

DEMOCRATIZING PUBLIC PARTICIPATION IN MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY

AKMAL SALIM RUHANA*)

ABSTRACT

People's participation in maintaining religious harmony among the multi religious societies in Indonesia has now become public policy issue. Public participation itself varies in the types and levels of contribution, from just being invited, being involved and up to self-initiative to work on a public issue. The question is, how far has the quality of public participation been carried out? By using public participation theory, this qualitative research with descriptive analysis shows that collaborative participation and empowerment are more in line with the efforts to democratize public life. This research encourages broader public participation in maintaining religious harmony in Indonesia.

KEY WORDS: *Public participation, democracy, religious harmony, collaboration, empowerment*

DEMOKRATISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

ABSTRAK

Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KATA KUNCI: Partisipasi publik, demokrasi, kerukunan umat beragama, kolaborasi, pemberdayaan

*) Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kemenag RI Jakarta, akmalsalimruhana@gmail.com

* Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Bagi bangsa Indonesia yang multikultural dan multireligius, pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi isu penting kebijakan publik.¹ Selain ada lembaga khusus dalam Pemerintah yang menangani isu-isu kerukunan umat beragama, yakni Pusat Kerukunan Umat Beragama pada Kementerian Agama, juga terdapat sejumlah regulasi terkait kerukunan. Misalnya, ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (UU PKS), juga ada Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.² Di dalam masyarakat juga ada banyak forum perdamaian dan dialog, seperti Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Komunikasi Pemuka Antaragama (FKPA), dan Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) serta LSM di bidang kerukunan dan kebebasan beragama.

Secara sosiologis-praktis, pemeliharaan kerukunan umat beragama juga merupakan kebutuhan masyarakat. Sering terjadinya disharmoni antarumat beragama atau konflik bernuansa keagamaan, menjadi *raison d'être* keberadaan terma dan berbagai institusi tersebut di atas. Di antara landasan sosiologis UU PKS, misalnya, adalah banyaknya perseteruan atau benturan antarkelompok dalam masyarakat. Demikian halnya, PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 lahir dilatarbelakangi dengan adanya banyak kasus terkait rumah ibadah pada tahun-tahun sebelumnya.³ Karenanya, sebagai subyek, masyarakat dengan sendirinya akan berperan memelihara kerukunan karena menjadi kebutuhan esensial dalam kehidupannya.

Dari kenyataan tersebut, partisipasi publik dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama tampak cukup besar. Publik tidak saja terlibat

sebagai pelaksana sebagian tugas negara dalam memelihara kerukunan nasional⁴, tetapi juga turut serta secara langsung dalam proses perumusan kebijakan kerukunan tersebut. PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, misalnya, adalah hasil perumusan para tokoh-tokoh agama dalam 11 kali putaran yang kemudian disepakati dan diangkat sebagai Peraturan Menteri.⁵ Demikian halnya, pada tahap perumusan UU PKS, pendapat publik didengar dan diakomodasi dalam rangkaian sidang pembahasannya di parlemen.

Permasalahannya kemudian, sejauhmana kualitas partisipasi publik tersebut dalam konteks demokratisasi partisipasi publik? Dengan kata lain, apakah keterlibatan publik dalam perumusan kebijakan publik tersebut didasari kehendak hakiki publik terkait kebutuhannya, atau semata pengesah (legitimasi) keterlibatan publik dalam perumusan suatu kebijakan publik? Pertanyaan substantial ini penting diajukan dengan memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

Pertama, kebijakan publik lahir sebagai respon terhadap persoalan yang benar-benar dialami atau dihadapi publik. Jika ada suatu persoalan dimunculkan atau menjadi agenda pihak tertentu, maka implementasinya akan problematik karena bertabrakan dengan kepentingan publik secara luas. Misalnya, pengesahan revisi UU KPK di gedung DPR oleh 'wakil rakyat' menimbulkan gejolak dan penolakan dari publik di jalanan.⁶

Kedua, adanya kecenderungan penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Indeks Demokrasi Indonesia 2019 menunjukkan penurunan dalam beberapa aspeknya (diagram 1).⁷ Beberapa peneliti di dalam dan luar negeri

⁴ Pasal 25 Ayat (1) butir c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, berbunyi: "*Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) meliputi: pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional.*"

⁵ Mohamad Atho Mudzhar, *op.cit.* hlm.135.

⁶ Kasus demonstrasi besar mahasiswa pada tanggal 21-22 September 2019 yang menelan korban jiwa menunjukkan adanya penolakan publik (mahasiswa dan masyarakat) terhadap substansi revisi UU KPK yang dipandang publik justru akan melemahkan posisi KPK. Pandangan ini berbeda dengan apa yang dipahami/dipilih 'wakil' mereka di dalam ruang DPR. Hemat penulis, yang terjadi adalah klaim 'adanya kehendak rakyat' yang ditunjukkan dengan kecenderungan sikap anggota DPR di balik adanya aspirasi-terselembung kepentingan partai atau pihak tertentu yang diuntungkan dengan pelemahan KPK tersebut.

⁷ Aspek kebebasan sipil dan hak-hak politik menurun beberapa poin, sementara indeks demokrasi naik tipis. Partisipasi publik dalam konteks judul penelitian ini merupakan bagian dari aspek

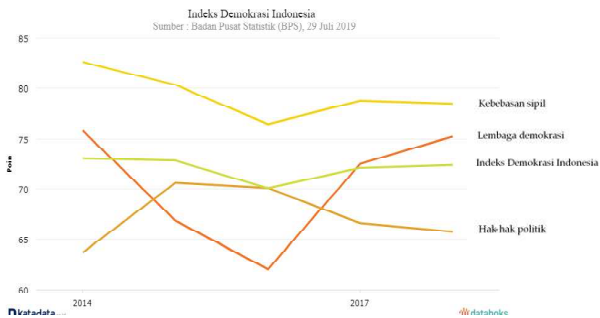
¹ Beragam definisi atas istilah "kebijakan publik (*public policy*)", namun yang dipandang padat-melingkupi dalam konteks ini adalah yang diindikasikan oleh Dewey, yakni, publik dan berbagai permasalahannya — yang menempatkan publik sebagai jantung/inti dari kebijakan publik. John Dewey, *The Public and Its Problems* (Chicago: Chicago Gateway Books, 1946).

² Selengkapnya, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.

³ Mohamad Atho Mudzhar, *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 109.

bahkan sudah menengarai gejala meredupnya demokrasi di Indonesia tersebut.⁸ Secara politik, misalnya, terjadi dominasi kekuatan partai-partai koalisi pro-pemerintah di parlemen dan eksekutif, yang sangat mengkhawatirkan bagi perjalanan demokrasi Indonesia (baca: partisipasi publik luas dalam perumusan kebijakan).

Diagram 1. Indeks Demokrasi Indonesia 2019



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Karena itu, tulisan ini akan menelisik keterlibatan atau partisipasi publik dalam perumusan atau implementasi kebijakan kerukunan umat beragama. Sebuah upaya memperkuat kualitas partisipasi publik tersebut (di dalam tulisan ini diistilahkan 'demokratisasi partisipasi publik'), sebagai indikator pemerkuatan demokrasi di Indonesia.

B. KAJIAN TEORITIK

1. Jenis dan Tingkatan Partisipasi Publik

Kajian terkait partisipasi publik terus berkembang seiring perkembangan wacana demokrasi dalam pemerintahan. Kata 'demokrasi' sendiri berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yakni *demos* (rakyat) dan *kratos* (pemerintahan), yang muncul pertama kali dalam mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di Athena.⁹ Jika secara singkat demokrasi diartikan

kebebasan sipil yang menurun tersebut. Indeks Demokrasi Indonesia, Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2019.

⁸ Misalnya, Saiful Mujani Research Center (SMRC) merilis hasil survei tentang semakin meredupnya demokrasi di Indonesia, lihat <http://www.saifulmujani.com/blog/2019/09/09/hasil-diskusi-meredupnya-demokrasi-di-indonesia>. Baca juga, Tom Power, 'Jokowi's authoritarian turn', *New Mandala*, 9 October 2018, baca: <https://www.newmandala.org/jokowis-authoritarian-turn/>.

⁹ John Dunn, *Democracy: the unfinished journey 508 BC – 1993 AD*, (United Kingdom: Oxford University Press, 1994); Kurt A. Raaflaub, Josiah Ober, & Robert W. Wallace, *Origin of Democracy in Ancient Greece*, (United States: University of California Press, 2007).

pemerintahan oleh rakyat, maka partisipasi rakyat atau publik dalam pemerintahan (baca: pengambilan keputusan), juga menjadi suatu keharusan logis. Semakin luas partisipasi publik pada pengambilan keputusan, maka berarti semakin tinggi tingkat demokrasi di suatu negara.

Dalam sejarah panjang diskursus demokrasi dan kebijakan publik, partisipasi masyarakat sipil dalam kebijakan publik terus berkembang dan diekspresikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Ada yang dalam bentuk gerakan protes seperti yang banyak terjadi pada 1960-an - 1970-an, audiensi publik pada 1980-an, pola keterlibatan publik pada 1990-an, atau serangkaian kerja sama kolaboratif dalam beberapa dekade terakhir.¹⁰ Melihat tren global ini, partisipasi publik dari waktu ke waktu semakin kooperatif, pemerintah pun semakin demokratis dalam merumuskan kebijakan publik. Fenomena ini memberikan sinyal positif pada proses demokratisasi atau upaya pemerkuatan demokrasi.¹¹

Dari sisi publik yang terlibat dan karakteristiknya, publik dapat dikelompokkan dalam beberapa tipologi dan tingkatan, yakni ada publik yang menuntut (*insisted publics*), berjejaring (*networked publics*), diundang (*invited publics*), kolaboratif (*collaborative publics*), dan publik yang melakukan (*doing publics*).¹² Secara singkat, publik yang menuntut (*insisted publics*), adalah sekelompok warga negara yang menyampaikan aspirasi atau mendorong ide dan agenda untuk suatu perubahan kebijakan publik. Sebagai contoh, kelompok gerakan konservasi lingkungan yang berjuang memperbaiki kondisi lingkungan dengan promosi pembatasan penggunaan plastik. Mereka melakukan serangkaian aksi di jalanan dan mendemo Kementerian Lingkungan Hidup agar menerbitkan aturan pelarangan penggunaan

¹⁰ John Gaventa & Rosemary McGee, 'Introduction: making change happen', *Citizen Action and National Policy Reform* (London: Zed Books, 2010), 8-11; Carolyn Hendriks, 'Participating in Public Policy: Citizen Engagement and Public Talk', paparan bahan ajar, 2018.

¹¹ Carole Pateman, 'Participatory Democracy Revisited', *APSA Presidential Address*, 1970, 103-104; Benjamin Barber, *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*, (California: University of California Press, 1984), 208; Beth Simone Noveck, *Wiki Government: How Technology can Make Government Better, Democracy Stronger, and Citizens More Powerful* (Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2009), 156.

¹² Carolyn Hendriks, 'Participating in Public policy', paparan bahan ajar, 2018, tidak diterbitkan.

plastik di supermarket. Adapun publik yang berjejaring (*networked publics*), mereka berupaya berpartisipasi atau memengaruhi kebijakan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Misalnya, gerakan anti pelecehan seksual terhadap perempuan yang melakukan promosi dan advokasi bagi para korban melalui media sosial *Twitter* dengan tagar *#metoo*.¹³ Gerakan di dunia maya ini dapat mendorong pengambil kebijakan untuk mengeluarkan regulasi atau kebijakan perlindungan perempuan, seperti penyediaan gerbong khusus perempuan pada moda transportasi kereta.

Publik yang diundang (*invited publics*) adalah publik yang diundang oleh pemerintah (atau instansi pemerintahan) ke dalam proses penyusunan kebijakan publik untuk diminta pandangan, saran, atau masukan. Praktiknya dapat berupa konsultasi publik atau keterlibatan publik. Di mancanegara, misalnya, ada program *Participatory Budgeting* yang menggunakan model *invited publics* ini. Pertama kali dilakukan di Brasil pada 1989, program penyusunan porsi alokasi anggaran pemerintah dengan melibatkan partisipasi publik ini kini telah dilakukan di lebih dari 1500 lokasi, seperti pemerintah kota, sekolah dan lainnya.¹⁴

Sementara itu, publik yang berkolaborasi (*collaborative publics*), adalah kemitraan antara aktor negara (seperti lembaga pemerintah) dan aktor non-negara terkait (seperti LSM, tokoh agama, atau pengguna layanan) dalam suatu kebijakan publik. Secara umum berbentuk dua jenis, yakni kolaborasi-tatakelola (*collaborative governance*) dan produksi-bersama (*co-production*). Kolaborasi-tatakelola adalah ketika pemerintah secara langsung melibatkan aktor non-negara dalam proses pengambilan keputusan kolektif yang formal, berorientasi konsensus, yang bertujuan untuk membuat atau menerapkan kebijakan publik atau mengelola program atau aset publik.¹⁵ Misalnya, dalam penyusunan kebijakan kerukunan antarumat beragama (seperti PBM 2006), Kementerian Agama

bekerjasama dengan perwakilan majelis agama merumuskan dan menerapkannya di masyarakat. Adapun *co-production*, hampir serupa ini, hanya saja sumber dayanya berasal dari kedua pihak dan kerjasamanya kerap berada pada tahap implementasi.

Partisipasi publik paling tinggi terjadi pada model publik yang melakukan (*doing publics*). Pada model ini, masyarakat melakukan sendiri urusan publik yang tidak dilakukan oleh pemerintah. Umumnya, ketika publik merasa pemerintah tidak hadir atas satu persoalan publik dan mereka berinisiatif merumuskan dan mengimplementasikan suatu aksi yang menjawab persoalan publik tersebut. Misalnya, gerakan memungut sampah di sepanjang Pantai Mumbai yang dilakukan oleh sekelompok orang, karena melihat tidak adanya upaya pembersihan dari pemerintah setempat.¹⁶

Demikianlah, kelima jenis partisipasi publik dalam kebijakan publik tersebut berbeda jenis dan level partisipasinya. Mulai dari sekadar 'berteriak', mengkritik kebijakan di jalanan, hingga 'menyusun sendiri kebijakan' dan melaksanakan aksinya. Secara kategorik, dari sisi pemerintah, berikut tabel level partisipasi dan pemberdayaan publik yang bertingkat dari sekadar memberi tahu, meminta masukan, melibatkan, bekerjasama, hingga memberdayakan (lihat tabel 1).

Tabel 1. Level partisipasi dan pemberdayaan publik¹⁷

	Membertahui (<i>inform</i>)	Mengkonsultasikan (<i>consult</i>)	Melibatkan (<i>involve</i>)	Berkolaborasi (<i>collaborate</i>)	Memberdayakan (<i>empower</i>)
Tujuan partisipasi publik	Menyediakan informasi yang seimbang dan objektif untuk membantu publik memahami masalah, beberapa alternatif, atau solusi.	Menperoleh umpan balik dari masyarakat tentang sesuatu, beberapa alternatif, dan/atau keputusan.	Bekerja secara langsung dengan publik dalam proses untuk memastikan bahwa keputusannya dan aspirasi publik dipertimbangkan secara konsisten.	Bermitra dengan publik di setiap aspek keputusan, termasuk pengembangan alternatif dan identifikasi solusi yang diinginkan.	Menempatkan pengambilan keputusan akhir di tangan masyarakat.
Janji kepada publik	Kami akan terus memberitahu Anda.	Kami akan terus memberitahu Anda informasi, mendengarkan dan mempertimbangkan kebutuhan, aspirasi, dan sumber daya yang baik tentang bagaimana masalah publik mempengaruhi keputusan.	Kami akan bekerja dengan Anda untuk memastikan keharusan dan aspirasi Anda tercermin langsung dalam alternatif keputusan publik, bagaimana input publik mempengaruhi keputusan.	Kami akan meminta langsung saran dan inovasi dalam merumuskan solusi dan menegosiasikan saran dan rekomendasi Anda ke dalam keputusan yang akan kita ambil.	Kami akan memajukan apa yang Anda putuskan.
Contoh untuk dipertimbangkan	Lembar fakta Webinar Open House	Komentar publik FGD diskusi Survei Rapat umum	Workshop Polling terencana	Pembuatan konsensus Penyusunan kebijakan partisipatoris	Perwakilan warga Suara (<i>ballot</i>) Keputusan yang didisgaisikan

2. Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Istilah 'kerukunan umat beragama' pertama kali digunakan secara formal pada tahun 1967 saat

¹³ <https://www.voaindonesia.com/a/me-too-berbagi-kisah-dalam-kampanye-anti-peleceh-an-seksual/4073596.html>

¹⁴ <https://www.shareable.net/15-participatory-budgeting-projects-that-give-power-to-the-people/>

¹⁵ Chris Ansell & Alison Gash 'Collaborative governance in theory and practice', *Journal of public administration research and theory*, vol. 18 no. 4, (2008), 543-571.

¹⁶ <https://www.theguardian.com/world/2018/mar/30/mumbai-beach-goes-from-dump-to-turtle-hatchery-in-two-years>

¹⁷ International Association for Public Participation (2005), Copyright IAP2, dalam Brian W Head, 'Community Engagement: Participation on Whose Terms?', *Australian Journal of Political Science*, 42:3, (2007), 445.

penyelenggaraan Musyawarah Antarumat Beragama yang pertama di Jakarta.¹⁸ Konsep ini terus berkembang menjadi 'kata kunci' yang terus digunakan oleh pemerintah (baca: kebijakan) dalam upaya penciptaan dan pembinaan kerukunan intern dan antarumat beragama di Indonesia. Pada tahun 2006, konsep ini ditegaskan kembali dan didefinisikan serta diimplementasikan sebagai bentuk kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama.¹⁹ Dalam Pasal 1 PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006,²⁰ disebutkan:

Kerukunan umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah 'kerukunan umat beragama' telah menjadi istilah generik yang dipakai baik oleh pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, meski tak lepas dari kritik juga.²¹ Upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama, merujuk pada PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, merupakan upaya bersama umat beragama dan Pemerintah di bidang pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan umat beragama. Umat beragama

dalam konteks ini adalah anasir non-pemerintah.

Pada praktiknya, selain masyarakat secara luas, partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama mewujudkan dalam Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Forum yang beranggotakan para tokoh perwakilan majelis agama ini kini telah berdiri di 34 provinsi dan 486 kabupaten/kota.²² Forum ini bertugas: (a) melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; (b) menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; (c) menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan bupati/walikota; (d) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; dan khusus FKUB kabupaten/kota, (e) memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah.²³

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengambil model penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian model ini menggunakan sumber data penelitian dari referensi kepustakaan berupa buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan tema penelitian. Dalam konteks topik penelitian pendalaman-wacana seperti tulisan ini, model penelitian kepustakaan dipandang tepat karena dapat menelusuri berbagai pemikiran dan pengalaman dari berbagai periode, tempat, dan disiplin ilmu. Kajian tentang 'demokratisasi', misalnya, dapat merujuk pada kajian politik dan pemerintahan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa penelusuran dan dokumentasi berbagai data dan informasi yang terkait atau dibutuhkan oleh topik ini. Adapun analisis data dilakukan dengan model deskriptif analitik. Data yang telah dikumpulkan, kemudian disistematisasi dalam suatu konstruk pemikiran sesuai dengan *state of the art* kajian serupa ini, lalu dianalisis dengan teori-teori terkait dan digambarkan dalam sebuah tulisan. Fakta, data dan informasi terkait upaya

¹⁸ Muhaimin AG, *Damai di Dunia, Damai untuk Semua, Perspektif Berbagai Agama*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004), 16-18.

¹⁹ Misalnya, ditegaskan di dalam RPJMN 2004-2009 bahwa "...peningkatan kerukunan intern dan antarumat beragama merupakan salah satu dari arah kebijakan pembangunan kehidupan beragama, dengan fokus pada upaya: pertama, memberdayakan masyarakat, kelompok-kelompok agama, serta pemuka agama untuk menyelesaikan sendiri masalah kerukunan umat beragama (KUB); dan kedua, memberikan rambu-rambu dalam pengelolaan kerukunan umat beragama." *Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Edisi Kesebelas, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012), 9.

²⁰ Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2006.

²¹ Misalnya, kebijakan kerukunan lebih dipandang sebagai 'politik perukunan', karena dipandang masih lebih berpihak pada mayoritas dibanding adil terhadap minoritas. Baca Ismail Fahmi Arrauf Nasution, "Minoritas dan Politik Perukunan: FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang," *Substantia*, vol. 19 nomor 1, (2017), 63-64.

²² *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2016*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jakarta, 2017.

²³ PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Pasal 9 Ayat (2).

dan kebijakan pemeliharaan kerukunan dibaca dalam kerangka jenis dan tingkatan partisipasi publik dalam perumusan dan implementasi kebijakan. Penyimpulan dilakukan setelah memahami keseluruhan konstruk data dan analisa tersebut di atas.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Ragam Partisipasi Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama

Partisipasi publik dalam perumusan dan implementasi kebijakan kerukunan umat beragama di Indonesia terus berkembang. Menggunakan tipologi dan tingkatan partisipasi publik sebagaimana dikembangkan Hendriks (2018)²⁴, partisipasi umat beragama telah beranjak dari *invited publics*, menuju *collaborative publics*, bahkan *doing publics*. Demikian halnya, menggunakan ukuran level partisipasi dan pemberdayaan publik (oleh pemerintah) yang dikembangkan IAP²⁵, kondisinya telah beranjak, dari yang semula *inform* dan *consult*, telah berkembang menjadi *collaborate* bahkan *empower*. Hal ini dapat dilihat dari beberapa peristiwa interaksi pemerintah dan umat beragama (baca: publik) dalam perumusan konsep dan praktik kerukunan umat beragama dan dialog antarumat beragama di Indonesia, sejak 1967 hingga kini.²⁶

Tabel 2. Interaksi pemerintah-publik dalam kebijakan publik kerukunan umat beragama

Tahun	Interaksi pemerintah-publik dalam kebijakan publik KUB	Partisipasi publik
1967	Pemerintah mengundang dan berdiskusi dengan kelompok umat beragama dalam Musyawarah Antar Umat Beragama	<i>inform. consult. invited publics</i>
1980	Berhasil membentuk Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB), yang bersama-sama menyusun pedoman dasar hubungan umat beragama	<i>consult. collaborate. collaborative publics</i>
1990-an	Pemerintah lebih mengarahkan umat agar mendukung program pembangunan. Membentuk LPKUB sebagai lembaga pengkajian kerukunan dan dialog pimpinan umat.	<i>inform. invited publics</i>
1992, 1995	Sejumlah lembaga non-pemerintah menginisiasi forum-forum dan gerakan dialog lintas iman, sebagai solusi mandiri atas kegagalan Pemerintah menyediakan kebutuhan ruang publik tersebut	<i>empower. doing publics</i>
1999	Pascareformasi 1998, partisipasi publik secara umum meningkat seiring demokratisasi politik. Aspirasi keagamaan juga bermunculan, seperti permintaan pengakuan dan pelayanan keagamaan.	<i>inform. insisted publics</i>
2005-2006	Pemerintah bersama/memfasilitasi majelis agama menyusun regulasi PBM, dan mengimplementasikannya. FKUB juga dibentuk dan diberdayakan untuk kerukunan.	<i>empower. collaborative publics</i>
-2019	Pemerintah memberdayakan umat beragama (FKUB), dan melibatkan masyarakat sipil dalam bersama-sama menyusun regulasi keagamaan (RUU PUB)	<i>involve. empower. collaborate. collaborative publics</i>

²⁴ Ada lima jenis partisipasi publik, yakni: publik yang menekan (*insisted publics*), publik yang berjejaring (*networked publics*), publik yang diundang (*invited publics*), publik yang berkolaborasi (*collaborative publics*), dan publik yang melakukan (*doing publics*). Hendriks, *loc.cit.*

²⁵ Ada lima tingkatan partisipasi dan pemberdayaan publik, yakni: memberitahu (*inform*), mengkonsultasikan (*consult*), melibatkan (*involve*), berkolaborasi (*collaborate*), dan memberdayakan (*empower*). Brian W. Head, *loc.cit.*

²⁶ Banawiratma, dkk, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2010), 65-86.

Merespon ketegangan antarumat beragama pascapembubaran PKI dan beberapa kasus rumah ibadat serta penyiaran agama, pada 30 November 1967 Pemerintah 'mengundang' pimpinan kelompok-kelompok umat beragama untuk membicarakannya dan mencari jalan keluar. Digelarlah *Musyawaharah Antarumat Beragama* yang dipimpin oleh Menteri Agama KH. M. Dachlan, dan dihadiri 20 perwakilan Islam, Kristen dan Katolik. Musyawarah ini menjadi tonggak dialog-dialog antarumat beragama berikutnya. Dalam musyawarah tersebut, Pemerintah menawarkan untuk disusun kesepakatan tentang penyiaran agama, namun gagal disepakati terutama menyangkut penyiaran agama terhadap pemeluk agama lain. Dalam perkembangannya, di masa Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara, terbit SK Menteri Agama Nomor 70 dan 77 tahun 1978 tentang pedoman penyiaran agama dan dikuatkan SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1/1979 tentang penyiaran agama dan bantuan luar negeri.²⁷ Hingga titik ini, partisipasi publik dalam kebijakan lebih banyak terkategori pada level *inform* dan *consult*, dengan keterlibatan *invited publics*.

Kemudian, pada medio 1980, Menteri Alamsyah berhasil membujuk dan mengundang para pimpinan agama untuk membentuk Wadah Musyawarah Antar-Umat Beragama (WMAUB), yang beranggotakan pimpinan organisasi keagamaan (MUI, MAWI, DGI, dan PHDI Walubi). Forum ini terbentuk dan mendiskusikan bersama pedoman dasar hubungan antarumat beragama, dan berhasil menyetujuinya. Keputusan-keputusan wadah lintas agama ini selanjutnya menjadi acuan bagi kebijakan Pemerintah.²⁸ Titik ini menunjukkan adanya perkembangan partisipasi publik, tidak saja pada *inform*, *consult* dan *invited publics* melainkan sudah beranjak pada *collaborate* dan *collaborative publics*. Pemerintah dan tokoh agama (baca: publik) bersama-sama menyusun bahan kebijakan berdasarkan problem yang mereka hadapi, dan lalu menjadikan hasilnya sebagai solusi yang dicenderung.

²⁷ Sudjangi, *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996), 43-52, dalam JB Banawiratma, dkk, (2010), 39-43.

²⁸ Banawiratma, dkk, *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: Mizan, 2010), 44-45.

Pada masa keemasan hingga periode akhir Orde Baru, isu kerukunan dan dialog antarumat beragama tidak terlalu mendapat perhatian. Meski tokoh-tokoh WMAUB diundang oleh Menteri Agama Munawir Sadzali, namun lebih diarahkan untuk mendukung program-program pembangunan pemerintah. Kerukunan umat beragama lebih dipromosikan ke luar negeri. Pada tahun 1993, di era Menteri Agama Tarmizi Taher, Pemerintah membentuk Lembaga Pengkajian untuk Kerukunan Umat Beragama (LPKUB) untuk mengaktifkan kembali dialog lintas agama. Hanya saja, aktivitasnya lebih kepada pengkajian, penelitian, dan dialog yang tidak langsung ke masyarakat.²⁹ Pada fase ini, partisipasi publik umat beragama dalam kebijakan keagamaan kembali pada bentuk *inform* dengan keterlibatan *invited publics*. Namun demikian, pada tahun 1992 lahir forum dialog lintas iman DIAN Interfidei (Dialog Antar Iman - *Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia*) di Yogyakarta. Lalu, pada 1995 lahir MADIA (Masyarakat Dialog Antaragama). Lalu ada juga ICRP (*Indonesian Conference on Religion and Peace*) pada 2001 di Jakarta, dan sejumlah lembaga serupa di berbagai daerah. Forum-forum non-pemerintah (LSM) tersebut bermunculan dari adanya kekecewaan bahwa Pemerintah gagal memahami kebutuhan dialog antarumat beragama.³⁰ Peningkatan 'agresivitas' publik dalam hal partisipasi ini juga dipengaruhi iklim demokratisasi politik pascareformasi 1998. Berbagai inisiatif swasta yang menjawab kebutuhan publik ini merupakan lompatan dalam level partisipasi publik pada kebijakan publik, yakni terkategori *doing publics* (publik yang melakukan).

Pada tahun 2005-2006, menyusul terjadinya sejumlah kasus rumah ibadat di berbagai daerah Indonesia, pemerintah mengundang para pemuka agama mewakili majelis agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Dalam hal ini, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama dan Ditjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri memfasilitasi serial dialog untuk menjawab problem kebijakan tersebut. Rancangan revisi SKB No. 1 Tahun 1969 terkait pendirian rumah ibadat, setelah 11 kali putaran diskusi dalam forum ini, hampir 90-95% berubah sesuai

dengan kehendak para perwakilan agama tersebut. Hasil diskusi tersebut selanjutnya seutuhnya diangkat menjadi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006) yang menjawab persoalan yang dihadapi umat beragama.³¹ Pada titik ini, partisipasi publik dalam kebijakan berbentuk *empower* dengan partisipasi *collaborative publics*. Pemerintah menempatkan pengambilan keputusan akhir (substansi apa yang perlu diatur) di tangan para tokoh agama, dan menerapkan apa yang diputuskan tersebut dalam kebijakan publik, yakni PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Selain itu, PBM yang memuat soal pembentukan FKUB di seluruh provinsi dan kabupaten/kota, menunjukkan bahwa Pemerintah memberdayakan (*empower*) tokoh-tokoh agama dalam pelaksanaan kebijakan kerukunan tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama menjadi sangat diperhatikan. Secara garis besar ada dua kebijakan, yakni pemberdayaan umat beragama dan penyediaan regulasi keagamaan. Berbekal PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tersebut, pemerintah bersama tokoh agama dan masyarakat melakukan berbagai upaya bersama untuk memelihara kerukunan umat beragama. Selain sosialisasi peraturan dan penanganan kasus-kasus keagamaan yang terjadi, juga dilakukan upaya memperkuat regulasi keagamaan, yakni penyusunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Umat Beragama (RUU PUB). Meski pada mulanya draf RUU disusun oleh Balitbang Kemenag dan Pusat Kerukunan Umat Beragama (PKUB), namun dalam diskusi selanjutnya melibatkan anasir masyarakat sipil untuk bersama-sama melakukan diskusi pembahasan. Meskipun RUU ini hingga saat ini belum diputuskan, namun partisipasi publik dalam penyusunan naskah telah menunjukkan adanya level *collaborate* dan partisipasi *collaborative publics*. Bahkan, dalam konteks keberadaan FKUB, Kementerian Agama mendorong masyarakat menyelesaikan sendiri permasalahan yang dihadapi dengan memfasilitasi dan memberdayakan FKUB yang

²⁹ *Ibid*, hlm. 45-47.

³⁰ *Ibid*, hlm. 50-57.

³¹ Rubrik Wawancara, Prof. Dr. H. M. Atho Mudzhar: "RUU PUB itu Penting Sekali!", *Majalah Litbangdiklat*, Edisi Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 23.

bergerak secara langsung di masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya model *empower* dan partisipasi *collaborative publics*.

2. Proyeksi Kecenderungan ke Depan

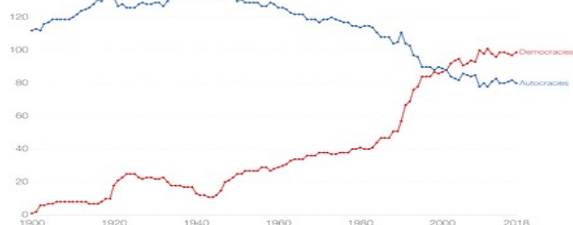
Dari ragam partisipasi publik dalam kebijakan publik kerukunan umat beragama di atas, dapat dirumuskan proyeksi tren perkembangan ke depan. Setidaknya ada dua prediksi, sebagai berikut:

a. Tren *empower* dan *collaborative publics*

Mencermati sifat dan level partisipasi publik dalam berbagai (sebagian aktivitas) interaksi pemerintah dan publik umat beragama (tabel 2), model kolaborasi (*collaborate*) tampak semakin terus dicenderung. Dalam konteks ini, Pemerintah cenderung bermitra dengan umat beragama dalam aspek-aspek keputusan, sejak dari pengembangan alternatif dan identifikasi solusi, hingga pilihan yang lebih kompromis. Dapat dipahami, model ini lebih mendekatkan aspirasi publik dengan efektivitas pelaksanaan kebijakan. Model ini juga lebih menentramkan bagi Pemerintah (bandingkan dengan *insisted publics* yang mendemo, memprotes, dsb), dan menguntungkan umat beragama, karena aspirasi publik langsung dijadikan bahan kebijakan (bandingkan dengan *inform* atau *consult*, dimana usulan aspirasi bisa diterima atau diabaikan pemerintah tanpa diskusi). Dalam perumusan PBM 2006, misalnya, hampir 95% draf pemerintah telah diubah dan disesuaikan dengan keinginan pimpinan majelis dan umat beragama.

Kondisi ini sesungguhnya sejalan dengan kecenderungan global mengenai semakin kooperatifnya partisipasi publik dan semakin demokratisnya pemerintahan dalam merumuskan kebijakan publik. Hal ini juga sejalan dengan semakin diadopsinya sistem pemerintahan demokrasi oleh negara-negara dunia (diagram 2).

Diagram 2. Jumlah negara yang menganut otkrasi dan demokrasi

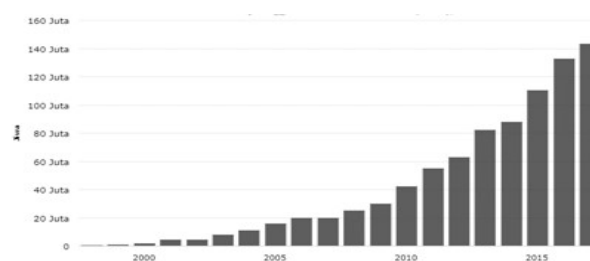


Sumber: *Varieties of Democracy Project* (2019, versi 9, ourworldindata.org/democracy)

b. Model *networked publics* akan meningkat

Mempertimbangkan perkembangan zaman di mana teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat, publik yang berjejaring (*networked publics*) juga akan meningkat. Sebagai-mana diketahui, jumlah pengguna internet dan media sosial di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun (diagram 3).

Diagram 3. Pengguna internet di Indonesia (1998-2017)³²



Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2018

Mayoritas pengguna tersebut tergolong generasi milenial (15-24 tahun) yang lebih banyak mengekspresikan aspirasinya melalui media sosial. Karenanya, partisipasi publik dalam isu pemeliharaan kerukunan umat beragama dapat disalurkan melalui media sosial, seperti dengan tagar atau meme yang mendukung upaya pemeliharaan kerukunan. Sebagaimana dalam pesta demokrasi pemilihan umum beberapa waktu lalu, berbagai tagar untuk Pemilu Damai banyak ditemukan, seperti: #pemiludamai dan #PilkadaDamai2018. Penggalangan opini untuk mendo-rong kebijakan kerukunan juga dapat dilakukan secara maya, sebagaimana dilakukan oleh *petitionline.net* atau *change.org*. Dalam tingkat tertentu, gerakan maya ini efektif mendorong perubahan kebijakan, seperti dalam kasus peninjauan kembali UU MD3 yang disahkan diam-diam oleh anggota DPR, berkat dukungan lebih dari 240.000 orang pendukung petisi tersebut.³³

³² Survei Penetrasi dan Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia 2018, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2019.

³³ "Daftar Kasus yang Dimenangkan Petisi Change.org Selama Tahun 2018", <https://tirto.id/dcnm>

E. PENUTUP

Kerukunan umat beragama di Indonesia dan upaya pemeliharannya sudah menjadi bagian dari isu kebijakan publik. Kebijakan tersebut mewujudkan dalam bentuk regulasi maupun praktik-praktik dialog antaragama ataupun tindakan yang mengarah pada pemeliharaan kondisi rukun. Partisipasi publik dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama telah banyak, dalam jenis dan tingkatannya yang beragam. Mulai dari sekadar keterlibatan pasif hingga inisiatif mandiri mengerjakan suatu isu publik.

Menyandarkan pada kategorisasi level dan subyek partisipasi publik, penelitian ini menemukan bahwa partisipasi kolaboratif (*collaborate*) dan pemberdayaan (*empower*) dengan aktor *collaborate publics* lebih dicenderung belakangan ini. Selain nyaman bagi pemerintah dan akomodatif bagi aspirasi publik, hal ini juga sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik, sehingga demokrasi semakin kuat dan berkualitas.

Penelitian ini merekomendasikan adanya partisipasi publik yang lebih luas dalam isu pemeliharaan kerukunan umat beragama. Dari sisi Pemerintah, pengembangan jenis partisipasi yang kolaboratif dan memberdayakan sangat baik dipilih dan dipraktikkan. Hal ini akan

meningkatkan kualitas partisipasi publik dalam perumusan kebijakan. Sementara itu, dari sisi masyarakat umat beragama sendiri, penting mengembangkan variasi partisipasi yang kreatif dan kekinian, sebagai *networked publics*, yang melakukan partisipasi terhadap kebijakan kerukunan melalui media sosial atau media kreatif lainnya.

Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Carolyn Hendriks, dosen pengampu Mata Kuliah "*Participating in Public Policy*" pada Crawford School of Public Policy, the Australian National University (ANU), atas pencerahan dan inspirasinya sehingga penulis membuat tulisan sederhana ini. Semoga tulisan ini bermanfaat bagi dunia akademik serta upaya pemerkuatan demokrasi dan pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ansell, Chris, dan Alison Gash. "Collaborative governance in theory and practice." *Journal of public administration research and theory*, 18 no. 4, (2008), 543-571.
- Banawiratma, dkk. *Dialog Antarumat Beragama: Gagasan dan Praktik di Indonesia*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Barber, Benjamin. *Strong Democracy: Participatory Politics for a New Age*. United States: University of California Press, 1984.
- Dewey, John. *The Public and Its Problems*. Chicago: Chicago Gateway Books, 1946.
- Dunn, John. *Democracy: the unfinished journey 508 BC – 1993 AD*. United Kingdom: Oxford University Press, 1994;
- Gaventa, John, & Rosemary McGee. "Introduction: making change happen." *Citizen Action and National Policy Reform*. London: Zed Books, 2010.
- Ghafur, Muhaimin Abdul. *Damai di Dunia, Damai untuk Semua, Perspektif berbagai Agama*. Jakarta: Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, 2004.
- Head, Brian W. "Community Engagement: Participation on Whose Terms?" *Australian Journal of Political Science*, 42:3, (2007), 445.
- Hendriks, Carolyn. "Participating in Public Policy: Citizen Engagement and Public Talk." Paparan bahan ajar, 2018.
- Kompilasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*. Edisi Kesebelas. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2012
- Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2016*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2017.
- Mudzhar, Mohamad Atho. *Merayakan Kebhinnekaan Membangun Kerukunan*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013.
- Nasution, Ismail Fahmi Arrauf. "Minoritas dan Politik Perukunan: FKUB, Ideologi Toleransi dan Relasi Muslim-Kristen Aceh Tamiang." *Substantia*, 19 Nomor 1, (2017), 63-64.
- Noveck, Beth Simone. *Wiki government: how technology can make government better, democracy stronger, and citizens more powerful*. Washington, D.C: Brookings Institution Press, 2009.
- Pateman, Carole. "Participatory Democracy Revisited." *APSA Presidential Address*, 1970.
- Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, 2006.
- Power, Tom. "Jokowi's authoritarian turn." *New Mandala*, 9 October 2018, <https://www.newmandala.org/jokowis-authoritarian-turn/>.
- Raaflaub, Kurt A., Josiah Ober, Robert W. Wallace. *Origin of Democracy in Ancient Greece*. United States: University of California Press, 2007.
- Sudjangi. *Pembinaan Kerukunan Hidup Umat Beragama: 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI, 1995/1996.
- <http://www.saifulmujani.com/blog/2019/09/09/hasil-diskusi-meredup-nya-demokrasi-di-indonesia>.
- <https://www.voaindonesia.com/a/me-too-berbagi-kisah-dalam-kampanye-anti-peleceh-anseksual/4073596.html>
- <https://www.shareable.net/15-participatory-budgeting-projects-that-give-power-to-the-people/>
- <https://tirto.id/dcnm>

HISTORY OF ADVOCACY OF RELIGIOUS PLURALISM: CASE STUDY OF ANCESTRAL RELIGION ADVOCACY IN INDONESIA

HUSNI MUBAROK*)

ABSTRACT

In November 2017, the Constitutional Court (MK) granted a judicial review of ancestral religious beliefs on article 61 paragraph 1 and article 64 paragraph 1 of the Civil Administration Law 2013. The decision is an essential milestone for the practice of advocacy for religious pluralism in Indonesia. How to understand the advocacy of religious pluralism, in this context, for the followers of the ancestral religions, in Indonesia from a historical perspective? This research argues that the supporters of the ancestral religions have been accustomed to advocating themselves to fight for the fate of their communities since the Indonesian independence. The roles of NGO activists and academics play as a supporting system for the decisions of ancestral religious communities in the face of changes in the political structure and politics of religion since the independence until the reform era.

KEY WORDS: *Advocacy, ancestral religion, social inclusion, policy, public service, social acceptance*

SEJARAH ADVOKASI PLURALISME AGAMA: STUDI KASUS ADVOKASI AGAMA LELUHUR DI INDONESIA

ABSTRAK

November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013. Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya? Menggunakan metode penelitian kualitatif, tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim. Peran aktivis LSM dan akademisi lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat agama leluhur dalam menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama sejak kemerdekaan hingga era reformasi.

KATA KUNCI: *Advokasi, agama leluhur, inklusi sosial, kebijakan, pelayanan publik, penerimaan sosial*

*) Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Email: husni@paramadina-pusad.or.id

**) Naskah diterima Agustus 2019, direvisi September 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

November 2017, dekade kedua reformasi di Indonesia, adalah bulan bersejarah bagi penghayat agama leluhur. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013, revisi atas UU tahun 2006. Para penghayat agama leluhur menggugat pasal tersebut karena kedua pasal tersebut menjadi rujukan bagi diskriminasi yang mereka alami selama ini, yakni kehilangan akses layanan publik karena persoalan pada kolom agama Kartu Tanda Penduduk (KTP). MK menyatakan bahwa agama pada kedua pasal tersebut bertentangan dengan UUD dan tidak berkekuatan hukum sepanjang tidak termasuk kepercayaan. Atas dasar keputusan tersebut, kedua pasal tersebut gugur. Putusan MK tersebut berimplikasi bahwa pemerintah Indonesia kini wajib menambahkan pilihan pada kolom agama pada KTP, yakni "aliran kepercayaan" bagi penghayat kepercayaan.

Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Sejak reformasi, gugatan para penghayat kepercayaan ini merupakan uji materi pertama terkait pluralisme agama yang dikabulkan MK seluruhnya. Sebelumnya, beberapa individu dan organisasi masyarakat sipil menggugat UU Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang penodaan agama namun MK memutuskan menolak gugatan tersebut dan merekomendasikan agar UU yang digugat direvisi melalui parlemen tahun 2010. Dua tahun berselang, beberapa orang dan organisasi masyarakat sipil kembali mengajukan permohonan uji materi ke MK pada 2012. Mereka secara spesifik meminta bagaimana tafsir MK terhadap UU tersebut sebagaimana tercantum pada putusan MK JR 2010 yang merekomendasikan untuk merevisi konsep penodaan agama di parlemen. MK kembali menolak permohonan tersebut. MK menyatakan bahwa revisi tidak termasuk wewenang MK.¹ Selain kali pertama, putusan MK atas UU Adminduk juga mendasari pelayanan setara

¹ Lihat Zainal A. Bagir. "Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?" *Australian Journal of Asian Law*, 13 (2), (2013); Jeremy Menchik. "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia." *Comparative Studies in Society and History*, 56 (3), (2014): 591-621.

kepada para penghayat kepercayaan, yang selama ini termarginalkan.

Pada level kebijakan berbagai pihak telah melakukan beragam cara untuk mengubah kebijakan agar lebih ramah terhadap kelompok rentan. Usaha tersebut, sayangnya, seringkali tidak memenuhi harapan dan menghasilkan perubahan seperti direncanakan. Pada UU tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional, misalnya, mengandung pasal yang berpotensi mengutamakan komunitas agama tertentu.² UU pornografi,³ uji materi terhadap UU penodaan agama,⁴ Peraturan Bersama Menteri tentang pendirian rumah ibadah,⁵ Peraturan Daerah (Perda) bernuansa agama,⁶ adalah contoh-contoh di mana regulasi tidak banyak berubah, khususnya dimensi diskriminasi terhadap kelompok paling tak beruntung.

Situasi di level relasi sosial juga menghadapi kebuntuan serupa. Penganut Syiah di desa Nangkernang, Sampang, misalnya, yang mengungsi di dalam negeri atau biasa disebut *internally displace person*, setelah diusir 2012 silam, belum bisa pulang ke kampung halaman.⁷ Serupa

² M. Sirozi. "Secular-Religious Debates on the Indonesian National Education System: Colonial Legacy and a Search for National Identity in Education." *Intercultural Education*, 15 (2), (2004): 123-137.

³ Melissa Crouch. "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review*, 34 (4), (2010): 403-419.

⁴ Lihat S. Butt & T. Lindsey, *The Constitution of Indonesia: a Contextual Analysis* (Bloomsbury Publishing, 2012); Melissa Crouch. "Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious Deference: The Case of the Indonesian Constitutional Court." *Australian Journal of Asian Law*, 16 (2) (2016).

⁵ Ihsan Ali-Fauzi, S.R. Panggabean, N.G. Sumaktoyo, H.T., Anick, H. Mubarak & S. Nurhayati, *Kontroversi Gereja di Jakarta* (Jakarta: Centre for the Study of Islam and Democracy, 2011); Melissa Crouch. "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review*, 34(4), (2010): 403-419.

⁶ Lihat D. Candraningrum. "Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari'ah Ordinances (Perda Syariah)." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 45 (2), (2007): 289-320. A. Salim. "Muslim Politics in Indonesia's Democratization: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post New Order Era." *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, (2007): 115-137; M. Buehler. "The rise of shari'a by-laws in Indonesian districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption." *South East Asia Research*, 16 (2), (2008): 255-285; R. Bush. "10 Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" in G. Fealy & S. White, (Eds.), *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. (Institute of Southeast Asian Studies, 2008); Ihsan Ali-Fauzi & Saiful Mujani, *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah*. (Jakarta: Freedom Institute, 2009).

⁷ Lihat Muhammad Afdillah, *Dari Masjid ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan*

warga Syiah di Jawa Timur, anggota Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) yang harus mengungsi di Transito Majeluk, Mataram setelah diserang sekelompok orang belum memperoleh kejelasan kapan akan kembali ke tanah milik mereka.⁸ Contoh lainnya adalah pendirian gereja HKBP Filadelfia di Bekasi dan GKI Yasmin di Bogor yang hingga kini belum menemukan titik terang jalan keluarnya.⁹

Putusan MK tentang status kewarganegaraan penghayat agama leluhur merupakan harapan di tengah oase advokasi pluralisme di Indonesia. Tulisan ini akan menelusuri sejarah advokasi pluralisme agama dengan memfokuskan perhatian pada advokasi kelompok penghayat agama leluhur di Indonesia. Tulisan ini berangkat dari pertanyaan, bagaimana rute dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Proses pengumpulan data penelitian ini menggunakan tiga cara: wawancara tatap muka, pengamatan lapangan, dan mempelajari dokumen. Dokumen dirujuk dalam penelitian ini adalah dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan advokasi Yasalti dan Donders sepanjang 2015-2018. Penelitian ini juga menggunakan data hasil observasi dalam kunjungan ke komunitas Marapu dan kantor Yasalti dan Donders pada 25 November – 02 Desember 2019. Selain dari dokumen dan observasi, penelitian ini juga mewawancarai narasumber yang berasal dari pimpinan Yasalti dan Donders, pendamping lapangan, tokoh pemerintah, pemuka agama, penghayat Marapu, dan tokoh lainnya di Sumba Timur dan Sumba Tengah. Sementara itu, penjelasan mengenai sejarah advokasi, penelitian ini mengandalkan tulisan-tulisan yang berserakan dari sejumlah peneliti dan wawancara kepada sejumlah tokoh

Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur (Master thesis, Universitas Gadjah Mada: 2013); N. Farabi. *Hambatan Pemulangan Pengungsi Internal Syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok* (Yogyakarta: Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada: 2014).

⁸ C. Koerner & W. D. Putro. "The Socio-Legal Construction of Ahmadiyah as a Religious Minority by Local and National Government Policy: Restrictions before the Law, a Challenge for Religious Freedom in NTB, Indonesia." *International Journal of Indonesia Studies*, issue 4 (2017).

⁹ S. R. Panggabean & Ihsan Ali-Fauzi, *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina: 2014).

yang dianggap memiliki peran khususnya setelah rezim Orde Baru jatuh.

Tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim. Peran aktivis LSM dan akademisi lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat agama leluhur dalam menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama sejak kemerdekaan hingga era reformasi. Sebagai sistem pendukung, hubungan LSM-akademisi sebagai pendamping dan para penghayat yang didampingi cenderung dinamis: kadang sejalan, kadang tidak.

Tulisan ini dibagi ke dalam tiga bagian. Bagian pertama akan memaparkan advokasi penghayat kepercayaan di tengah politik agama yang begitu kuat sejak kemerdekaan hingga rezim Orde Baru tumbang. Bagian kedua, advokasi penghayat kepercayaan pasca reformasi yang didominasi wacana hak asasi manusia. Bagian terakhir akan mendiskusikan perkembangan advokasi penghayat kepercayaan terkini, yakni melalui Program Peduli, yang kemudian menjadi studi kasus pada penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

Advokasi Penghayat Kepercayaan: Kemerdekaan hingga Orde Baru

Dalam sejarahnya, pengakuan negara terhadap eksistensi agama leluhur di Indonesia saat ini merupakan hasil pergulatan politik penganut agama leluhur itu sendiri dalam konteks politik agama. Samsul Maarif, dosen Center for Religius and Cross-cultural Studies (CRCS) UGM, mendokumentasikan dinamika tersebut dalam buku *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (2018). Politik pengakuan agama leluhur di Indonesia, menurut Maarif, bisa ditelusuri sejak polarisasi antara santri dan abangan pada era penjajahan belanda dan Jepang. Sementara abangan lebih mengutamakan budaya lokal, santri mengampanyekan purifikasi agama. Polarisasi abangan dan santri ini berlanjut pada masa awal kemerdekaan khususnya dalam perdebatan di BPUPKI. Professor Supomo, anggota BPUPKI yang juga pembela hukum adat, menentang Piagam Jakarta yang berupaya memasukkan syariat Islam ke dalam konstitusi Indonesia.

Polarisasi santri dan abangan bertransformasi menjadi polarisasi baru antara agama dan kepercayaan. Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 tentang kemerdekaan menganut dan menjalankan keyakinan menyebut agama dan kepercayaan secara terpisah. Penyebutan kepercayaan terpisah dari agama itu merupakan usulan dari kelompok "abangan" yang merasa terancam oleh agenda kelompok santri.¹⁰ Ancaman tersebut mencuat menyaksikan sejumlah aksi kelompok santri setelah mereka kecewa karena Piagam Jakarta dicoret pada konstitusi. Mereka misalnya mengusulkan pembentukan Departemen Agama (Depag) yang dibentuk pada 1946, yang pada masa awalnya hanya melayani umat Islam. sebagai lembaga baru, Depag kemudian merumuskan definisi agama pada 1952 untuk memperjelas posisinya. Mereka mengusulkan tiga kriteria agama: nabi, kitab suci, dan jaringan internasional. Sekalipun pada awalnya ditolak sejumlah pihak, definisi tersebut lambat laun menjadi pemahaman bersama yang kemudian menjadi alat ukur mana agama dan mana yang bukan agama.¹¹

Konteks sosial politik ini, menurut Maarif, mendorong komunitas kepercayaan di Jawa berkumpul dan membentuk Badan Kongres Kebatinan Indonesia (BPKI) pada kongres pertama di Semarang pada 1955. Kongres yang dihadiri 680 perwakilan dari sekitar 60an organisasi kebatinan ini memilih Mr. Wongsonegoro sebagai ketua. Di bawah kepemimpinan Wongsonegoro, BPKI menyelenggarakan kongres lima kali hingga tahun 1960 yang diikuti peserta lebih dari dua juta peserta. Perkembangan pesat kelompok kebatinan ini menarik perhatian Depag yang kemudian mengumumkan 61 aliran kebatinan yang bukan pemeluk agama Islam, Protestan, dan Katolik. Merespons pengumuman tersebut, BPKI mendeklarasikan diri sebagai aliran kebatinan dan tidak berencana menjadi agama.¹² Deklarasi ini dengan sendirinya memperlihatkan bahwa BPKI pada akhirnya seakan menerima definisi agama

yang dirumuskan Depag.

Polarisasi agama dan kepercayaan sejak saat itu semakin terlembagakan. Pemerintah untuk pertama kalinya menyatakan pengakuan terhadap kelompok kebatinan dalam regulasi negara. Pengakuan tersebut terekam pada TAP MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahapan Pertama 1961-1969. Pasal 2 ayat 1 GBHN ini merumuskan Mental, Agama, dan Kerohanian dengan menggunakan garis miring sebagai pertanda kesetaraan ketiganya. Sementara itu, pada pasal 3, ketentuan mengenai pendidikan, menyatakan bahwa setiap anak akan mendapatkan pendidikan agama, betapapun tak mereka yakini. Meski begitu, pasal tersebut juga menjamin kelompok kebatinan untuk tidak mengikuti pelajaran agama tersebut.¹³ Dinamika hubungan agama dan kepercayaan berkembang dengan munculnya Biro Pakem di Departemen Kejaksaan Pusat, yang salah satu kewenangannya mengawasi perkembangan kelompok kebatinan. Pengawasan tersebut semakin intensif setelah UU No.1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama disahkan. UU tersebut secara tegas melegitimasi agama dan mendelegitimasi aliran kepercayaan, bahkan ada kemungkinan mengkriminalisasi kelompok kepercayaan.

Peristiwa 30 September 1965 menandai babak baru hubungan agama dan kepercayaan. Peristiwa ini mendorong tentara membersihkan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan unsur-unsurnya, yang mana aliran kepercayaan dihubungkan dengan partai tersebut.¹⁴ Asosiasi antara penganut kepercayaan dengan PKI mengakibatkan para penganut kepercayaan bermigrasi ke agama-agama yang diakui sebagai strategi untuk menghindari tak beragama dan karenanya komunis. Tekanan dari kelompok Muslim agar penganut Islam memperlihatkan diri keislamannya mengakibatkan sebagian besar penganut kepercayaan di Jawa berpindah ke agama Kristen atau Katolik. World Council of Churches (WCC) melaporkan jumlah penganut

¹⁰ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).

¹¹ J. Moulder. "The Defence Act and Conscientious Objection." *Philosophical Papers*, 7 (1), (1978): 25-50.

¹² D. Dwiyanto, *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Pararaton, 2010).

¹³ S. Suhadi. "Who are "Normal" and "Extreme" Muslims? Discursive Study of Christians' Voice about Muslim's Identity in Surakarta, Central Java." *PCD Journal*, 5 (2), (2017): 241-265.

¹⁴ J. Moulder. "The Defence Act and Conscientious Objection." *Philosophical Papers*, 7 (1), (1978): 25-50, dikutip oleh Maarif, 2017.

Kristen meningkat 2,5 juta sepanjang 1986-1968.¹⁵

Aliran kepercayaan mendapat peluang baru pada rezim Orde Baru khususnya setelah Partai Golongan Karya (Golkar) berdiri. Satu di antara komunitas yang bergabung pada sekretariat bersama (Sekber) Golkar adalah organisasi aliran kebatinan. Golkar membentuk BK5I (Badan Kongres Kepercayaan Kejiwaan Kerohanian Kebatinan Indonesia). Pada 1971, BK5I bertransformasi menjadi Sekretariat Kerjasama Kepercayaan (SKK), yang diketuai Wongsonegoro serta R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo, mantan Kapolri pertama, sebagai sekretaris jenderal (Aryono, 2018:61).

Dukungan elit Golkar kepada aliran kebatinan ini memperlihatkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, aktor politik Orde Baru di level elit bisa membedakan dengan tegas beda antara aliran kebatinan dan unsur-unsur komunisme, yang mana sebelumnya diasosiasikan antara keduanya. Hal ini dimungkinkan karena di antara anggota aliran kebatinan adalah elit di Parati, seperti R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo sebagai sekretaris jenderal SKK merupakan mantan Kapolri pertama. Sementara itu, masyarakat pada umumnya menganggap aliran kebatinan dan komunisme berasosiasi satu sama lain. Kemungkinan kedua, massa aliran kebatinan di pulau Jawa signifikan untuk mendukung pengembangan Golkar sehingga satu cara mendapat suara mereka adalah dengan memasukkan aliran kebatinan menjadi bagian dari Golkar.

Sesuai saran Golkar, BK5I mengganti kebatinan menjadi kepercayaan sebagaimana dengan konstitusi pasal 29 ayat 2. Melalui Golkar, pemerintah mengakui kembali aliran kepercayaan secara formal, yang pada gilirannya mendapat dukungan finansial dari pemerintah. Hal ini menandai babak baru pengakuan terhadap penganut agama leluhur di Indonesia. Pada kongres Subud, salah satu aliran kepercayaan pada 1971, Presiden Soeharto menyatakan untuk menerima organisasi kepercayaan secara wajar.¹⁶ Pemerintah menunjukkan semakin kuat untuk

mengakui aliran kepercayaan setara dengan agama-agama dilihat dari TAP MPR 1973 yang menyatakan akan memberikan sejumlah sarana dan prasarana terhadap aliran kepercayaan.¹⁷

Kecenderungan pengakuan setara terjadi pada aspek kewargaan lainnya, perkawinan. Hal ini tercermin pada UU perkawinan yang telah disusun pada 1952 dan direvisi pada 1974. Sementara UU perkawinan 1952 hanya berlaku bagi umat Islam, pada UU 1974 mencakup seluruh warga negara, yang terkait dengan perkembangan aliran kepercayaan. Pada UU 1974, pemerintah mengatur bahwa perkawinan dilakukan oleh masing-masing pemuka agama. Pencatatan pernikahan penganut agama Islam dilakukan oleh petugas khusus, sementara penganut agama lainnya dan kepercayaan dicatat di kantor pencatatan sipil. Sampai sini, penganut kepercayaan dijamin haknya setara dengan agama lain. Pengakuan terhadap aliran kepercayaan surut kembali ketika pengakuan pada dokumen paling dasar, Kartu Tanda Penduduk (KTP dan Kartu keluarga (KK)). Pemerintah tidak mencatatkan kolom agama di luar UU PNPS 1965. Sejak saat itu, penganut aliran kepercayaan tidak punya pilihan kecuali mengikuti aturan tersebut dengan berpura-pura masuk salah satu agama, atau sama sekali tidak memiliki dokumen legal sebagai warga negara.

Advokasi Penghayat Kepercayaan: Paska Reformasi

Sementara komunitas penghayat mengadvokasi diri sendiri pada masa kemerdekaan hingga Orde Baru, pada era reformasi beberapa lembaga non pemerintah turut serta mendampingi klaim kelompok penghayat kepercayaan menyatakan klaim hak kewarganegaraannya. Pendampingan masyarakat sipil itu bisa ditelusuri pada perubahan struktur sosial politik paska reformasi, yakni terbentuknya UU HAM 1999 dan amandemen UU konstitusi pada 2000-2002 yang memasukkan dimensi HAM di dalamnya.

Advokasi terhadap komunitas penghayat kepercayaan bisa ditelusuri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang terbentuk pada kongres pertama 1999. AMAN

¹⁵ M. C. Ricklefs. "The Asian Immigration Controversies of 1984-85, 1988-89 and 1996-97: A Historical Review." *The resurgence of racism: Howard, Hanson and the race debate*, 39-61 (1997): 124.

¹⁶ D. Dwiyanto, *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah Istimewa Yogyakarta* (Yogyakarta: Pararaton,

2010).

¹⁷ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017): 45.

tidak spesifik mengadvokasi hak beragama, melainkan hak atas tanah ulayah masyarakat adat yang saat itu banyak diambil alih perusahaan-perusahaan besar atas nama pembangunan dan investasi. Pada kongres pertama, misalnya, AMAN menyatakan “Kami tidak mengakui negara jika negara tidak mengakui kami”.¹⁸ AMAN memandang negara telah abai terhadap hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat adat. Fokus pada hak ekonomi dan kebudayaan juga tampak dari penamaannya, masyarakat adat. Tidak semua masyarakat adat menganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan, dan tidak semua penghayat kepercayaan tinggal di lingkungan masyarakat adat. Tetapi, penghayat kepercayaan yang berada di wilayah pedalaman yang memiliki tanah ulayat adalah komunitas yang didampingi AMAN.

Pada perkembangannya, Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-5 pada 2017, penyelenggara mulai menyediakan ruang bagi diskusi dengan topik tentang spiritualitas dan kebudayaan. Pada sarasehan tersebut, sejumlah tokoh khususnya komunitas penghayat kepercayaan yang selama ini mengampanyekan kebebasan beragama/berkeyakinan menjadi pembicara. Gagasan tersebut sebetulnya sudah ada pada kongres sebelumnya pada 2012 di Halmahera, yang pada dokumen deklarasi menyatakan bahwa pemerintah agar tidak mengintervensi spiritualitas dan kebudayaan masyarakat adat nusantara. Sementara pada kongres ke-5 kongres mendiskusikan hak sipil politik, khususnya hak kewarganegaraan terkait kebebasan beragama/berkeyakinan. Pada diskusi tersebut, sebagian komunitas masyarakat adat tidak ingin bertransformasi menjadi komunitas agama tertentu. Kelompok lain menyatakan ingin pemerintah mengakui eksistensi komunitasnya sebagai salah satu agama di Indonesia. Kelompok lainnya cenderung mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku, walaupun mereka memiliki dimensi spiritualitas tertentu.¹⁹

¹⁸ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2017): 74; S. Moniaga “12 From Bumiputera to Masyarakat Adat.” In J. Davidson & D. Henley, (Eds.), *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism* (London: Routledge, 2007).

¹⁹ Wawancara bersama Samsul Maarif, dosen CRCS UGM, 25 Maret 2019.

Singkatnya, AMAN telah mengadvokasi kelompok agama leluhur dengan fokus pada dimensi sosial, ekonomi, dan politik, tetapi belum membahas implikasi perbedaan keyakinan spiritualitas para penghayat. Meski diskusi tentang hak kewarganegaraan dari segi agama telah muncul, Resolusi Wanua Koha, hasil rapat kerja nasional Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ke-5 itu, tidak memasukkan isu agama dan keyakinan sebagai agenda gerakan.

Sementara itu, advokasi yang fokus penghayat kepercayaan dari sudut pandang pluralisme agama sudah mulai didiskusikan pada acara-acara dialog antar agama. LSM yang bergerak dalam bidang dialog antar keyakinan meletakkan penghayat kepercayaan sebagai agama leluhur yang derajatnya setara dengan agama-agama lain. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Djohan Effendi, misalnya, melalui Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP) yang didirikan pada 2000 menggugat klaim agama resmi yang meminggirkan sejumlah agama yang ada di Indonesia, termasuk agama leluhur. Djohan Effendi, selama menjabat sebagai Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Agama (1998-2000) mengusulkan dialog antar iman, alih-alih antar agama. “Saat itu, usulan narasi dialog antar iman, bukan antar agama, adalah sebagai cara untuk memberi ruang kepada komunitas agama leluhur untuk menyampaikan pandangan keagamaannya.”²⁰ Meski tidak ada pendampingan khusus kepada komunitas penghayat, ICRP melibatkan mereka dalam berbagai kegiatan, tidak saja menjadi peserta tetapi juga sebagai panitia yang turut serta merumuskan substansi kegiatan. “Saat itu, bersama aliansi lintas iman belum mendiskusikan agama leluhur dalam kerangka kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB).”²¹

Wacana KBB menjadi kerangka analisis dalam advokasi setelah pemerintah Indonesia meratifikasi kovenan internasional tentang hak sipil politik. Ratifikasi itu kemudian tertuang dalam UU No 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik). Wacana HAM pada mulanya muncul sebagai

²⁰ Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

²¹ Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

respons terhadap berbagai pelanggaran kemanusiaan pada masa transisi dari rezim otoriter menuju demokrasi. Belakangan wacana HAM berkembang menjadi landasan untuk klaim atas hak asasi warga negara, termasuk beragama/berkeyakinan. Pada dua ketentuan internasional itu, setiap negara yang meratifikasi wajib memenuhi, menghormati, dan melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Setelah UU ratifikasi terbit, aliansi yang bekerja untuk dialog antar agama (seperti Dian Interfidei, ICRP, Madia, dan lainnya) dan aktivis HAM (Lembaga Bantuan Hukum (LHB), Elsam, ILRC, dan lainnya), yang sebelumnya bekerja di wilayah masing-masing, bertemu di bawah kerangka kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Pada kerangka KBB inilah wacana mengenai hak beragama penganut agama leluhur atau penghayat kepercayaan mulai mendapat perhatian khusus.

Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika (ANBTI) adalah satu di antara LSM yang mengadvokasi komunitas penghayat kepercayaan dari aspek hak sipil politik, khususnya sebagai komunitas agama. Kongres pertama, yang kemudian menjadi cikal bakal pembentukan ANBTI pada 2006, merekomendasikan agar penghayat kepercayaan menjadi satu di antara komunitas yang didampingi dan diperkuat. "Kami yang sejak saat itu lebih suka menggunakan istilah agama leluhur daripada penghayat kepercayaan, menaruh perhatian khusus pada kelompok agama leluhur," tutur Nia Syarifuddin, direktur ANBTI.²² Setahun berselang, ANBTI menyelenggarakan Sarasehan Kebhinekaan, yang melibatkan 33 komunitas agama leluhur di Indonesia seperti Sunda Wiwitan, Marapu, Kaharingan, dan lainnya. ANBTI berperan sebagai penguat jaringan di antara berbagai elemen masyarakat, khususnya mereka yang terdiskriminasi. ANBTI saat itu mengidentifikasi empat aktor yang melanggengkan diskriminasi terhadap agama leluhur: pemerintah, agama dunia, media, dan peneliti. Keempat aktor ini diyakini sebagai pihak yang melanggengkan stigma terhadap penganut agama leluhur. Oleh sebab itu, ANBTI kemudian menyelenggarakan sejumlah workshop pendokumentasian sebagai alternatif bagi

penganut agama leluhur membuat dokumentasi dan media sendiri sebagai sarana menyuarakan kebenaran.

Bersama lembaga antar iman lainnya, ANBTI juga terlibat dalam sarasehan nasional yang mendiskusikan hak keberagaman penghayat kepercayaan pada 2005 sebagai respons atas rancangan UU tentang Adminduk. Saat itu, permintaan LSM adalah menghapus kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk yang dinilai sebagai titik masuk diskriminasi penganut agama dan kepercayaan di luar enam agama, yang menjadi salah satu pasal dalam RUU tersebut. Menurut Anick HT, direktur ICRP 2008-2010, "Kami waktu itu menolak RUU tersebut karena di dalam UU tersebut ada penegasan mengenai agama resmi dan lainnya. Jika sebelumnya tidak pernah ada pernyataan khusus mengenai agama resmi, RUU Adminduk menegaskan hal itu dengan memisahkan mana agama dan mana budaya."²³

LSM dalam proses advokasi RUU tersebut berperan sebagai pendamping bagi komunitas penghayat kepercayaan yang tergabung dalam Badan Perjuangan Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (BPKBB). BPKBB diketuai Dr. Wahyono Raharjo, penganut Kapribaden, satu di antara penghayat kepercayaan di Indonesia. Pemerintah bersama DPR akhirnya mensyahkan UU Adminduk 2006 dengan catatan bahwa penganut kepercayaan boleh tidak mengisi kolom agama atau menandai (-). Berbagai komunitas di BPKBB merespons keputusan tersebut secara beragam. Di antara mereka, ada komunitas yang bersikukuh ingin agar pemerintah mengakui mereka sebagai agama. komunitas lain tundak terhadap keputusan tersebut, dan memilih mengosongkan kolom agama. Sementara itu, banyak di antara penghayat kepercayaan yang akhirnya mengisi dengan satu di antara enam agama, meski tidak meninggalkan tradisi dan ajaran kepercayaannya. "Kami, karenanya, tidak hanya mengadvokasi agar pemerintah merekognisi dan melayani penghayat, tetapi juga mengadvokasi komunitas di dalam penghayat itu sendiri agar betapapun ada perbedaan internal, perjuangan tetap di bawah kerangka hak asasi

²² Wawancara Nia Syarifuddin, Direktur ANBTI, 28 Maret 2019.

²³ Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

manusia,” tutur Anick.²⁴

UU Adminduk 2006, saat itu, dinilai sebagai setengah kemenangan kampanye KBB. Setengah kemenangannya adalah penghayat kepercayaan diberi keleluasaan memilih untuk mengosongkan kolom agama yang sebelumnya mereka terpaksa mengisi dengan satu dari enam agama yang diakui. Setengah kekalahan lainnya, pengosongan kolom agama belum menyelesaikan status kewarganegaraan penghayat. Menurut Anick “Mereka boleh mengosongkan kolom agama, tetapi mereka tidak bisa memiliki Akta Pernikahan setara dengan penganut agama lain. begitu juga dengan Akta Kelahiran anak-anak agama leluhur yang tidak setara. Belum lagi pendidikan agama mereka di sekolah-sekolah yang akan menjadi masalah atas dasar UU Adminduk 2006.”²⁵

Di tengah euforia UU Adminduk, pemerintah Indonesia memasukkan RUU anti-pornografi dan anti-pornoaksi dalam program legislasi nasional 2007. Satu di antara pasal yang akan diatur adalah cara berpakaian. Jika UU tersebut disahkan dengan pasal cara berpakaian yang dasarnya perspektif agama tertentu, maka praktik berpakaian di berbagai wilayah termasuk kelompok adat dan komunitas penghayat kepercayaan akan menjadi korban. Lagi-lagi, aktivis KBB dan masyarakat adat mengadvokasi RUU yang berpotensi mengebiri kebebasan masyarakat adat dan komunitas penghayat (Taufiqurahman, 2006).

Di lingkungan akademik, program studi agama dan lintas budaya (Center for Religions and Cross-cultural Studies – CRCS) UGM adalah program studi yang untuk pertama kalinya menawarkan mata kuliah *indigenous religion* (agama lokal). *Indigenous religion* terdiri dari tiga topik: “(1) mempersoalkan paradigma agama dunia yang dominan digunakan dalam studi agama, dan karenanya telah berkontribusi pada marginalisasi kajian agama lokal; (2) pendekatan yang memungkinkan produktivitas kajian agama lokal, dan agar terhindar dari bayang-bayang perspektif agama dunia; dan (3) pandangan dunia yang melaluinya dapat ditunjukkan perbedaan antara paradigma agama dunia dan paradigma

agama lokal”.²⁶

Sampai di sini, kita menyaksikan pendampingan penghayat kepercayaan dilakukan di level nasional. Lebih dari itu, advokasi lebih banyak menyangkut status penghayat pada kebijakan nasional. Sejauh ini, belum ada LSM yang bekerja di tingkat lokal atau komunitas yang secara langsung mendampingi hak kewarganegaraan. Mengisi kekosongan tersebut, sejumlah LSM di lima wilayah melakukan advokasi penghayat kepercayaan menggunakan inklusi sosial sebagai perspektif di bawah payung program Peduli.

Advokasi Penghayat Kepercayaan Terkini: Program Peduli

Program Peduli melanjutkan inisiatif pemerintah Indonesia di bawah payung Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang saat itu meluncurkan program turunan yakni PNPM Peduli 2011-2012. Program ini sedari awal memang diluncurkan untuk mendukung masyarakat sipil yang selama ini mendampingi kelompok termarjinalkan di Indonesia. Kegiatan pada program ini pada masa itu mengutamakan kegiatan-kegiatan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kapasitas mereka yang terpinggirkan, dengan pertama-tama menumbuhkan kapasitas pendampingan yang memadai bagi organisasi masyarakat sipil. PNPM Peduli didukung berbagai donor internasional yang dikelola World Bank. Tiga organisasi masyarakat sipil yang menerima hibah ini adalah Kemitraan, Association for Community Empowerment – ACE, dan Lakpesdam, sayap organisasi intelektual Nahdlatul Ulama (NU). Program ini menjangkau 15.000 penerima manfaat melalui 29 mitra lokal dan 20 cabang Lakpesdam di Indonesia.²⁷

Pemerintah Indonesia melanjutkan inisiatif ini sejalan dengan “Nawa Cita” pemerintahan Joko Widodo, yang menyatakan bahwa negara harus hadir melindungi segenap warga negara; negara hadir dalam menciptakan tata kelola yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya; membangun Indonesia dari wilayah pinggiran; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia; serta

²⁴ Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

²⁵ Wawancara bersama Anick H.T., Direktur Eksekutif ICRP 2008-2011, 13 Juni 2019.

²⁶ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluher dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).

²⁷ Tentang PNMP Mandiri. <http://www.pnpm-mandiri.org/PNMPPeduli.html>.

memperteguh kebhinekaan dan restorasi Indonesia. Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemkeno PMK) membidangi program Peduli atas dukungan pemerintah Australia melanjutkan program Peduli dengan menggandeng The Asia Foundation sebagai mitra pengelola program ini. Program Peduli jilid dua ini dilaksanakan sepanjang 2014-2018 dibagi ke dalam dua fase. Program ini mengidentifikasi enam kelompok yang dinilai selama ini terpinggirkan: Anak dan remaja rentan, (2) masyarakat adat dan lokal terpencil yang tergantung pada sumber daya alam, (3) korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan berbasis agama, (4) orang dengan disabilitas, (5) hak asasi manusia dan restorasi sosial, dan (6) waria.

Program yang melibatkan 72 organisasi masyarakat sipil dan tersebar di 84 kabupaten atau kota di Indonesia ini mengharapkan peningkatan inklusi sosial bagi warga atau kelompok termarjinalkan. Tujuan ini dicapai melalui perubahan dengan tiga indikator berikut: meningkatnya akses yang termarjinalkan pada layanan publik dan penerimaan sosial, meningkatnya pemenuhan hak asasi manusia, dan kebijakan publik tentang inklusi sosial. Berdasarkan tiga hal ini, program Peduli merumuskan tiga hal: penerimaan, pelayanan, dan kebijakan sebagai pendekatan. Ketiganya kemudian disebut sebagai trilogi inklusi sosial sebab satu tergantung pada yang lain, atau satu memengaruhi yang lain. Penerimaan sosial hanya bermakna jika pemerintah memberi akses seluas-luasnya untuk pelayanan publik. Layanan publik sangat tergantung pada kebijakan yang tersedia sejauh mana memungkinkan akses tersebut terbuka bagi kelompok termarjinalkan. Kebijakan publik dan layanan sosial tidak bisa jalan jika penerimaan sosial kepada mereka masih bermasalah. Program ini menggambarkan trilogi inklusi sosial dengan gambar di bawah ini.

Sebagaimana telah disebutkan di atas, salah satu penerima manfaat program ini adalah warga atau komunitas korban diskriminasi, intoleransi, dan kekerasan. Di Indonesia, warga atau komunitas yang mengalami kekerasan, intoleransi, dan diskriminasi adalah komunitas penganut agama leluhur atau lebih dikenal dengan sebutan aliran kepercayaan. Pada periode tertentu, pemerintah Indonesia mengakui aliran

kepercayaan dengan memberi perlindungan dan akses pada pelayanan dan fasilitas publik. Pada saat yang lain, pemerintah mengeluarkan regulasi baru yang meminggirkan aliran kepercayaan sebagai akomodasi kepada kelompok agama arus utama. Pada masa berikutnya lagi, pemerintah kembali mengakui aliran kepercayaan dan menyediakan fasilitas meski tidak lagi diletakkan serumah dengan agama arus utama, melainkan diletakkan sebagai bagian dari kebudayaan.²⁸

Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memperkirakan jumlah penghayat di Indonesia sekitar 10-12 juta penduduk. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat jumlah lebih kecil dari perkiraan Kementerian Pendudukan dan Kebudayaan, 299.617 orang yang mengaku "Lainnya" diasosiasikan dengan aliran kepercayaan. Kesimpangsiuran angka ini mencerminkan ketidakjelasan pendataan terhadap penganut aliran kepercayaan di Indonesia. Situasi ini lebih jauh menandakan pemerintah tidak secara resmi memasukkan penganut aliran kepercayaan pada kategori dalam sensus data kependudukan. Meski demikian, Direktorat Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa mencatat 187 organisasi aliran kepercayaan di Indonesia.²⁹

Program Peduli menargetkan penghayat kepercayaan menjadi target grup untuk advokasi. Melalui Satunama, LSM di Yogyakarta yang berperan sebagai *executive organizer* (EO), menjalankan program ini pada pilar agama dan menggandeng enam LSM lokal sebagai pelaksana advokasi: LKIS di Yogyakarta, Aliansi Sumut Bersatu (ABS) di Sumatera Utara, eLSA, Jawa Tengah, Yasalti dan Donders di Pulau Sumba. "Mayoritas penganut Marapu tinggal di Pulau Sumba. Semua penganut Marapu pasti orang Sumba, sebaliknya tidak semua penduduk Sumba adalah penganut Marapu," tutur Peter Mikhael (Wawancara berswama Pater Mikhael, direktur Yayasan Donders, pada 25 November 2018). Meski diakui keberadaannya di masyarakat, penganut Marapu di antara golongan yang termarjinalkan

²⁸ Samsul Maarif, *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia* (Yogyakarta: CRCS UGM, 2017).

²⁹ Frendi Kurniawan. "Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan." *Tirto*, 14 November 2017. <https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y> (diunduh 2 April 2019).

dari sisi akses terhadap layanan publik sebagai warga negara.

C. KESIMPULAN

Hingga rezim otoriter Orde Baru tumbang, penganut agama leluhur memperjuangkan kepentingan politiknya sendiri, yang pada satu saat mendapat dukungan dan di saat lainnya tekanan dari pemerintah dan militer. Reformasi telah membuka ruang advokasi dengan menyediakan kesempatan politik lebih luas, yang memungkinkan berbagai pihak terlibat dalam advokasi memperjuangkan kewarganegaraan penganut penghayat kepercayaan. Penghayat kepercayaan pada dasarnya selalu mengadvokasi nasibnya sendiri, tetapi LSM yang bergerak dalam bidang antar iman, berbasis HAM, berbasis

kampus turut serta mendampingi untuk memperkuat peran dan posisinya. Pada 2015, LSM yang mengadvokasi dan mendampingi penghayat kepercayaan bertambah banyak, salah satunya LSM yang bekerja di bawah Program Peduli. Putusan MK yang mengabulkan atas gugatan penghayat kepercayaan tentang hak sipil pada UU Adminduk bisa didistribusikan pada aksi kolektif yang ada di bawah program tersebut.[]

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Afdillah, Muhammad. *Dari Masjid ke Panggung Politik; Studi Kasus Peran Pemuka Agama dan Politisi dalam Konflik Kekerasan Agama antara Komunitas Sunni dan Syiah di Sampang Jawa Timur*. Master Thesis, Universitas Gadjah Mada, 2013.
- Ali-Fauzi, I., & Mujani, S. *Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis Ata Perda Syariah*. Jakarta: Freedom Institute, 2009.
- Ali-Fauzi, I., Panggabean, S. R., Sumaktoyo, N. G., Anick, H. T., Mubarak, H., & Nurhayati, S. *Kontroversi Gereja di Jakarta*. Jakarta: Centre for the Study of Islam and Democracy, 2011.
- Bagir, Zainal A. "Defamation of Religion Law in Post-Reformasi Indonesia: Is Revision Possible?" *Australian Journal of Asian Law*, 13 (2), (2013).
- Buehler, M. "The rise of shari'a by-laws in Indonesian districts: An indication for changing patterns of power accumulation and political corruption." *South East Asia Research*, 16(2), (2008): 255-285.
- Bush, R. "10 Regional Sharia Regulations in Indonesia: Anomaly or Symptom?" in Fealy, G., & White, S. (Eds.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies, 2008.
- Candraningrum, D. "Unquestioned Gender Lens in Contemporary Indonesian Shari'ah Ordinances (Perda Syariah)." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies*, 45(2), (2007): 289-320.
- Crouch, Melissa. "Constitutionalism, Islam and the Practice of Religious Deference: The Case of the Indonesian Constitutional Court." *Australian Journal of Asian Law*, 16 (2) (2016).
- Crouch, Melissa. "Implementing the Regulation on Places of Worship in Indonesia: New Problems, Local Politics and Court Action." *Asian Studies Review*, 34 (4), (2010): 403-419.
- Dwiyanto, D. *Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Pararaton, 2010.
- Farabi, N. *Hambatan Pemulangan Pengungsi Internal Syiah Sampang dan Ahmadiyah Lombok*. Yogyakarta: Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada, 2014.
- Koerner, C. & Putro, W. D. "The Socio-Legal Construction of Ahmadiyah as a Religious Minority by Local and National Government Policy: Restrictions before the Law, a Challenge for Religious Freedom in NTB, Indonesia." *International Journal of Indonesia Studies*, issue 4 (2017).
- Kurniawan, Frendi. "Seberapa Banyak Jumlah Penghayat Kepercayaan." Tirto. 14 November 2017. <https://tirto.id/seberapa-banyak-jumlah-penghayat-kepercayaan-di-indonesia-cz2y> (dunduh 2 April 2019).
- Maarif, Samsul. *Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia*. Yogyakarta: CRCS UGM, 2017.
- Menchik, Jeremy. "Productive Intolerance: Godly Nationalism in Indonesia." *Comparative Studies in Society and History*, 56 (3), (2014): 591-621.
- Moniaga, S. "12 From Bumiputera to Masyarakat Adat." In Davidson, J., & Henley, D. (Eds.). (2007). *The Revival of Tradition in Indonesian Politics: The Deployment of Adat from Colonialism to Indigenism*. London: Routledge, 2007.
- Moulder, J. "The Defence Act and Conscientious Objection." *Philosophical Papers*, 7 (1), (1978): 25-50.
- Panggabean, S. R. & Ali-Fauzi, I. *Pemolisian konflik keagamaan di Indonesia* Jakarta: Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Paramadina, 2014.
- Ricklefs, M. C. "The Asian Immigration Controversies of 1984-85, 1988-89 and 1996-97: A Historical Review." *The resurgence of racism: Howard, Hanson and the race debate*,

- 39-61 (1997): 124.
- S., Butt, & Lindsey, T. *The Constitution of Indonesia: a Contextual Analysis*. Bloomsbury Publishing, 2012.
- Salim, A. "Muslim Politics in Indonesia's Democratization: The Religious Majority and the Rights of Minorities in the Post New Order Era." *Indonesia: Democracy and the Promise of Good Governance*, (2007): 115-137.
- Sirozi, M. "Secular-Religious Debates on the Indonesian National Education System: Colonial Legacy and a Search for National Identity in Education." *Intercultural Education*, 15 (2), (2004) 123-137.
- Suhadi, S. "Who are "Normal" and "Extreme" Muslims? Discursive Study of Christians' Voice about Muslim's Identity in Surakarta, Central Java." *PCD Journal*, 5 (2), (2017): 241-265.
- Tentang PNMP Mandiri. <http://www.pnpm-mandiri.org/PNMPPeduli.html>.

THE EVALUATION OF 5000 DOCTORAL SCHOLARSHIP PROGRAM OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS (MORA) IN THE GRADUATE SCHOOL OF UPI BANDUNG

SUPRAPTO*

ABSTRACT

The 5000 doctoral Scholarship Program of MORA aims at the development of capacity, capability, human resource quality at the Ministry generally and at the Directorate General of Islamic Education specifically. The study takes advantage of qualitative description of Graduate School Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. The findings show that the awarded students were full funded, there is inconsistency between the regulation and its implementation. Decision No 226 Year 2015 on the guidelines of scholarship recipients among lecturer candidates, lecturers, and staff members at an Islamic Higher Education Institution, Chapter IV article B clearly states doctoral scholarship is awarded for the duration of 8 semester or 4 and can be extended up to one year. On the contrary, the students are provided with tuition fee and stipend, while there is no book allowance, thesis writing support, publication allowance, and transport fee. The scholarship is awarded for only six semesters.

KEY WORDS: *Evaluation, the 5000 doctoral scholarship, Graduate School of UPI*

EVALUASI PROGRAM 5000 DOKTOR KEMENTERIAN AGAMA RI DI SEKOLAH PASCASARJANA UPI BANDUNG

ABSTRAK

Program 5000 doktor Kementerian Agama RI bertujuan meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Kementerian Agama secara umum dan SDM pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada Program Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Hasil penelitian menunjukkan seluruh mahasiswa penerima beasiswa di SPs UPI merupakan beasiswa penuh (*full scholarship*), masih terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Pada SK No. 226 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa untuk calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada bab iii tercantum biaya penulisan disertasi, batas waktu pemberian beasiswa, dan pada bab iv poin b beasiswa program doktor diberikan pada waktu 8 semester atau 4 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Namun, dalam kenyataan di lapangan mahasiswa hanya diberikan uang semester dan biaya hidup saja tidak pembiayaan untuk pembelian buku, penulisan disertasi, publikasi (jurnal internasional), dan transport bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota. Dan pemberian beasiswa hanya 6 semester.

KATA KUNCI: *Evaluasi, program 5000 doktor, Sekolah Pascasarjana UPI*

*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. supraptolitbang@gmail.com

** Naskah diterima Agustus 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Program 5000 doktor Kementerian Agama, merupakan program unggulan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Program ini diluncurkan Presiden R.I. Pada bulan Desember 2014 di istana negara. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas, kapabilitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Kementerian Agama secara umum dan SDM pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus.

Dalam pelaksanaannya, program 5000 doktor dibagi ke dalam dua skema yaitu reguler dan kerja sama. Skema reguler program 5000 doktor merupakan program yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada peserta program untuk melanjutkan studi S3 di perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang berkualitas. Skema kerjasama: hanya di universitas partner dan bidang ilmu tertentu. Di luar negeri misalnya: Mora-McGill Scholarship On Religion And Society, Mora-Atn Research And Innovation Scholarship (Morais), Mora-France Scholarship On Applied Science And Technology, Mora-Leiden Scholarship On Religion And Society, Mora-Coventry Scholarship On Trust, Peace, And Social Relations, Special Pathways Leading To Ph.D (Splp). Di Australia (University Of Canberra, Western Sydney University, Central Queensland University. Di Asia: Malaysia (8), Thailand (1), Japan (10), Egypt (5), Morocco (2), Tunisia (1), Sudan (10), Saudi Arabia (3). Di Eropa Germany (9), France (13), Netherlands (15), United Kingdom (12), North America, Canada (2), Australia (52) Dannew Zealand (1).

Kurang lebih empat tahun program 5000 doktor telah dilaksanakan, maka selayaknya dilakukan evaluasi melalui penelitian yang mendalam dan komprehensif. Sebagai salah satu area bagi arah strategi dan kebijakan nasional bidang pengembangan sdm, maka program ini diharapkan tepat sasaran dan mampu menjadi pendongkrak kualitas SDM bidang agama dan keagamaan.

Tujuan

Secara umum penelitian ini pertama, untuk mengkaji secara mendalam implementasi program 5000 doktor pada perguruan tinggi pengelola program beasiswa. Kedua, menemukan *gap* antara konsepsi program 5000 doktor dengan implementasinya di lapangan. Ketiga,

menemukan alternatif solusi dalam pelaksanaan program 5000 doktor tahap berikutnya. Keempat, mengukur tingkat keberhasilan program 5000 doktor bagi ketercapaian program strategi Kementerian Agama.

Kegunaan

1. Penelitian ini bermanfaat bagi program pengembangan SDM Kementerian Agama melalui program-program beasiswa;
2. Bahan *review* bagi ketercapaian program strategis Kementerian Agama pada bidang pengembangan SDM.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian evaluasi ini dikelompokkan menjadi dua yaitu:

Pada aspek konsepsi, mengkaji bagaimana kebijakan program 5000 doktor diformulasikan. Pada aspek konsepsi ini juga memokus ketersediaan dokumen yang dimaksudkan, suatu program akan berjalan dengan baik jika didukung oleh tuntunan yang jelas. Kemudian, bagaimana dokumen tersebut disosialisasikan hingga sampai kepada sasaran program. Selanjutnya tataran implementasi. Pada aspek ini difokuskan pada dua sasaran yaitu perguruan tinggi penyelenggara program 5000 doktor dan mahasiswa peserta program. Pada wilayah perguruan tinggi, perlu dikaji (1) apa jenis program yang diikuti oleh mahasiswa peserta program (mandiri/kerja sama), (2) apa yang menjadi keunggulan pada perguruan tinggi tersebut, (3) apakah mahasiswa peserta program 5000 doktor memilih program studi yang menjadi unggulan tersebut, (4) bagaimana ketersediaan dan kesiapan manajemen program di perguruan tinggi penyelenggara (ketersediaan dosen/ profesor pembimbing dan kesiapan mereka, perangkat lain yang dituntut oleh manajemen program). Pada aspek mahasiswa dikaji, (1) bagaimana mereka mendapatkan informasi hingga menjadi peserta program, (2) kepesertaan program: skema reguler/kerjasama, (3) pendaftaran dan proses seleksi. (4) hak, kewajiban dan sanksi, (5) komponen dan besaran dana program serta mekanisme pembayaran. Selanjutnya, kedua aspek konsepsi dan implementasi program bisa menjadi bahan untuk melihat dampak program bagi tujuan pengembangan SDM Kementerian Agama.

Landasan Teoretik

Definisi Evaluasi

Menurut Purwanto¹, evaluasi adalah pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain dari itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan. Pakar pendidikan lainnya juga memberikan definisi serupa.² Paulson (1976) dalam bukunya "*A Strategy for Evaluation Design*" mengemukakan bahwa "*Evaluation as a process of examining certain objects or events in the light of specific value standards for the purpose of making adaptive decisions*". (Evaluasi adalah proses pengujian berbagai objek atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai. Berdasarkan pengertian ini, evaluasi program adalah kegiatan pengujian terhadap sesuatu fakta atau kenyataan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Worthen dan Sanders (1973) memberi arti bahwa "*Evaluation as a process of identifying and collecting information to assist decision-makers in choosing among available decision alternatives*" (Evaluasi adalah suatu proses mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi untuk membantu para pengambil keputusan dalam memilih berbagai alternatif keputusan. Sementara itu Alkin (1981) mengemukakan bahwa "*Evaluation is the process of ascertaining the decision areas of concern, selecting appropriate information, and collecting and analyzing information in order to report summary*". (Evaluasi merupakan proses yang berkaitan dengan penyiapan berbagai wilayah keputusan melalui pemilihan informasi yang tepat, pengumpulan dan analisis data, serta pelaporan yang berguna bagi para pengambil keputusan dalam menentukan berbagai alternatif pilihan untuk menetapkan keputusan).

Menurut Suharsimi Arikunto³ ada dua tujuan evaluasi yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diarahkan pada program secara keseluruhan sedangkan tujuan khusus lebih difokuskan pada masing-masing komponen. Dari

beberapa definisi di atas, penelitian ini cenderung menggunakan definisi Fitzpatrick, Sander dan Worthen karena lebih mendekati kepada tujuan penelitian yang hendak dicapai. Meski demikian, penelitian memerlukan modifikasi teoretik yang dimaksudkan untuk mengakomodasi keperluan penelitian. Dari pengertian evaluasi di atas, dapat disimpulkan bahwa evaluasi adalah proses mengumpulkan dan menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya diikuti dengan pengambilan keputusan atas obyek yang dievaluasi.

Brinkerhoff, et.al.,⁴ (1983: 37) mengemukakan tiga pendekatan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama, yaitu: (1) *fixed vs emergent evaluation design*. Desain evaluasi yang baik ditentukan dan direncanakan secara sistematis sebelum implementasi dikerjakan. Desain dikembangkan berdasarkan tujuan program disertai seperangkat pertanyaan yang akan dijawab dengan informasi yang akan diperoleh dari sumber-sumber tertentu. Rencana analisis dibuat sebelumnya yang pemakainya akan menerima informasi seperti yang telah ditentukan dalam tujuan. Desain ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang mungkin. (2) *Formative vs sumative evaluation*. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program, dilaksanakan pada saat implementasi program sedang berjalan. Fokus evaluasi berkisar pada kebutuhan yang telah dirumuskan oleh evaluator. Evaluasi sumatif dilaksanakan untuk menilai suatu program, dari hasil evaluasi ini dapat ditentukan apakah suatu program tertentu akan diteruskan atau dihentikan. Pada evaluasi sumatif difokuskan pada variabel yang penting bagi pembuat keputusan. Waktu pelaksanaan evaluasi sumatif pada akhir program. (3) *Experimental & quasi-experimental designs vs. Unobtrusive Inquiry*. Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal seperti ini penelitian diacak, perlakuan diberikan dan pengukuran dampak dilakukan. Tujuan dari penelitian untuk menilai manfaat suatu program yang dicobakan. Apabila siswa atau program dipilih secara acak, maka generalisasi dibuat pada

¹M. Ngalim Purwanto, *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran* (Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2002).

²Sujana, Djuju Sujana, *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), 19-20.

³Suharsimi Arikunto dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin, *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan* (Bumi Aksara: Jakarta, 2004).

⁴Darodjat dan M. Wahyudhiana. *Model Evaluasi Program*. <https://media.penelitian/media-13569-id-model-evaluasi-program-pendidikan> (diunduh 30 Oktober 2018).

populasi yang agak lebih luas. Dalam beberapa hal intervensi tidak mungkin dilakukan atau tidak, proses sudah diperbaiki. Evaluator harus melihat dokumen-dokumen, seperti mempelajari nilai tes atau menganalisis penelitian yang dilakukan dan sebagainya. Strategi pengumpulan data terutama menggunakan instrumen formal seperti tes, survei, kuesioner, serta memakai metode penelitian yang terstandar.⁵

Model evaluasi program yang lain adalah illuminatif. Model illuminatif ini lebih menekankan pada penilaian kualitatif. Tujuan evaluasi model ini adalah mengadakan studi yang cermat terhadap sistem maupun program yang bersangkutan, yang meliputi: (1) Bagaimana implementasi program di lapangan, (2) bagaimana implementasi dipengaruhi oleh situasi sekolah tempat program yang bersangkutan dikembangkan, (3) apa kebaikan-kebaikan dan kelemahan-kelemahannya dan bagaimana program tersebut mempengaruhi pengalaman-pengalaman para peserta program. Hasil evaluasi yang dilaporkan bersifat deskripsi dan interpretasi, bukan pengukuran dan prediksi. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan evaluasi model yang keempat ini lebih banyak menekankan pada penggunaan *Judgement*. Perbedaan penelitian (akademik) dengan penelitian evaluasi adalah bahwa pada evaluasi diperlukan adanya kriteria. Berdasarkan kriteria, tersebut bisa memberikan nilai terhadap objek yang dievaluasinya. Evaluasi program mempunyai fungsi menyediakan informasi yang digunakan untuk membantu pembuatan keputusan/penyusunan kebijakan maupun penyusunan program selanjutnya agar keputusan yang dihasilkan menjadi keputusan yang baik. Asumsi yang dibangun dalam pemikiran ini bahwa keputusan yang baik membutuhkan informasi yang lengkap, akurat, dan dapat dipercaya (*valid*, dan *reliable*) serta tepat waktu (*timely*). Informasi yang lengkap mempunyai makna bahwa informasi yang dihasilkan dari evaluasi mencakup komponen-komponen program secara lengkap. Informasi yang akurat mempunyai makna bahwa informasi merupakan informasi yang tepat menggambarkan keadaan

yang sebenarnya dari objek evaluasi dan dapat dipercaya.

Untuk mendapatkan informasi yang akurat dibutuhkan instrumen pengumpulan data yang *valid* dan *reliable*. Informasi yang tepat waktu mempunyai makna bahwa informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi dapat disampaikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, untuk mengambil keputusan, menyusun kebijakan maupun menyusun program selanjutnya. Syarat ketepatan waktu ini berkaitan dengan kepraktisan dalam pengumpulan, pengolahan, dan penyajian/pelaporan informasi. Hal ini membutuhkan panduan evaluasi yang sederhana dan mudah dipahami oleh pemakai model evaluasi, sehingga proses evaluasi dapat berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan kelengkapan dan keakuratan informasi. Jadi model evaluasi program yang baik adalah: (1) bersifat komprehensif, menyangkut semua komponen/subkomponen program, baik input, proses, *output*, dan *outcome*, (2) praktis, yaitu mudah dalam penggunaan dan pengelolaan, (3) ekonomis, yaitu membutuhkan biaya relatif sedikit, demikian halnya dengan waktu dan tenaga, (4) Instrumen pengumpulan data valid dan reliabel.⁶

B. METODOLOGI

Pendekatan Evaluasi

Evaluasi ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tujuan menjelaskan fenomena nyata dari implementasi program 5000 doktor yang dilaksanakan Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama. Pendekatan kualitatif dalam konteks evaluasi kebijakan formal (*formal policy evaluation* (dunn, 2000) atau *formal policy impacts* (dye, 1976) menekankan pada kondisi obyek yang alamiah dan analisis data bersifat induktif. Untuk itu diperlukan kecermatan dan multi-metode dari peneliti dalam menghadapi obyek yang bervariasi sehingga bisa tertangkap mulai dari situasi, hakekat masalah, konteks persoalan, dan solusi masalah secara *bottom up* (lasswell, 2008). Dengan formulasi seperti ini, evaluasi ini sebenarnya merupakan evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilakukan pada saat program sedang berjalan dan

⁵Agustanico Dwi Muryadi. "Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi." *Jurnal ilmiah penjas* vol.3, no.1 (2017). utp.ac.id/index.php/JIP/article/download/538/522. /10/2018.

⁶ Model-Model Evaluasi Program/Teknologi Pendidikan. <https://tepens06.wordpress.com/2012/10/02/model-model-evaluasi-program>.

dimaksudkan untuk menemukan alternatif-alternatif perbaikan.

Tempat dan Waktu

Penelitian ini dilaksanakan di UPI Bandung sebagai salah satu penyelenggara program beasiswa 5000 doktor di dalam negeri. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Nopember 2018.

Informan

Karena sifatnya induktif, maka informan utama dari evaluasi adalah mahasiswa peserta program 5000 doktor itu sendiri. Kedua, pihak perguruan tinggi yang terdiri dari profesor pendamping, manajemen dan fakultas. Sumber data juga diambil dari unsur-unsur pengelola dan penyelenggara program beasiswa 5000 doktor di Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (DIKTIS).

Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi berbentuk daftar isian, panduan wawancara, dan panduan Focuss Group Discussion (FGD). Daftar isian digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif baik data primer maupun skunder yang berkenaan dengan peserta program maupun dokumen. FGD digunakan untuk menjaring data dari pelaku kunci/pemegang kebijakan yang terkait langsung dengan pelaksanaan program 5000 doktor dan atau pada peserta program, dan wawancara mendalam yang digunakan untuk mendalami permasalahan spesifik di lapangan, khususnya pada peserta program dan perguruan tinggi pelaksana program.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam evaluasi ini meliputi pengisian daftar pertanyaan, FGD, dan wawancara. FGD dilakukan sebelum evaluasi dan pada waktu evaluasi dilaksanakan. FGD sebelum evaluasi, dilakukan sebagai upaya pengumpulan data awal, yang diikuti oleh dua pihak yaitu *project management unit* (PMU) dan subdit kelembagaan Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Sedangkan FGD pada waktu evaluasi dilaksanakan, diorientasikan untuk memperoleh data secara komprehensif dari penerima program (mahasiswa peserta program 5000 doktor) dan perguruan tinggi pelaksana program. Untuk menggali persoalan yang sifatnya spesifik, dilakukan melalui wawancara mendalam baik kepada peserta program maupun perguruan

tinggi pelaksana program.

Analisis Data

Data yang terkumpul terlebih dahulu dilakukan pengklasifikasian, kemudian dideskripsikan menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

C. GAMBARAN UMUM PERGURUAN TINGGI

Universitas Pendidikan Indonesia

Berdasarkan profil Universitas Pendidikan Indonesia, UPI adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang kampus utamanya berkedudukan di Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia. Sejak tahun 2012, UPI berstatus sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah (PTP). Berubah dari status sebelumnya sebagai perguruan tinggi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

UPI adalah perguruan tinggi yang menganut sistem multi kampus yaitu dengan 6 kampus yang tersebar di dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Banten. Kampus utama UPI berlokasi di jalan Setiabudi 229, Bandung. Sedangkan kampus lainnya berlokasi di Cibiru, Tasikmalaya, Sumedang, Purwakarta, dan Serang.

Universitas Pendidikan Indonesia didirikan pada tanggal 20 Oktober 1954 di Bandung, diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Pengajaran Mr. Muhammad Yamin. Semula bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG), didirikan dengan latar belakang sejarah pertumbuhan bangsa, yang menyadari bahwa upaya mendidik dan mencerdaskan bangsa merupakan bagian penting dalam mengisi kemerdekaan. Beberapa alasan didirikannya ptpg antara lain: pertama, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, bangsa Indonesia sangat haus pendidikan. Kedua, perlunya disiapkan guru yang bermutu dan bertaraf universitas untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang akan merintis terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Gedung utama UPI bermula dari puing sebuah villa yang bernama Villa Isola, merupakan gedung bekas peninggalan masa sebelum perang dunia II (pada masa perjuangan melawan penjajah, gedung ini pernah dijadikan markas para pejuang kemerdekaan). Puing puing itu dibangun kembali dan kemudian menjelma menjadi sebuah gedung bernama Bumi Siliwangi yang megah dengan gaya arsitekturnya yang asli.

Berikut ini adalah daftar mereka yang pernah menjabat sebagai pimpinan UPI, dari mulai dekan PTPG Bandung, dekan FKIP Unpad, dan rektor IKIP Bandung, hingga berubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI).

1. Prof. Dr. Sadarjoen Siswomartojo (1954-1961) (Dekan Ptpg Bandung Dan Dekan FKIP Unpad 1957-1961)
2. M.A. Gazali Soerianatasoedjana Dan Prof. Drs. Harsojo (1961-1963) Dekan FKIP Unpad A Dan B
3. Prof. Dr. H. Roeslan Abdulgani (1964-1966) (Rektor Pertama Ikip Bandung)
4. Prof. Dr. H. Achmad Sanusi, S.H., M.Pa. (1966-1971)
5. Prof. Dr. Garnadi Prawirasudirdjo, M.Sc. (1971-1978)
6. Prof. Drs. H.M. Nu'man Somantri, M.Sc. (1978-1987)
7. Prof. Drs. H. Mas Abdul Kodir, M.Sc. (1987-1995)
8. Prof. Dr. H.M. Fakry Gaffar, M.Ed. (1995-2005) (Rektor Pertama Saat Berubah Menjadi UPI)
9. Prof. Dr. H. Sunaryo Kartadinata, M.Pd. (2005-2015)
10. Prof. H. Furqon, M.A., Ph.D. (2015-2017)^[23] (Wafat Saat Menjabat)
11. Prof. Dr. H. R. Asep Kadarohman, M.Si. (2017-Sekarang) (Rektor Paw 2015-2020).

UPI memiliki 8 fakultas, yaitu: Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP), Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS), Fakultas Pendidikan Bahasa dan Sastra (FPBS), Fakultas Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FPMIPA), Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (FPTK), Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan (FPOK), Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis (FPEB), dan Fakultas Pendidikan Seni dan Desain (FPDS); 5 Kampus Daerah (Kampus UPI Cibiru, Kampus UPI Tasikmalaya, Kampus UPI Sumedang, Kampus UPI Purwakarta dan Kampus UPI Serang); Sekolah Pascasarjana (SPS) dan Sekolah Laboratorium atau *Lab School UPI*.

Seiring dengan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan tinggi yang memberikan perluasan mandat bagi lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) yang harus mampu mengikuti tuntutan perubahan serta mengantisipasi segala kemungkinan dimasa

datang, IKIP Bandung diubah menjadi Universitas Pendidikan Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 124 Tahun 1999 Tertanggal 7 Oktober 1999.

Untuk meningkatkan mutu tenaga pengajar, pada tahun 1970 IKIP Bandung membuka program pos doktoral melalui pembentukan Lembaga Pendidikan Pos Doktoral (LPPD) PPs yang mengelola program S2 dan S3. Pada Tahun 1976 LPPD diubah namanya menjadi Sekolah Pascasarjana, pada tahun 1981 berubah menjadi fakultas pasca sarjana dan tahun 1991 menjadi program Pascasarjana (PPs) dan berubah lagi menjadi Sekolah Pascasarjana (SPs) pada tahun 2000.

Sekolah Pascasarjana UPI

Berdasarkan profil UPI (2018) setelah lebih dari tiga setengah dasawarsa mengabdikan kepada masyarakat ilmu, Sekolah Pascasarjana (SPs) semakin memantapkan diri menjadi salah satu kebanggaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), baik sebagai pusat unggulan maupun sebagai pembawa bendera mutu akademik universitas. SPs UPI terus memacu diri untuk tetap menjadi salah satu yang terbaik dalam ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan ilmu-ilmu lainnya.

Berbeda dengan SPs yang ada tersebar di berbagai tempat di Indonesia, SPs UPI menyajikan kekhasan yang tidak dimiliki oleh lembaga lain, yakni kekokohan pijakannya pada disiplin ilmu pendidikan, dan pendidikan disiplin ilmu. Namun, sesuai dengan mandat yang dimilikinya, universitas ini mengembangkan pula program-program studi yang tidak berorientasi kepada pengembangan ilmu-ilmu pendidikan, melainkan diarahkan untuk mengembangkan disiplin ilmu lainnya. Ini adalah wujud komitmen tinggi dari pihak SPs dan pihak universitas untuk tetap dapat melayani warga masyarakat keilmuan secara lebih luas.

SPs UPI berpegang teguh pada *khittahnya* untuk menjadi lembaga unggulan dalam pengembangan dan pemeliharaan ilmu pendidikan dan pendidikan disiplin ilmu serta disiplin ilmu lainnya.

Untuk menjaga pelayanan prima kepada mahasiswa, manajemen SPs UPI dikelola secara profesional yang terbukti dengan diperolehnya sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 sejak tahun 2011.

Untuk meningkatkan mutu dan perluasan pengakuan Internasional, SPs UPI pun melakukan *benchmarking* dengan perguruan tinggi kelas dunia. Pengakuan Internasional pun diraih, misalnya dengan diperolehnya sertifikasi Internasional dari *Asean University Network-Quality Assurance (Aun-Qa)* untuk program studi pendidikan IPA.

Sekolah Pascasarjana adalah Unit Pelaksana Akademik yang berfungsi menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan Program Pendidikan Magister, Program Doktor, Program Magister Terapan, Program Doktor Terapan, dan program lain sesuai dengan kewenangannya.

Struktur Organisasi SPs UPI

Direktur SPs UPI: Prof. H. Yaya S. Kusumah, M.Sc., Ph.D; Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan: Prof. Dr. Anna Permanasari, M.Si; Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Sumber Daya: Prof. Dr. H. Disman, M.Si; Kepala Bagian Tata Usaha: Dadang Hidayat, S.Pd; Kepala Sub-Bagian Akademik dan Kemahasiswaan: Yedi Rudiawan, S.Sos; Kepala Sub-Bagian Keuangan dan Kepegawaian: H. Rukmana, S.Pd dan Kepala Sub-Bagian Umum dan Perlengkapan: Margono, S.Pd.

Visi, Misi dan Tujuan SPs UPI

Visi: mendapat pengakuan yang lebih luas di tingkat internasional dalam penyelenggaraan pendidikan pascasarjana bidang ilmu kependidikan dan pendidikan disiplin ilmu menuju kepeloporan dan keunggulan UPI tahun 2020.

Misi: 1) menyelenggarakan pendidikan magister dan doktor yang bermutu untuk menghasilkan lulusan yang menguasai konsep dan wawasan yang luas di bidangnya, mandiri, berkepribadian, dan berdaya saing tinggi pada tingkat nasional dan internasional; 2) menyelenggarakan penelitian yang bermutu dan produktif yang berorientasi pada publikasi ilmiah nasional dan internasional; 3) menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat; memperluas jejaring dengan masyarakat ilmiah nasional dan 4) menyelenggarakan manajemen yang mendukung terciptanya lingkungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bertaraf internasional.

Tujuan: 1) menghasilkan magister dan doktor

dalam ilmu pendidikan, pendidikan disiplin ilmu, dan ilmu lainnya yang menguasai konsep dan memiliki wawasan yang luas dalam bidangnya serta memiliki kepribadian dan daya saing yang dapat ditampilkan pada tingkat nasional maupun internasional; 2) menghasilkan karya-karya penelitian yang bermutu dan dipublikasikan nasional maupun internasional; 3) menghasilkan karya-karya pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat; 4) meningkatkan kapasitas program dan reputasi akademik di tingkat nasional dan internasional dan 5) meningkatkan kapasitas manajemen dan sumber daya yang mendukung lingkungan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu.

Program Studi SPs UPI

Jumlah prodi di sekolah PPs UPI untuk program S2 dan S3 seluruhnya berjumlah 33 program studi. Untuk S3 sebanyak 21 program studi, yaitu:

1. Administrasi Pendidikan (S2/S3)
2. Bimbingan dan Konseling (S2/S3)
3. Pengembangan Kurikulum (S2/S3)
4. Pendidikan Umum Dan Karakter (S2/S3)
5. Pendidikan Khusus (S2/S3)
6. Pendidikan Masyarakat (S2/S3)
7. Pendidikan Dasar (S2/S3)
8. Pendidikan Anak Usia Dini (S2)
9. Pedagogik (S2)
10. Psikologi Pendidikan (S2)
11. Pendidikan IPS (S2/S3)
12. Manajemen (S2/S3)
13. Pendidikan Kewarganegaraan (S2/S3)
14. Pendidikan Sejarah (S2/S3)
15. Pendidikan Geografi (S2/S3)
16. Pendidikan Ekonomi (S2/S3)
17. Pendidikan Sosiologi (S2)
18. Linguistik (S2/S3)
19. Pendidikan Bahasa Indonesia (S2/S3)
20. Pendidikan Bahasa Inggris (S2/S3)
21. Pendidikan Bahasa Jepang (S2)
22. Pendidikan Bahasa Perancis (S2)
23. Pendidikan Bahasa Arab (S2)
24. Pendidikan Bahasa Dan Budaya Sunda (S2)
25. Pendidikan Seni (S2/S3)
26. Pendidikan IPA (S2/S3)
27. Pendidikan Matematika (S2/S3)
28. Pendidikan Fisika (S2)
29. Pendidikan Kimia (S2)
30. Pendidikan Biologi (S2)

31. Pendidikan Teknologi & Kejuruan (S2/S3)
32. Pendidikan Olahraga (S2/S3)
33. Pendidikan Agama Islam (S2)

Berdasarkan informasi Disman (2018) dari 21 (dua puluh satu) program S3 yang menjadi Prodi Unggulan SPs UPI berdasarkan besarnya jumlah mahasiswa adalah Prodi Bimbingan dan Konseling (BK), Prodi Pendidikan Dasar, Prodi Pendidikan Umum, Prodi Pengembangan Kurikulum, Prodi Matematika, Prodi IPA, Prodi Administrasi Pendidikan, Prodi Ekonomi, Prodi Manajemen dan Prodi Sejarah.

Seiring dengan program studi yang dipilih oleh mahasiswa program 5000 doktor hampir seluruh mahasiswa penerima beasiswa memilih prodi unggulan baik pada angkatan 2015, 2016, 2017 maupun angkatan 2018.

Sumber Daya Manusia Dosen

Jumlah dosen di SPs UPI berjumlah 470 orang, sedangkan keadaan mahasiswa aktif per Agustus 2018 sebanyak 4.301 mahasiswa. Berdasarkan keadaan tersebut, maka rasio dosen dengan mahasiswa adalah 1 : 10. Dengan demikian jumlah dosen yang tersedia dapat dikategorikan sangat memadai. Artinya seorang dosen di SPs UPI melayani 10 orang mahasiswa. Dengan jumlah layanan sebesar itu, maka beban dosen tidak hanya dalam pengajaran, tetapi masih bisa untuk melakukan kegiatan penelitian, publikasi, dan pengembangan dirinya, seperti mengikuti seminar, dan lain sebagainya.

Dalam hal beban tugas dosen, SPs UPI telah menetapkan batasan berdasarkan SNPT, atau statuta UPI:

- (1) Dosen yang memegang jabatan struktural setingkat Dekan/Direktur ke atas mengajar maksimal 3 mata kuliah atau rombongan belajar;
- (2) Dosen yang memegang jabatan struktural setingkat Wakil Dekan/Wakil Direktur mengajar maksimal 4 mata kuliah atau rombongan belajar;
- (3) Dosen yang menjabat sebagai ketua prodi mengajar maksimal 6 matakuliah atau rombongan belajar;
- (4) Dosen yang tidak memegang jabatan struktural mengajar maksimal 10 matakuliah atau rombongan belajar; dan

- (5) Dosen pensiun atau emeritus mengajar maksimal 8 matakuliah atau rombongan belajar.

Kualifikasi dosen SPs UPI terdiri atas 470 orang yang telah berpendidikan (100%). Dari 470 dosen tersebut, terdiri dari 96 guru besar (20%).

Upaya yang dilakukan oleh SPs dalam pengembangan karir dosen tetap adalah sebagai berikut:

- Memberikan fasilitas (pendanaan) kepada prodi dan dosen yang mengikuti seminar, workshop, konferensi, penulisan buku, dan penciptaan karya inovatif, serta publikasi ilmiah yang berkaitan dengan pengembangan keilmuan dan pengembangan jejaring keilmuan pada tingkat nasional maupun internasional.
- Disediakan hibah penelitian dan hibah pengabdian kepada masyarakat yang dapat diakses oleh dosen.
- Membuat batasan maksimal beban mengajar dosen dalam satu semester, sehingga memberi kesempatan kepada dosen untuk melakukan kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- Membuat batasan maksimal jumlah bimbingan, agar dosen dapat melaksanakan tridarma PT dengan efektif.
- Membuat penilaian kinerja dosen (angket kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen) oleh mahasiswa. Hasil penilaian disampaikan ke prodi sebagai bahan pertimbangan pengembangan dan keberlangsungan tugas dosen.
- Memfasilitasi dosen untuk pelatihan-pelatihan dalam berbagai *event* yang relevan untuk meningkatkan kompetensi dosen, seperti pelatihan IT, penulisan artikel ilmiah internasional, supervisor, dan metode riset.

Tenaga Kependidikan

Jumlah tenaga kependidikan di SPs UPI telah mampu mengakomodasi kebutuhan pelayanan akademik mahasiswa dan dosen. Sebanyak 49 tenaga administratif yang ada (yang terbanyak dari bagian akademik) melayani 4.301 mahasiswa (1 orang tenaga administratif melayani 88 orang mahasiswa). Sementara dalam memberikan layanan kepada dosen yang berjumlah 470 dosen, maka 1 orang tenaga administratif melayani 10

orang dosen. Layanan pada program studi, 1 orang tenaga administratif melayani 1-3 program studi.

Tabel berikut menggambarkan jumlah tenaga kependidikan berdasarkan jenjang pendidikan.

Tabel: 1
Tenaga Kependidikan di SPs UPI

Jenis Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Kependidikan Di Sekolah Pascasarjana Dengan Pendidikan Terakhir										To-Tal
	S3	S2	S1	D4	D3	D2	D1	Sma/Smk	Smp	Sd	
Tenaga Kependidikan: Administratif, Pramu kantor dan Sopir		3	21		4	-	-	17	3	1	49

Sumber: Profil Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2018

Untuk meningkatkan kinerja, berbagai upaya telah dilakukan SPs UPI terutama untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan. Beberapa kegiatan peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga kependidikan yang telah dilaksanakan adalah:

- Pelatihan Sistem Informasi (SIK, *E-Planning*, Simak-BMN, Simpeg) semua Staf.
- Pelatihan Penyusunan RKAT setiap awal tahun anggaran untuk semua staf.
- Pelatihan ISO 9001: 2015 untuk semua staf akademik.
- Pelatihan Bahasa Inggris untuk semua staf akademik.
- Pelatihan Pengelolaan *E-Journal* untuk tim pengelola jurnal
- Pelatihan Penyusunan SKP untuk semua staf akademik.
- Pelatihan Kearsipan untuk tenaga administrasi
- Workshop Peningkatan Mutu Layanan Administrasi Akademik untuk staf akademik
- Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk staf umum dan perlengkapan.
- Studi lanjut ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi untuk beberapa staf (Sudah ada 5 orang).

Pola Kerjasama yang Dilakukan

Kebijakan dan upaya yang dilakukan oleh SPs UPI dalam menjamin dan meningkatkan mutu,

relevansi, produktivitas, dan keberlanjutan kerjasama dengan instansi lain dengan memperhatikan:

(1) Mutu kegiatan kerjasama

SPs UPI dalam menyelenggarakan kerjasama yang dituangkan dalam moa baik dengan instansi dalam negeri dan luar negeri ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan yang tertuang di dalam nota kerjasama. Misalnya penyelenggaraan pendidikan bagi guru atau dosen dari pemprov atau pemda di wilayah Indonesia, kerjasama penyelenggaraan pendidikan bagi dosen Philippine Normal University (PNU), dan kolaborasi penelitian dengan institusi nasional dan internasional.

(2) Relevansi kegiatan kerjasama

Kerjasama yang dilakukan oleh SPs UPI dengan instansi di dalam dan di luar negeri berprinsip saling menghargai, menguntungkan, kejelasan hasil, kemitraan, kesetaraan dan kebersamaan serta menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Contoh kegiatan kerjasama SPs UPI yang sesuai dengan kebutuhan institusi mitra antara lain: kerjasama penyelenggaraan pendidikan S2 dan S3 pada program studi sesuai dengan kebutuhan institusi terkait, kerjasama penelitian pada bidang penelitian yang diperkuat SDM yang memiliki kepakaran sesuai dengan bidang ilmu dan tema penelitian yang terkait.

(3) Produktivitas kegiatan kerjasama

- o Mendorong dan memfasilitasi prodi untuk melaksanakan dan mengembangkan kerjasama penyelenggaraan pendidikan dengan dukungan beasiswa dari berbagai instansi seperti Kemenristekdikti, Kementerian Agama, pemerintahan provinsi, pemerintah daerah, dan PMPTK/LPMP.
- o Mendorong dan memfasilitasi prodi untuk mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dengan lembaga di luar negeri (seperti perguruan tinggi) atau lembaga penyandang data untuk bantuan pendidikan misalnya Ausaid.

(4) Keberlanjutan kegiatan kerjasama

SPs UPI mendorong keberlanjutan kerjasama baik dengan instansi dalam dan luar negeri yang telah berlangsung dengan melaksanakan program kegiatan yang telah disepakati. Selain itu SPs UPI melakukan perpanjangan MoU dengan beberapa

institusi dalam negeri dan luar negeri serta menginisiasi MoU baru dengan institusi dalam maupun luar negeri.

Terdapat 29 kerjasama dalam negeri yang telah disepakati terkait dengan penyelenggaraan akademik di SPs UPI, dengan berbagai instansi, pada umumnya bentuk kerjasamanya adalah penyelenggaraan pendidikan S2, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kelemahan dan kekuatan mahasiswa penerima beasiswa dan penyelenggara program

Kelemahan:

1. Mahasiswa program 5000 doktor yang sudah dinyatakan lulus seleksi dan telah memenuhi persyaratan administrasi tidak disetujui beasiswanya oleh Direktorat Pendidikan Islam mengingat prodi yang dipilih tidak dibuka oleh program beasiswa 5000 doktor.
2. Dalam SK No. 226 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa untuk calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam pada bab III tercantum biaya buku, riset, disertasi, transportasi domisili, batas waktu pemberian beasiswa. Selanjutnya pada bab IV poin b beasiswa program doktor diberikan 8 semester atau 4 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Namun kenyataannya, biaya buku, riset, disertasi, transportasi, domisili tidak diberikan dan batas waktu pemberian beasiswa hanya 6 semester.
3. Dijanjikan mahasiswa yang memiliki IPK terbaik tiga orang dalam setiap angkatan dapat mengikuti program *sandwich* kenyataannya tidak ada tindak lanjut.
4. Ada perbedaan pembiayaan beasiswa dalam dan luar negeri. Untuk beasiswa luar negeri diberikan pembiayaan penuh yang meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya riset, biaya penulisan disertasi. Sementara beasiswa dalam negeri hanya diberikan biaya pendidikan dan biaya hidup saja. Sedangkan untuk pembiayaan lainnya tidak ada, termasuk biaya ujian tertutup dan terbuka, dan promotor dari luar dan biaya publikasi jurnal internasional terindeks scopus.
5. Mahasiswa program 5000 doktor yang telah mencapai 6 semester belum selesai studinya maka beasiswanya diberhentikan, selanjutnya biaya sendiri. Mereka akhirnya mengambil

cuti studi. Ada 4 (empat) orang pada angkatan 2015 yang yaitu Mario Emilzoli Prodi Pengembangan Kurikulum, Irwan Suryadi Prodi Administrasi Pendidikan, Govar Arian Laleno Prodi Sejarah dan Khairunnisa Prodi Matematika.

6. Mahasiswa program 5000 doktor tahun 2015 dengan latar belakang pendidikan non pendidikan wajib mengikuti *anvullent* sebanyak 12 sks. Bagi mahasiswa yang lulusan diluar UPI, UNY, Unesa, harus menambah 2 mata kuliah dengan bobot 5 sks.
7. Calon mahasiswa program 5000 doktor yang telah dinyatakan lulus ujian seleksi UPI belum dinyatakan lulus dari Kementerian Agama mengingat harus lulus wawancara yang diselenggarakan oleh Direktorat Diktis.
8. Pengelola program 5000 doktor UPI terlambat menerima informasi terhadap pelaksanaan seleksi program mengingat pihak Direktorat Diktis Kemenag tidak memberitahu dan tidak diberitahu berapa jumlah quotanya.
9. Penyelenggara program 5000 doktor di SPs UPI tidak memiliki pedoman beasiswa 5000 doktor yang diterbitkan oleh Direktorat Diktis.
10. Ada kesulitan melakukan pembinaan kepada mahasiswa program 5000 doktor karena MoU antara Direktorat Diktis Kemenag dengan mahasiswa beasiswa program 5000 doktor tidak diserahkan kepada penyelenggara program.
11. Progres mahasiswa program 5000 doktor secara *online* belum ada dalam artian Direktorat Diktis Kemenag belum membuka portal untuk laporan kemajuan studi mahasiswa program ini.

Kekuatan:

1. Rata rata mahasiswa penerima program 5000 doktor memiliki IPK di atas rata rata (diatas 3,33 – 3,95), penuh semangat dan aktif dalam mengikuti perkuliahan.
2. Prodi yang diambil mahasiswa program 5000 doktor sudah sesuai dengan latar belakang pendidikan S2 sebelumnya dan sesuai dengan minatnya.
3. Adanya pembinaan dari penyelenggara 5000 doktor baik dari pengelola pusat berupa monitoring maupun pelaporan perkembangan studi mahasiswa.
4. Pencairan beasiswa tepat waktu dengan nominal yang sesuai tidak ada pemotongan.

5. UPI merupakan PTN rangking 13; prodi di SPs UPI seluruhnya terakreditasi "A" dan terakreditasi internasional. SPs UPI telah menerapkan model manajemen yang berbasis teknologi modern (IT dan Online).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Temuan Penelitian

Profil Mahasiswa

Pada bagian ini akan disampaikan gambaran umum mahasiswa penerima beasiswa program 5000 doktor Kementerian Agama di SPs UPI pada empat angkatan, yaitu tahun 2015, 2016, 2017 dan 2018, yang mencakup aspek latar belakang pendidikan, kesesuaian program studi yang dipilih dan prodi yang dipilih merupakan prodi unggulan atau tidak. Untuk menjelaskan ketiga aspek tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

Latar belakang mahasiswa penerima beasiswa 5000 doktor sebelum mengikuti program S3 di SPs UPI pada 4 angkatan yaitu tahun 2015, 2016, 2017, dan 2018.

Pada tahun 2015 jumlah mahasiswa penerima beasiswa seluruhnya 15 orang. Mereka berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi yaitu UIN Sunan Gunung Jati Bandung, SSTAI Siliwangi Cimahi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, IAIN Pontianak, IAIN Imam Bonjol Padang, IAIN Ambon, IAIN Palu, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta STIT MU Gumawang, STAI Sayid Sabiq Indramayu IAIN Suryalaya dan IAIN Sultan Amai Gorontalo. Latar belakang pendidikan mereka seluruhnya S2 dari berbagai program studi. Pada angkatan pertama ini sudah dapat meluluskan satu orang yaitu Rozi Fitriza dengan predikat *cum laude*. Sedangkan yang lain masih aktif menyelesaikan desertasinya pada tahap penyusunan instrument pengumpulan data meskipun ada 4 (empat) orang mahasiswa yang cuti karena beasiswanya berakhir yaitu Mario Emilzoli dosen STAI Siliwangi Cimahi, Irwan Suryadi dosen STIT MU Gumawang, Govar Arian Laleno dosen IAIN Sultan Amai Gorontalo dan Khairunnisa dosen UIN Syarif Hidayatullah.

Pada tahun 2016 jumlah mahasiswa penerima beasiswa seluruhnya 10 orang. Mereka berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi yaitu STIT Ahlussunah Bukit Tinggi, STAIN Curup Bengkulu, STAI Airmolek Padang, IAI Shalahudin al Ayyubi, IAIN Salatiga, IAIN Imam Nonjol padang, IAIS Syekh Nurjati Cirebon, STAI

Watampone, STIT Pematang dan IAIN Raden Intan Lampung. Latar belakang pendidikan mereka seluruhnya S2 dari berbagai program studi. Pada angkatan kedua seluruhnya masih aktif posisinya sedang menyelesaikan proposal penelitian.

Pada tahun 2017 jumlah mahasiswa penerima beasiswa seluruhnya 8 orang. Mereka berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi yaitu UIN Raden Fatah Palembang, IAIN Padang Sidempuan, UIN Sumatera Utara, STAI Al Musaddadiyah Garut, IAI Ngawi, IAI Darusalam, dan Sekolah Tinggi Ilmu Bahasa Arab. Mereka berlatar belakang S2 dari berbagai program studi. Pada angkatan ketiga seluruhnya masih aktif mengikuti perkuliahan.

Pada tahun 2018 jumlah mahasiswa penerima beasiswa seluruhnya 14 orang. Mereka sebagian besar berprofesi sebagai dosen di berbagai perguruan tinggi yaitu IAIN Bukit Tinggi, IAIN Salatiga, UIN Riau, UIN Ar Raniry Banda Aceh, IAIN Tulungagung, UIN SGD, IAIN Langsa, UIN Mataram, IAIN Ternate dan PTIQ Jakarta. Terdapat 2 orang sebagai pegawai kantor di Kementerian Agama Pusat dan kantor Kementerian Agama di Kab. Pidie. Mereka berlatar belakang S2 dari berbagai program studi. Pada angkatan ketiga seluruhnya masih aktif mengikuti perkuliahan.

Program Studi yang Diambil Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan Sebelumnya

Program studi yang diambil mahasiswa di SPs UPI pada umumnya telah sesuai dengan latar belakang prodi S2 sebelumnya. Hanya sebagian kecil saja yang tidak sesuai, untuk angkatan pertama 2015 ada satu orang berlatar belakang pendidikan S2 Prodi Pendidikan Bahasa Arab mengambil S3 Pendidikan Umum, yaitu Sitti Hasnah dosen IAIN Palu. Lalu pada angkatan ketiga 2017 terdapat satu orang berlatar belakang pendidikan S2 Antropologi mengambil S3 pendidikan umum, yaitu Nahriya Fata dosen IAIN Padang Sidempuan. Sedangkan untuk angkatan kedua tahun 2016 dan angkatan keempat tahun 2018 seluruhnya telah sesuai dengan latar belakang S2 dengan pilihan prodi S3.

Program Studi yang Diambil

Program studi yang diambil oleh para mahasiswa S3 di SPs UPI bandung dalam empat angkatan seluruhnya merupakan program unggulan yaitu prodi bimbingan konseling,

pendidikan umum, pendidikan dasar, pendidikan matematika, pendidikan ekonomi, pendidikan IPA, pendidikan matematika, manajemen, pendidikan sejarah, administrasi pendidikan dan pendidikan masyarakat. Program studi unggulan tersebut berdasarkan ketentuan program studi yang dibuka oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam dan minat mahasiswa.

Data Peserta Program dari Tahun 2015 sampai dengan 2018

Jumlah mahasiswa penerima beasiswa program 5000 doktor di SPs UPI seluruhnya berjumlah 47 orang, terdiri dari angkatan 2015 sebanyak 15 orang, angkatan 2016 sebanyak 10 orang, angkatan 2017 sebanyak 8 orang, dan angkatan 2018 sebanyak 14 orang.

Mahasiswa penerima beasiswa 5000 doktor Kementerian Agama pada SPs UPI berprofesi sebagai dosen dari berbagai perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia baik negeri maupun swasta hanya ada dua orang sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama. Status kepegawaian mereka 36 PNS dan 11 non PNS dalam kondisi masih aktif meskipun ada 4 (empat) orang mahasiswa angkatan 2015 yang menyatakan cuti karena beasiswanya telah berakhir.

Organisasi penyelenggara program beasiswa

Penyelenggaraan program beasiswa 5000 doktor di UPI dilaksanakan melalui kerjasama antara Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan UPI. Pengelola program oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama dalam hal ini dilaksanakan oleh Subdirektorat Ketenagaan. Sedangkan penyelenggaraan program oleh SPs UPI.

Prosedur penetapan SPs UPI sebagai penyelenggara program 5000 doktor didasarkan kepada terpenuhinya persyaratan baik umum maupun khusus. Persyaratan umum bahwa UPI memiliki program studi sesuai dengan kebutuhan program beasiswa dan memiliki status perguruan tinggi negeri. Sedangkan persyaratan secara khusus memiliki izin dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi; memiliki sertifikat dari lembaga penjaminan mutu (ISO); memiliki dosen yang mencukupi baik secara kualitas maupun kuantitas; memiliki sarana penyelenggaraan

program yang memadai berstandar nasional, seperti ruang belajar, media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium dll. dan memiliki pengalaman menyelenggarakan program beasiswa.

Hak dan kewajiban SPs UPI sebagai penyelenggara program. Hak SPs UPI sebagai penyelenggara program beasiswa adalah 1) memperoleh petunjuk teknik penyelenggaraan program beasiswa; 2) menerima daftar penerima beasiswa yang telah ditetapkan berdasarkan SK Dirjen Pendidikan Islam; 3) menerima dana penyelenggaraan program beasiswa sesuai perjanjian kerjasama; 4) dapat berkonsultasi dengan pengelola program beasiswa dalam hal ini Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam terkait pelaksanaan program beasiswa. Adapun kewajiban SPs UPI dalam program beasiswa adalah: 1) menandatangani perjanjian kerjasama program 5000 doktor; 2) menerima berkas pendaftaran calon penerima beasiswa; 3) melakukan seleksi administrasi terhadap berkas yang diterima dari pendaftar; 4) melakukan tes rekrutmen dan seleksi bagi pendaftar; 4) melaporkan pengelolaan program dalam kegiatan monitoring, evaluasi, pembinaan dan penyusunan laporan dan 5) membuat laporan penyelenggaraan program secara tertulis setiap semester dan membuat laporan akhir tahun akademik mengenai perkembangan hasil studi mahasiswa program beasiswa baik secara prestasi akademik, administrasi dan keuangan.⁷

Model Implementasi Program yang Diikuti

Seluruh mahasiswa program beasiswa 5000 doktor kemenag di SPs UPI merupakan beasiswa penuh (*full scholarship*).⁸ Mereka telah lulus persyaratan administrasi dan ujian tertulis dalam bentuk test potensi akademik (TPA) dan bahasa Inggris dengan Toefl 525 dan hasil wawancara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama.

Implementasi Program 5000 Doktor di Perguruan Tinggi

Yang menjadi unggulan SPs UPI sebagai penyelenggara program beasiswa 5000 doktor Kementerian Agama adalah UPI merupakan Perguruan Tinggi Negeri ranking 13 Perguruan

⁷ Dadang Hidayat, Kabag TU SPs UPI, Pengelola Beasiswa 5000 Doktor Kemenag, wawancara tanggal 3 Desember 2018

⁸ Idem.

Tinggi Negeri seluruh Indonesia; program studi di SPs UPI seluruhnya terakreditasi "A" dan terakreditasi internasional. SPs UPI telah menerapkan model manajemen yang berbasis teknologi modern (IT dan *Online*).⁹ dengan berbagai keunggulan tersebut maka Direktorat Pendidikan Islam menetapkan UPI sebagai salah satu penyelenggara program beasiswa 5000 doktor Kementerian Agama.

Prestasi Mahasiswa Berdasarkan PNS dan Non PNS

Hasil prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa program 5000 doktor di SPs UPI didasarkan kepada perbandingan nilai rata-rata IPK. Berdasarkan nilai rata-rata IPK yang diperoleh mahasiswa berdasarkan status kepegawaian menunjukkan bahwa mahasiswa PNS lebih unggul dibandingkan non PNS.

Tabel:2

Nilai Rata-Rata IPK Mahasiswa Penerima Beasiswa Program 5000 Doktor di SPs UPI

No.	Angkatan	Nilai Rata-Rata Ipk	
1	Tahun 2015	3,77	3,67
2	Tahun 2016	3,64	3,52
3	Tahun 2017	3,58	3,56

Hasil prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa Pada tabel di atas rata-rata IPKnya di atas 3,50. Apabila dilihat per angkatan maka angkatan pertama lebih unggul dibandingkan angkatan berikutnya, meskipun nilai rata-rata IPK per angkatan dalam setiap tahunnya semakin menurun. Pada tahun 2015 IPK mahasiswa PNS 3,77 dan Non PNS 3,67. Selanjutnya pada tahun 2016 IPK mahasiswa PNS 3,64 dan non PNS 3,52. sedangkan pada tahun 2017 IPK mahasiswa PNS 3,58 dan non PNS 3,56.

Pembahasan

Program beasiswa 5000 doktor merupakan program pemberian beasiswa S3 di Perguruan Tinggi dalam Negeri (PT-DN) kepada para dosen, laboran dan pustakawan PTKIN, tenaga kependidikan, peneliti, guru dan pengawas madrasah, serta pegawai negeri sipil yang bekerja

pada program pendidikan Islam pada Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama RI untuk meningkatkan mutu, kapabilitas, dan profesionalisme mereka dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi Islam yang berorientasi pada peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing pendidikan.

Relialitas Penyelenggaraan Program Beasiswa

Menurut para penerima beasiswa tujuan umum dan khusus program ini sudah tepat untuk meningkatkan mutu dan kualitas serta profesionalisme dosen karena melalui program ini para dosen memiliki keilmuan dan profesionalisme yang dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam pendidikan nasional dan dapat meningkatkan mutu dosen khususnya dalam menjalankan tridharma perguruan tinggi.

Untuk sasaran peserta program sudah tepat karena program ini diperuntukkan bagi semua dosen baik berstatus PNS maupun non PNS yang berada di lingkungan PTKI dan dosen tetap fakultas agama Islam pada perguruan tinggi umum sehingga semua dosen mendapat kesempatan yang sama untuk meningkatkan mutunya sesuai dengan standar nasional.

Mengenai jenis program beasiswa penuh dan bantuan penyelesaian pendidikan dalam penyelenggaraan program 5000 doktor sudah tepat untuk memenuhi kekurangan tenaga doktor di PTKI dan akan memperkuat para dosen di lingkungan PTKI baik secara jumlah maupun kualitas. Meskipun masih menghadapi kelemahan dalam pemberian program beasiswa penuh hanya 6 (enam) semester ini perlu ditinjau ulang untuk diperpanjang 2 (dua) semester lagi.

Kriteria calon penerima beasiswa, prosedur pengajuan beasiswa dan hak, kewajiban, dan sanksi sudah cukup memadai. Untuk penetapan penerima beasiswa melalui dua tahap dari seleksi berkas administrasi dan ujian tertulis oleh perguruan tinggi dan dilanjutkan wawancara oleh Direktorat Pendidikan Islam dirasa peserta beasiswa sudah sangat tepat.

Dalam pelaksanaan program beasiswa 5000 doktor kementerian agama masih terjadi ketidaksesuaian antara aturan dengan pelaksanaan di lapangan. Dalam SK Nomor 226 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa untuk calon dosen, dosen dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam pada bab III

⁹ Prof. Dr. H. Disman, M.S. Wakil Direktur Bidang Keuangan dan Sumber Daya SPs UPI, Wawancara tanggal 4 Desember 2018.

tercantum biaya penulisan disertasi, batas waktu pemberian beasiswa dan pada bab IV poin b beasiswa program doktor diberikan pada waktu 8 semester atau 4 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Namun dalam kenyataan di lapangan mahasiswa penerima beasiswa hanya diberikan uang semester dan biaya hidup namun tidak diberikan pembiayaan untuk pembelian buku, penulisan disertasi, publikasi (jurnal internasional), dan transportasi bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota. Masih adanya perbedaan pembiayaan beasiswa dalam dan luar negeri. Untuk beasiswa luar negeri diberikan pembiayaan penuh yang meliputi biaya pendidikan, biaya hidup, biaya buku, biaya riset, biaya penulisan disertasi. Sementara beasiswa dalam negeri hanya diberikan biaya pendidikan dan biaya hidup saja sedangkan untuk pembiayaan lainnya tidak ada termasuk biaya ujian tertutup dan terbuka dan promotor dari luar dan biaya publikasi jurnal internasional terindeks scopus. Di sisi lain pemberian beasiswa hanya 6 semester sementara dalam SK No. 226 Tahun 2015 menyebutkan masa pemberian beasiswa selama 8 semester (empat tahun) dan dapat diperpanjang satu tahun. Keadaan tersebut perlu diambil langkah ke depan untuk membantu para mahasiswa penerima beasiswa agar dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya. Juga perlu dipertimbangkan masa pemberian beasiswa 6 semester dapat diperpanjang menjadi 8 semester agar mahasiswa tidak terancam *dropout*.

Bagi penyelenggara beasiswa 5000 doktor di SPs UPI juga mengalami kesulitan dalam penyelenggaraan program ini karena tidak dimilikinya buku pedoman beasiswa 5000 doktor yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Islam sementara dalam pedoman dinyatakan bahwa penyelenggara program memiliki hak untuk mendapat buku pedoman tersebut. Di sisi lain penyelenggara masih menghadapi kesulitan dalam melakukan pembinaan kepada mahasiswa program 5000 doktor karena MoU antara Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan mahasiswa penerima beasiswa program tidak diserahkan kepada penyelenggara program. Agar program ini berjalan dengan baik maka pelaksana program tingkat pusat perlu memenuhi buku pedoman dan menyerahkan fotocopy MoU antara Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan mahasiswa penerima beasiswa

pada penyelenggara program di SPs UPI.

Kegiatan monitoring dan evaluasi program beasiswa oleh pengelola program Direktorat Pendidikan Islam telah dilakukan namun permasalahan yang disampaikan mahasiswa tidak ada solusi dan tindak lanjutnya.

Kebutuhan Keilmuan di PTKI Asal Mahasiswa Peserta Program

Umumnya PTK Negeri maupun swasta masih kekurangan tenaga doktor baik pada program studi agama maupun umum. Oleh sebab itu Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Islam diharapkan untuk tidak membatasi pemberian beasiswa pada prodi-prodi tertentu yang dibuka dalam artian setiap PTKI baik negeri maupun swasta dapat mengajukan prodi S3 sesuai dengan kebutuhan. Yang terpenting para calon peserta penerima beasiswa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan lulus seleksi berkas administrasi dan lulus ujian tertulis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi serta hasil wawancara dengan Direktorat Pendidikan Islam.

Anggaran Beasiswa

Jumlah beasiswa yang diterima oleh para mahasiswa penerima beasiswa masih dirasa kurang memadai karena hanya diberikan biaya pendidikan dan biaya hidup, sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan. Beasiswa tersebut belum termasuk biaya buku, riset, penyusunan disertasi, kursus Toelf, publikasi (jurnal internasional) dan transportasi bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota. Akibatnya ada 4 (empat) orang penerima beasiswa pada angkatan pertama tahun 2015 mengajukan cuti karena alasan keuangan. Hal tersebut perlu diambil kebijakan perpanjangan beasiswa 2 (dua) semester ke depan bila tidak di kuatkan mahasiswa tersebut terancam *dropout*. Untuk pencairan beasiswa dalam setiap bulannya sudah tepat waktu dan sesuai dengan nominalnya tanpa adanya pemotongan. Mahasiswa penerima beasiswa yang sudah dinyatakan lulus baru satu orang angkatan pertama tahun 2015 dengan predikat *cumlaude*. Untuk angkatan pertama umumnya sudah pada tahap studi lapangan dan pengolahan data, angkatan kedua pada tahap ujian proposal dan penyusunan instrument pengumpulan data, angkatan ketiga dan keempat masih mengikuti perkuliahan.

Prestasi Belajar Mahasiswa Berdasarkan Status Kepegawaian

Hasil prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa program 5000 doktor di SPs UPI didasarkan kepada perbandingan nilai rata-rata IPK. Berdasarkan nilai rata-rata IPK yang diperoleh oleh mahasiswa berdasarkan status kepegawaian menunjukkan bahwa mahasiswa PNS lebih unggul dibandingkan Non PNS. Secara umum hasil prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa cukup menggembirakan karena rata-rata IPK yang diperoleh di atas 3,50 meskipun jika dilihat per angkatan prestasinya semakin menurun.

Manfaat Program 5000 Doktor bagi PTKI

Pemberian beasiswa 5000 doktor oleh Direktorat Pendidikan Islam, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama bermanfaat untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Adanya mutu dan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan tersebut maka PTKI dapat menciptakan iklim akademik yang kondusif yang pada akhirnya mampu melahirkan lulusan yang memiliki daya saing dalam dunia kerja. Di sisi lain program beasiswa membantu para dosen dan tenaga kependidikan yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan mendorong semangat belajar mereka.

E. PENUTUP

Kesimpulan

1. Jumlah mahasiswa penerima program beasiswa di SPs UPI seluruhnya 47 orang, terdiri dari angkatan 2015, 15 orang; angkatan 2016, 10 orang; angkatan 2017, 8 orang dan angkatan 2018; 14 orang.
2. Mahasiswa penerima beasiswa umumnya sebagai dosen di PTKI baik negeri maupun swasta yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, hanya dua orang yang berstatus sebagai pegawai di kantor Kementerian Agama (Pusat dan Kabupaten Pidie). Status kepegawaian mereka 36 PNS dan 11 Non PNS dalam kondisi masih aktif meskipun ada 4 (empat) orang mahasiswa angkatan pertama yang menyatakan cuti karena beasiswanya telah berakhir (6 semester). Sedangkan berdasarkan latar belakang pendidikan

dengan prodi yang dipilih tidak linear terjadi pada angkatan pertama, yaitu S2 Bahasa Arab mengambil Prodi S3 Pendidikan Umum.

3. Seluruh mahasiswa penerima beasiswa di SPs UPI merupakan beasiswa penuh (*full scholarship*). Mereka telah lulus persyaratan administrasi dan ujian tertulis dalam bentuk test potensi akademik (TPA) dan bahasa Inggris dengan Toefl 525 dan hasil wawancara yang diselenggarakan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama.
4. Yang menjadi unggulan SPs UPI sebagai penyelenggara program beasiswa 5000 doktor adalah UPI merupakan perguruan tinggi negeri rangking 13 perguruan tinggi negeri seluruh Indonesia; program studi di SPs UPI seluruhnya terakreditasi "A" dan terakreditasi internasional dan SPs UPI telah menerapkan model manajemen yang berbasis teknologi modern (IT dan *online*).
5. Berdasarkan nilai rata-rata IPK mahasiswa PNS lebih unggul dibandingkan Non PNS.
6. Masih terjadi ketidaksesuaian antara dengan pelaksanaan di lapangan, pada SK No. 226 tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa untuk calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi keagamaan Islam pada bab III tercantum biaya penulisan disertasi, batas waktu pemberian beasiswa dan pada bab IV poin b beasiswa program doktor diberikan pada waktu 8 semester atau 4 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Namun dalam kenyataan di lapangan mahasiswa hanya diberikan uang semester dan biaya hidup saja tidak pembiayaan untuk pembelian buku, penulisan disertasi, publikasi (jurnal internasional), dan transportasi bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota. Dan pemberian beasiswa hanya 6 semester.
7. Jumlah beasiswa yang diterima mahasiswa belum memadai karena belum termasuk biaya pembelian buku, riset, penyusunan disertasi, kursus Toefl, publikasi (jurnal internasional) dan transportasi domisili.
8. Penyelenggara program di SPs UPI tidak memiliki pedoman penerima beasiswa 5000 doktor yang diterbitkan oleh Direktorat Diktis dan tidak mendapatkan fotocopy surat perjanjian antara Direktorat Diktis dengan mahasiswa penerima beasiswa.
9. Dijanjikan oleh pengelola program bagi

mahasiswa yang memiliki IPK terbaik tiga orang dalam setiap angkatan dapat mengikuti program *sandwich* kenyataannya tidak ada tindak lanjut.

Rekomendasi

1. Pelaksana program tingkat pusat perlu memenuhi buku pedoman dan menyerahkan fotocopy surat perjanjian antara Direktorat Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan mahasiswa penerima beasiswa kepada penyelenggara program di SPs UPI.
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam tidak membatasi program beasiswa pada prodi-prodi tertentu akan tetapi didasarkan kepada kebutuhan prodi dari masing-masing PTKI.
3. Perlu penambahan nominal beasiswa untuk biaya pembelian buku, riset, penyusunan disertasi, kursus Toelf, transport, domisili, dan publikasi (jurnal internasional).
4. Perlu perpanjangan beasiswa dari 6 (enam) semester menjadi 8 (delapan) semester.
5. Perlu direalisasi program *sandwich* bagi mahasiswa penerima beasiswa yang berprestasi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian tentang evaluasi program 5000 doktor

Kementerian Agama. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Direktur PPs UPI, Wakil Direktur Bidang Akademik SPs UPI, Kepala Bagian SPs UPI dan seluruh pihak yang turut membantu memberikan data dan informasi dalam penelitian ini. Semoga tulisan ini bermanfaat untuk memberikan masukan kepada Direktorat Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama ke depan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin. *Evaluasi Program Pendidikan, Pedoman Teoritis bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Dwi Muryadi, Agustanico. "Model Evaluasi Program dalam Penelitian Evaluasi." *Jurnal Ilmiah Penjas* vol.3, no.1 (2017).
- Darodjat dan Wahyudhiana, M. *Model Evaluasi Program*. [https:// media. Penelitian/media-13569-id-model-evaluasi-program-pendidikan](https://media.Penelitian/media-13569-id-model-evaluasi-program-pendidikan), 30/10/2018.
- Data Penerima Beasiswa 5000 Doktor Kementerian Agama Di SPs UPI.
- Fattah, Nanang. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Model-Model Evaluasi Program/Teknologi Pendidikan*. <https://tepens06.Wordpress.com2012/10/02/model-model-evaluasi-program>.
- Profil Universitas Pendidikan Indonesia, Tahun 2018.
- Profil Sekolah Pascasarjana UPI, Tahun 2018.
- Purwanto., M. Ngalim. 2002. *Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya, 2002.
- Sumardjoko, Bambang. "Faktor-faktor Determinan Peran Dosen dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi." *Cakrawala Pendidikan* Th XXIX, no. 3 (2010).
- Sujana, Djuju. 2006. *Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.

MUHAMMADIYAH AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS: HABITUS, MODALITY AND ARENA

AZAKI KHOIRUDIN*

ABSTRACT

The study sheds light on community development programs conducted by Muhammadiyah. Through practical Social Theory by Pierre Bourdieu, this study finds some points: first, the reasons of Muhammadiyah's community development programs. Second, the models of Muhammadiyah's community development programs. It finds that the programs are conducted due to al-Ma'un theological perspective coined KH. Ahmad Dahlan which is described by Moeslim Abdurrahman as "Transformative Islam" that fights for the weak people. This social theology then leads to social conducted by Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)/Community Development Assembly to combat poverty in the 21st century.

KEY WORDS: Muhammadiyah, al-ma'un theology, Moeslim Abdurrahman, Transformative Islam, community development

MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: HABITUS, MODAL, DAN ARENA

ABSTRAK

Artikel ini akan mengulas paradigma dari praktik gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan menggunakan pendekatan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, studi kualitatif ini akan mengemukakan beberapa hal: *pertama*, apa yang mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan masyarakat dalam Muhammadiyah. *Kedua*, bagaimana model praksis pemberdayaan masyarakat ini dilakukan Muhammadiyah. Penelitian ini menemukan bahwa praksis pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah didorong oleh teologi Alma'un (ajaran) pendiri gerakan ini yaitu KH. Ahmad Dahlan, yang direinterpretasi oleh Moeslim Abdurrahman menjadi "Islam Transformatif" sebagai paradigm Islam yang memihak kepada kaum lemah. Teologi sosial ini kemudian melahirkan praksisme sosial yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) untuk menggempur kemiskinan gaya baru di abad ke-21

KATA KUNCI: Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un, Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif, pemberdayaan masyarakat.

*) Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia. Email: azakikhoirudin@gmail.com

* Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. Pendahuluan

Studi ini akan mengkaji gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah tidaklah sebagai gerakan sosial murni akan tetapi gerakan sosial yang bertautan dengan Islam yang menjadikan Islam sebagai solusi atas persoalan sosial dan kehidupan.¹ Pasca seabad usia gerakan sosial-keagamaan ini, mulai merengkuh wilayah baru gerakan tajdid di bidang pemberdayaan masyarakat. Hipotesis yang diajukan di sini adalah bahwa etos al-Maun dari KH. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, setelah seabad berselang telah diinterpretasi ulang oleh generasi selanjutnya, yaitu Moeslim Abdurrahman dengan gagasan Islam transformatifnya. Gagasan inilah yang kemudian melahirkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang fokus menangani masyarakat mustadzafin baru, sehingga Muhammadiyah sudah mulai akrab dengan para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, kaum difabel.

Berdasarkan studi Deni Syahputra “Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman)” (2016), kemunculan Islam transformatif Moeslim Abdurrahman sebagai kritik atas teori modernisasi dan teori pembangunan dengan basis Islam dan dakwah.² Di samping itu, Islam Transformatif juga merupakan bentuk kesadaran dan refleksi langsung kegiatan sosial oleh masyarakat, terutama kaum marjinal. Sebagaimana penelitian Fauzan Budi Raharjo berjudul “Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman” (2015) bahwa konsep Islam Transformatif Moeslim merupakan sebuah ajakan korektif kembali terhadap ajaran agama dan mengubah arah kajian Islam yang memiliki ranah teologis dunia-akhirat menuju arah yang progresif, yaitu peduli terhadap problematika sosial.³

Mutthoharoh berjudul “Teologi Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dan Relevansinya terhadap Pemikiran Keagamaan Di

Era Kontemporer” (2013) menyatakan teologi Islam transformatif merupakan sebuah pencarian dialogis antara teks dan konteks, yaitu bagaimana agama harus membaca dan memberi jawaban terhadap ketimpangan sosial yang ada.⁴ Sebagaimana dinyatakan Zuly Qodir dalam “Kalibokong Theology” And Moeslim Abdurrahman’s *Transformative Islamic Education*. Moeslim Abdurrahman memahami teks suci al-Qur’an dalam kaitannya dengan perspektif teologi kaum mustad’afin, menghadirkan teks suci Al-Qur’an dalam kondisi kekinian yang penuh dengan hegemoni kapitalisme sosial dan kapitalisme ekonomi sebagai bentuk kemungkaran sosial atau syirik sosial.⁵

Beberapa studi di atas, baik Deni Syahputra, Fauzan Budi Raharjo, Mutthoharoh, maupun Zuly Qodir, masih berkuat pada wacana Islam transformatif dan Moeslim Abdurrahman. Belum ada yang mengulas bagaimana dimensi praksis dari teologi neo-al-Ma’un (Islam transformatif) yang digagas oleh Moeslim Abdurrahman menjadi sebuah model praksis gerakan pemihakan kaum lemah. Bahwa sejak tahun 2000, Moeslim Abdurrahman telah memelopori Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN). Setelah 5 tahun berjalan, pada tahun 2005, diubah Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dimana dalam struktur Muhammadiyah, istilah Majelis lebih tinggi daripada sebuah lembaga. Karena itu, tak kalah penting dikemukakan di sini adalah skripsi Sawaluddin Eka Saputra yang berjudul “Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dalam Pendidikan Islam”. Eka memotret bagaimana Islam Transformatif menginspirasi kehadiran Trisula Baru dalam Muhammadiyah yaitu LazisMu,, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM), dan Lembaga Penanggulangan Bencana (LPB).⁶

Artikel ini akan lebih spesifik melihat keterkaitan antara gagasan Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Apa yang

¹ Abdul Mu’ti. “Muhammadiyah Gerakan Civil Society yang Mandiri, Tidak Anti Pemerintah.” *Media Maarif* Vol 4, no. 2 (2009)

² Deni Syahputra. “Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman).” *Penelitian Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung*, 2016.

³ Fauzan Budi Raharjo. “Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman.” *Penelitian Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga*, 2015.

⁴ Mutthoharoh. “Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer.” *Penelitian Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya*, 2013.

⁵ Zuly Qodir. “Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman’s Transformative Islamic Education.” *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).

⁶ Sawaluddin Eka Saputra. “Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).

mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan Muhammadiyah? Etos dan ide apa yang mendasarinya? Lalu, bagaimana model praksis gerakan pemberdayaan Muhammadiyah?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Fokus studi ini pada gerakan pemberdayaan Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) yang digerakkan oleh teologi Alma'un KH. Ahmad Dahlan. Dengan menggunakan rumus Piere Bourdieu tentang praktik sosial, yakni "(habitus x modal) + arena= praktik",⁷ dengan memodifikasi kreatif-imajinatif hubungan pilar triadik = (*knowledge x person*) + *institution*. Salah satu aspek dalam *habitus*, perpektif Bourdieu, merupakan seperangkat pengetahuan. Dalam kaitan penelitian ini yang dimaksud adalah cara pandang terhadap dunia (*worldview*), kepercayaan, dan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari Kiai Dahlan. Selanjutnya, pengetahuan, dalam penelitian ini yang spesifik membahas "teologi Alma'un" ini dibentuk oleh *habitus* daripada direkam oleh memori. Kemudian diinterpretasi ulang oleh generasi pelanjutnya yaitu Moeslim Abdurrahman menjadi sebuah teologi sosial yang dikenal dengan "teologi transformatif atau "Islam transformatif" setelah seabad berselang, sehingga akhirnya melahirkan gerakan pemberdayaan masyarakat dalam Muhammadiyah.⁸

Adapun mengenai prinsip "modal" Bourdieu merupakan hubungan sosial. Salah satu modal yang digunakan yang jadi pertarungan dalam arena adalah modal budaya, modal ekonomi, modal sosial, dan modal simbolik. Termasuk modal budaya adalah bakat yang dibawa sejak lahir, cara berbicara, cara pembawaan, tata krama, dan sebagainya. Waryani mengkonseptualisasikan pilar modal ala Bourdieu menjadi pilar *person*, sedangkan *arena* Bourdieu sebagai *field* (lapangan). Menariknya, Bourdieu membagi arena menjadi dua, yaitu arena produksi terbatas (*field of restricted production*) dan arena produksi skala besar (*field of large-scale production*). Kemudian Waryani membagi konsep *field*-nya Bourdieu dengan istilah

little field (*litle community*) dan *great field* (*global community*).⁹ Dengan meminjam Bourdieu, *little field* penulis pahami sebagai organisasi Muhammadiyah, dan *great field*-nya berhubungan dengan organisasi-organisasi (baca: umat Islam) lain, termasuk bangsa dan dunia internasional.

Rumusan generatif "(*habitus x modal*) + arena= praktik" Bourdieurian di atas adalah dalam rangka mengajukan sebuah pendekatan dalam memahami realitas sosial Muhammadiyah secara dialektis. Pendekatan yang mencoba keluar dari subjektivisme dan objektivisme. Kemudian penulis merumuskan sebagaimana tabel berikut:

Pierre Bourdieu	Modal x Ahmad Dahlan	<i>Habitus +</i> Teologi Alma'un	Arena = Muhammadiyah	Praktis Pemberdayaan Masyarakat
	Moeslim Abdurrahman	Islam Transformatif		

Sehingga tulisan ini mengintegrasikan dan menginterkoneksi antara Kiai Ahmad Dahlan dan Moeslim Abdurrahman (*person*), Muhammadiyah (*institution*), dan teologi Alma'un dan Islam Transformatif (*knowledge*). Dimana modal, *habitus*, dan arena ini yang mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan Muhammadiyah.

Untuk melihat proses institusionalisasi gagasan Islam Transformatif Moeslim Abdurrahman dalam Muhammadiyah, maka penelitian ini meminjam pendekatan Berger dan Luckmann, rumusan konseptual tentang dimensi sosial pengetahuan yang berkembang di masyarakat berawal dari proses eksternalisasi (*externalization*) kemudian beranjak ke dalam proses obyektivikasi (*objectication*) dan berakhir menuju proses internalisasi (*internalization*).¹⁰ Dalam penelitian ini eksternalisasi digunakan untuk melihat proses masuknya rezim intelektual atau diskursus yang terjadi pada Moeslim Abdurrahman, sehingga mempengaruhi orientasi dan gagasan Islam transformatif. Selanjutnya, obyektivikasi adalah proses produksi pengetahuan Moeslim yang di sini terjadi penandaan. Proses penandaan ini merupakan proses habitualisasi kolektif masyarakat yang

⁷ Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique og The Judgment of Taste*, terj. Ricard Nice (UK: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1984), 101.

⁸Jen Webb, Tony Schirato, and Geof Danaher, *Understanding Bourdieu* (London: SAGE Ppublication, 2002), 38-42.

⁹ Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) Person, Knowledge, and Institution* (Yogyakarta: Suka-Press, 2013), 78.

¹⁰*Ibid*, 52.

terinstitusionalisasi melalui proses pengulangan. Proses ini kemudian dipahami sebagai tahap terinstitusionalisasi gagasan atau konsep Moeslim dalam Muhammadiyah. Sementara, internalisasi merupakan pemahaman subyektif dan sekaligus penangkapan atas dunia sebagai sesuatu yang bermakna dan sekaligus sebagai realitas sosial. Segudang wacana dalam diri Moeslim dan pemahaman individu yang disosialisasikan melalui proses habituasasi, yang termodifikasi secara kreatif, di sinilah terjadi internalisasi aktivis-aktivis Muhammadiyah, yang kemudian akan berputar lagi mengalami eksternalisasi menjadi sebuah lembaga yang disebut MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat).

C. KERANGKA TEORI

Sebenarnya, pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*”¹¹. Konsep ini lebih luas, tak hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safetynet*), yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga akhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife menyatakan bahwa:

Empowerment is a process of helping disadvantaged groups and individual to compete more effectively with other interests, by helping them to learn and use in lobbying, using the media, engaging in

political action, understanding how to ‘work the system,’ and so on.¹²

Konsep pemberdayaan (*empowerment*) menurut Ife tersebut sebagai upaya pemberian otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu komunitas, serta mendorong mereka agar kreatif dalam menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Lahirnya konsep pemberdayaan merupakan antitesa terhadap model pembangunan yang kurang memihak pada rakyat mayoritas. Menurut Prijono dan Pranarka, konsep ini dibangun dari kerangka logika sebagai berikut : 1) proses pemusatan kekuasaan terbangun dari pemusatan kekuasaan faktor produksi; 2) pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja dan masyarakat pengusaha pinggir; 3) kekuasaan akan membangun bangunan atas atau sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan sistem ideologi yang manipulatif untuk memperkuat legitimasi; dan 4) pelaksanaan sistem pengetahuan, sistem politik, sistem hukum dan ideologi secara sistematis akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya.¹³ Akhirnya yang terjadi ialah dikotomi, yaitu masyarakat yang berkuasa dan manusia yang dikuasai. Untuk membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan melalui proses pemberdayaan bagi yang lemah (*empowerment of the powerless*).

Dilihat dari proses operasionalisasinya, menurut Sumodiningrat, ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai

¹¹ R. Chambers, “Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?”, dalam G. Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cides, 1996); juga G. Kartasasmita, *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat* (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996).

¹² J.W. Ife, *Community Development: Creating Community Alternatives, Vision, Analysis and Practice* (Longman, Australia, 1995).

¹³ O.S. Prijono dan A.M.W. Pranarka, *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi* (Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies, 1996).

kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Dua kecenderungan tersebut (pada titik ekstrem) seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.¹⁴

Upaya memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. *Kedua*, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasian ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting di sini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. *Ketiga*, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah

menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Jika menurut Ife, pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung, maka pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat. Atau dengan kata lain adalah bagaimana menolong masyarakat untuk mampu menolong dirinya sendiri. Secara sederhana, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

Sejatinya watak dasar Muhammadiyah adalah pemberdayaan dan pelayanan sosial. Dalam konteks sejarah, Muhammadiyah generasi awal era Kiai Dahlan banyak memelopori usaha-usaha pembinaan komunitas atau jamaah di masyarakat. Pendiri Muhammadiyah tersebut membentuk dan membina kelompok pengajian seperti Wal-Ashri, Fathul Asrar Miftahu Sa'adah, Nurul Iman, dan lain-lain. Dilanjutkan dengan berdirinya Qismul Arqa kelompok putra-putri yang dibina di rumah atau asramanya, yang menjadi embrio lahirnya Madrasah Mu'allimin

¹⁴ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial* (Jakarta: Gramedia, 1999).

dan Mu'allimat Yogyakarta. Kiai dan sahabat-sahabat terdekatnya juga membina kependuan, yang melahirkan Hizbul Wathan tahun 1918. Pemberdayaan perempuan melalui Sopotresno sebagai embrio Aisyiyah tahun 1917. Juga pembinaan Siswa Praja sebagai embrio Ikatan Pelajar Muhammadiyah 1961.¹⁵

Kiai Dahlan melalui gerakan al-Ma'un mengumpulkan anak-anak yatim yang kemudian dilembagakan menjadi *Weeshuis* (Rumah Yatim), *Armeinhuis* (Rumah Miskin), dan Poliklinik sebagai benih lahirnya Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) atau kini dikenal sebagai Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Pendiri Muhammadiyah tersebut juga bergaul dengan kelompok elite di Boedi Oetomo, mengajar di Sekolah Praja, dan berinteraksi dengan siapa saja yang ditemuinya untuk berdialog dan mendakwahkan Islam. Di kediaman HOS Tjokroaminoto Kiai Dahlan juga memberikan pengajian keislaman di hadapan Soekarno, Semaun, dan elite muda pergerakan yang haus ilmu dan keislaman. Perintisan awal Muhammadiyah tersebut menunjukkan usaha-usaha langsung membina kelompok-kelompok khusus dalam masyarakat, yang saat ini dikenal sebagai komunitas atau jamaah.¹⁶

Majelis paling awal dibentuk oleh Muhammadiyah adalah Majelis Penolong Kesengsaraan Oemoem (PKO) di samping Majelis Tabligh, Majelis Pengajaran, dan Majelis Pustaka. Aksi-aksi yang dilakukan Muhammadiyah melalui Majelis ini cukup mengesankan. Muhammadiyah seperti membentuk rumah miskin, menyantuni yatim-piatu, menampung dan melatih tenaga kerja urban, memberikan penolongan kepada korban bencana alam, memberikan akses pendidikan dan kesehatan gratis. Aksi-aksi pelayanannya sungguh mengesankan adalah ketika dokter Soetomo, menjuluki Muhammadiyah sebagai agama welas asih. Etika welas asih yang dilakukan Muhammadiyah konon bersumber dari spirit al-Ma'un, bahkan spirit al-Ma'un (pemberdayaan) inilah yang telah menjadikan Muhammadiyah terus bergerak sampai sekarang ini.¹⁷

Al-Ma'un menjadi basis ideologis-teologis

¹⁵ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas*, (Yogyakarta: PPM, 2015), 5.

¹⁶ *Ibid.*...,5.

dalam perjuangan Muhammadiyah. Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah telah merumuskan landasan normatif teologi al-Ma'un menjadi *Fikih al-Ma'un* yang lebih operasional. Fikih al-Ma'un sebagai pelengkap sistem gerakan Muhammadiyah untuk menguatkan komitmen dakwah advokatif. Gerakan dakwah advokatif melalui pemberdayaan masyarakat, sedikit banyak telah mengubah wajah Muhammadiyah. Banyak kalangan menilai dakwah Muhammadiyah cenderung elitis bergeser menjadi lebih populis. Kalau selama ini upaya pemberdayaan yang dilakukan Muhammadiyah lebih banyak terjadi di seputaran amal usaha, saat ini pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui program aksi yang langsung menyentuh persoalan riil masyarakat miskin dan marginal yang direpresentasikan oleh para petani, nelayan, peternak, buruh, kaum miskin kota, dan kaum difabel.¹⁸

1. Genealogi Intelektual Moeslim Abdurrahman

Moeslim Abdurrahman, di kalangan anak-anak muda Muhammadiyah akrab disapa kang Moeslim. Moeslim merupakan putra kelahiran kota Lamongan, Jawa Timur, 8 Agustus 1948 dari keluarga petani Muhammadiyah. Di dalam keluarganya masih mengalir darah priyayi, seniman dan kebanyakan terdidik dalam lingkungan pesantren. Maka, tidak heran jika obsesi dalam keluarganya selalu ingin setiap anaknya mondok di pesantren, kemudian pulang kampung dan minimal menjadi Kiai kecil di pedesaan.¹⁹

Berbeda dengan anak-anak di masanya yang dari kalangan santri, ketika itu mereka memasukkan anak-anaknya di pondok pesantren atau madrasah, Moeslim kecil dengan latar belakang keluarga petani santri atau Masyumi pergi ke Sekolah Rakyat (SR) yang di situ memiliki guru rata-rata condong berideologi PKI (Partai Komunis Indonesia). Setamat dari SR di

¹⁷ Bachtiar Dwi Kurniawan, "Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput" dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

¹⁸ Laporan Majelis dan Lembaga serta Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009 (Bandar Lampung, 5-8 Maret 2009), 133.

¹⁹ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2018).

pertengahan tahun 1960-an, dia melanjutkan studi mondok di Pesantren Roudhotul 'Ilmiyyah Kertosono Jawa Timur yang diasuh salah satu generasi pertama murid Kiai Hasyim Asy'ari (Pendiri NU) bernama Kiai Salim Akhyar. Beliau selama menuntut ilmu di Makkah bersentuhan dengan Wahabisme, sehingga memilih haluan purifikasi yang ketat. Pola pendidikan yang demikian turut membentuk cara keberagamaan Moeslim muda yang cenderung keras dalam menyikapi problematika khilafiyah.²⁰

Masa-masa nyantri, masa dimana kaum muslimin baru melakukan penumpasan komunis, termasuk Moeslim terlibat secara fisik.²¹ Ketika di pesantren Moeslim tekun mengkaji kitab (takhasus kitab-kitab tafsir Baidhawi dan Bidayatul Mujtahid) sebagai bekal menjadi kyai di desanya jika pulang nanti. Namun, Moeslim juga sedang merasa gundah dengan permasalahan sulit yang dialaminya ketika itu dan hal tersebut tertuang dalam salah satu tulisan bukunya (sebutan nama Moeslim adalah Kang Thowil):

“Rasa gundah yang membuat Kang Thowil menghadapi pilihan sulit: apakah ia akan kembali ke desanya setelah menyelesaikan takhasus kitab-kitab tafsir Baidhawi dan Bidayatul Mujtahid, untuk menjadi kyai petani, ataukah ikut melompat masuk fakultas adab universitas di pesantrennya”.²²

Keluarganya memang sering titip untuk membeli kitab-kitab agama pada mereka yang naik haji (masyarakat di desanya), karena waktu itu membeli kitab sangat sulit. Ketika itu juga, orang tua di rumahnya telah mendirikan madrasah dari bahan-bahan pohon kelapa untuk dikelolanya setamat mondok di pesantren.

Pada saat yang bersamaan, madrasah yang didirikan ambruk ditiup angin. Ketika itu nuansa konflik orang-orang di dua ormas besar NU-Muhammadiyah mencuat ke permukaan. Pasca kejadian itu juga muncul beragam penafsiran. Orang-orang NU sangat senang dengan kejadian itu, mereka menafsirkan bahwa madrasah yang didirikan kelompok Islam sesat, tidak akan diridloi Allah. Sementara itu, tentu Bapak Moeslim yang orang Muhammadiyah menafsirkan kalau

kejadian tersebut hanya sebuah ujian dari Allah, ditambah ungkapan apakah bisa bertahan di jalan yang benar. Kampanye ini juga dilakukan dengan tujuan meyakinkan orang-orang sekitar.²³

Sekilas, di usia Moeslim yang relatif muda, sekitar usia 19 tahunan. Ia berkesempatan naik haji tepat tahun 1965. Tidak lama menjelang G 30 S PKI meletus. Kesempatan itu didapatkan karena harus menggantikan jatah kakeknya yang sudah lansia. Sejak itu ia mangkir di kehidupan pesantren dan tinggal di kampung untuk mengurus administrasi haji di kabupaten.²⁴ Dari pengalaman perjalanan hajinya yang pertama ini, pengalaman hajinya yang kedua tahun 1988 justru jauh berbeda menurutnya:

“Pada tahun 1988, saya berkesempatan menunaikan ibadah haji untuk kedua kalinya. Pengalaman saya ini benar-benar berbeda dari ibadah haji saya tahun 1965, pada masa Orde Lama. Saat itu, umat Muslim yang pergi naik haji berbeda dengan mereka yang sekarang menunaikan ibadah yang sama. Tidak seperti haji modern, jemaah 1965 tidak disediakan pesawat terbang atau hotel; mereka harus naik kapal laut ke Mekkah. Di samping itu, jemaah haji dari dua masa ini berasal dari latar belakang sosial yang berbeda yang sama sekali bertentangan. Pada masa perjalanan haji menggunakan kapal laut, mayoritas umat Muslim yang menunaikan ibadah haji terdiri dari kaum tani. Jumlah jemaah yang terdiri kaum profesional perkotaan yang kaya, terutama dari kalangan pejabat tinggi pemerintah, dapat dihitung dengan jari. Umat Muslim yang mendominasi perjalanan haji di masa Orde Lama biasanya datang dari daerah yang, oleh Clifford Geertz dalam bukunya *The Religion of Java*, digambarkan sebagai komunitas *santri*”.²⁵

Adapun pengalaman haji pertama yang tidak pernah terlupakan baginya adalah apa yang ia katakan berikut,

“Pengalaman tak terlupakan pada saat saya pertama kali menunaikan ibadah haji adalah ketika rombongan saya melakukan ziarah ke gua Hira, tempat Muhammad menerima ayat Al-Qur'an yang pertama. *Mutawwif* Arab memberi

²³ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

²⁴ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 56-65.

²⁵ Moeslim Abdurrahman, *Bersujud Di Baitullah: ibadah haji, mencari kesalehan hidup*. (Jakarta: Kompas, 2009), 71.

²⁰ *Ibid*.

²¹ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 3.

²² *Ibid*, 4.

penjelasan dan merekonstruksi bagaimana Muhammad menerima wahyu dari jibril. Karena sebagian besar penjelasan yang diberikan oleh *mutawwif* menggunakan bahasa Arab, para jemaah yang berasal dari desa menganggapnya sedang memimpin doa. Akibatnya mereka semua menanggapinya dengan 'amin, amin, amin'".²⁶

Selanjutnya, Moeslim sempat optimistis bagaimana menjadi seorang mahasiswa. Karena di zamannya masih belum banyak kaum santri yang kuliah di universitas, kalau bukan anak dari kaum saudagar muslim. Waktu itu Moeslim melihat mahasiswa UII (Universitas Islam Indonesia) Yogyakarta memakai jaket UII, anggota HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) memakai jaket HMI. Berkat simbol-simbol tersebut yang memiliki arti kebanggaan tersendiri, juga mereka musuh-musuh PKI (Partai Komunis Indonesia) yang membuatnya lebih optimis lagi. Di samping itu juga banyak teman-temannya yang telah mendaftar di universitas.²⁷

Menjelang tahun 1970-an Moeslim memasuki perguruan tinggi di Fakultas Tarbiyah (saat ini berubah nama menjadi program Studi Pendidikan Agama Islam) di IAIM (Institut Agama Islam Muhammadiyah) Surakarta yang merupakan cikal bakal Universitas Muhammadiyah Surakarta. Semasa mahasiswa menjadi aktivis HMI cabang Solo yang mengembangkan pemahaman progresif-kosmopolitan. Pergumulan di HMI inilah yang pada urutannya menggeser pola pemahaman pemurnian ke arah kosmopolitanisme Islam.²⁸

Ditemukan dua data berbeda tentang tempat kuliah Moeslim, *pertama* masuk di Fakultas Ilmu Agama, Jurusan Tarbiyah yang didirikan Muhammadiyah di Kediri.²⁹ *Kedua* ia masuk di Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM), Solo. Titik terangnya adalah Bapak Agus Sumiyanto selaku adik kelas langsung dari Moeslim pada masa kuliahnya. Ia menyampaikan ketidaktahuannya tentang tempat kuliah Moeslim di Universitas Muhammadiyah

Kediri, tetapi ia menyampaikan kalau Moeslim pernah kuliah di Institut Agama Islam Muhammadiyah (IAIM) Kottabarat serta Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Surakarta, yang telah menjadi cikal bakal berdirinya Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).³⁰

Moeslim sendiri aktif di berbagai gerakan kemasyarakatan atau LSM, keaktifannya dimulai ketika mengikuti pergerakan mahasiswa Islam, yaitu HMI Cabang Solo. Ia pernah menjadi ketua. Di HMI ini ia mengalami pergulatan.³¹ Ia merasa sebagai subkultur masyarakat pedesaan yang agraris dengan pencarian agama yang lebih menguatkan iman serta spiritualitas otentik dan sedikit bersentuhan dengan akal pikiran, tidak ada yang namanya pemikiran Islam lain. Berbeda ketika menjadi mahasiswa yang tergabung dalam aktivis HMI, ia menemukan pengalaman Islam lain dan agak akademik.³²

Semasa ujian akhir perkuliahan Moeslim untuk mendapat titel sarjana muda, Moeslim diwajibkan untuk menyeter ijazah SLTA. Moeslim sendiri mengikuti ujian persamaan Aliyah supaya bisa ikut ujian BA (sarjana muda). Perasaan berbeda muncul pada diri Moeslim terhadap teman-temannya yang dari pesantren. Sebab, ia telah memiliki gelar akademik, gelar yang langka dan sudah menjadi status sosial tersendiri di lingkungannya.³³

Pergulatan itu semakin menjadi, ketika pandangannya yang normatif berubah ke empiris semakin kental saat ia diterima di Pusat Penelitian Ilmu Sosial selama setahun (tahun 1975) di bawah naungan Dr. Alfian almarhum dari LIPI dan menjadi pegawai negeri di Badan Litbang Departemen Agama dari tahun 1977 sampai 1990.³⁴ Pergulatan-pergulatan semacam itu yang merubah pemikiran Moeslim kepada jalur transformasi berpikir secara multitafsir sebagai sebuah sikap terhadap perubahan sosial yang terjadi. Seperti apa yang pernah ia ungkapkan:

"Amat mengherankan, belakangan, saya

²⁶ *Ibid*, 81.

²⁷ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

²⁸ Moeslim Abdurrahman, *Kang Thowil dan Siti Marginal* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 17-18.

²⁹ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

³⁰ Hasil wawancara bersama bapak Agus Sumiyanto & Azaki Khoirudin di Pondok Hajjah Nuriyah Shabran, UMS, tanggal 15/5/18, pukul 21.30 WIB.

³¹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 209.

³² *Ibid*.

³³ <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2003).

³⁴ Moeslim Abdurrahman, *Islam Yang Memihak* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 209.

mulai merasakan kejadian itu sebagai perbaikan moral dan intelektual atas pemahaman saya mengenai 'Islam Transformatif'. Soalnya, selama beberapa waktu, bagi saya, hal itu tidak berarti melihat kaum miskin sebagai individu yang harus diberikan sedekah supaya si pemberi mendapatkan balasan dari Tuhan. Hal tersebut justru lebih menandakan perjuangan Islam berdasarkan kepentingan dalam sistem politik yang bersifat adil. Berbeda dari ajaran Islam tradisional, saya menyokong filosofi tersebut melalui slogan 'teologi Islam untuk transformasi,' yang memandang kaum miskin sebagai golongan sosial dalam analisis sosial".³⁵

Berkat hal itu, tidak ada alasan serasional apapun bagi seorang Moeslim untuk tidak memberi, seolah-olah imannya tergoncang dan takut jika tidak memberi sesuatu kepada kaum marjinal. Moeslim juga menekankannya pada setiap sesi perkuliahan atau pendidikannya, terutama kepada anak-anak muda Muhammadiyah didikannya dengan berbicara bahwa Islam adalah agama untuk keadilan sosial. Karena menurut Moeslim, kalau di hadapan mata kita terdapat banyak orang yang kelaparan atau menderita, hal ini sudah merupakan peringatan bagi kaum Muslim untuk membangun solidaritas yang memihak nasib mereka.³⁶

Demikian sejumlah organisasi yang didirikan dan diprakarsai Moeslim dan teman selama hidupnya, semua bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat. Beberapa dari organisasi itu adalah LP3ES, P3M, LSP, Maarif Institute, PSAP, al-Maun Foundation, dan JIMM. Advokasi Moeslim untuk pemuda dan tertindas atau marjinal (mustad'afin) cukup diakui. Ia menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemberdayaan Pekerja, Petani dan Komunitas Perikanan (LPBTN) dari Pusat Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Ketua Umum Din Syamsuddin, di 2005-2010. Setelah itu LPBTN diubah menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat (Majelis Pemberdayaan Masyarakat/MPM) yang dipimpin Said Tuhuleley untuk 2010-2021 tetapi ia meninggal di tengah tugasnya dan digantikan oleh Mohammad Yamin hingga saat ini.³⁷ Hari-hari Moeslim memang diabdikan

³⁵ Moeslim Abdurrahman., *Bersujud di Baitullah: ibadah haji, mencari kesalehan hidup*. (Jakarta: Kompas, 2009), 85.

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Zuly Qodir. "Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman's Transformative Islamic Education." *Jurnal Iseedu* Volume 1, no. 1 (2017).

untuk membina dan mengembangkan LSM bentukannya. Hingga akhirnya, Moeslim meninggal dunia pada Jumat malam, 6 Juli 2012 di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta.³⁸

Moeslim Abdurrahman dikenal sebagai sosok intelektual muslim di eranya dan memiliki banyak pengalaman serta kontribusi dalam pendidikan berbasis kemasyarakatan (LSM), tentunya juga memiliki segudang konsep gagasan pemikiran terhadap persoalan-persoalan sosial di dalam kehidupan masyarakat. Kemudian Moeslim menuangkan gagasan tersebut berbentuk karya berupa tulisan yang diterbitkan di berbagai media lokal maupun nasional dan ada juga yang telah menjadi buku. Dalam beberapa buku karya yang penulis kumpulkan dan simpulkan berdasarkan urutan tahun terbit, yaitu: (1) "*Kang Moeslim dan Siti Marginal*" diterbitkan Pustaka Firdaus tahun 1995; (2) "*Islam Transformatif*" Pustaka Firdaus tahun 1995; (3) "*Semarak Islam, Semarak Demokrasi*" (Pustaka Firdaus, 1996); (4) "*Islam sebagai Kritik Sosial*" (Erlangga, 2003); (5) "*Islam Yang Memihak*" (Pustaka Pesantren, 2015); (6) "*Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan*" (Penerbit Kanisius, 2009); (7) "*Bersujud di Baitullah: Ibadah Haji, Mencari Kesalehan Hidup*" (Kompas, 2009)

2. Islam Transformatif: Teologi Sosial Neo-Al-Maun

Dalam sosiologi, agama selain berfungsi legitimatif, juga berfungsi kontrol secara kritis, jika agama mampu independen dari struktur yang mungkin menjeratnya. Perlu kita sadari bahwa setiap fase perkembangan sosial, kemungkinan lahirnya struktur yang menjebak agama itu tetap ada, kendati mulanya agama menjadi pemrakarsa perubahan masyarakat. Pemimpin agama dengan keberanian, berhasil melakukan perubahan masyarakat dengan menawarkan tema-tema moral-etis dan konsolidasi spiritual, tetapi proses berikutnya cenderung terjebak sendiri dalam rutinitas karismanya saja, tatkala ia melihat perlunya mengambil langkah-langkah stabilisasi atau pembirokratisasi. Sebab, ide-ide keagamaan yang ideal harus diterjemahkan dalam bentuk kehidupan praksis sambil memperhitungkan segala tradisi atau kapasitas formal yang ada dalam masyarakat.³⁹

³⁸ Mutthoharoh, "Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer", *Penelitian* Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013, 14.

³⁹ Moeslim Abdurrahman, *Islam Transformatif*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), 9.

Agama seharusnya selalu berani tampil dalam setiap keadaan, bukan saja untuk menunjukkan hal-hal yang *ma'ruf* (positif), tetapi juga hal yang munkar (teologi negatif). Mekanisme kritis agama terhadap perubahan, dalam Islam sangat ditekankan. Dalam tradisi Islam, teologi negatif sebenarnya berarti harus mempertanyakan dan menunjukkan hal-hal yang tidak benar, bahkan sesuatu yang sifatnya sentral. Pengakuan keislaman melalui pengucapan syahadat, pada dasarnya dimulai dengan pernyataan negatif, dengan menafikan semua dewa yang bukan Tuhan dalam tradisi monotheisme sejati.⁴⁰ Seorang muslim, tidak sampai pada taraf keimanan sejati, sebelum ia mengalami pergulatan dengan dirinya sendiri dengan lingkungan sosial sekitar. Dalam proses seperti itu, kemampuan untuk "*membebaskan*" struktur sangat diperlukan, agar ia dapat berperilaku dengan dasar-dasar moralitas agama yang otentik. Bukan sebaliknya, berperilaku dengan hanya menuruti peranan sosiologisnya atas status yang disandang dalam masyarakat.⁴¹

Menurut Kang Moeslim, agama tetap bisa menumbuhkan mekanisme kritis dalam dinamika agama itu sendiri, baik melalui ijtihad sebagai metode intelektual dalam memahami pesan agama. Ataupun secara langsung, jika agama diharapkan peranannya untuk menyelesaikan problem-problem kemanusiaan masyarakat yang aktual. Itu berarti, agama harus selalu berani memberikan kriteria moral pada setiap keadaan, dengan menunjukkan mana keadaan yang diridhai oleh Allah dan mana yang tidak.⁴²Sebenarnya kalau direnung-renungkan, apa yang baik dan apa balasan dari perbuatan baik (teologi positif), itu adalah urusan Tuhan. Akan tetapi, apa yang tidak baik menurut Tuhan, itulah yang oleh-Nya kepada kita untuk memperbaikinya. Adapun, bagaimana cara memperbaiki keadaan itu, menurut Kang Mueslim Tuhan sengaja tidak menunjukkan dengan pasti. Oleh karenanya, adalah tanggungjawab bersama untuk mengkajinya dan menemukan cara yang terbaik. Jalan Tuhan, tampaknya selalu memberikan kemungkinan agar kita mampu menafsirkannya.⁴³

⁴⁰*Ibid*,10.

⁴¹*Ibid*.

⁴²*Ibid*,12.

⁴³*Ibid*.

Dalam konteks yang lebih luas, agama tidak hanya menuntut kepatuhan belaka, tetapi juga pergulatan untuk mewujudkan tatanan yang lebih bertanggung jawab. Seperti halnya pergulatan seorang sufi, yang tak kenal henti menyatu dengan Tuhan (*Al-Haq*), yang biasanya harus dilalui dengan tahapan-tahapan pembebasan (*khalwat*). Itu dilakukan, dengan rasa naif, karena syareat berisi kepatuhan belaka, dan tanpa kebebasan mempertanyakan theis yang sejati itu, maka tidak mungkin orang akan mencapai kerinduan dan kecintaan kepada-Nya. Dalam pergulatan kaum sufi, mereka yakin bahwa emosi Tuhan tidak akan terganggu sedikitpun oleh kebebasan manusia. Perpektif sufi, menurut Kang Mueslim diutarakan dalam rangka membicarakan fungsi kritis terhadap struktur sosiologis agama. Karena, hanya dengan perpektif itulah kita akan dapat memahami pesan suci agama yang relevan dengan keadilan sosial, persamaan derajat, demokrasi, egalitarian. Inilah manifestasi takwa, yang memulangkan seluruh sumber kebenaran dan harkat kemanusiaan di tangan Tuhan, bukan pada otoritas manusia.⁴⁴

Jika kita ingin menyelesaikan persoalan mereka secara mendasar, janganlah memberi ikan, tetapi berilah pancing.⁴⁵ Gerakan memberi kail, bukan ikan, idealnya dilakukan dengan program-program pengembangan masyarakat. Gerakan itu harus bersifat pendampingan, dan penempatan kaum *dhuafa* dan *mustadha'afin* sebagai subyek. Oleh karena itu, pendekatan transformatif menjadi acuan yang sangat penting agar dalam proses itu, mereka lah yang akan melaksanakan program dirinya, memahami strategi dan peluang-peluang yang mungkin dapat meningkatkan harga dan harkatnya sebagai manusia yang mulia di depan Penciptanya.⁴⁶

Transformasi, sepatutnya menjadi gerakan kemanusiaan yang mampu mengantarkan kehidupan sosial yang sederajat di depan Allah SWT. Suatu gerakan transformatif yang menumbuhkan kepedulian terhadap nasib sesama, dan yang melahirkan aksi solidaritas. Yakni bertujuan mempertalikan mitra insani atas dasar kesadaran iman bahwa sejarah suatu kaum hanya akan diubah oleh Tuhan jika ada kehendak

⁴⁴*Ibid*,13.

⁴⁵*Ibid*,39.

⁴⁶*Ibid*,40.

dan upaya dari semua anggota kaum itu sendiri. Transformasi adalah jalan yang paling manusiawi untuk mengubah sejarah kehidupan umat manusia. Sebab dalam proses ini yang berlaku adalah “pendampingan” dan bukan pengarahan, apalagi pemaksaan.

Transformasi, pada dasarnya adalah gerakan kultural yang didasarkan pada liberalisasi, humanisasi, dan transendensi yang bersifat profetik. Yakni, mengubah sejarah kehidupan masyarakat oleh masyarakat sendiri ke arah lebih partisipatif, terbuka, dan emansipatoris. Suatu cita-cita yang melambungkan penjunjangan tinggi harkat dan harga kemanusiaan, keyakinan orang dihargai dan perbedaan pendapat yang menjadi tradisi. Untuk mencapai situasi seperti itu, harus disadari memang tidak gampang. Hal ini harus dimulai oleh siapa saja yang dalam pandangan hidupnya merasa peduli terhadap persoalan ketimpangan sosial sebagai tantangan iman bersama.

Gerakan transformasi sosial bersifat partisipatif dimulai dari organisasi. Gerakan transformatif yang dinamis dari, oleh, dan untuk masyarakat. Transformasi bersifat holistik, yaitu dimensi yang menyeluruh, termasuk transformasi tata nilai, tingkah laku individu, dan struktur kehidupan kolektif masyarakat. Gerakan transformatif harus menciptakan suasana kebersamaan di antara masyarakat itu sendiri dalam membicarakan dan mempersepsi realitas, mencari peluang-peluang di balik realitas dan memutuskan secara bersama-sama bagaimana mengubah realitas itu agar lebih bermakna dilihat dari prinsip-prinsip dasar kemanusiaan yang sederajat sebagai khalifah Allah swt untuk menciptakan kemakmuran.⁴⁷

Proses transformasi dalam arti menumbuhkan kesadaran bersama masyarakat sejauh mana mereka mampu memahami dirinya sendiri dan memecahkan persoalan. Yang lebih penting ialah secara wajar menumbuhkan kesadaran kelompok dalam bentuk jamaah sosial baru yang terbuka, egalitarian, dan menyejahterakan. Jadi, tidak sekedar kemakmuran semu berupa tumbuhnya pendapatan ekonomi yang bersifat material saja.⁴⁸ Jamaah sosial (baca: komunitas) yang lahir

dengan solidaritas baru yang didasarkan pada kesamaan berusaha, keadilan memperoleh hasil dan keterbukaan dalam kepemimpinan. Tipe jamaah (komunitas) yang lahir di pelbagai tempat sebagai modal organisasi umat yang mengacu pada terwujudnya masyarakat Indonesia yang demokratis, beriman, dan bertakwa kepada Allah swt.

Moeslim berpandangan jika psikoanalisis agama bukanlah model yang tepat untuk membaca gagasan wahyu dalam proses sosial. Semisal ada seorang da'i menceritakan kisah Isra' Mi'raj seperti terjadi apa adanya tanpa mengajak para *audience* mengkonfrontasikan dengan kenyataan-kenyataan sosial yang aktual, pada dasarnya ini merupakan sesuatu *therapeutic* dan bukan hermeneutik⁴⁹. Moeslim bermaksud ingin menggarisbawahi bahwa dalam bertafsir transformatif, prinsip utama yang mendasari bukanlah sub-ordinasi sukarela satu terhadap yang lain, tetapi semua pihak harus memiliki kesetaraan 'resistensi' baik langsung maupun tidak untuk memberikan konstruk yang obyektif.

Oleh karena itu, bertafsir transformatif Moeslim merupakan kegiatan pembacaan wahyu secara bersama-sama dalam suasana dialogis, saling memberi pendapat, kritik dalam rangka merumuskan praksis bersama. Dalam situasi dimana wahyu sebagai teks kehidupan dibawa dalam percaturan umum (*the public sphere*), sudah tentu agar tetap memantulkan hidayah, potensi kreativitas bahkan kontroversi tentang makna di balik gagasan Tuhan dalam teks itu harus dijaga (semata-mata untuk menghindari *taqlid*, yakni sikap 'membeo' sebagai gejala yang paling dasar melawan kebebasan fitrah manusia itu sendiri sebagai makhluk kreatif).

Bertafsir transformatif (yang bisa dikatakan sebagai proses refleksi memahami wahyu paling dalam atau *the depth hermeneutics*), memang harus dialogis. Namun agar menghasilkan aksi, tetap dibutuhkan konsensus atau *ijma'*, hanya saja kesadaran palsu dan kesepakatan palsu tidak bisa ditolelir. Di sinilah harus tetap dijaga porsi antara kritik, kesepakatan, dan emansipasi, sebab baik pemahaman kritis dan kesepakatan sebenarnya merupakan kulminasi dari kehidupan sosial umat manusia.

⁴⁷*Ibid*,41.

⁴⁸*Ibid*,42.

⁴⁹Moeslim Abdurrahman, *Semarak Islam Semarak Demokrasi?* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), 163.

Bertafsir transformatif, memang tidak boleh berhenti pada keasyikan ‘perbincangan bebas’ itu sendiri. Praksis sebenarnya memiliki lingkup dan lingkaran yang ukurannya disandarkan pada ideologi emansipasi (yang merupakan tema pokok ajaran tauhid itu sendiri). Proyek tafsir transformatif tidak lain merupakan politik opini yang berangkat dari tafsir wahyu untuk memfasilitasi kemampuan umat mendefinisikan keadaan yang dapat disebut adil dan yang tidak adil. Dan bila tidak adil, bagaimana keadaan itu bisa diubah menjadi lebih adil.

3. Majelis Pemberdayaan Masyarakat: Wilayah Baru Praksis Al-Ma’un

Fondasi teologi al-Ma’un yang diletakkan Ahmad Dahlan dalam bentuk Tafsir Amali dianggap oleh warga Muhammadiyah dan juga dinilai banyak peneliti, seperti Deliar Noer (1973) dan A Jainuri (1999), berhasil membawa warga gerakan ini gigih dan bersemangat membebaskan para mustadh’afin dari ketertindasannya. Di abad pertama, wujud konkret dari gerakan ini adalah pendirian beberapa panti asuhan, rumah sakit, dan sekolah. Pada abad kedua, dalam satu dasawarsa terakhir, sejak Muhammadiyah berada di bawah kepemimpinan prolifk Din Syamsuddin, organisasi ini sedang membangun tiga ranah pembaruan melengkapi tiga ranah konvensional. Tiga ranah itu adalah Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sadaqah (LAZISMU), Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC), dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM). Dimana tulisan ini hendak fokus pada aktivisme MPM dalam mengawal agenda pencerahan peradaban melalui pemberdayaan kaum marjinal.

Gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah melalui MPM menjadikan surat al-Ma’un (maupun berbagai surat lainnya dalam Al-Qur’an) sebagai basis nilai yang menginspirasi dan menggerakkan aktivismenya. Terutama tiga ayat awal dari surat al-Ma’un memberi inspirasi bagi dikembangkannya berbagai aktivitas untuk memberdayakan masyarakat yang miskin dan terpinggirkan, tetapi sekaligus dengan itu mendorong juga upaya serius dalam rangka menjamin ketersediaan pangan yang *halal* dan *thayyib*. Kalau tidak menganjurkan memberi makan orang miskin menjadi salah satu indikator

dari para pendusta agama, maka jaminan bagi ketercukupan pangan bagi orang miskin pun menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh.⁵⁰ Teologi al-Ma’un dapat menjadi pijakan teologi pembebasan ala Muhammadiyah yang memberdayakan dan memajukan “orang-orang miskin, kaum papa dan terpinggirkan (*mustadh’afin*)”, bahkan kelompok “neo-mustadh’afin”.

Ide gerakan pemberdayaan masyarakat melahirkan sebuah komitmen yang kuat di dalam tubuh persyarikatan Muhammadiyah. Gagasan itu mengalami institusionalisasi di Muhammadiyah sejak Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta. Untuk merealisasikan ide dan komitmen keberpihakan Muhammadiyah kepada masyarakat yang lemah dan marginal dibentuklah lembaga baru di Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan nama Lembaga Buruh Tani dan Nelayan (LBTN PP Muhammadiyah) dengan Surat Keputusan: No. 70/SK-PP/I-A/2.a/2000 yang diketuai oleh Moeslim Abdurrahman. Secara teknis lembaga ini digerakkan oleh aktivis muda potensial untuk menjadi *officer progame* (OP), yaitu Himmatul Hasanah (OP *integrated farming system*) dan Raja Juli Antoni (OP pendidikan dan advokasi). Pada masa awal program diarahkan untuk pengembangan masyarakat berbasis pertanian terpadu dengan pendekatan *qoryah thayyibah* dan pendidikan penyadaran untuk advokasi kaum marjinal.⁵¹

Setelah berproses selama 5 (lima) tahun, berdasar evaluasi dari PP Muhammadiyah setelah mendengarkan masukan dari internal dan dinamika eksternal, maka pada Muktamar ke-45 tahun 2005 di Malang Jawa Timur, Muhammadiyah semakin menguatkan komitmen keberpihakannya tersebut melalui penguatan kelembagaan dari yang berbentuk Lembaga menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah (MPM PP Muhammadiyah).⁵² Muhammadiyah menilai, gerakan pemberdayaan harus didukung oleh struktur dan infrastruktur yang kuat dan memadai. Perubahan dari lembaga

⁵⁰ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410-411.

⁵¹ Laporan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005, Disampaikan pada Muktamar Muhammadiyah ke-45 (Malang, 2005), 111.

⁵² Bachtiar Dwi Kurniawan, “Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput” dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan* (Jakarta: Al-Wasat, 2014).

ke majelis mengandung konsekuensi bahwa Muhammadiyah harus membentuk Majelis Pemberdayaan Masyarakat tersebut sampai ke tingkat cabang.⁵³

Komitmen Muhammadiyah yang kuat terhadap keperpihakan kepada masyarakat miskin dan marjinal semakin terlihat jelas ketika kita melihat keputusan Muktamar ke-45 Tahun 2005 di Malang. Dalam rencana strategis disebutkan bahwa Muhammadiyah akan mengembangkan dan memperluas basis gerakan Muhammadiyah yang terletak pada pusat "Penolong Kesengsaraan Oemoem". Pada pasal 10 garis besar program tertulis bahwa Muhammadiyah akan meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, nelayan, dan mereka yang mengalami marginalisasi sosial di perkotaan maupun pedesaan. Bahkan dalam program nasional hasil keputusan Muktamar ke-45 Tahun 2005 di Malang tersebut secara eksplisit menyebutkan tentang pasal program yang memadukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan.⁵⁴ Konstruksi dakwah advokatif melalui pemberdayaan masyarakat semakin terlihat jelas ketika kita memaca keputusan muktamar Muhammadiyah ke 46 tahun 2010 di Yogyakarta, sikap keberpihakan kepada masyarakat miskin secara organisatoris dan kelembagaan tergambar semakin kuat. Setidaknya terdapat 11 pasal program yang secara jelas dan eksplisit akan memberi perhatian pada peningkatan taraf hidup masyarakat miskin dan advokasi kebijakan publik yang tidak berpihak pada rakyat.⁵⁵

MPM PP Muhammadiyah dibentuk setelah Muktamar Muhammadiyah ke-45. MPM mempunyai dua pekerjaan besar. Pertama, menata konsep dasar pemberdayaan masyarakat. Kedua, melakukan sosialisasi kepada kalangan internal Muhammadiyah bahwa pengarusutamaan pemberdayaan masyarakat, khususnya kaum miskin merupakan kewajiban keagamaan. Pemberdayaan masyarakat itu tidak hanya ditujukan kepada warga Muhammadiyah

saja atau umat Islam semata, tetapi ditujukan untuk seluruh rakyat tanpa melihat suku dan agama. Kemudian periode 2010-2015, misi MPM memberikan prioritas kepada empat hal. Yaitu pertama, *massifikasi* program pemberdayaan masyarakat. Kedua, memberi perhatian yang lebih serius kepada advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan akomodatif terhadap kehidupan rakyat miskin yang terpinggirkan. Ketiga, memberi perhatian serius kepada kaum buruh, baik yang bekerja di dalam maupun luar negeri. Keempat, memberi perhatian serius kepada kaum difabel melalui berbagai aktivitas pemberdayaan.⁵⁶

Di tangan yang tepat MPM dirintis dan dipelopori oleh kedua tokoh yaitu almarhum Dr. Moeslim Abdurrahman dan almarhum Dr. Said Tuhuleley, yang keduanya merupakan kekuatan operasional dari gagasan teologi al-Ma'un ala Ahmad Dahlan dan sekaligus peletak dasar-dasar gerakan pemberdayaan masyarakat. Said Tuhuleleylah yang berhasil secara gemilang melanjutkan, menyempurnakan, dan mengonkretkan langkah-langkah *avant garde* Moeslim Abdurrahman. Langkah-langkah keduanya yang sangat fenomenal berhasil mendorong ekspansi dan ekstensifikasi gerakan Muhammadiyah sehingga merambah dunia buruh, tani, dan nelayan, bidang-bidang yang selama ini berada di luar arus utama Muhammadiyah. Muhammadiyah yang di sepanjang satu abad pertama usianya lebih dikenal menekuni bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, di tangan Lamongan dan Putra Ambon itu mulai merambah dunia petani, buruh, dan nelayan.⁵⁷

Dilihat dari kemunculannya, Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) tergolong Majelis yang baru. Meskipun tergolong sebagai majelis yang relatif baru, beberapa contoh dan rintisan model pemberdayaan masyarakat sudah banyak dilakukan, terutama di kantong-kantong "kemiskinan" masyarakat yang mengalami ketidakberdayaan dan marginalisasi khususnya petani, nelayan tambak, pelaku industri rumah

⁵³ lihat Anggaran Rumah tangga Muhammadiyah Pasal 19 ayat 1 poin a.

⁵⁴ lihat Berita Resmi Muhammadiyah, BRM, No 1 tahun 2005, 67-68 dan 88.

⁵⁵ lihat BRM, 2010.

⁵⁶ Muthohharun Jinan, "Dakwah Pelayanan Muhammadiyah", dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016), 308.

⁵⁷ Hajriyanto Y. Thohari, "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah" dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan...*, 331.

tangga, kelompok buruh, difabel, dan kelompok miskin kota. Sejak 10 tahun terakhir melalui MPM Muhammadiyah mulai menggarap ranah pertanian, peternakan, dan perikanan. Di bawah pimpinan alm. DR (HC) Said Tuhulele (wafat 9 Juni 2015), MPM semakin berkibar dan siapa tahu akan menjadi arus utama ketiga dalam Muhammadiyah dalam beberapa tahun yang akan datang setelah pendidikan dan kesehatan.⁵⁸

Dalam menjelaskan cara kerja aktivitas pemberdayaan dari berbagai konteks, MPM mengacu pada pendekatan ekologi perkembangan manusia (*ecology of human development*) dan lingkungannya yang menyatakan bahwa intervensi sosial harus dapat menyentuh seluruh level relasi antar individu dan lingkungannya. Ruang lingkup/pendekatan pemberdayaan dan bidang garap majelis tersebut terdiri dari tiga tingkatan: *Pertama*, level makro (struktur sosial, sistem politik, ideologi, kebijakan pemerintah, lingkungan global), sistem yang akomodatif dan responsif terhadap kebutuhan publik; *full participation of community*. *Kedua*, level meso (lingkungan dan komunitas; norma sosial, nilai-nilai, kultur), yaitu membantu lingkungan agar dapat mengakomodasi kebutuhan individu; *social networking*. *Ketiga*, level mikro (individual; sistem nilai, sikap, kepribadian, pengetahuan dan keterampilan), yaitu *self-awareness*; memfasilitasi pengembangan potensi individual dan memfasilitasi adaptasi diri terhadap lingkungan.⁵⁹

Berdasarkan relasi antar level tersebut, bidang garap yang akan diberdayakan oleh MPM adalah: *Pertama*, kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara. *Kedua*, pengembangan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat (yang miskin dan termarjinalisasi). *Ketiga*, advokasi kebijakan terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarjinalisasi. *Keempat*, pengembangan pusat penanggulangan krisis (*recovery center*) di tingkat regional dan wilayah yang berfungsi sebagai respon cepat dan antisipasi terhadap problem-problem psikososial

⁵⁸ Ahmad Syafii Maarif, "Antara Penentu dan Pembantu" dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan...*, 432.

⁵⁹ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410-411.

di masyarakat.⁶⁰

Peran MPM dalam pemberdayaan masyarakat berfungsi sebagai fasilitator dan koordinator program pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah (termasuk ortom dan amal usaha) dalam berbagai skala dan variasi/konsentrasi kegiatan. MPM juga sebagai inspirator dan motivator bagi warga Muhammadiyah untuk mengembangkan jiwa prososial dan voluntarisme, juga sebagai mediator individu, lingkungan, dan sistem yang lebih luas.

Visi pengembangan MPM dalam Muktamar ke-46 dan ke-47 diarahkan untuk, "Meningkatnya kapasitas, daya saing, posisi tawar, dan intensitas pemberdayaan masyarakat berbasis misi Penolong Kesengsaraan 'Oemoem' (PKO) dan gerakan al-Ma'un menuju kehidupan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan berkeadaban". Adapun program-program yang bersifat pengembangan antara lain: 1) Mengaplikasikan konsep-konsep gerakan seperti Teologi/Fikih al-Ma'un dan model pemberdayaan masyarakat lainnya yang terpadu dengan sistem gerakan Muhammadiyah; 2) Mengembangkan model-model pemberdayaan masyarakat yang bersifat *bottom-up* dan partisipatif untuk komunitas buruh, tani, nelayan, dan kaum marginal di perkotaan maupun pedesaan; 3) Mengembangkan potensi sumberdaya manusia untuk pemberdayaan masyarakat disertai peningkatan kualitas pengelola, optimalisasi multimedia dan teknologi informasi, dan mobilisasi sumber dana dari berbagai pihak yang sah dan tidak mengikat; 4) Meningkatkan kapasitas pengorganisasian dan pengembangan program pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan berbagai daya dukung yang dimiliki persyarikatan; 5) Meningkatkan jaringan hubungan dan kerjasama baik di lingkungan persyarikatan maupun lembaga-lembaga lain yang memiliki kepedulian pada pengembangan *civil society* atau masyarakat madani sejalan dengan prinsip gerakan Muhammadiyah; 6) Mengembangkan model-model pertanian, peternakan, dan perikanan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir menuju pemberdayaan kelompok petani, nelayan, dan peternak yang kuat dan mandiri; 7) Meningkatkan advokasi dan pendampingan terhadap kelompok miskin, buruh, dan kelompok *dhu'afa/mustadh'afin*

⁶⁰ *Ibid.*, 412.

lainnya untuk memiliki akses, usaha, dan kekuatan kemandirian; 8) Meningkatkan perhatian, kepedulian, dan advokasi kepada kelompok difabel untuk memperoleh hak-hak dasar dan kesejahteraan dalam kehidupannya; 9) Mengupayakan advokasi kebijakan publik yang tidak sensitif dan tidak memihak kepada kaum miskin, *dhu'afa*, dan *mustadh'afin*; 10) Mengembangkan pusat penanganan krisis (*crisis center*) di pusat dan wilayah sebagai wahana penanggulangan krisis yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin, *dhu'afa*, dan *mustadh'afin*; 11) Meningkatkan kapasitas keahlian, modal, produksi, dan distribusi usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan usaha-usaha lainnya yang mampu meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat.

Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah yang diselenggarakan tanggal 21-24 Juni 2012 di Kota Bandung yang berkaitan dengan bidang garap Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) adalah: "*Pengembangan model praksis gerakan di bidang pemberdayaan masyarakat untuk komunitas petani, abang becak, buruh, nelayan dan kelompok dhu'afa lainnya yang memerlukan peningkatan dan diversifikasi dan model yang dikembangkan meliputi: 1) Menegakkan kedaulatan pangan; 2) Memberdayakan sektor informal; 3) Memberdayakan kaum buruh; dan 4) Memberdayakan kaum difabel*" (Tanfidz Tanwir). Keputusan Sidang Tanwir tersebut pada hakikatnya menjadi acuan program prioritas pada tahun selanjutnya. Seiring dengan amanah tersebut, kegiatan majelis harus berjalan secara simultan agar keberadaan dan eksistensi Majelis Pemberdayaan Masyarakat dapat segera dirasakan manfaatnya oleh umat. Namun demikian, menyadari banyaknya amanah yang diemban majelis, untuk memudahkan operasional kegiatan divisi pengembangan dalam majelis yang semula terdiri dari empat bagian dikembangkan menjadi lima divisi yaitu: Divisi Pengembangan dan Penguatan Kapasitas Organisasi; Divisi Model Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kaum Marginal; Divisi Pengembangan Model Pertanian Terpadu; Divisi Advokasi Kebijakan; dan Divisi Pengembangan Kemitraan Strategis dan Publikasi. Di samping itu, pengurus juga dibantu oleh Tim Fasilitator.

Dalam Mukhtar ke-47 diagendakan dan diprogramkan secara khusus tentang "Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas" sebagai

wujud aktualisasi Gerakan Jamaah untuk dilaksanakan dan menjadi gerakan masif dalam pergerakan Muhammadiyah ke depan.⁶¹ Gerakan pencerahan juga bermakna sebagai gerakan pemberdayaan. Setelah melakukan pembebasan, Muhammadiyah harus melakukan tindak lanjut penguatan masyarakat. Upaya penguatan itu bisa dilihat dari bagaimana Muhammadiyah memberdayakan masyarakat sejak berdirinya sampai saat ini. Komitmen pemberdayaan mengalami penguatan dan institusionalisasi ketika Muhammadiyah mendirikan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM).⁶² MPM adalah jawaban Muhammadiyah dalam merespons dan mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya kemiskinan. Muhammadiyah melalui MPM langsung terjun ke tengah-tengah masyarakat dengan melakukan intervensi mengatasi persoalan hidup masyarakat, khususnya di akar rumput, miskin, dan marginal. Adapun praksis MPR selama ini antara lain:

1. Jihad Kedaulatan Rakyat

"Selama Rakyat Masih Menderita, Tidak Ada Kata Istirahat" begitulah slogan yang diwariskan oleh almarhum Said Thuhuleley yang begitu melekat di hati aktivis/penggerak Majelis Pemberdayaan Masyarakat. "Jihad Menegakkan Kedaulatan Rakyat", yang meliputi bidang garap sebagai berikut: *Pertama*, jihad menegakkan kedaulatan pangan, meliputi antara lain: mengembangkan model pertanian terpadu (*integrated farming*); mendirikan pusat pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) pertanian terpadu; mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan; dan mengembangkan kapasitas masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan. *Kedua*, jihad memberdayakan sektor informal, meliputi antara lain: Pendampingan pedagang asongan; pendampingan abang becak; pendampingan kaki lima; pendampingan berbagai sektor informal lainnya. *Ketiga*, jihad memberdayakan kaum buruh, meliputi antara lain: penguatan kapasitas buruh migran untuk mengembangkan usaha; pendampingan terhadap keluarga buruh migran di tanah air; dan pendampingan buruh gendong dan perosok.

⁶¹ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Model Dakwah...*, 25.

⁶² Bachtiar Dwi Kurniawan, "Kemiskinan dan Kepemimpinan Muhammadiyah", dalam Abdul Mu'ti dkk, *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016), 312.

Keempat, “Jihad Advokasi Kebijakan Publik”, advokasi kebijakan, terutama yang berhubungan dengan kebijakan publik yang tidak akomodatif dan sensitif terhadap kebutuhan masyarakat luas maupun komunitas-komunitas yang termarginalisasi. Program kerja bidang garap ini diarahkan kepada dua hal, yang menjadi prioritas utama, yaitu: a. memfasilitasi penyaluran aspirasi masyarakat miskin langsung kepada penentu kebijaksanaan/pengambil keputusan, dengan menggunakan pendekatan “*islah*”. Prinsipnya: rakyat miskin tidak dikorbankan, mengangkat isu-isu besar yang berhubungan dengan nasib rakyat banyak sehingga menjadi perbincangan khalayak. Program ini misalnya advokasi kebijakan publik yang merugikan rakyat, advokasi penyusunan APBN maupun APBD, dan Sekolah Aparatur Desa. *Kelima*, jihad memberdayakan kaum difabel, meliputi antara lain: penguatan kapasitas penyandang disabilitas, fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, lapangan kerja bagi penyandang disabilitas, dan advokasi aturan dan perundangan yang pro penyandang disabilitas.⁶³

Jenis program-program di atas menandai dinamika baru gerakan Muhammadiyah di abad kedua, yaitu mulai masuknya Muhammadiyah langsung ke akar rumput untuk bersama masyarakat berupaya menolong diri mereka sendiri. Inilah inti pemberdayaan masyarakat. Kalau selama ini Muhammadiyah terkesan sebagai gerakan elite kota maupun desa, maka dinamika menjelang usia satu abad memperlihatkan bahwa Muhammadiyah memilih juga ‘jalan sunyi’, masuk langsung ke desa untuk bersama masyarakat ‘melumuri tangan dengan lumpur’, atau bermandi keringat di gang-gang sempit untuk bersama masyarakat miskin berbuat sesuatu bagi upaya menolong diri sendiri. Beragam tanggapan memang muncul dari kalangan persyarikatan sendiri. Ada yang memberi komentar, “Muhammadiyah kok ngurus petani”. Ini perkara jalan berpikir. Sudah lama di kalangan Muhammadiyah berkembang cara berpikir bahwa Muhammadiyah itu ya sekolah, ya rumah sakit, ya panti asuhan. Karena itu, dinamika menjelang satu abad usia Muhammadiyah ini memerlukan suatu upaya serius juga untuk mengembangkan jalan berpikir

⁶³ Laporan Pertanggung Jawaban Muktamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015, 410.

sedemikian sehingga persoalan dasar rakyat juga menjadi bagian yang dipikirkan Muhammadiyah.⁶⁴

2. Merengkuh dan Memberdayakan PSK

Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan merupakan representasi Muhammadiyah di tingkat kecamatan. Secara geografis berada di kompleks lokalisasi PSK yaitu di Bangunsari-Dupak dan Tambak Asri-Morokrembangan Surabaya. PCM Krembangan melaksanakan program pemberdayaan ekonomi terhadap mantan PSK yang dialamatkan sebagai kaum lemah (baik secara iman maupun modal). Pemberdayaan ekonomi tersebut ditujukan pada pengembangan tiga ranah yakni sosial, ekonomi dan religiusitas (perilaku keberagamaan) dengan pendekatan dari sisi ekonomi melalui pemberian modal usaha. PCM Krembangan hidup dan berkembang di lingkungan lokalisasi. Di satu sisi PSK menjadi beban karena merupakan bagian dari patologi sosial, di sisi lain mereka merupakan peluang dan ladang bagi dakwah *amar ma'ruf nahi mungkar*. Sebelum ada isu dan upaya Pemkot Surabaya tentang penutupan lokalisasi di daerah Bangunsari maupun Tambak Asri, program kerja Muhammadiyah telah melibatkan para PSK, misalnya pengajian rutin bersama ibu-ibu Aisyiyah. Melalui pengajian ini, PCM melakukan pendekatan baik kepada Bapak/Ibu geromo/mucikari agar menyekolahkan anak-anak mereka di SD Muhammadiyah 11 Bangunsari, maupun aktif di AMM (Angkatan Muda Muhammadiyah) melalui beberapa ortom Muhammadiyah di lingkungan PCM Krembangan, baik Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyiyah (NA), Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Tidak kalah penting PCM memberikan santunan rutin maupun pembinaan keterampilan bagi PSK dengan merangkul NU, LSM-LSM terkait, dan pemerintah.⁶⁵

Ada dua pembagian daerah binaan PCM Krembangan yaitu Bangunsari dan Tambak Asri. Kedua daerah ini memiliki karakteristik yang berbeda baik dari segi kondisi ekonomi rata-rata penduduknya, kondisi sosio-kultural maupun kondisi sosio-religiusitasnya. Spirit awal dakwah PCM Krembangan di dua daerah ini adalah untuk

⁶⁴ Said Tuhuleley, “Gerakan Dakwah Muhammadiyah...”

⁶⁵ Arin Setiyowati, “Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krembangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Surabaya”.

mengubah kampung prostitusi menjadi kampung santri. Karenanya tanpa perlu menunggu pemerintah untuk melakukan pemihakan pada para PSK sebagai bagian dari kaum *mustadh'afin*, PCM Krembangan melalui beragam program dan kegiatan selalu mengikutsertakan para PSK, baik secara langsung maupun tidak langsung. PCM mengembangkan program binaan, baik untuk PSK aktif maupun mantan PSK. Berdasar data arsip PCM Krembangan, PSK binaan Tahap 1 berjumlah 25 orang (pembinaan di masjid At-Taqwa Bangunsari), sementara PSK binaan tahap 2 sejumlah 48 orang (pembinaan di SD Muhammadiyah 11), jadi total ada sekitar 73 PSK yang dibina sekaligus diverifikasi kesiapan dan kelayakan mereka untuk berusaha (berwiraswasta). Dari 73 PSK maupun mantan PSK yang dianggap layak diberikan modal dan dibuatkan usaha. Setelah berjalan selama beberapa waktu dan seleksi alam, akhirnya 40 orang dari mereka dapat bertahan dan terus melanjutkan usahanya. Pemberdayaan dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pengajian rutin, shalat tarawih berjamaah, pondok ramadhan WTS, bantuan mukena dan sembako, pembinaan kewirausahaan, pelatihan memasak, konseling (curhat bareng), pembinaan HIV, usaha warung kopi, usaha warung makan, usaha gorengan dan es degan, dan usaha sayur keliling.⁶⁶

Setelah melalui proses seleksi, penelusuran minat dan bakat usaha, pelatihan dan pemberian modal, akhirnya dari 40 orang tersebut, seiring berjalannya waktu berkurang menjadi 35 orang. Dari 35 PSK/ mantan PSK sebelum penutupan mengalami seleksi alam terutama dengan adanya kebijakan penutupan lokalisasi secara resmi oleh Pemkot Surabaya. Akhirnya pasca penutupan lokalisasi, hanya 17 mantan PSK yang dibina oleh PCM Krembangan melalui usaha-usaha kecil di lingkungan Bangunsari maupun Tambak Asri. Dari 17 mantan PSK ini ada yang mendapat bantuan modal penuh dan ada juga yang hanya mendapatkan bantuan tambahan modal. Jumlah 17 orang ini semakin hari semakin berkurang dengan berbagai alasan, diantaranya pulang kampung, menikah, dan melarikan diri.⁶⁷ Dalam hal urgensi upaya pertolongan ekonomi perlu

digaris bawahi, mengingat bahwa rerata umur mantan PSK yang menjadi mitra binaan PCM Krembangan adalah ibu-ibu yang memiliki beban anak dan keluarga di desa yang setiap bulannya menunggu kiriman uang dari mereka. Peluang ini yang disambut oleh PCM Krembangan melalui program pemberdayaan dalam rangka menjaga ketahanan ekonomi.

3. Revolusi Pertanian Terpadu

Sektor pertanian merupakan wilayah tajdid baru Muhammadiyah di abad kedua. Melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Muhammadiyah mulai fokus memberdayakan petani dan pertanian yang selama ini terabaikan. Ada beberapa contoh yang sudah berhasil dilakukan oleh MPM. *Pertama*, Sawangan merupakan kecamatan yang berada di lereng gunung Merapi dan Merbabu. Sebagian penduduknya bermata pencaharian petani, juga sebagai buruh tambang pasir dan batu di sungai-sungai kecamatan ini, seperti Kali Putih dan Kali Pabelan. Kemiskinan menjadi bagian penting wajah pedesaan, belum lagi tingkat pendidikan dan buta huruf. Di Cabang Sawangan, terdapat 12 desa. Tetapi Muhammadiyah baru 6 ranting. Hampir semua ranting tidak aktif dikarenakan warga sibuk dengan aktivitas mata pencaharian untuk kebutuhan ekonomi rumah tangga. Momentum pengembangan cabang dan ranting bermula dari Nur Ardiyanto, aktivis Muhammadiyah di Desa Piyungan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Magelang untuk mengembangkan usaha pertanian miliknya seluas 2 ha. Kebetulan saat itu MPM PP Muhammadiyah sedang mengadakan Diklat Pertanian Terpadu ke-3 di Yogyakarta, Maret 2011. Setelah Diklat Ardiyanto hampir setiap hari menemui Konsultan Bidang Pertanian MPM PP Muhammadiyah, Ir. Syafii Latuconsina di Yogyakarta. Melihat keseriusan MPM PPM membuat Ardiyanto sebagai inti jamaah tani di Sawangan menjadi fasilitator lapangan. Maka dibentuklah Kelompok Tani "Surya Gemilang" yang didukung PCM Sawangan. Kelompok ini pesat, sehingga menjadi 7 kelompok Surya Gemilang se-Kecamatan. MPM kemudian mengadakan pelatihan pertanian se-kecamatan Sawangan. Bersama dengan itu Lazismu membantu menyediakan kambing jenis Merino sebanyak 13 ekor sebagai "pabrik penghasil utama bahan baku pupuk kocor yang selama ini menjadi andalan MPM. Maka dibuatlah

⁶⁶ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Best Practice Program Muhammadiyah*, 73-83.

⁶⁷ Arin Setiyowati, "Efektivitas Pemberdayaan.

Pusdiklat Pertanian Terpadu Unit-3 melengkapi Unit-1 di Makassar dan Unit-2 di Kayutanam, Sumatra Barat.⁶⁸

Kedua, berbeda dengan Sawangan yang memulai gerakannya setelah Diklat, kegiatan ini justru dimulai sejak erupsi merapi oleh MDMC. Tepatnya di Desa Jrasah, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali. Pasca darurat PCM Selo meminta MPM PPM agar membantu *recovery* di bidang pertanian. Lalu diadakan Pelatihan Pertanian Terpadu setengah hari, kemudian diberi pendampingan rutin dengan membentuk kelompok tani "Surya Madani". Lazismu kemudian menyumbang 23 Domba Melino. Usaha "Surya Madani" luar biasa, kambing 23 ekor telah menjadi 120 ekor. Keuntungannya tidak hanya dari kambing tetapi juga kotorannya. Saat ini, PNPM Boyolali menetapkan Desa Jrasah sebagai Desa Belajar Pertanian Organik Terpadu.⁶⁹

Ketiga, di tengah kerisauan akibat turunnya produksi pertanian, MPM PP Muhammadiyah mampu melakukan revolusi pertanian di Banjarnegara. Banjarnegara merupakan salah satu *pilot project* MPM PP Muhammadiyah di Jawa Tengah, sehingga di kabupaten ini Muhammadiyah telah membantu terjadinya peningkatan produksi pertanian melalui cara "bagaimana *cost of production* dapat diturunkan sampai 50%. Meskipun luas wilayah 1.064,52 km persegi yang umumnya berstruktur bebatuan, hanya 18,17% tanah sawah, dan dari luas itu hanya 6,32% yang berpengairan teknis, 5,29% berpengairan sederhana, 5,65% sawah tadah, dan 0,70% berpengairan non-teknis, sektor pertanian di Banjarnegara menjadi sektor penting. Namun ada kecenderungan produksi pertanian terus menurun hasilnya. Untuk mengembalikan kesuburan tanah, petani diajak membuat sendiri Pupuk Lengkap Kocoran (PLK) dengan memanfaatkan nanas masak yang diblender kemudian dicampur dengan (kotoran kambing) yang telah diolah. Sedangkan penanaman menggunakan sistem legawa, di mana setiap 3 baris diberi kelonggaran (kelegawaan) 30 cm. Tujuannya agar sinar matahari tidak masuk. Revolusi pertanian di Banjarnegara sudah diakui oleh Menteri Pertanian, sebagai harapan baru bagi

petani dan pertanian. Apalagi pendampingan MPM PPM menunjukkan hasil bagi tanaman kentang dan teh di Pengelengan, Bandung, juga berbagai jenis sayuran dan buah-buahan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa praksis pemberdayaan Muhammadiyah dibentuk oleh habitus Moeslim Abdurrahman, ditambah modal intelektualnya yaitu "Islam Transformatif" yang merupakan reinterpretasi teologi al-Ma'un KH. Ahmad Dahlan. Modal dan habitus ini bergerak di arena perjuangan yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan sosial keagamaan, yang kemudian melahirkan Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) sebagai praksis pemberdayaan Muhammadiyah. Dalam proses pelebagaan pemikiran Moeslim Abdurrahman ini mengalami proses eksternalisasi yaitu proses kemunculan gagasan Islam Transformatif menjadi fenomena obyektif di Muhammadiyah maupun ruang publik. Akhirnya terinternalisasi dalam Muhammadiyah, sehingga melembaga menjadi Majelis Pemberdayaan Masyarakat.[]

⁶⁸ Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Best Practice Program Muhammadiyah*, 55-57.

⁶⁹ *Ibid.*, 60.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abdurrahman, Moeslim. *Kang Thowil dan Siti Marginal*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.
- Abdurrahman, Moeslim. *Semarak Islam Semarak Demokrasi?* Jakarta: Pustaka, 1996.
- Abdurrahman, Moeslim. *Islam Yang Memihak*. Yogyakarta: LkiS, 2005.
- Abdurrahman, Moeslim. *Bersujud Di Baitullah: ibadah haji. mencari kesalehan hidup*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of The Judgment of Taste*. terj. Ricard Nice. UK: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1984.
- Chambers, R. "Poverty and Livelihoods: Whose Reality Counts?". dalam G. Kartasasmita. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan* (Jakarta: Cides, 1996.
- <http://islamlib.com/gagasan/pergulataniman/moeslim-abdurrahman-berislam-dari-bukhari-muslim-ke-weber-durkheim/> (diakses tanggal 11/08/2018).
- Ife, J.W. *Community Development: Creating Community Alternatives. Vision, Analysis and Practice*. Longman. Australia, 1995.
- Jinan, Muthohharun. "Dakwah Pelayanan Muhammadiyah". dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016.
- Kartasasmita, G. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung: Institut Teknologi Bandung, 1996.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. "Pemberdayaan Masyarakat: Jalan Dakwah Muhammadiyah di Akar Rumput" dalam *Pelajar Bergerak Menuju Indonesia Berkemajuan*. Jakarta: Al-Wasat, 2014.
- Kurniawan, Bachtiar Dwi. "Kemiskinan dan Kepemimpinan Muhammadiyah". dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah Press, 2016.
- Laporan Lembaga Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 2000-2005. Disampaikan pada Mukhtamar Muhammadiyah ke-45 (Malang. 2005). 111.
- Laporan Majelis dan Lembaga serta Organisasi Otonom Pimpinan Pusat Muhammadiyah Disampaikan pada Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 2009.
- Laporan Pertanggung Jawaban Mukhtamar ke-47 Muhammadiyah Makassar 2015.
- Maarif, Ahmad Syafii. "Antara Penentu dan Pembantu" dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan*. Surakarta: Muhammadiyah Press.
- Mu'ti, Abdul. "Muhammadiyah Gerakan Civil Society yang Mandiri. Tidak Anti Pemerintah." *Media Maarif* Vol 4, no. 2 (2009).
- Mutthoharoh. "Teologi Islam Transformatif Di Era Kontemporer". *Penelitian* Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Model Dakwah Pencerahan Berbasis Komunitas*. Yogyakarta: PPM, 2015.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Berita Resmi Muhammadiyah*. BRM. No 1 tahun 2005.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah. *Best Practice Program Muhammadiyah*.
- Prijono, O.S. dan Pranarka, A.M.W. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Penerbit Centre for Strategic and International Studies, 1996.
- Qodir, Zuly. "Kalibokong Theology And Moeslim Abdurrahman's Transformative Islamic Education" *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017) .
- Raharjo, Fauzan Budi. "Islam Transformatif Dalam Pandangan Moeslim Abdurrahman". *Penelitian* Fakultas Ushuluddin Dan Pemikiran Islam UIN

- Sunan Kalijaga, 2015.
- Riyanto, Waryani Fajar. Integrasi-Interkoneksi Keilmuan Birografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...) *Person. Knowledge. and Institution*. Yogyakarta: Suka-Press, 2013.
- Saputra, Sawaluddin Eka. "Institusionalisasi Gagasan Islam Transformatif dalam Pendidikan Islam". *Jurnal Iseedu* Volume. 1, no. 1 (2017).
- Setiyowati, Arin. "Efektivitas Pemberdayaan Ekonomi Oleh Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) Krebangan Terhadap Mantan Pekerja Seks Komersial (PSK) di Surabaya".
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaringan Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia, 1999.
- Syahputra, Deni. "Dakwah Transformatif (Studi Pemikiran Moeslim Abdurrahman)". *Penelitian* Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi IAIN Raden Intan Lampung, 2016.
- Thohari, Hajriyanto Y. "Trisula Baru Gerakan Muhammadiyah" dalam Abdul Mu'ti dkk. *Kosmopolitanisme Islam Berkemajuan* (Surakarta: Muhammadiyah Press).
- Webb, Jen., Schirato, Tony., and Danaher, Geof. *Understanding Bourdieu*. London: SAGE Ppublication, 2002.

EDUCATION SERVICE INDEX OF BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN

SRI RAYANI TANJUNG*

ABSTRACT

This paper is based mainly on the survey findings on the Education Service Index which provides information on measuring the level of training participants' satisfaction on public services at the Medan Religious Training Centre (BDK). This survey is carried out to investigate the quality of public services and is one of the requirements in the Integrity Zone Development Program at BDK Medan. Respondents in this survey were training participants at BDK Medan from 2016-2018 and were selected according based on cluster random sampling technique. The locations of the activities were 35 cities (Office of MORA at Regency/City levels, IAIN, IAKN and STAKPN) with a total of 230 respondents. Technically the sending of questionnaire was conducted by writing a permission letter to BDK Medan stakeholders and meetings at aHotel/Restaurant Hall for filling out the questionnaire. The results of this study showed that all elements of BDK Medan's public services are in "good" category scored 86,17 in the interval (76,61-88,30).

KEY WORDS: *Education service index, public satisfaction index, service quality, public service*

INDEKS LAYANAN KEDIKLATAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN

ABSTRAK

Tulisan ini diangkat dari hasil survei untuk mengetahui indeks layanan kediklatan yang memberikan informasi pengukuran tingkat kepuasan peserta diklat terhadap layanan publik Balai Diklat Keagamaan (BDK) Medan. Survei ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam melihat kualitas pelayanan publik dan merupakan salah satu syarat dalam Program Pembangunan Zona Integritas BDK Medan. Responden pada survei ini adalah peserta diklat yang telah menerima pelayanan/alumni diklat BDK Medan dari tahun 2016-2018 dan dipilih sesuai dengan pemetaan yang dilakukan berdasarkan teknik *cluster random sampling*. Lokasi kegiatan sebanyak 35 kota (Kemenag Kab/Kota, IAIN, IAKN, dan STAKPN) dengan jumlah responden 230 orang. Secara teknis, penyampaian kuesioner dilakukan dengan menyurati *stakeholder* BDK Medan dan menyepakati pertemuan tersebut di Aula Hotel/Rumah Makan dalam pengisian kuesioner. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa seluruh unsur pelayanan publik BDK Medan dalam kategori "baik", dengan nilai indeks layanan kediklatan BDK Medan sebesar 86,17 yang berada pada interval (76,61-88,30).

KATA KUNCI: Indeks layanan kediklatan, indeks kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan, pelayanan publik

* Balai Diklat Keagamaan Medan, Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan, tanjungsri93@gmail.com

** Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Visi BDK Medan adalah “terwujudnya aparatur yang profesional dan berakhlak mulia di wilayah kerja BDK Medan, dengan misi yaitu meningkatkan kualitas penyelenggara pendidikan dan pelatihan (diklat) serta sarana dan prasarana. Peningkatan kualitas ini dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan profesionalitas dan akuntabilitas pelaksanaan program untuk mewujudkan layanan kediklatan yang memuaskan seluruh *stakeholders* dan mampu menghasilkan peningkatan kualitas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) BDK Medan.¹

Upaya peningkatan mutu secara terus menerus yang dilakukan di BDK Medan diharapkan akan menumbuhkan budaya mutu sehingga akan tercapai peningkatan standar pelayanan yang berkelanjutan (*continuous quality improvement*). Adapun tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis kebutuhan masyarakat. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan.

Sejalan dengan hal tersebut Gasperz² mendeskripsikan ciri-ciri atau atribut yang melekat pada kualitas pelayanan publik adalah ketepatan waktu pelayanan; akurasi pelayanan; kesopanan dan keramahan; kemudahan; kenyamanan; dan atribut pendukung pelayanan lainnya, seperti ruang tunggu yang sejuk, kebersihan, dan lain-lain. Dengan diketahuinya dimensi kualitas pelayanan yang baik, maka diharapkan aparatur pemerintah dalam melakukan tugasnya dapat mencapai kualitas pelayanan dalam rangka pemenuhan kepuasan pelanggan.

Untuk mengetahui sejauh mana pelayanan publik mampu memenuhi harapan masyarakat di suatu instansi maka diperlukan upaya-upaya untuk selalu memperbaiki pelayanan sehingga sesuai dengan perkembangan dan harapan masyarakat. Salah satu bentuk evaluasi perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Indeks Layanan Kediklatan dan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Survei ini wajib dilaksanakan oleh seluruh unit penyelenggara pelayanan publik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik³ dan didukung oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014*⁴ dan pelaksanaannya diatur oleh Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik⁵.

BDK Medan telah terpilih sebagai *Pilot Project* Pembangunan Zona Integritas dan Reformasi Birokrasi. Oleh sebab itu, diperlukan pengukuran Indeks Layanan Kediklatan dan IKM di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara dengan tujuan mengetahui pendapat atau persepsi masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh BDK Medan.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh manakah tingkat kepuasan peserta diklat dapat menggambarkan mutu pelayanan publik BDK Medan?

3. Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta diklat sehingga dapat menggambarkan mutu pelayanan publik BDK Medan melalui Pengukuran Indeks Layanan Kediklatan.
- Untuk mengetahui peningkatan mutu pelayanan publik BDK Medan sehingga menjadi bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas layanan secara berkesinambungan.
- Terpenuhinya nilai IKM BDK Medan pada Aplikasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas dan Monitoring Kelompok Pokja Reformasi Birokrasi Kementerian Agama.

³ Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Jakarta, 2009), 13.

⁴ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014* (Jakarta, 2010), 8.

⁵ Indonesia, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Jakarta, 2017), 2.

¹ Indonesia, Laporan Tahunan Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 2018 (Medan, 2018), 9.

² Gasperz Vincent, *Manajemen Kualitas Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), 2.

4. Manfaat

Manfaat pengukuran indeks layanan kediklatan adalah tersedianya informasi tentang kinerja penyelenggara pelayanan publik sehingga menjadi bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan BDK Medan.

B. LANDASAN TEORITIS

1. Pelayanan Publik

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*⁶, pelayanan publik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Pelayanan adalah perihal atau cara melayani.
- b. Pelayanan adalah kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang dan jasa.
- c. Pelayanan medis merupakan pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosa, dan pengobatan suatu gangguan kesehatan tertentu.
- d. Publik berarti orang banyak (umum).

Pengertian lain berasal dari Moenir⁷ yang menyatakan bahwa: "Pelayanan umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu". Pelayanan merupakan kegiatan utama pada orang yang bergerak di bidang jasa, baik itu orang yang bersifat komersial ataupun yang bersifat non komersial. Namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan antara pelayanan yang dilakukan oleh orang yang bersifat komersial yang biasanya dikelola oleh pihak swasta dengan pelayanan yang dilaksanakan oleh organisasi non komersial yang biasanya adalah pemerintah. Kegiatan pelayanan yang bersifat komersial melaksanakan kegiatan dengan berlandaskan mencari keuntungan, sedangkan kegiatan pelayanan yang bersifat non-komersial kegiatannya lebih tertuju pada pemberian layanan kepada masyarakat (layanan publik atau umum) yang sifatnya tidak mencari keuntungan akan tetapi berorientasi pada pengabdian.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik,

yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik⁸ memberikan pengertian bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Selanjutnya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik⁹. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi, dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat.

Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Adapun prinsip dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat perlu memperhatikan hal berikut:

- a. Transparan (hasil survei kepuasan masyarakat harus dipublikasikan dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat);
- b. Partisipatif (dalam melaksanakan survei kepuasan masyarakat harus melibatkan peran serta masyarakat dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya);

⁸ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Jakarta, 2009), 3.

⁹ Indonesia, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Jakarta, 2017), 6.

⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990).

⁷ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 7.

- c. Akuntabel (hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku);
- d. Berkesinambungan (survei kepuasan masyarakat harus dilakukan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan);
- e. Keadilan (pelaksanaan survei kepuasan masyarakat harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta perbedaan kapabilitas fisik dan mental);
- f. Netralitas (dalam melakukan survei kepuasan masyarakat, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan, dan tidak berpihak).

Unsur survei kepuasan masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

- a. Persyaratan (syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif);
- b. Sistem, mekanisme, dan prosedur (prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan);
- c. Waktu penyelesaian (jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan);
- d. Biaya/tarif (ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat);
- e. Produk spesifikasi jenis pelayanan (hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan).
- f. Kompetensi pelaksana (kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman);
- g. Perilaku pelaksana (sikap petugas dalam memberikan pelayanan);
- h. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan (tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut);

- i. Sarana dan prasarana (sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses).

Survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh BDK Medan merupakan survei indeks layanan kediklatan karena tugas dan fungsi BDK Medan (PMA Nomor 59 Tahun 2015 Pasal 2)¹⁰ adalah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan. Dalam melaksanakan tugas pada Pasal 2 tersebut BDK Medan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana dan program diklat;
- b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas BDK Medan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga BDK Medan.

2. Kualitas Pelayanan Publik

Goetsch dan Davis yang diterjemahkan Tjiptono¹¹ membuat definisi mengenai kualitas sebagai berikut : “Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan”. Definisi kualitas di atas mengandung makna bahwa elemen-elemen kualitas yaitu:

- a. Kualitas merupakan kondisi yang dinamis.
- b. Kualitas berhubungan dengan produk jasa, manusia, proses, dan lingkungan.
- c. Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.

Menurut Wyckcof dan Lovelock dalam bukunya yang dikutip dan diterjemahkan oleh Tjiptono¹² ada dua faktor utama yang mempengaruhi kualitas pelayanan yaitu *respected service* dan *perceived service*. Apabila jasa yang diterima atau dirasakan (*perceived service*) sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas ideal. Sebaliknya

¹⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Jakarta, 2015), 2-3.

¹¹ F. Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Ardi, 2002), 101.

¹² F. Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Ardi, 2002), 60.

jika jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa yang dipersepsikan buruk. Baik tidaknya kualitas jasa tergantung pada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pelanggannya secara konsisten.

Masyarakat akan merasa puas apabila mereka mendapatkan suatu pelayanan yang berkualitas A.S. Konsep pelayanan yang efektif sebagai suatu pelayanan yang berkualitas menurut Moenir¹³ adalah "Layanan yang cepat, menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan menyenangkan, tidak mengandung kesalahan, mengikuti proses dan prosedur yang telah ditetapkan lebih dahulu." Jadi pelayanan yang berkualitas itu tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melayani, tetapi juga pihak yang ingin dipuaskan, dan yang menjadi prinsip-prinsip layanan yang berkualitas antara lain:

- a. Proses dan prosedur harus ditetapkan lebih awal.
- b. Proses dan prosedur itu harus diketahui oleh semua pihak yang terlibat.
- c. Disiplin bagi pelaksanaan untuk menaati proses dan prosedur.
- d. Perlu peninjauan proses dan prosedur oleh pimpinan, sewaktu-waktu dapat dirubah apabila perlu.
- e. Perlu menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembang budaya organisasi untuk menciptakan kualitas layanan.
- f. Kualitas berarti memenuhi keinginan, kebutuhan, selera konsumen
- g. Setiap orang dalam organisasi merupakan *partner* dengan orang lainnya.

Menurut Parasuraman dkk., ada beberapa kriteria yang menjadi dasar penilaian konsumen terhadap pelayanan yaitu: a). Bukti langsung (*tangible*), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, dan sarana komunikasi; b). Keandalan (*reliability*) yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan; c). Daya tanggap (*responsiveness*) yaitu keinginan para staf untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; e). Jaminan (*assurance*) mencakup

¹³ Moenir, *Manajemen Pelayanan Umum* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995), 204.

pengetahuan, kemampuan, dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para staf bebas dari bahaya, resiko, dan keragu-raguan; f). Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi yang unik, perhatian individu, memahami kebutuhan para pelanggan¹⁴.

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi Survei Indeks Layanan Kediklatan ini dilaksanakan di lingkungan wilayah Kerja BDK Medan pada 33 Kemenag Kab./Kota tepatnya di Aula Pertemuan Hotel/Wisma/Pondok yang telah dipetakan pada tanggal 21 Desember 2018. Responden merupakan peserta diklat yang telah menerima pelayanan publik BDK Medan dengan bentuk kegiatan "Evaluasi Pasca Diklat di Wilayah Kerja BDK Medan Tahun 2018".

2. Responden Survei

Adapun responden survei ini adalah peserta diklat yang telah menerima pelayanan publik BDK Medan (alumni diklat) tahun 2016 s.d. tahun 2018 sebanyak 230 orang yang mengisi kuesioner, akan tetapi setelah validasi kelengkapan kuesioner yang dianggap layak untuk diolah adalah sebanyak 208 kuesioner (Tabel 1.)

Tabel 1.
Validasi Data Jumlah Kuesioner Yang Layak Diolah

Jumlah Kuesioner	Validasi Jumlah Kuesioner	
	Layak Olah	Tidak Layak Olah
230 Responden	208 Reponden	22 Responden

3. Metode Survei

Penelitian survei mengkaji populasi (*universe*) yang besar maupun kecil dengan menyeleksi serta mengkaji sampel yang dipilih dari populasi itu, untuk menemukan insidensi, distribusi, dan interelasi relatif dari variabel-variabel.¹⁵

Responden pada Survei Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dipilih secara acak dengan menggunakan teknik *Cluster Random Sampling* yaitu teknik memilih sebuah sampel dari kelompok-kelompok unit yang kecil. Sesuai

¹⁴ F. Tjiptono, *Manajemen Jasa* (Yogyakarta: Ardi, 2002), 70.

¹⁵ Fred N. Kerlinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral* (Yogyakarta: UGM Press, 2004), 660.

dengan namanya, penarikan sampel ini didasarkan pada gugus atau *cluster*. Teknik *cluster sampling* digunakan jika catatan lengkap tentang semua anggota populasi tidak diperoleh serta keterbatasan biaya dan populasi geografis elemen-elemen populasi berjauhan. Secara teknis penyampaian kuesioner dilakukan dengan mengumpulkan para alumni diklat, rekan sejawat, dan atasan langsung dengan memberikan surat kepada 35 Kepala Kemenag Kab./Kota agar menentukan peserta kegiatan dengan 230 responden.

4. Alat Pengumpulan Data

Penyusunan survei Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan menggunakan alat bantu kuesioner sebagai alat pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun berdasarkan tujuan survei terhadap tingkat kepuasan masyarakat dan disebarakan sesuai pemetaan.

Prinsip pelayanan yang digunakan sebagai dasar pengukuran Indeks Layanan Kediklatan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik¹⁶ sebagai berikut:

- a. *Persyaratan*; syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan baik persyaratan teknis maupun administratif.
- b. *Sistem, Mekanisme dan Prosedur*; tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
- c. *Waktu Penyelesaian*; jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
- d. *Biaya/Tarif*; ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
- e. *Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan*; hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari

setiap spesifikasi jenis pelayanan.

- f. *Kompetensi Pelaksana*; kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
- g. *Perilaku Pelaksana*; sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
- h. *Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan*; tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
- i. *Sarana dan Prasarana*; Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Secara garis besar desain penelitian kegiatan "Pengisian Kuesioner pada Evaluasi Pasca Diklat di Lingkungan Wilayah Kerja BDK Medan Tahun 2018" terbagi menjadi beberapa tahap kegiatan, yaitu:

a. Tahap Persiapan (*Preparation*)

Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang optimal, maka diperlukan tahap persiapan yang baik. Pada tahap ini yang perlu dipersiapkan adalah: *Kick Off Meeting/Rapat Koordinasi* awal dengan Tim Teknis, Penyusunan rancangan indikator, desain kuesioner, dan metode sampling pada Survei Indeks Layanan Kediklatan.

Beberapa prinsip dasar dalam penyusunan kuesioner, antara lain adalah isi dan tujuan pertanyaan dalam kuesioner harus sesuai dengan tujuan survei; bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti; pertanyaan yang diberikan tidak menimbulkan makna ganda sehingga menyulitkan responden untuk menjawabnya; pertanyaan yang diberikan merupakan pertanyaan yang aktual, mudah diingat responden, bukan pertanyaan yang perlu berfikir keras dalam menjawabnya; pertanyaan dalam kuesioner sebaiknya tidak terlalu banyak, agar responden tidak jenuh menjawabnya; urutan pertanyaan dalam kuesioner biasanya diacak, atau dimulai dari yang umum menuju ke yang spesifik atau dapat dimulai dari yang mudah menuju ke yang lebih sulit.¹⁷

¹⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Jakarta, 2017), 8-9.

¹⁷ Isti Pujihastuti. "Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian". *CEEARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah* 2, no. 1 (2010): 49-51.

Adapun kuesioner pada Survei Indeks Layanan Kediklatan ini menggunakan pertanyaan tertutup (*close ended question*). Pertanyaan tertutup yaitu pertanyaan dalam kuesioner yang mengharapkan responden untuk memilih salah satu alternatif pilihan jawaban yang telah tersedia (*multiple choice*). Pertanyaan tertutup ini akan membantu responden untuk menjawab dengan cepat dan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis data menggunakan skala Likert.

b. Tahap Pelaksanaan Survei Lapangan (*Fieldwork Survey*)

Tahapan ini dilaksanakan dengan mengirimkan surat kegiatan beserta kuota peserta kegiatan, selanjutnya setiap Tim Survei Lapangan melakukan koordinasi langsung kepada Kemenag Kab/Kota melalui bantuan Admin Simdiklat dalam penentuan peserta yang mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya Admin Simdiklat akan mendisposisi surat dan berkoordinasi dengan Kepala Kankemeng Kab/Kota dalam mengirimkan surat balasan yang merupakan daftar peserta yang akan mengikuti kegiatan. Tim Survei juga melakukan koordinasi dalam penentuan lokus kegiatan serta sarana prasana yang dibutuhkan sebelum kegiatan berlangsung.

Survei ini dilaksanakan dengan pembukaan oleh Kakankemenag Kab/Kota dengan menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan serta memberikan penekanan agar jawaban responden sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya untuk tujuan evaluasi BDK Medan menjadi lebih baik. Selanjutnya Tim Survei Lapangan akan menjelaskan pengisian kuesioner dan mengawasi kegiatan pengisian kuesioner dan langkah terakhir melakukan pemeriksaan terhadap kuesioner dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala BDK Medan berupa progres pelaksanaan survei lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi di lapangan, serta mendiskusikan dan mencari alternatif solusi yang akan diambil dalam menghadapi kendala pelaksanaan survei lapangan.

c. Tahap Pengolahan dan Analisis Data (*Data Processing and Analysis*)

Tahapan ini dilakukan dengan *coding*, *input*, dan *cleaning data*, selanjutnya dilakukan analisis data yang disesuaikan dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Nilai

Indeks Layanan Kediklatan dan Indeks Persepsi Korupsi dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{jumlah bobot}}{\text{jumlah unsur}} = \frac{1}{X} = N;$$

Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ILK, IPK} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks Layanan Kediklatan (ILK) yaitu antara 20-100 maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 20, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{ILK Unit Pelayanan} \times 20$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

- Menambah unsur yang dianggap relevan;
- Memberikan bobot yang berbeda terhadap unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.
- Berikut Tabel 2. merupakan nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan:

Tabel 2.

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan, dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (X)	Kinerja Unit Pelayanan (Y)
1	1,00-2,5996	25,00-64,99	D	Tidak Baik
2	2,60-3,064	65,00-76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644-3,532	76,61-88,30	B	Baik
4	3,5324-4,00	88,31-100,00	A	Sangat Baik

Sumber: Permenpan RB No. 14 Tahun 2017, hal. 19

Pengolahan data survei dilakukan dengan komputer berbantu *software* SPSS dan *Microsoft Excel*.

D. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Profil BDK Medan

Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan (BDPTK) Medan berdiri pada tahun 1981 melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kotamadya dan Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan. Pada periode ini, wilayah kerjanya adalah Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh.

Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 1979 sampai tahun 1980, ketika masih bernama Balai Penataran Guru Agama (BPGA), wilayah kerjanya meliputi empat provinsi yaitu Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau. Secara organisasi, BPGA bertanggung jawab langsung kepada Sekjen Departemen Agama cq. Pusdiklat Departemen Agama. Pada periode ini, BPGA memiliki struktur sebagai berikut: 1. Kepala Balai Diklat. 2. Seksi Diklat Tata Usaha. 3. Seksi Diklat Guru Agama. 4. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan.

BDPTK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hanya terfokus pada pegawai administrasi, sedangkan pendidikan dan pelatihan guru masih dilaksanakan oleh Kanwil Departemen Agama Provinsi. Sejak tahun 1984, berdasarkan KMA Nomor 45 Tahun 1984 Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Padang didirikan. Saat itu Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Padang memiliki wilayah kerja sebanyak 3 provinsi yaitu Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Dengan begitu maka Balai Diklat Pegawai Teknis Keagamaan Medan hanya memiliki 2 wilayah kerja yaitu Sumatera Utara dan Aceh.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan di Indonesia dan pertumbuhan madrasah di lingkungan Departemen Agama, pada tahun 2002 lahirlah instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pengalihan Perencanaan Program dan Anggaran serta Pelaksanaan Diklat di lingkungan Departemen Agama. Berdasarkan Instruksi Menteri Agama tersebut, maka seluruh kegiatan diklat, baik diklat tenaga administrasi maupun diklat tenaga teknis keagamaan sepenuhnya dilaksanakan oleh BDPTK yang selanjutnya diubah menjadi Balai Diklat Keagamaan (BDK) dan secara organisatoris bertanggung jawab kepada Badan Litbang dan

Diklat Departemen Agama.

Pada tanggal 24 Juni 2004, lahir Keputusan Menteri Agama Nomor 345 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Keagamaan dengan struktur organisasi sebagai berikut: 1. Kepala Balai Dikla. 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi Diklat Tenaga Administrasi 4. Seksi Diklat Tenaga Teknis Keagamaan. Seiring dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi, ada wacana untuk pembentukan Balai Diklat Keagamaan Aceh. Pada tahun 2012 hal itu terwujud dengan terbitnya PMA Nomor 38 Tahun 2012 tentang Struktur dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh. Dengan berdirinya Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Provinsi Aceh, maka Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan Medan, saat ini hanya memiliki satu wilayah kerja yaitu Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan¹⁸ menyebutkan bahwa Balai Diklat Keagamaan adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama yang menangani bidang pendidikan dan pelatihan di lingkungan Kementerian Agama di daerah. Sebagai kepanjangan tangan dari Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tersebut, Balai Diklat Keagamaan Medan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan di wilayah kerja Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara. Fungsi BDK Medan adalah:

- a. Penyusunan rencana dan program diklat;
- b. Penyelenggara pendidikan dan pelatihan tenaga administrasi dan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas Balai Diklat Keagamaan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi dan rumah tangga Balai Diklat Keagamaan.

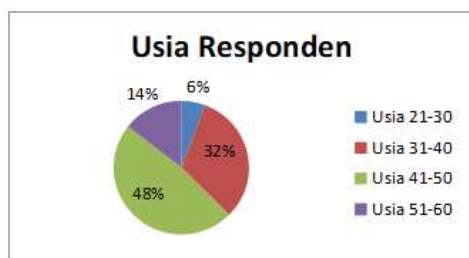
¹⁸ Indonesia, Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan (Jakarta: 2015), 2-3.

2. Data Demografis Responden

Tabel 3. Profil Usia Responden

Usia Responden	Frekuensi	Persen (%)
Usia 21-30	12	5,77
Usia 31-40	66	31,73
Usia 41-50	100	48,08
Usia 51-60	30	14,42
Total	208	100

Gambar 1. Pie Chart Profil Usia Responden

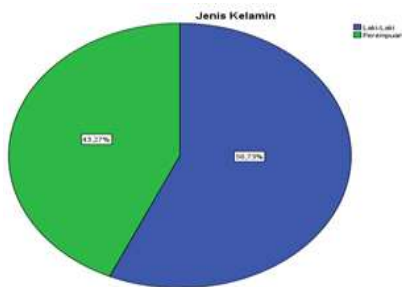


Mayoritas responden berada pada usia yang produktif (Tabel 3. dan Gambar 1.), usia yang aktif bekerja dan dalam fase kematangan karir yaitu usia 41-50 tahun (48%) dan usia 31-40 tahun (32%), untuk usia 51-60 tahun sebanyak 14%, sedangkan usia 21-30 tahun sebanyak 6%.

Tabel 4. Profil Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persen (%)
Pria	118	56,7
Wanita	90	43,3
Total	208	100,0

Gambar 2. Pie Chart Profil Jenis Kelamin



Mayoritas responden berjenis kelamin pria (57%) dan wanita (43%) (Tabel 4. dan Gambar 2.). Hal ini sangat wajar karena responden merupakan

Pejabat Struktural pada Kemenag Kab/Kota, Penyuluh Agama, Kepala KUA, Calon Dosen, Kepala/Wakil Kepala Madrasah, Guru, Pengawas dan JFU serta Pramubakti.

Tabel 6. Profil Pendidikan Terakhir Responden

Pendidikan	Frekuensi	Persen (%)
SMU	5	2,4
D3	2	1,0
S1	158	76,0
S2	42	20,2
S3	1	,5
Total	208	100,0

Gambar 3. Pie Chart Profil Pendidikan Terakhir



Mayoritas responden berpendidikan S1 (76%), sedangkan S2 (20%), SMU (2%), D3 dan S3 (1%). Profil responden seperti ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap validitas pengisian kuesioner karena responden memiliki tingkat pendidikan yang mumpuni untuk dapat mengerti substansi kuesioner dan mampu mengisi kuesioner tersebut dengan valid tanpa bias bahasa.

3. Kajian Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan

Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan terbagi atas 5 unsur indikator yaitu integritas penyelenggara, pemanggilan peserta, registrasi diklat, mutu pembelajaran, dan penyerahan rencana tindak lanjut (RTL) serta penyerahan sertifikat. Setiap unsur indikator terdapat sub unsur yang terdiri dari indikator integritas penyelenggara terdiri atas 7 sub unsur; indikator pemanggilan peserta terdiri atas 5 sub unsur, indikator registrasi diklat terdiri atas 5 sub unsur,

indikator mutu pembelajaran terdiri atas 19 unsur, indikator penyerahan RTL dan sertifikat sebanyak 6 sub unsur. Unsur indikator integritas penyelenggara dan sub unsur dalam kuesioner pada Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Tabel 6. berikut:

Tabel 6.

Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan Indikator Integritas Penyelenggara

No.	Integritas Penyelenggara	Indeks (Skala 1-5)	Nilai (%)
1.	Penampilan rapi dan bersih	4,28	85,6
2.	Panitia mengenakan tanda pengenal	4,13	82,6
3.	Panitia mengetahui jobdesnya (tugas dan fungsinya)	4,27	85,4
4.	Panitia menguasai teknis prosedur pelatihan	4,30	86,0
5.	Panitia menunjukkan sikap ramah	4,41	88,2
6.	Perhatian dan memfasilitasi kebutuhan peserta saat pelatihan	4,31	86,2
7.	Penyelenggara tidak menerima gratifikasi	4,55	91,0
Total Kategori		4,32	86,43
		"Baik"	

Unsur indikator integritas penyelenggara disimpulkan dalam kategori "Baik=86,43%" karena berada pada interval (76,61-88,30). Dari tabel tersebut terlihat bahwa sub unsur dalam kategori "Baik" namun untuk unsur "penyelenggara tidak menerima gratifikasi" berada pada kategori "Sangat Baik=91%." Untuk unsur indikator pemanggilan peserta dan sub unsur dalam kuesioner pada Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Tabel 8. berikut:

Tabel 7.

Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan Indikator Pemanggilan Peserta

No.	Pemanggilan Peserta	Indeks (Skala 1-5)	Nilai (%)
1.	Mekanisme pemanggilan jelas	4,33	86,6
2.	Pemanggilan peserta tersosialisasi dan terakses secara umum	4,25	85,0
3.	Pemanggilan peserta sesuai waktu yang ditetapkan	4,28	85,6
4.	Pemanggilan peserta tepat sasaran	4,14	82,8
5.	Pemanggilan peserta dilakukan secara transparan	4,27	85,4
Total Kategori		4,25	85,08
		"Baik"	

Unsur indikator pemanggilan peserta disimpulkan dalam kategori "Baik=85,08%" karena berada pada interval (76,61-88,30). Dari tabel tersebut terlihat bahwa sub unsur dalam kategori "Baik". Untuk unsur indikator registrasi

diklat dan sub unsur dalam kuesioner pada Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Tabel 8. berikut:

Tabel 8.

Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan Indikator Registrasi Diklat

No.	Registrasi Diklat	Indeks (Skala 1-5)	Nilai (%)
1.	Prosedur registrasi disosialisasikan secara jelas	4,29	85,8
2.	Pelayanan saat registrasi mudah dan cepat	4,40	88,0
3.	Pelayanan saat registrasi tidak berbelit-belit	4,38	87,6
4.	Pelayanan saat registrasi transparan	4,45	89,0
5.	Registrasi tidak dipungut biaya	4,70	94,0
Total		4,44	88,88
Kategori		"Sangat Baik"	

Unsur indikator registrasi diklat disimpulkan dalam kategori "Sangat Baik = 88,88%" karena berada pada interval (88,31-100). Namun sub unsur "pelayanan saat registrasi transparan = 89% dan registrasi tidak dipungut biaya = 94%" dalam kategori "Sangat Baik". Untuk unsur indikator mutu pembelajaran dan sub unsur dalam kuesioner pada Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Tabel 9. berikut:

Tabel 9.

Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan Indikator Mutu Pembelajaran

No.	Mutu Pembelajaran	Indeks (Skala 1-5)	Nilai (%)
1.	Materi diklat diberikan sesuai dengan kurikulum diklat	4,37	87,4
2.	Materi diklat diberikan sesuai dengan mata diklat	4,36	87,2
3.	Materi diklat diberikan sesuai dengan tujuan pembelajaran	4,37	87,4
4.	Kurikulum untuk mencapai kompetensi sikap	4,23	84,6
5.	Kurikulum untuk mencapai kompetensi pengetahuan	4,27	85,4
6.	Kurikulum untuk mencapai kompetensi keterampilan	4,22	84,4
7.	Pembelajaran dilaksanakan tepat waktu	4,25	85,0
8.	Pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan	4,22	84,4
9.	Narasumber memulai dan mengakhiri pembelajaran sesuai jadwal	4,26	85,2
10.	Narasumber menguasai materi diklat	4,25	85,0
11.	Narasumber menguasai pendekatan andragogi	4,17	83,4
12.	Narasumber menggunakan berbagai model pembelajaran	4,20	84,0
13.	Narasumber menggunakan berbagai strategi pembelajaran	4,21	84,2
14.	Narasumber yang ditunjuk kompeten dalam bidangnya	4,25	85,0
15.	Peserta diklat dapat mencapai tujuan pembelajaran	4,00	80,0
16.	Materi diklat mudah dipahami	4,07	81,4
17.	Tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan kurikulum diklat	4,10	82,0
18.	Materi diklat dapat diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsinya	4,14	82,8
19.	Narasumber/ Widyaiswara tidak diperkenankan menerima gratifikasi	4,61	92,2
Total		4,24	84,79
Kategori		"Baik"	

Unsur indikator mutu pembelajaran disimpulkan dalam kategori “Baik=84,79%” karena berada pada interval (76,61-88,30). Namun sub unsur “Narasumber/Widyaiswara tidak diperkenankan menerima gratifikasi = 92,2%” dalam kategori “Sangat Baik”. Sedangkan sub unsur “Peserta Diklat Dapat Mencapai Tujuan Pembelajaran = 80%” masih pada kategori “Baik”. Untuk unsur indikator penyerahan rencana tindak lanjut (RTL) dan sertifikat dan sub unsur dalam kuesioner pada Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Tabel 10. berikut:

Tabel 10.
 Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan
 Indikator Penyerahan RTL dan Sertifikat

No.	Penyerahan RTL dan Sertifikat	Indeks (Skala 1-5)	Nilai (%)
1.	Sertifikat dibagikan cepat sesuai jadwal	4,05	81,0
2.	Pembagian sertifikat tidak dipungut biaya	4,65	93,0
3.	Sertifikat diserahkan tepat waktu	4,03	80,6
4.	Pembagian sertifikat sudah diterapkan berdasarkan SOP	4,24	84,8
5.	Mekanisme antara penyerahan RTL dan pembagian sertifikat tepat sesuai SOP	4,17	83,4
6.	Penyerahan RTL dan pembagian sertifikat dilakukan secara transparan dan tidak dipungut biaya	4,56	91,2
Total		4,28	85,67
Kategori		"Baik"	

Unsur indikator penyerahan RTL dan sertifikat disimpulkan dalam kategori “Baik=85,67%” karena berada pada interval (76,61-88,30). Dari tabel tersebut terlihat bahwa sub unsur dalam kategori “Baik” namun untuk unsur “Pembagian Sertifikat Tidak Dipungut Biaya=93% dan Penyerahan RTL dan Pembagian Sertifikat Dilakukan Secara Transparan dan Tidak Dipungut Biaya=91,2%”, sedangkan sertifikat diserahkan tepat waktu masih berada pada 80,6%.

Gambar 4.

Nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan



Untuk seluruh indikator pada Indeks Kediklatan BDK Medan dapat dilihat pada Gambar 4. Secara umum Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan dalam kategori “Baik” dengan nilai 86,17%. Dari ke lima indikator (integritas penyelenggara, pemanggilan peserta, registrasi diklat, mutu pembelajaran, dan penyerahan RTL dan sertifikat) maka yang berada pada kategori “Sangat Baik” terdapat pada indikator registrasi diklat sebanyak 88,88%.

E. KESIMPULAN

Gambaran dan hasil analisis capaian Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan yang disajikan dalam tulisan ini menghasilkan rencana perbaikan terhadap pelayanan publik BDK Medan dengan responden adalah alumni diklat dari tahun 2016-2018 yang telah menerima pelayanan. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Dari hasil pelaksanaan Survei Indeks Layanan Kediklatan yang dilaksanakan dengan 5 (lima) indikator, berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, maka seluruh unsur pelayanan publik BDK Medan dalam kategori “BAIK” dengan nilai Indeks Layanan Kediklatan BDK Medan sebesar 86,17% yang berada pada interval (76,61-88,30). Hal ini menyatakan bahwa secara mutu aspek-aspek pelayanan publik BDK Medan dalam kategori “BAIK” namun perlu dioptimalkan dengan mencari metode pelayanan yang paling efektif dan efisien sehingga pelayanan terhadap peserta diklat lebih baik lagi. Indeks ini mengalami peningkatan dari Survei IKM Periode I pada bulan Mei tahun 2018 sebesar 84%.
2. Dari ke lima indikator (integritas penyelenggara, pemanggilan peserta, registrasi diklat, mutu pembelajaran, dan penyerahan RTL dan sertifikat) maka yang berada pada kategori “Sangat Baik” terdapat pada indikator registrasi diklat sebanyak 88,88%.

Saran/Rekomendasi

BDK Medan mengklasifikasikan hasil seluruh Indeks Layanan Kediklatan yang berada pada angka di bawah 85% yang memerlukan pertimbangan dan perhatian bagi pemangku kebijakan BDK Medan. Adapun beberapa saran yang dapat diajukan adalah:

1. Sub unsur "Panitia Mengenakan Tanda Pengenal" memerlukan edukasi dari pemangku kebijakan BDK Medan.
2. Sub unsur "Pemanggilan Peserta Tepat Sasaran" memerlukan evaluasi dan pengawasan terhadap peserta yang dikirim dari Kemenag Kab./Kota melalui Admin Simdiklat.
3. Sub unsur "Kurikulum untuk mencapai kompetensi sikap dan keterampilan, dan pembelajaran sesuai dengan jadwal yang diberikan memerlukan kajian tersendiri agar kurikulum yang ada dapat di-*update* sesuai dengan kebutuhan peserta serta adanya pengawasan terhadap jadwal yang telah disusun secara sekuen.
4. Sub unsur "Narasumber menguasai pendekatan andragogi, Narasumber menggunakan berbagai model pembelajaran, Narasumber menggunakan berbagai strategi pembelajaran". Hal ini memerlukan perhatian khusus bagi pimpinan BDK Medan agar terus meningkatkan kompetensi narasumber dalam hal ini widyaiswara dengan berbagai pelatihan, kursus maupun seminar.
5. Sub unsur "Peserta diklat dapat mencapai tujuan pembelajaran, Materi diklat mudah dipahami, Tujuan pembelajaran tercapai sesuai dengan kurikulum diklat, Materi diklat dapat diimplementasikan dalam tugas pokok dan fungsinya". Hal ini tentunya perlu kajian/penelitian yang mendalam agar BDK Medan mengetahui sejauh mana dampak diklat yang sudah mengena kepada peserta diklat. Misalnya, selalu melakukan evaluasi terhadap perkembangan kinerja alumni diklat yang telah kembali ke tempat tugas masing-masing, melakukan pembimbingan, dan pembinaan yang berkelanjutan pada alumni diklat serta membuat wadah untuk saling *sharing* di antara alumni sehingga dapat menginspirasi alumni diklat yang lain.
6. Untuk sub unsur "Sertifikat dibagikan cepat sesuai jadwal, Sertifikat diserahkan tepat waktu, Pembagian sertifikat sudah diterapkan berdasarkan SOP dan Mekanisme antara penyerahan RTL dan pembagian sertifikat tepat sesuai SOP". Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antara Kemenag Kab./Kota dengan BDK Medan dengan mempublikasikan teknis penyerahan RTL dan sertifikat dalam bentuk poster atau selebaran yang dapat dijadikan acuan/pedoman dalam penyerahan RTL dan sertifikat.
7. Peserta diklat dapat menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan melalui lembar pengaduan, telp ataupun sms, yang selanjutnya akan diterima dan diidentifikasi oleh panitia dan segera ditindaklanjuti, selanjutnya panitia akan melakukan perbaikan serta menyampaikan hasil perbaikan pada lembar jawaban atas pengaduan, saran, dan masukan.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- _____, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
- _____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010 – 2014
- _____, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- _____, Peraturan Menteri Agama Nomor 59 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Keagamaan
- _____, Laporan Tahunan Balai Diklat Keagamaan Medan Tahun 2018
- Henryanto. "Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Dari Kualitas Pelayanan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai". *KBP* 2, no. 1 (2014): 7-9.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Kerlinger, Fred N. *Asas-asas Penelitian Behavioral*. Yogyakarta: UGM Press, 2004.
- Larasati, P. A. "Pengembangan Aparatur Berbasis Kompetensi dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Unit Pelaksanaan Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu (UPT P2T) Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur". *Kebijakan dan Manajemen Publik* 4, no. 3 (2016): 3-4.
- Moenir. *Manajemen Pelayanan Umum*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995.
- Pujihastuti, Isti. "Prinsip Penulisan Kuesioner Penelitian". *CEFARS: Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Wilayah* 2, no. 1 (2010): 49-51.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta, 2011.
- Tjiptono, F. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Ardi, 2002.
- Vincent, Gasperz. *Manajemen Kualitas Penerapan Konsep-Konsep Kualitas Dalam Manajemen Bisnis Total*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Widodo, T. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Solo: UNS Press, 2008.

QUALITY ANALYSIS OF PARTICIPANTS IN THE TRAINING WITH SERVQUAL METHODS AND TOLERANCE ZONE IN BDK SEMARANG

RISKHA NURFITRIYAH*)

ABSTRACT

Training participants' satisfaction can be achieved by providing good quality service. Therefore, BDK of Semarang as a training service provider must focus on the training participants' satisfaction as consumers. Good service performance and the fulfilment of training participants' expectations will greatly affect the satisfaction of training participants. This study aims to identify differences between the reality and expectations among the training participants on the services of the training providers and to analyze the quality of training services provided by training providers using the Servoqual method and Zone of Tolerance. Based on the value with the Servoqual method, the study found that the quality of the training committee's service providers did not satisfy the training participants as customers. Whereas the value with the ZOT (zone of tolerance) method found that out of the 15 service attributes of the training committee, there were 9 service attributes that could still be tolerated by the training participants including registration service, training equipment, training facilities and infrastructure, tidiness and friendliness of the committee, committee response, safety and comfort of participants, committee empathy for participants, menu variations and professionalism and friendliness of lecturers.

KEY WORDS: *Customer satisfaction, zone of tolerance, service quality*

KUALITAS LAYANAN PESERTA DENGAN METODE SERVQUAL DAN ZONE OF TOLERANCE DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG

ABSTRAK

Kepuasan peserta diklat dapat dicapai dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itu, BDK Semarang sebagai penyedia jasa layanan diklat harus berfokus pada kepuasan peserta diklat sebagai konsumen. Kurangnya kinerja pelayanan selama ini belum sesuai dengan harapan, dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan peserta diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kenyataan dan harapan para peserta diklat atas pelayanan dari penyelenggara diklat dan menganalisis kualitas pelayanan diklat yang diberikan oleh penyelenggara diklat dengan metode *Servoqual* dan *Zone of Tolerance*. Berdasarkan nilai dengan metode *Servoqual*, diperoleh bahwa kualitas layanan panitia penyelenggara diklat masih belum bisa memuaskan peserta diklat sebagai pelanggan. Sedangkan nilai dengan metode ZOT (*zone of tolerance*) didapatkan bahwa dari 15 atribut pelayanan dari panitia penyelenggara diklat, terdapat 9 atribut pelayanan yang masih bisa ditoleransi oleh peserta diklat, yaitu pelayanan saat registrasi, bahan perlengkapan diklat, sarana dan prasarana diklat, kerapihan dan keramahan panitia, respon panitia, keamanan dan kenyamanan peserta, empati panitia terhadap peserta, variasi menu serta profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara.

KATA KUNCI: *Kepuasan pelanggan, zone of tolerance, kualitas layanan*

*) Balai Diklat Keagamaan Semarang Jl. Temugiring Banyumanik Semarang 50264. riskhafitriyah@gmail.com

* Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki suatu organisasi/instansi dapat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi / instansi dalam mencapai target dan tujuan. Tidak terkecuali SDM dalam dunia pendidikan yang meliputi pendidik yaitu guru dan tenaga kependidikan yaitu tenaga administrasi¹. Penyelenggaraan diklat masih menjadi salah satu alternatif untuk mengembangkan kompetensi dan profesionalisme, baik pegawai, guru maupun tenaga administrasi lainnya di sebuah organisasi/instansi.

Dalam literatur pengembangan organisasi, diklat dianggap sebagai salah satu investasi strategis untuk peningkatan kinerja organisasi bagi para pegawai². Diklat yang efektif berpotensi sangat besar untuk meningkatkan kompetensi pegawai agar mereka mampu memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kinerja organisasi³. Kinerja kualitas pelayanan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan diklat untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, yaitu peserta diklat. Kepuasan peserta merupakan suatu yang harus dijaga dan ditingkatkan agar organisasi/instansi senantiasa tetap berkompeten, baik di bidang manajerial maupun operasionalnya.

Keberhasilan suatu program diklat dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya sekedar dilihat dari tercapainya jumlah sasaran yang telah direncanakan, juga terselenggaranya diklat sesuai dengan waktu yang direncanakan, berjalannya semua proses diklat sesuai dengan yang sudah direncanakan, adanya peningkatan nilai *post test* terhadap nilai *pre test*, maupun tercapainya kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan diklat⁴. Tercapai atau tidaknya

tujuan dalam setiap penyelenggaraan diklat sangat dipengaruhi oleh kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara. Kualitas pelayanan penyelenggara diklat menjadi faktor yang sangat penting karena kualitas pelayanan yang diberikan akan menentukan sejauh mana para peserta diklat dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan pembelajaran dalam penyelenggaraan diklat⁵.

Penyelenggaraan Diklat Teknis Substantif (DTS) bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap guru dalam meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap mental guru dalam mengimplementasikan pembelajaran sehingga diharapkan menjadi guru yang profesional sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya⁶. Diklat menjadi wahana pencetak sumber daya manusia agar memiliki kompetensi atau kualitas yang diperlukan yaitu pengetahuan (*knowledge/kognitif*), keterampilan (*skill/psikomotorik*), dan sikap/perilaku (*behavior/attitude/affective*)⁷.

Balai Diklat Keagamaan Semarang adalah Unit Pelaksana Teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Agama dengan melaksanakan diklat tenaga administrasi dan tenaga teknis keagamaan sesuai dengan wilayah kerja di Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Balai Diklat Keagamaan (BDK) Semarang dalam meningkatkan kinerja pelayanan kediklatan yang berkualitas menggunakan prinsip 5 S (*senyum, salam, sapa, sofa, dan santun*). Hasil penelitian dari Sudjarwo (2008) dengan judul "Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pada Balai Diklat Keagamaan Semarang" mengungkapkan bahwa kinerja pelayanan akademik yang meliputi unsur nilai penyelenggara dalam memberikan pelayanan terhadap peserta Diklatpim IV meliputi 9 aspek pelayanan atau 9 item, yaitu: pemanggilan

¹ Theresia Martina Hastari. "Studi Deskriptif Tentang *Learning Transfer* Bagi Alumni Peserta Pendidikan dan Pelatihan Pelayanan Publik Oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Jawa Timur di Badan Koordinasi Wilayah Malang". *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, 1 no.1 (2013) : 110-119.

² Brian Blume; Timothy Baldwin & Jason Huang. "Transfer of Training: A Meta-Analytic Review." *Journal of Management*, 36 no. 4 (2010) : 1065-1066.

³ W. Timothy Coombs dan Sherry J. Holladay, *Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach* (Chichester: Wiley-Blackwell, 2012), 460-461.

⁴ Adi Wijaya Sumarno. "Evaluasi Dampak Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Keprofesyan Berkelanjutan Guru Matematika Di PPPPTK Matematika Yogyakarta." *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 21, no. 2 (2017) : 28-29.

⁵ N Wulandari., Sauddin. A dan Irwan. "Analisis Kualitas Layanan pada Fakultas Sains dan Teknologi Menggunakan Metode Zone Of Tolerance, Kano Dan Lean Six Sigma" (Studi Kasus: Fakultas Sains Dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar)". *Jurnal MSA*, 5 no. 2 (2017), 81-90.

⁶ Balai Diklat Keagamaan Semarang. "Buku Panduan Diklat Teknis Substantif Tematik RA Angkatan 2". Semarang: BDK Semarang (2018) : 2-4.

⁷ R. Noe, *Employee Training and Development* (Singapore : Mc Graw-Hill International Edition, 5th ed., 2010) : 45-46.

peserta, penerimaan peserta, sikap dan pelayanan, pelayanan kesehatan, pelayanan akomodasi, pelayanan konsumsi, penyediaan tempat kuliah, pelaksanaan perkuliahan, sarana olah raga. Capaian rata-rata kinerja penyelenggara dalam pemberian pelayanan 79,38 (masuk dalam kategori sedang).

Kurangnya kualitas pelayanan kepada peserta diklat, seperti panitia jarang berada di kelas dan tidak jelasnya pengelolaan pengaduan menjadi salah satu tolok ukur dalam penyelenggaraan diklat⁸. Pelayanan yang masih lamban dan berbelit-belit serta belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pelayanan prima di BDK Semarang menjadi salah satu kendala dalam penyelenggaraan kegiatan diklat⁹. Berdasarkan hasil rapat persiapan dan evaluasi diklat tahun 2018, secara umum pelayanan yang diberikan kepada peserta diklat selama ini masih kurang memuaskan. Hal ini terlihat dari beberapa keluhan dari peserta di setiap periodenya, mulai dari fasilitas asrama (lampu kamar, kunci dan air), sarana dan prasarana di ruang kelas (microphone, LCD, AC dan rol kabel), pelayanan panitia kepada peserta dan widyaiswara yang belum maksimal dan berubah-ubahnya jadwal selama penyelenggaraan diklat.

Proses pelayanan dinilai dari seberapa besar BDK Semarang memenuhi harapan kualitas layanan yang ingin diperoleh peserta diklat. Kinerja pelayanan yang baik serta pemenuhan harapan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan peserta diklat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa jauh kualitas layanan diklat dilihat dari sudut pandang antara kenyataan dan harapan para peserta sebagai pelanggan jasa kediklatan?
2. Bagaimana kualitas layanan peserta yang diberikan oleh BDK Semarang sebagai penyelenggara diklat?

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mendeskripsikan kualitas layanan diklat antara kenyataan dan harapan dari peserta sebagai

pelanggan jasa kediklatan, (2) mengidentifikasi kualitas pelayanan diklat yang diberikan oleh penyelenggara diklat.

Kajian Literatur

Kualitas pelayanan adalah strategi yang penting dalam agenda manajemen strategi bisnis untuk menarik pelanggan dalam bisnis jasa¹⁰. Terdapat lima dimensi kualitas pelayanan yang dijadikan pedoman oleh pelanggan atau peserta dalam menilai kualitas pelayanan yaitu: (1) berwujud (*tangible*) berkaitan penampilan fasilitas fisik, peralatan, dan personil, (2) keandalan (*reliability*) berkaitan dengan kemampuan untuk melaksanakan jasa yang dijanjikan dengan tepat dan terpercaya, (3) koresponsifan (*responsiveness*) berkaitan dengan kemauan untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat atau tanggap, (4) keyakinan (*assurance*) berkaitan dengan pengetahuan dan kesopanan karyawan serta kemampuan mereka untuk menimbulkan kepercayaan dan keyakinan, (5) empati (*emphaty*) berkaitan dengan kepedulian, memberi perhatian pribadi bagi pelanggan¹¹. Kualitas layanan juga dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang memfokuskan pada usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen yang disertai dengan ketepatan dalam menyampaikannya, sehingga tercipta kesesuaian yang seimbang dengan harapan konsumen¹².

Pelayanan yang berkualitas dibutuhkan, karena: (a) kualitas pelayanan merupakan salah satu cara yang terbaik dalam menciptakan nilai bagi pelanggan, (b) kualitas pelayanan merupakan kunci perbedaan yang nyata yang membedakan produk kita dengan pesaing, (c) kualitas pelayanan sangat mempengaruhi mobilitas pelanggan, dan (d) kualitas pelayanan selalu menguntungkan perusahaan/organisasi/instansi¹³. Adapun faktor-faktor yang

¹⁰ L Anatan, *Service Excellence Competing Through Competitiveness* (Bandung: Alfabeta : 2008), 25-26.

¹¹ Wayan M.A Nugroho dan Imam Hambali Prawoto. "Analisis Kepuasan Peserta Terhadap Kualitas Pelayanan Widyaiswara Pada DTSS Pengadaan Barang/Jasa Di Bdk Malang". *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 12 no. 2 (2017), 3-4.

¹² Erlina Purnamawati, *Analisis Kualitas Layanan dengan Metode Seroqual dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya* (Teknik Industri FTI : UPN Veteran Jatim, 2016), 4-5.

¹³ Henryanto. "Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Dari Kualitas Pelayanan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai". *Jurnal KBP*, 2 no. 1 (2014), 4-5.

⁸ *Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Di Balai Diklat Keagamaan Semarang*. <https://bdksemarang.kemenag.go.id> (diunduh Juni 2019).

⁹ *Strategi Pelayanan Prima Balai Diklat Keagamaan Semarang Dalam Penerimaan Peserta Diklat Reguler Tahun 2014*. <https://bdksemarang.kemenag.go.id> (diunduh Juli 2019).

mempengaruhi penilaian terhadap suatu jasa yaitu: (1) *personal needs*, bahwa pada dasarnya setiap orang pasti mempunyai kebutuhan yang spesifik, tergantung pada karakteristik individu, situasi, dan kondisi dari pelanggan, (2) *past experience*, yaitu pada pengalaman masa lalu dalam mengonsumsi barang dan jasa yang sama, (3) *word of mouth communication*, bahwa preferensi konsumen terhadap suatu pelayanan akan dipengaruhi oleh apa yang dikatakan orang lain, yang akan membentuk harapan konsumen dan (4) *external communication*, bahwa komunikasi eksternal dari penyedia jasa memainkan peranan penting dalam membentuk harapan konsumen seperti promosi dan iklan¹⁴.

Jasa/pelayanan merupakan suatu kinerja penampilan, tidak berwujud dan cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada dimiliki serta pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengonsumsi jasa tersebut. Dalam strategi pemasaran, definisi jasa harus diamati dengan baik, karena pengertiannya sangat berbeda dengan produk berupa barang. Kondisi dan cepat lambatnya pertumbuhan jasa akan sangat tergantung pada penilaian pelanggan terhadap kinerja yang ditawarkan oleh pihak produsen¹⁵.

Metode *Service Quality* (Servqual) merupakan sebuah cara untuk mengukur kualitas pelayanan jasa. Dimensi kualitas jasa dalam metode servqual didasarkan pada skala multiitem yang dirancang untuk mengukur harapan dan persepsi pelanggan, serta *gap* di antara keduanya dalam dimensi-dimensi kualitas jasa. Terdapat lima *gap* yang menyebabkan kegagalan penyampaian jasa, yaitu:

1. *Gap* antara harapan konsumen dan persepsi manajemen. Pada kenyataannya pihak manajemen suatu perusahaan tidak selalu dapat merasakan atau memahami apa yang diinginkan para pelanggan secara tepat. Akibatnya manajemen tidak mengetahui bagaimana suatu jasa seharusnya didesain, dan jasa-jasa pendukung / sekunder apa saja yang diinginkan oleh konsumen.
2. *Gap* antara persepsi manajemen terhadap harapan konsumen dan spesifikasi kualitas jasa. Kadangkala manajemen mampu

memahami secara tepat apa yang diinginkan oleh pelanggan, tetapi mereka tidak menyusun standar kinerja tertentu yang jelas. Hal ini bisa dikarenakan tiga faktor, yaitu tidak adanya komitmen total manajemen terhadap kualitas jasa, kekurangan sumber daya, atau karena adanya kelebihan permintaan.

3. *Gap* antara spesifikasi kualitas jasa dan penyampaian jasa. Ada beberapa penyebab terjadinya *gap* ini, misalnya karyawan kurang terlatih beban kerja melampaui batas, tidak dapat memenuhi standar kinerja, atau bahkan tidak mau memenuhi standar kinerja yang ditetapkan.
4. *Gap* antara penyampaian jasa dan komunikasi eksternal. Seringkali harapan pelanggan dipengaruhi oleh iklan dan pernyataan atau janji yang dibuat oleh perusahaan. Resiko yang dihadapi perusahaan adalah apabila janji yang diberikan tidak dapat dipenuhi.
5. *Gap* antara jasa yang dirasakan dan jasa yang diharapkan oleh konsumen. *Gap* ini terjadi apabila pelanggan mengukur kinerja prestasi perusahaan dengan cara yang berlainan, atau bisa juga keliru mempersepsikan kualitas jasa tersebut¹⁶.

Zone of Tolerance adalah daerah di antara *adequate service* dan *desired service*, yaitu daerah dimana variasi pelayanan yang masih dapat diterima oleh pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima pelanggan di bawah *adequate service*, pelanggan akan kecewa. Sedangkan apabila pelayanan yang diterima pelanggan melebihi *desired service*, maka pelanggan akan merasa puas¹⁷. Hasil penelitian Dewi (2017) dengan judul "Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Servqual Dan Zone Of Tolerance" menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pusat oleh XY masih belum bisa memuaskan pelanggan, hal ini bisa dilihat dari nilai *gap* yang negatif dari skor ServQual. Dari 23 atribut pelayanan semua bernilai negatif. Pada 23 atribut tersebut ada 13 atribut yang masih bisa ditoleransi oleh konsumen berdasarkan hasil pemetaan dari *Zone of Tolerance*. Purnawati dan Erlina (2016)

¹⁶ Ibid., 5-6.

¹⁷ Shanty Kusuma Dewi. "Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Servqual Dan Zone of Tolerance". Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA) 2017 ISSN (Cetak) 2527-6042 eISSN (Online) 2527-6050 : 3-4.

¹⁴ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran* (Jakarta: Prenhallindo, Edisi Millenium 2, 2002), 178-179.

¹⁵ Ibid., 5-6.

dengan penelitian berjudul "Analisis Kualitas Layanan dengan Metode Servqual dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya" juga mengungkapkan bahwa dari perhitungan servqual pembobotan dan servqual terbobot yang telah dilakukan maka diketahui kriteria mana saja yang perlu ditingkatkan agar pelayanan yang diterima oleh pelanggan sesuai dengan harapan pelanggan. Dari hasil analisis Servqual terbobot diketahui indikator yang harus ditingkatkan kualitas layanannya adalah tata letak ruangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, luas ruangan yang memadai, jumlah loket yang tersedia, fasilitas ruang tunggu yang nyaman, keramahan, kesopanan, dan rasa bersahabat pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terhadap pelanggan.

Perbaikan kualitas pelayanan publik kepariwisataan pada PT Semarang Arsana Rekreasi Trusta (Wonderia), dalam penelitian Bambang dan Agus (2010) digunakan metode Quality Function Deployment (QFD) dengan bertolak pada model SERVQUAL yang menggunakan dimensi khusus pariwisata. Pada penelitian ini ditetapkan 68 variabel pelayanan kepariwisataan yang kemudian dinilai oleh pengunjung. Dengan menggunakan *importance performance matrix* diperoleh 17 variabel kritis. Dari *House of Quality* diperoleh 19 *technical response* sebagai rekomendasi perbaikan, dengan prioritas perbaikan yang dilakukan adalah pembuatan *Standard Operational Procedure, maintenance* secara sistematis, dan penambahan jenis permainan¹⁸. Dari hasil pengolahan dan analisis data dengan metode SERVQUAL bisa disimpulkan bahwa seluruh indikator yang berjumlah 30 butir, diperoleh *gap* yang semuanya negatif. *Gap* negatif ini berkisar antara 0,30 sampai dengan 1,47. Ini memberikan indikasi bahwa peserta pelatihan belum puas terhadap kualitas pelatihan Divisi Product Quality Engineering PT. MEB. Berdasarkan hasil analisis dengan *Importance-Performance Analysis* terhadap *gap* yang muncul pada 30 butir indikator, terdapat 8 faktor yang menjadi prioritas perbaikan kinerja pelayanan

pelatihan pada lembaga Pelatihan Divisi Product Quality Engineering¹⁹

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, pengambilan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner dan studi kepustakaan. Variabel penelitian ini terdiri dari variabel terikat yaitu tingkat kepuasan pelanggan dan variabel bebas yaitu *tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy*. Populasi penelitian ini adalah peserta diklat Periode 5 (4 angkatan diklat) berjumlah 140 orang. Penentuan sampel secara "*stratified proportional sampling*" berjumlah 30 orang. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang dikumpulkan dengan teknik kuesioner atau penyebaran angket dan data sekunder didapat melalui arsip atau dokumen Balai Diklat Keagamaan Semarang.

Sedangkan metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Untuk menganalisis kualitas pelayanan peserta diklat di Balai Diklat Keagamaan Semarang digunakan model *service quality* (servqual) dan *Zone of Tolerance* (ZOT). *Service quality* (servqual) merupakan model pengukuran kualitas pelayanan dalam usaha jasa yang paling banyak digunakan. Dalam model Servqual, persepsi pelanggan terhadap layanan yang diterima (*perceived service*) merupakan hasil dari serangkaian keputusan dan aktivitas internal perusahaan. Sedangkan ZOT (*zone of tolerance*) adalah daerah di antara *adequate service* dan *desired service*, yaitu daerah dimana variasi pelayanan yang masih dapat diterima oleh pelanggan²⁰.

Perhitungan Nilai Gap *Service Quality* (Servqual)

Model ini digunakan untuk mengungkap data tentang kualitas pelayanan yakni membandingkan antara pelayanan aktual pelatihan dengan harapan peserta pelatihan dengan menggunakan skala Likert dengan perhitungan rumus pada persamaan 2.5²¹ sebagai berikut:

¹⁸ Bambang P, Sri, H, dan Agus, S.A. "Perbaikan Kualitas Layanan Jasa Dengan Model Servqual Dimensi Kepariwisata dan Metode *Quality Function Deployment* (Studi Kasus Di Pt X, Tempat Wisata Wahana Permainan)". *Jurnal Teknik Industri* (J@TI) Undip 5, no. 1 (2010) : 50-51

¹⁹ Mikael Eko Baskoro. "Analisis Kepuasan Peserta Terhadap Kualitas Pelatihan Divisi *Product Quality Engineering* Pt.Meb Menggunakan Metode Servqual". *Skripsi* (2011) : 65-66.

²⁰ Ibid., 8-13.

²¹ Ibid., 10.

$$\text{SERVQUAL} = \text{SKOR P} - \text{SKOR E}$$

P = Persepsi peserta diklat tentang pelayanan penyelenggara

E = Harapan peserta diklat tentang pelayanan penyelenggara

Menurut model Servqual, apabila skor negatif (-) berarti kualitas jasa kurang atau tidak baik (peserta tidak puas). Apabila skor Servqual sama dengan nol (0) berarti kualitas jasa baik (peserta puas). Apabila skor Servqual positif (+) berarti kualitas jasa sangat baik (peserta sangat puas).

Perhitungan dan Penentuan Kategori ZOT

Kepuasan konsumen adalah persepsi konsumen bahwa harapannya telah terpenuhi atau terlampaui²². Ada dua tingkatan harapan pelanggan pada jasa sebagai berikut:

- Adequate service level* (layanan minimum), yaitu tingkat pelayanan minimum yang dinilai pelanggan masih bisa diterima
- Desired service level* (layanan harapan), yaitu tingkat pelayanan yang diharapkan dapat diterima oleh pelanggan atau gabungan dari keinginan dan harapan pelanggan.

Zone of Tolerance adalah daerah di antara *adequate service* dan *desired service*, yaitu daerah di mana variansi pelayanan yang masih dapat diterima oleh pelanggan. Apabila pelayanan yang diterima pelanggan di bawah *adequate service*, pelanggan akan kecewa. Sedangkan apabila pelayanan yang diterima pelanggan melebihi *desired service*, maka pelanggan akan merasa puas. Tahap-tahap yang digunakan dalam perhitungan *Zone of Tolerance* antara lain:

- Hitung *Measure of Service Adequacy* (MSA)
MSA = pelayanan sekarang – pelayanan minimum
- Hitung *Measure of Service Superiority* (MSS)
MSS = pelayanan sekarang – pelayanan harapan
- Hitung posisi pelayanan sekarang pada *Zone of Tolerance* =

$$\frac{M}{(P \quad ha \quad -P \quad m \quad)}$$

- Hasil dari perhitungan di atas dapat diartikan sebagai berikut:

²² Ibid., 11.

- Jika nilai MSS positif, artinya pelayanan sekarang berada di atas ZOT. Dengan kata lain pelanggan sudah merasa puas dengan pelayanan yang diberikan saat ini.
- Jika nilai MSA negatif, artinya pelayanan sekarang berada di bawah ZOT. Dengan kata lain pelanggan sangat tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan saat ini.
- Jika nilai MSA positif dan MSS negatif, artinya pelayanan sekarang berada di dalam ZOT. Dengan kata lain pelanggan merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan saat ini namun mereka masih dapat menerimanya²³.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggan atau peserta diklat menggunakan kelima dimensi, yaitu dimensi keandalan (*reliability*), dimensi berwujud (*tangible*), dimensi daya tanggap (*responsiveness*), dimensi jaminan (*assurance*), dan dimensi empati (*emphaty*) sebagai tolok ukur untuk memberikan penilaian terhadap kualitas pelayanan penyelenggara. Saat ini konsep kualitas merupakan kata yang dipakai secara universal dan telah jadi penentu dalam keberhasilan suatu bisnis khususnya penyelenggaraan diklat sejenis. Oleh karena itu, dimensi-dimensi kualitas pelayanan yang telah disebutkan di atas, harus diramu dengan baik agar lembaga dapat mencapai tujuan yakni kepuasan pelanggan melalui kualitas pelayanan yang tepat.

1. Perhitungan Servqual

Perhitungan rata-rata skor tingkat harapan dan tingkat persepsi dari setiap dimensi kualitas dilakukan untuk menghitung skor *gap* Servqual. Rata-rata nilai tingkat harapan dan tingkat persepsi setiap dimensi kualitas dapat dihitung dengan mengalikan jawaban responden dengan skala Likert. Dari hasil skor tiap atribut kemudian dihitung nilai *gap*-nya berdasarkan rumus Servqual. Hasil perhitungan skor Servqual dapat dilihat pada tabel 1, berikut :

Tabel 1. Hasil Perhitungan Skor Servqual

²³ Ibid., 7-11.

No	Pernyataan	Rata-rata Harapan	Rata-rata Persepsi	GAP
1	Pelayanan saat registrasi cepat dan mudah	3,96	3,79	-0,17
2	Profesionalisme dan keramahan petugas	3,79	3,67	-0,12
3	Bahan perlengkapan diklat berkualitas	3,75	3,71	-0,04
4	Kelengkapan fasilitas di asrama	3,38	3,16	-0,22
5	Ketersediaan sarana dan prasarana di kelas	3,83	3,54	-0,29
6	Kerapihan dan keramahan panitia penyelenggara	3,58	3,33	-0,25
7	Kenyamanan dan kebersihan ruang makan	3,67	3,29	-0,38
8	Panitia merespon permintaan peserta dengan cepat	3,79	3,67	-0,12
9	Peserta selalu merasa aman dan nyaman	3,87	3,75	-0,12
10	Jadwal pelaksanaan diklat sesuai dengan kurikulum	3,87	3,71	-0,16
11	Panitia selalu memperhatikan kepentingan peserta	3,87	3,79	-0,08
12	Variasi menu makanan yang disajikan	3,71	3,54	-0,2
13	Profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara	3,83	3,75	-0,08
14	Penyelesaian pembayaran uang saku dan transport STTPL tepat waktu diberikan	3,79	3,58	-0,21
15		3,83	3,71	-0,1

Nilai *gap* dapat diartikan sebagai nilai selisih antara nilai persepsi dan nilai harapan atau dengan kata lain selisih antara nilai yang dipersepsikan oleh peserta diklat dengan nilai yang diharapkan oleh peserta diklat²⁴. Nilai yang positif menunjukkan bahwa pihak penyelenggara diklat tidak perlu meningkatkan kualitas layanannya cukup dipertahankan saja karena sudah mampu memberikan pelayanan sesuai dengan yang diharapkan peserta diklat, akan tetapi jika nilai negatif maka pihak penyelenggara diklat harus meningkatkan kualitas layanannya karena belum mampu untuk memberikan pelayanan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peserta diklat. Dari hasil perhitungan skor *gap* Sevqual didapatkan hasil bahwa ke-15 pernyataan masih bernilai negatif yang artinya masih belum memuaskan peserta diklat dan pihak penyelenggara diklat harus meningkatkan kualitas pelayanannya mulai dari pelayanan saat registrasi, profesionalisme dan keramahan petugas, bahan perlengkapan diklat, kelengkapan

²⁴ Ibid., 10.

fasilitas di asrama, ketersediaan sarana dan prasarana di kelas, kerapihan dan keramahan panitia penyelenggara, kenyamanan dan kebersihan ruang makan, respon panitia, rasa aman dan nyaman, jadwal diklat, empati panitia terhadap peserta, variasi menu makanan, profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara, penyelesaian pembayaran uang saku dan transport serta STTPL tepat waktu diberikan.

1. Pemetaan *Zone of Tolerance*

Pada tahap ini data yang diperlukan adalah rata-rata skor tingkat pelayanan harapan, tingkat pelayanan yang dirasakan dan tingkat pelayanan minimum setiap atribut, yang digunakan untuk menghitung nilai MSA (*Measure of Service Adequacy*), MSS (*Measure of Service Superiority*), dan ZOT (*Zone of Tolerance*) serta digunakan untuk mengukur tingkat pelayanan yang diberikan pada konsumen²⁵. Hasil perhitungan *Zone of Tolerance* dapat dilihat pada tabel 2, sebagai berikut :

Tabel 2. Hasil Perhitungan *Zone of Tolerance*

No	Pernyataan	Tingkat Pelayanan Harapan	Tingkat Pelayanan yang dirasakan	Tingkat Pelayanan Minimum	MSA	MSS	ZOT
1	Pelayanan saat registrasi cepat dan mudah	3,96	3,79	3,77	0,02	-0,17	0,1
2	Profesionalisme dan keramahan petugas	3,79	3,67	3,73	-0,06	-	-1
3	Bahan perlengkapan diklat berkualitas	3,75	3,71	3,63	0,08	0,12	0,67
4	Kelengkapan fasilitas di asrama	3,38	3,16	3,28	-0,12	-	-1,2
5	Ketersediaan sarana dan prasarana di kelas	3,83	3,54	3,53	0,01	0,04	0,03
6	Kerapihan dan keramahan panitia penyelenggara	3,58	3,33	3,07	0,26	0,22	0,5
7	Kenyamanan dan kebersihan ruang makan	3,67	3,29	3,57	-0,28	0,29	-2,8
8	Panitia merespon permintaan peserta dengan cepat	3,79	3,67	3,53	0,14	0,25	0,5
9	Peserta selalu merasa aman dan nyaman	3,87	3,75	3,43	0,22	-	0,5
10	Jadwal pelaksanaan diklat sesuai dengan kurikulum	3,87	3,71	3,73	-0,02	0,38	-0,14
11	Panitia selalu memperhatikan kepentingan peserta	3,87	3,79	3,6	0,19	0,12	0,7
12	Variasi menu makanan yang disajikan	3,71	3,54	3,33	0,21	0,12	0,5
13	Profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara	3,83	3,75	3,67	0,08	0,16	0,5
14	Penyelesaian pembayaran uang saku dan transport STTPL tepat waktu diberikan	3,79	3,58	3,68	-0,1	-	-0,9
15		3,83	3,71	3,73	-0,02	0,08	-0,2

²⁵ Ibid., 7-16.

Berdasarkan perhitungan pada tabel 2 menunjukkan bahwa semua atribut (15 layanan penyelenggara diklat) belum memuaskan peserta karena nilai MSS semua negatif. Akan tetapi ada beberapa atribut yang berada di dalam *Zone of Tolerance* yang berarti dimensi kualitas pelayanan terhadap peserta yang diberikan oleh pihak penyelenggara diklat (BDK Semarang) masih bisa diterima, namun tidak menunjukkan tingkat kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan karena nilai ZOT masih di bawah nilai MSA.

Selain itu ada beberapa atribut yang tidak masuk dalam ZOT karena nilai MSA dan MSS bernilai negatif yang artinya peserta diklat tidak bisa mentoleransi, atribut tersebut dan harus dilakukan perbaikan, yaitu profesionalisme dan keramahan petugas, fasilitas asrama, kenyamanan dan kebersihan ruang makan, jadwal diklat, pembayaran uang saku, dan transport serta penyerahan STTPL.

Atribut yang masuk dalam kategori ZOT (nilai ZOT positif) dengan kriteria peserta diklat tidak puas dalam pelayanan namun masih dapat diterima, antara lain: pelayanan saat registrasi, bahan perlengkapan diklat, sarana dan prasarana diklat, kerapihan dan keramahan panitia, respon panitia, keamanan dan kenyamanan peserta, empati panitia terhadap peserta, variasi menu serta profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara.

Zone of Tolerance adalah daerah di antara *desired service* sebagai batas atas dan *adequate service* sebagai batas bawah. Jika layanan yang didapat berada di atas zona toleransi artinya kualitas layanan yang ada saat ini sudah dapat memuaskan keinginan konsumen, begitupun sebaliknya.

Zona toleransi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menunjukkan kualitas pelayanan, yang secara tidak langsung berhubungan dengan kepuasan konsumen

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan dengan 2 metode yaitu *servqual* dan *zone of tolerance* dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh panitia penyelenggara diklat masih belum bisa memuaskan peserta diklat sebagai pelanggan. Hal ini bisa dilihat dari nilai *gap* yang negatif dari skor

Servqual. Dari 15 atribut pelayanan semua bernilai negatif.

Dari 15 atribut pelayanan dari panitia penyelenggara diklat, terdapat 9 atribut pelayanan yang masih bisa ditoleransi oleh peserta diklat berdasarkan hasil pemetaan dari *Zone Of Tolerance*. Atribut yang masuk dalam kategori ZOT (nilai ZOT positif) dengan kriteria peserta diklat tidak puas dalam pelayanan namun masih dapat diterima, antara lain: pelayanan saat registrasi, bahan perlengkapan diklat, sarana dan prasarana diklat, kerapihan dan keramahan panitia, respon panitia, keamanan dan kenyamanan peserta, empati panitia terhadap peserta, variasi menu serta profesionalisme, dan keramahan pengajar/widyaiswara.

Saran

Pihak penyelenggara diklat, dalam hal ini Balai Diklat Keagamaan Semarang harus segera melakukan semua perbaikan layanan sehingga semua layanan selama diklat dapat memuaskan peserta diklat. Salah satu caranya menyusun SPM, SOP, dan pengembangan kualitas SDM. Perbaikan wajib dilakukan terutama berkenaan dengan fasilitas di asrama, sarana dan prasarana di dalam kelas, jadwal pelaksanaan, sikap dan perilaku panitia, penyelesaian uang saku, dan transport serta penyerahan STTPL.

Ucapan Terimakasih

Karya tulis ilmiah ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Karya tulis ilmiah ini tidak akan pernah terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah berkontribusi terhadap proses pelaksanaan penelitian dan penerbitan karya tulis ilmiah ini.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Anatan, L. *Service Excellence Competing Through Compettiveness*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Bambang .P, Sri. H dan Agus, S.A. “Perbaikan Kualitas Layanan Jasa Dengan Model Servqual Dimensi Kepariwisata Dan Metode Quality Function Deployment (Studi Kasus Di Pt X, Tempat Wisata Wahana Permainan)”. *Jurnal Teknik Industri (J@TI) Undip* , Vol V, no. 1 (2010) : 1 – 10.
- Baskoro, Mikael Eko. *Analisis Kepuasan Peserta Terhadap Kualitas Pelatihan Divisi Product Quality Engineering PT. MEB Menggunakan Metode Servqual*. Sripsi. Fakultas Teknik Industri Universitas Indonesia, 2011.
- Blume, Brian Baldwin, Timothy & Huang, Jason. “Transfer of Training: A Meta-Analytic Review”. *Journal of Management* Vol. 36, no. 4 (2010): 1065-1105.
- Coombs, W. Timothy dan Sherry J. Holladay. *Managing Corporate Social Responsibility: A Communication Approach*. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012.
- Dewi, Shanty Kusuma. *Analisis Kualitas Pelayanan Dengan Metode Servqual Danzone Of Tolerance*. Seminar Nasional Teknologi dan Rekayasa (SENTRA), Jurusan Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Henryanto. “Analisis Tingkat Kepuasan Peserta Diklat Dari Kualitas Pelayanan Diklat Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai”. *Jurnal KBP* Volume 2 , no. 1 (2014) : 1-17.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*. Prenhallindo: Jakarta, Edisi Millenium 2, 2002.
- Nugroho, Wayan M.A dan Prawoto, Imam Hambali. “Analisis Kepuasan Peserta Terhadap Kualitas Pelayanan Widyaiswara Pada DTSS Pengadaan Barang/Jasa Di BDK Malang”. *Jurnal Pendidikan Nonformal* Volume 12, no. 2 (2017) : 62 – 76.
- Nur Sangadah. *Strategi Pelayanan Prima Balai Diklat Keagamaan Semarang Dalam Penerimaan Peserta Diklat Reguler Tahun 2014*. <https://bdksemarang.kemenag.go.id>. 2015 (diunduh Juli 2019).
- Purnamawati, Erlina. *Analisis Kualitas Layanan dengan Metode Servqual dan AHP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Surabaya*. Teknik Industri FTI-UPN “Veteran Jatim, 2016
- Sudjarwo. *Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV Pada Balai Diklat Keagamaan Semarang*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang: Semarang, 2008.
- Sumarno, Adi Wijaya. “Evaluasi Dampak Pendidikan Dan Pelatihan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Guru Matematika Di PPPPTK Matematika Yogyakarta”. *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* Volume 21, no 2 (2017): 127 – 141.
- Suyadi. *Upaya Peningkatkan Kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Diklat di Balai Diklat Keagamaan Semarang*. <https://bdksemarang.kemenag.go.id> (diunduh Juni 2019).

EVALUATION OF THE IMPLEMENTATION OF PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL (FORMAL RELIGIOUS EDUCATION) IN PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS WEST JAVA

ACHMAD DUDIN*)

ABSTRACT

This article is the result of the author's research in 2019. The main backdrop of this research is the quality issues of Formal Religious Education (PDF) that needs to be taken into account for their effectiveness in the future references. This evaluation research using a qualitative approach was conducted Ulya Ciamis West Java level. The data and information of this research reflected the thoughts of religious teachers, caregivers, managers, experts and related officials as well as an analysis of the implementation of the school in the pesantren. The results show: first, the development of the religious school has to be in line with the quality standard; some teachers argued that many teachers had no academic qualification and relevant certificates, funding and facilities did not sustain the quality of the school. Second, in terms of the process, the management system is not well implemented, course planning, course management, traditional teaching methods, ineffective course evaluation, and no monitoring and evaluation process.

KEY WORDS: *Evaluation, Formal Religious School(PDF), Pesantren Darussalam Ciamis*

EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL (PDF) PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS JAWA BARAT

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis tahun 2019. Latar belakang penelitian ini adalah adanya persoalan mutu Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang strategis untuk diperhatikan demi efektifitas penyelenggaraan PDF ke depan. Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif ini mengambil kasus pada PDF tingkat Ulya Ciamis Jawa Barat. Data dan informasi penelitian ini merupakan hasil pikiran para ustadz, pengasuh, pengelola, pakar, dan pejabat terkait serta analisis terhadap penyelenggaraan PDF di pesantren. Hasilnya, *pertama* dari segi *input*, rekognisi terhadap PDF di pesantren harus dibarengi dengan pengawalan konteks mutu penyelenggaraan PDF di pesantren secara profesional, terdapat beberapa ustadz kurang memenuhi standar kualifikasi akademik dan semua ustadz belum memiliki sertifikat PDF, standar kurikulum PDF belum terumuskan sesuai jenjang, pembiayaan dan sarana prasarana kurang memadai. *Kedua*, dari segi proses, manajemen PDF belum tertata dengan baik, belum akreditasi, perencanaan pembelajaran kurang standar, pengelolaan proses pembelajaran kurang efektif, penggunaan metode pembelajaran kurang variatif, penilaian hasil pembelajaran kurang sesuai prosedur yang profesional, pembinaan dan pengawasannya kurang optimal.

KATA KUNCI: *Evaluasi, PDF Pesantren Darussalam Ciamis*

*) Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmad.dudin@gmail.com

** Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Salah satu pendidikan keagamaan yang berkembang di masyarakat adalah pendidikan diniyah/madrasah diniyah. Pendidikan ini merupakan evolusi dari pendidikan agama yang diselenggarakan masyarakat Islam, terutama di pesantren salafiyah. Seiring perkembangan zaman pendidikan diniyah mengalami perubahan yaitu dari sistem halaqoh ke sistem klasikal yang di dalamnya tidak hanya sekedar membaca Alquran dan ilmu dasar agama, tetapi juga meliputi ilmu-ilmu keislaman lainnya. Sistem klasikal ini mulai dilaksanakan sekitar pertengahan abad ke-19 sejalan dengan yang dilaksanakan oleh pemerintah Belanda. Sistem ini kemudian banyak memberikan pengaruh terhadap perkembangan pendidikan di tanah air termasuk pendidikan Islam.

Secara legal formal keberadaan pendidikan diniyah sebagai satuan pendidikan keagamaan (Islam) telah diakui dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20/2003 maupun Peraturan Pemerintah (PP No. 55 Tahun 2007). Pendidikan diniyah sebagai satuan pendidikan keagamaan, dalam UU Sisdiknas Pasal 30 disebutkan bahwa pendidikan keagamaan merupakan salah satu jenis pendidikan. Pasal 30 ayat (3) menyebutkan bahwa pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non formal, dan informal. Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pada pasal 15 menyebutkan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal atau informal dapat dihargai sederajat dengan hasil pendidikan formal keagamaan atau umum atau kejuruan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi yang ditunjukkan oleh pemerintah.

Pada tahun 2014, dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 9 ayat (3), pasal 13 ayat (5), dan pasal 19 ayat (2) PP No 55/2007, ditetapkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang pendidikan keagamaan Islam. Dalam PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam dijelaskan bahwa lembaga Pendidikan Diniyah Formal (PDF) merupakan lembaga pendidikan keagamaan

Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Lembaga Pendidikan Diniyah Formal yang diselenggarakan oleh pondok pesantren ini berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.

Dasar pendirian PDF di pesantren adalah berdasarkan SK Dirjen Pendis No. 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian PDF. Untuk izin pendirian PDF yang merupakan izin operasional penyelenggaraan PDF, diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama dalam bentuk keputusan tentang Penetapan Izin Pendirian PDF setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen tersebut.

Sesungguhnya peraturan pemerintah dalam hal ini peraturan Kementerian Agama RI ini muncul dalam rangka memberikan rekognisi terhadap pendidikan diniyah yang telah lama diselenggarakan pesantren. Dalam dinamika sejarahnya, pesantren tercatat sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai andil besar dan selalu aktif menyumbangkan sumber daya manusianya kepada bangsa Indonesia. Sampai saat ini pun pesantren bersikap konsisten untuk senantiasa memikirkan dan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bagi kepentingan bangsa dan negara. Termasuk mendirikan dan menyelenggarakan PDF dalam rangka memenuhi pelaksanaan peraturan Kementerian Agama tersebut.

Sejak tahun 2015 telah berdiri 14 PDF di pesantren dan merupakan *pilot project* PDF. PDF ini dalam naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI. PDF dimaksud adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Ini merupakan pendidikan diniyah formal dalam naungan pesantren dengan ciri khas mempertahankan tradisi pesantren yaitu mempertahankan paradigma penguasaan "kitab kuning".¹ PDF ini telah menerima pengakuan dari pemerintah sebagai bagian dari sistem pendidikan

¹ Amin Haedari, *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah* (Jakarta: Diva Pustaka, 2006), 18.

nasional di Indonesia. Jenjang PDF itu dimulai dari tingkat ula (dasar), wustha (menengah), 'ulya (tinggi) dan kemudian berlanjut ke tingkat Ma'had Aly.

Dalam kenyataan penyelenggaraan PDF mengalami banyak problematika yang dihadapi. Berdasarkan pengamatan *stakeholder* PDF, terdapat kesiapan dan penyelenggaraan PDF di pesantren yang kurang optimal, antara lain: (1) dari sisi *input*, kurikulum PDF masih tumpang tindih dengan kurikulum Ma'had Aly, ustaz kurang memenuhi standar kualifikasi akademik, sarana prasarana dan pembiayaan PDF kurang memadai; (2) dari sisi proses, pengelolaan pembelajaran masih relatif konvensional dan evaluasi pembelajaran kurang sistematis.

Keberadaan PDF ini penting dikaji dan dievaluasi untuk perbaikan PDF ke depan. Oleh karena itu, penulis mencoba melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PDF. Untuk evaluasi penyelenggaraan PDF kali ini difokuskan pada PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis, yang merupakan sebuah *pilot project* PDF dari 14 PDF *pilot project* yang diformalkan sejak tahun 2015 di pesantren Indonesia.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana penyelenggaraan dilihat dari sisi *input*, proses, dan *output* PDF tingkat Ulya Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang telah berjalan sekitar empat tahun dan pada tahun ini (2019) telah melakukan ujian Nasional PDF?

Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tulisan ini bertujuan untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan dilihat dari sisi *input*, proses, dan *output* PDF tingkat Ulya Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang telah berjalan sekitar empat tahun dan pada tahun ini (2019) telah melakukan ujian Nasional PDF.

Kajian Literatur

Evaluasi

Penelitian evaluasi merupakan proses pengumpulan data secara ilmiah yang hasilnya bisa digunakan untuk bahan pertimbangan dan pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif kebijakan. Menurut George Sanchez,

dengan melakukan evaluasi berarti membuat taksiran melalui perbandingan kekuatan dan kelemahan pelaksanaan suatu kegiatan.² Abdul Basir menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses pengumpulan data yang deskriptif, informatif, prediktif, dilaksanakan secara sistematis dan bertahap untuk menentukan kebijaksanaan dalam usaha memperbaiki pendidikan.³ Purwanto menyatakan bahwa secara garis besar evaluasi merupakan pemberian nilai terhadap kualitas sesuatu. Selain itu, evaluasi juga dapat dipandang sebagai proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.⁴ Menurut Suharsimi Arikunto, evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program pendidikan.⁵ William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann, menyebutkan evaluasi sebagai suatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif-alternatif keputusan.⁶ Dari pemahaman teori-teori tersebut dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan proses kegiatan pengumpulan informasi sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan alternatif-alternatif keputusan.

Tujuan evaluasi adalah: (1) mengetahui prosedur-prosedur perencanaan program, program, dan atau produk; (2) meningkatkan prosedur, program dan atau produk yang telah ada; (3) menilai keadaan atau prosedur rencana, program dan atau produk.⁷

Untuk langkah-langkah penelitian evaluasi sebagaimana dinyatakan Stufflebeam, yaitu: (1) melukiskan atau menggambarkan aktivitas yang dievaluasi, keputusan tentang aktifitas yang akan dijalankan, informasi yang diperlukan untuk melayani keputusan tersebut, dan kebijakan yang

² George I. Sanchez, *Educational Psychology* (Austin: College of Education, The University of Texas, 2003). 2.

³ Abdul Basir, *Evaluasi Pendidikan* (Surabaya: Universitas Airlangga. 1998), 4.

⁴ Purwanto, *Evaluasi Hasil Belajar* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 152.

⁵ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Penerbit PT. Rineka Cipta. 2002).

⁶ William A. Mehrens dan Irlin J. Lehmann, *Introduction to measurement theory* (Belmont, California: Wadsworth, Inc. 1979).

⁷ Blaine R. Worthen dan James R. Sanders, *A highly esteemed and comprehensive overview of program evaluation that covers common approaches, models, and methods* (Western Michigan University, Utah State University. 2011), 6.

akan menentukan penyediaan informasi; (2) memperoleh informasi yang diperlukan; (3) menyampaikan informasi kepada keputusan.⁸ Adapun tulisan ini bertujuan mengevaluasi PDF di pesantren.

Evaluasi terhadap PDF di pesantren adalah evaluasi penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal yang terstandar sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Untuk penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka Kementerian Agama membuat Keputusan Menteri Agama, yaitu Keputusan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Dari pemahaman tersebut di atas dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud evaluasi dalam tulisan ini adalah penilaian tentang keadaan atau prosedur rencana, program dan atau produk dari Pendidikan Diniyah Formal di pesantren, untuk selanjutnya dilakukan analisis terhadap temuan-temuan sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan atau alternatif kebijakan, terutama untuk peningkatan kualitas Pendidikan Diniyah Formal di pesantren.

Penyelenggaraan Pendidikan

Penyelenggaraan berasal dari kata "selenggara" yang berarti mengatur. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dijelaskan bahwa penyelenggaraan merupakan proses, cara, perbuatan menyelenggarakan.⁹ Penyelenggaraan dapat didefinisikan sebagai upaya mengurus dan mengadakan sesuatu seperti memelihara dan merawat, melaksanakan perintah, rencana atau undang-undang, menunaikan atau menyampaikan (maksud, cita-cita, harapan, tugas kewajiban, dsb), untuk tujuan tertentu.¹⁰ Menurut Handoko, penyelenggaraan merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya dan lingkungan yang melingkupnya.¹¹ Berdasarkan pernyataan di atas

dapat kita ambil kesimpulan, bahwa penyelenggaraan merupakan proses awal untuk menempatkan orang-orang, baik individu maupun kelompok, ke dalam struktur organisasi demi mencapai tujuan organisasi tersebut.

Dalam kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, maka penyelenggaraan di sini merupakan kegiatan penyelenggaraan secara sistemik dari mulai *input*, proses sampai ke *output* pendidikan. Jadi yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan adalah penyelenggaraan yang secara sistemik menyangkut *input*, proses dan, *output* pendidikan.

Penyelenggaraan dalam konteks pendidikan adalah suatu proses belajar dan penyesuaian individu-individu secara terus menerus terhadap nilai-nilai budaya dan cita-cita masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang komprehensif, mencakup seluruh aspek kehidupan untuk mempersiapkan mereka agar mampu mengatasi segala tantangan.¹²

Menurut Langgulang, pendidikan merupakan perbuatan merubah dan memindahkan nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat.¹³ Muhajir mengemukakan pendidikan merupakan upaya terprogram dari pendidik secara pribadi untuk membantu subyek peserta didik berkembang ke tingkat yang normatif lebih baik, yang normatif bukan hanya tujuan tetapi juga cara atau jalannya.¹⁴

Menurut Lift Anis, pendidikan ialah proses yang berkaitan dengan upaya untuk mengembangkan potensi pada diri seseorang yang meliputi tiga aspek kehidupan, yaitu pandangan hidup, sikap hidup, dan keterampilan hidup. Ketiga aspek tersebut adalah kognitif, afektif, dan psikomotor.¹⁵ Ketiganya merupakan kesatuan totalitas yang melekat pada diri seseorang.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan terdapat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010, pasal 1 ayat (2) menyebutkan

⁸ Daniel L. Stufflebeam, *Educational Evaluation Decision Making* (Itasca, Illinois: F.E. Peacock Publisher, Inc., 1977), 215.

⁹ <http://kbbi.web.id/selenggara> pg. 4 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kamus versi online/daring dalam jaringan (diunduh tanggal 7 Juli 2019).

¹⁰ Pranala. <http://kbbi.web.id/selenggara> (diunduh tanggal 8 Juli 2019).

¹¹ Handoko T.Hani, *Manajemen Personalialia dan Sumber Daya*

Manusia (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003), 167.

¹² Azyumardi Azra, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 4.

¹³ Hasan Langgulang, *Pendidikan dan Peradaban Islam* (Jakarta: Balai Pustaka Al-Husna, 1985), 3.

¹⁴ Noeng Muhajir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Rake Sarasen, Ed, IV, 1987), 11.

¹⁵ Lift Anis, *Pembinaan Kesadaran Beragama Pada Anak* (Semarang: Pustaka Pelajar, 2001), 214.

bahwa penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan intinya adalah melaksanakan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan.

Sehubungan dengan itu, Coombs menyebutkan bahwa terdapat 12 komponen pendidikan, yaitu: tujuan dan prioritas, peserta didik, manajemen, struktur dan jadwal waktu, isi atau materi, dosen dan pelaksana, alat dan sumber belajar, fasilitas, teknologi, pengawasan mutu, penelitian, dan biaya pendidikan.¹⁶ Adapun menurut Saiful Nirwan dkk., komponen-komponen yang memungkinkan terjadinya proses pendidikan atau terlaksananya proses mendidik terdiri dari: tujuan pendidikan, peserta didik, pendidik, kurikulum, lingkungan pendidikan, interaksi edukatif, dan alat pendidikan.¹⁷

Dari pemahaman teori penyelenggaraan pendidikan tersebut di atas maka yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan dalam tulisan ini adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

Pendidikan Diniyah Formal

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.¹⁸ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* disebutkan bahwa arti dari pendidikan formal adalah segenap bentuk pendidikan atau pelatihan yang diberikan secara terorganisasi dan berjenjang, baik yang bersifat

umum maupun yang bersifat khusus.¹⁹ Pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang ditempuh secara resmi pada satuan lembaga atau organisasi yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal diselenggarakan oleh pemerintah (berstatus negeri) dan yayasan atau organisasi yang telah memenuhi syarat (berstatus swasta).²⁰ Contoh MI, SD, MTs, SMP, MA, SMA, Universitas, Sekolah Tinggi, dll. Adapun untuk pendidikan diniyah yang telah diformalkan sejak tahun 2015 yang berada di bawah naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI secara teknis memiliki otoritas memberikan definisi tentang satuan pendidikan ini. Yaitu dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7), yang dimaksud dengan Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.²¹ Jenjang pendidikan PDF yang berada pada lembaga formal di bawah naungan pondok pesantren ini adalah: (1) pendidikan diniyah formal ula (setingkat MI); (2) pendidikan diniyah formal wustha (setingkat MTs); (3) pendidikan diniyah formal ulya (setingkat MA); dan (4) Ma'had Ali (setingkat Perguruan Tinggi).

Sebagaimana lembaga pendidikan formal pada umumnya, dalam PDF juga dilakukan sebuah ujian yang bersifat nasional atau ujian yang dilakukan seluruh Indonesia. Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut tentang ujian nasional pendidikan diniyah formal dan standar kompetensinya ditetapkan dengan peraturan

¹⁶ Coombs Phillip Hall, *The World Educational Crisis* (Oxford University Press, 1968).

¹⁷ Syaiful Nirwan, Kustiono, dan Puji Astuti, *komponen pendidikan*. <http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/04/komponen-pendidikan.html> (diunduh 13 September 2019).

¹⁸ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Nomor 11.

¹⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. <https://kbbi.kata.web.id/pendidikan-formal/> (diunduh 14 September 2019).

²⁰ kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formal-nonformal.html (diunduh 14 September 2019)

²¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam yang terdapat pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7).

Menteri Agama dengan berpedoman kepada Standar Nasional Pendidikan.

Evaluasi Penyelenggaraan PDF

Evaluasi penyelenggaraan PDF di pesantren merupakan evaluasi penyelenggaraan PDF yang terstandar sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan sesuai Pedoman Pengembangan Standar Nasional Pendidikan. Untuk penyelenggaraan PDF yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam.

Evaluasi penyelenggaraan PDF di pesantren difokuskan pada PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis, yang merupakan sebuah *pilot project* PDF dari 14 PDF *pilot project* yang diformalkan sejak tahun 2015 di pesantren Indonesia. PDF ini dalam naungan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama RI. PDF dimaksud adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal.

Untuk mengevaluasi standar penyelenggaraan PDF, secara khusus kiranya dapat mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, dan SK Dirjen Pendis Nomor 5839 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian PDF. Termasuk mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Rangkuman dan pengembangan dari peraturan tersebut dinyatakan bahwa lembaga PDF adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di dalam pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Lembaga PDF yang diselenggarakan oleh pondok pesantren ini berbadan hukum setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan.

Untuk izin pendirian PDF yang merupakan izin operasional penyelenggaraan PDF, diberikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam atas nama Menteri Agama dalam bentuk keputusan tentang Penetapan Izin pendirian PDF setelah memenuhi persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pendis Nomor 5839 Tahun 2014. Untuk melihat standar penyelenggaraan PDF perlu

dilihat beberapa keterpenuhan persyaratan administrasi, teknis, dan kelayakan. Adapun untuk evaluasi penyelenggaraan PDF di pesantren difokuskan pada PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis, yang merupakan sebuah *pilot project* PDF dari 14 PDF *pilot project* yang diformalkan sejak tahun 2015 di pesantren Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian evaluatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yaitu model evaluasi sistemik terdiri dari komponen: *input*, *process*, dan *output*. Model evaluasi ini berorientasi pada pengambilan keputusan (*decision oriented*). Hasil evaluasi dalam penelitian ini dipaparkan dan digambarkan dalam bentuk kalimat, keterangan atau pernyataan bermakna terhadap penyelenggaraan Pendidikan Diniyah Formal (PDF) di pesantren.

Penelitian ini dilaksanakan di bulan Februari hingga Mei 2019. Lokasi penelitian adalah PDF tingkat Ulya Darussalam Ciamis. Pemilihan PDF tingkat Ulya Darussalam Ciamis merupakan sebuah *pilot project* Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang telah berjalan sekitar empat tahun dan pada tahun ini (2019) telah melakukan ujian nasional PDF dan keberadaannya strategis dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan PDF tersebut untuk perbaikan PDF ke depan.

Dalam penelitian ini, data diambil oleh peneliti bersumber dari pihak-pihak yang terkait dengan PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis. Yaitu Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kabupaten Ciamis, pimpinan pesantren Darussalam Ciamis, kepala dan ustaz PDF, dan santri. Pengambilan data dilakukan peneliti melalui pengisian daftar isian, wawancara mendalam, *focus group discussion*, pengamatan, dan telaah dokumen. Pengisian daftar isian oleh pengelola PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam dilakukan untuk memperoleh data dan informasi tentang profil PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis. Wawancara mendalam kepada informan yaitu kepala PDF, ustaz, santri, dan pengasuh pesantren dilakukan untuk mendalami penyelenggaraan PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam Ciamis. Sementara itu, teknik triangulasi sumber dilakukan penulis dengan cara membandingkan hasil wawancara

oleh satu subyek dengan hasil wawancara oleh subyek lainnya, sehingga tingkat kepercayaan dan keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan. *Focus group discussion* dilakukan dengan sejumlah ustaz dan waka kurikulum membahas tentang penyelenggaraan PDF Darussalam Ciamis. Pengamatan dilakukan pada setiap kegiatan yang terkait dengan penelitian. Adapun telaah dokumen dilakukan untuk menyelidiki benda-benda tertulis yang berkaitan dengan penelitian ini. Analisis data dilakukan selama pengumpulan data di lapangan dan setelah data terkumpul. Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data dengan tiga proses analisis yaitu reduksi data, penyajian data, penggambaran, dan pembuktian data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil

Sejarah

Pendidikan Diniyah Formal Ulya (PDFU) Pondok Pesantren Darussalam Ciamis Jawa Barat didirikan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 2924 Tahun 2015 tentang Penetapan Izin Pendirian Pendidikan Diniyah Formal Darussalam Kabupaten Ciamis Jawa Barat. Izin tersebut kemudian diubah melalui Piagam Direktur Jenderal Nomor 1981/H Tahun 2018; dengan Nomor Statistik 231232070003.

Pendidikan Diniyah Formal Ulya (PDFU) Pondok Pesantren Darussalam Ciamis beralamatkan di Jalan Kiai Ahmad Fadlil Kampus Pondok Pesantren Darussalam Kotak Pos No. 2 Ciamis Jawa Barat 46271, Telp. 0265-773618; Fax 0265-773618 E-mail: pdfu.darussalam@gmail.com Homepage: <http://www.darussalamciamis.or.id>.

PDF tingkat Ulya Pesantren Darussalam didirikan untuk mengembangkan fungsi antara lain: (1) pengembangan ilmu agama Islam; (2) penanaman ilmu-ilmu Islam agar peserta didik memiliki ketangguhan iman, keluasan ilmu agama Islam, dan ketangguhan akhlak; (3) fungsi edukatif, di mana upaya bimbingan dan pembelajaran diorientasikan pada pembentukan landasan kepribadian yang kuat. Fungsi ini diwujudkan dengan modeling, yaitu memberikan contoh konkret dan keteladanan perilaku yang berakhlak al-karimah, etis, normatif, dan bertanggungjawab dalam setiap berinteraksi

dengan siswa; (4) fungsi pengembangan dan peningkatan, merupakan penjabaran dari fungsi edukatif yang harus dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan. Fungsi ini dirujuk pada upaya optimalisasi potensi siswa melalui penciptaan pembelajaran yang kondusif, yaitu lingkungan interaksi yang sehat dan memberikan kemudahan kepada siswa untuk melaksanakan tugas-tugas perkembangannya sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dimana dia hidup; (5) fungsi transformasi budaya, yaitu untuk mewariskan budaya dari generasi ke generasi berikutnya; (6) fungsi pembentukan pribadi, yaitu berupaya sistematis untuk membentuk dan meningkatkan kualitas kepribadian individu, serta membentuk karakteristik kepribadian yang kreatif, mandiri, tanggungjawab, ulet, dan tekun; (7) fungsi penyiapan warga negara, yaitu untuk membentuk siswa agar menjadi warga negara yang baik, sesuai dengan tujuan dan falsafah bangsa, mengetahui dan mampu menjalankan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan perundang-undangan dan hukum yang berlaku; dan (8) fungsi penyiapan tenaga kerja, yaitu Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Pondok Pesantren Darussalam berupaya memberi berbagai kemampuan, sikap, ketrampilan kepada siswa untuk menjadi manusia yang produktif bagi kehidupan dirinya sendiri, keluarga, masyarakat, dan bangsanya.

Visi, Misi, dan Tujuan

Visi Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya Pondok Pesantren Darussalam adalah: "Menjadi lembaga pendidikan keagamaan tingkat menengah yang mampu mengintegrasikan tradisi intelektual Islam klasik dan kontemporer". Adapun misinya adalah: (1) menyelenggarakan pendidikan keagamaan formal tingkat menengah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku; (2) menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran ilmu agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab Islam klasik dan kontemporer; dan (3) menyelenggarakan layanan di bidang pendidikan, pembimbingan, administrasi, dan akomodasi bagi peserta didik/santri.

Untuk tujuan yang ingin dicapai Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya ini ada dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum adalah untuk menghasilkan lulusan yang ahli

dalam bidang ilmu agama Islam yang menguasai tradisi keilmuan Islam (*turats*) dan mampu melanjutkan studi di perguruan tinggi di dalam dan luar negeri. Adapun tujuan khusus adalah: (1) membantu pendidikan pondok pesantren sehingga legalitasnya diakui, baik oleh masyarakat maupun pemerintah; (2) menghasilkan lulusan yang mencintai dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber dari kitab-kitab Islam klasik dan kontemporer; (3) menghasilkan lulusan yang memiliki etos *tafaqquh fiddien* agar mereka mampu memahami ajaran-ajaran Islam secara baik dan benar; (4) menghasilkan lulusan kader ulama yang mampu memecahkan permasalahan keagamaan secara tepat sesuai dengan perkembangan zaman; dan (5) menghasilkan lulusan yang memiliki kesalehan (*al-akhlaqul-karimah*) dan kepakaran (*al-'ulumun-nafi'ah*).

Kebijakan PDF

Secara umum kebijakan pengelolaan PDF mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. Kebijakan yang dimaksudkan untuk memberikan rekognisi terhadap PDF di pesantren, maka hal tersebut harus dibarengi dengan pengawalan konteks mutu penyelenggaraan PDF di pesantren secara profesional. Pendidikan Diniyah Formal Ulya Pondok Pesantren Darussalam adalah program pendidikan keagamaan swasta tingkat atas setingkat dengan SMA/MA yang fokus kegiatannya adalah pembelajaran bidang ilmu-ilmu agama Islam yang bersumber pada kitab-kitab klasik dan kontemporer. Masa studi pada Pendidikan Diniyah Formal (PDF) Ulya Pondok Pesantren Darussalam adalah tiga tahun. Di samping itu terdapat pula kebijakan institusi PDF di pesantren.

Untuk kebijakan institusi PDFU Darussalam Ciamis, yaitu: (1) pengangkatan Kepala PDFU, dilakukan oleh pengasuh pesantren; (2) pengangkatan Wakil Kepala (Waka) PDFU bidang kurikulum, Waka bidang Kesantrian, dan Waka bidang sarana prasarana diangkat oleh pengasuh pesantren; dan (3) pengangkatan Kepala TU juga oleh pengasuh pesantren. Semua pengangkatan tersebut melalui Surat Keputusan (SK) pengasuh pesantren. Untuk pengangkatan ustaz-ustaz dilakukan oleh ketua Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Islam [YAKPI] al-Fadhliyah. Yaitu melalui Surat Keputusan YAKPI al-Fadhliyah.

Persyaratan Kelayakan

Dilihat dari persyaratan kelayakan PDF

Darussalam Ciamis telah memiliki izin pendirian PDF. Dari aspek tata ruang, terdapat lokasi pendirian PDF yang memenuhi standar keamanan, kebersihan, kesehatan, dan keindahan. Dari segi kemudahan akses terdapat angkot dari kota Ciamis sampai pesantren, bahkan terdapat pengajian khusus para supir angkot. Dari segi struktur bangunan PDF Darussalam memiliki gedung ber-AC dengan dilengkapi laptop dan infocus.

Dari aspek geografis, lokasi PDF Darussalam adalah aman dari bencana seperti banjir, longsor, dan jenis bencana lainnya, termasuk ramah lingkungan. Dari aspek ekologis, lokasi PDF Darussalam tidak berada di daerah resapan air, dan tidak termasuk dalam lokasi yang mengganggu ekologi lingkungan. Dari aspek jumlah santri PDF, selama 4 tahun (2015-2018) jumlah santri mencapai 35, 57, 85, 95 orang. Jumlah tersebut telah mencukupi jumlah minimal 30 santri sebagaimana disebutkan dalam juknis PDF. Ini menunjukkan animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di PDF Darussalam Ciamis cukup baik, bahkan jumlah santri pendaftar PDF Darussalam Ciamis cenderung meningkat.

Evaluasi Input

Pengelola PDF

Pengelola PDFU Pesantren Darussalam Ciamis terdiri dari Pengasuh Pesantren: K.H. Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S., Kepala PDFU: K.H. Dr. Hasan Bisri, M.Ag., Wakil Kepala Bidang Kesiswaan: Tanto Aljauhari Tantowie, M.Pd.I., Wakil Kepala Bidang Kurikulum: Dr. Husni Thoyyar, M.Pd., Wakil Kepala Bidang Sarana dan Prasarana: Soni Samsu Rizal, M.Pd.I.; Tata Usaha Kepala: Ghea Giovanni Zulfikri, S.Pd. dan staf adalah Riska Putri Agustin dan Siti Eva Maspupah.

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Secara umum, tenaga pendidik PDF merupakan pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan agama. Dalam menjalankan tugas profesionalnya, pendidik PDF harus memiliki seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap-perilaku yang harus dihayati dan dikuasai. Menjadi pendidik PDF memiliki kualifikasi tertentu, baik kualifikasi akademik maupun kompetensi

tertentu pula. Di PDFU Darussalam Ciamis persyaratan untuk menjadi tenaga pendidik atau pengajar PDFU adalah: (1) memiliki kemampuan membaca kitab Islam klasik dengan baik; (2) memiliki pengalaman mengajar di pondok pesantren; dan (3) berpendidikan sarjana atau tengah menempuh program sarjana. Meski persyaratan ini mengacu pada kualifikasi akademik PDFU.

Tenaga pengajar atau pendidik pada Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Pondok Pesantren Darussalam adalah: (1) K.H. Dr. Fadlil Munawwar Manshur, M.S., (2) K.H. Dr. Hasan Bisri, M.Ag., (3) K.H. Kamaludin Barizy, (4) K. Anas Nasrudin, (5) Dr. H. Husni Thoyyar, M.Pd., (6) Ahmad Farhani, M.Pd.I., (7) H. Wahidin Rahmat Hidayat, M.Pd.I., (8) Otong Suhendar, Lc., M.Ag., (9) Tanto Aljauhari Tantowie, M.Pd.I., (10) Soni Samsu Rizal, M.Pd.I., (11) Alifa Baiduri Hayatunnufus, S.S., M.Pd., (12) Wawan, SH., dan (13) Ghea Giovanni Zulfikri, S.Pd. Dilihat dari kualifikasi akademik, kebanyakan tenaga pendidik telah berpendidikan S2 dan bahkan ada yang telah berpendidikan S3. Ini artinya kualifikasi pendidikan pendidik PDFU Darussalam telah melampaui standar kualifikasi akademik PDF. Meski diakui terdapat dua tenaga pendidik non gelar, yang menurut persyaratan sebagai ustaz tidak memenuhi kualifikasi akademik, namun sesungguhnya mereka secara kualifikasi keilmuan dan kompetensinya sangat menguasai dengan baik. Meskipun demikian, keberadaan ustaz perlu penguatan kompetensi secara profesional yang selama ini belum dilakukan. Di samping itu, ustaz di PDF Darussalam belum menerima gaji dari pengurus PDF, dan pemerintah juga belum memberikan dana sertifikasi karena memang belum ada program sertifikasi ustaz PDF di pesantren.

Untuk kualifikasi tenaga kependidikan PDFU Darussalam memiliki seorang kepala TU dan dua staf. Kepala TU memiliki pendidikan S1 dan dua staf memiliki pendidikan SLTA. Yaitu Kepala TU adalah Ghea Giovanni Zulfikri, S.Pd. dan Staf adalah Riska Putri Agustin dan Siti Eva Maspupah. Terdapat pula penjaga sekolah yaitu Herdis dan Badrus Syamsi berpendidikan SLTA. Tenaga perpustakaan bernama Sholeh berpendidikan SLTA, dan tenaga laboran yaitu Agi Suhendri berpendidikan S1.

Peserta Didik

Untuk menjadi santri PDF diperlukan persyaratan tertentu dan jumlah santri tertentu sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan pemerintah yang berlaku bagi PDF. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh santri PDF-U Darussalam adalah: (1) lulusan MTs/SMP/Paket B, (2) memiliki kemampuan membaca kitab Islam klasik dengan standar yang ditentukan oleh pengelola, (3) belum berusia 21 tahun saat mendaftar, dan (4) lulus seleksi. Keadaan peserta didik (santri) PDFU Pondok Pesantren Darussalam adalah sebagai berikut. Hal ini telah memenuhi persyaratan yang diharapkan PDF. Yaitu santri PDFU Darussalam semua berasal dari santri pesantren tersebut yang telah lulus MTs Al-Fadhliyah Darussalam dan Paket B dengan kriteria memiliki kemampuan membaca kitab kuning yang ditentukan oleh pengelola. Santri berusia antar 16-20 tahun saat mendaftar PDF dan lulus seleksi.

Dari segi jumlah santri PDF dengan persyaratan memiliki santri paling sedikit 32 (tigapuluh dua orang), maka pada tahun pertama 2015 jumlahnya sebanyak 35 orang yang berasal dari santri pesantren Darussalam Ciamis. Jumlah tersebut telah memenuhi standar PDFU. Pada tahun 2016 jumlah santrinya meningkat menjadi 57 orang dengan jumlah rombel dua, pada tahun 2017 meningkat 85 orang dengan jumlah rombel tiga, dan kemudian pada tahun 2018 meningkat lagi 92 orang dengan jumlah rombel empat. Ini menunjukkan trend jumlah santri selalu meningkat setiap tahunnya.

Kurikulum

Menurut Waka Kurikulum PDFU Darussalam, Husni, kurikulum PDF dari Kemenag standar kitabnya terlalu tinggi. Hal ini menjadi keluhan banyak pengelola PDF di pesantren Indonesia termasuk menjadi keluhan PDFU Darussalam Ciamis. Menurut Husni, kitab-kitab yang menjadi standar PDF hampir sama dengan kitab-kitab yang diajarkan pada Ma'had Ali. Kalau ini dipertahankan menurutnya maka akan sulit menentukan penjejangannya. Jadi dalam hal ini perlu dirumuskan ulang kurikulum dari PDF jenjang ula, wustho, ulya dan Ma'had Ali. Menurutnya juga bahwa perumusan kurikulum harus lebih merujuk pada kitab *turats* daripada merujuk pada kompetensi. Di beberapa pesantren belum tegas (peta rendah tinggi kitab)

tapi ini berdasarkan pada tradisi di pesantren saja.

Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Darussalam berisi pilihan strategis untuk mencerdaskan peserta didik. Kurikulum ini dirancang dengan karakteristik sebagai berikut: (1) mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik; (2) lembaga pendidikan merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar; (3) mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat; (4) memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan; (5) kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar matapelajaran; (6) kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti; dan (7) kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar matapelajaran dan jenjang pendidikan.

Berdasarkan argumentasi tersebut, maka Kurikulum Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya di Pondok Pesantren Darussalam direncanakan dengan struktur kurikulum yaitu: *Pertama*, Kelas X, Alquran | Tahsin dan Tahfidz (2 jam), Tafsir | Tafsir al-Jalalain (2 jam), Ilmu Tafsir | Imam al-Dirayah Al-Suyuthi (2 jam), Hadis | Mukhtar al-Ahadits Ahmad al-Hasyimi (2 jam), Ilmu Hadis | Mandhumah Bayqunyah Al-Baiquni (2 jam), Tauhid | Husun al-Hamidiyyah Syaikh Sayyid Husain Afandi & Tuhfat al-Murid Al-Baijuri (2 jam), Fiqh | Fath al-Mu'in Al-Maelabary (2 jam), Ushul Fiqh | Tashil al-Thuruqat Al-Juwayni (2 jam), Akhlak-Tasawuf | Minhaj al-'Abidin Al-Ghazali & Kifayat al-Atqiya Al-Dimyathi (2 jam), Tarikh | Al-Rahiq Al-Makhtum Rahman Mubarakpuri (2 jam), Bahasa Arab | Al-Arabiyyah Baina Yadaik, Al-Arabiyyah li al-Nasyi'in (3 jam), Nahwu | Alfiyah Ibn Malik (2 jam), Sharaf | Mughni al-Labib Ibnu Hisyam al-

Anshary (2 jam), Balaghah | Jauhar al-Maknun Al-Akhdhari (2 jam), Ilmu Kalam | Al-Iqtishad fi al-'Itiqad Al-Ghazali (2 jam), Ilmu Arudl | Ilmu Manthiq | Fi 'Ilm al-Mantiq Al-Sawi (1 jam), Ilmu Falak | Pendidikan Kewarganegaraan (1 jam), Bahasa Indonesia (2 jam), Matematika (2 jam), Ilmu Pengetahuan Alam (2 jam), Seni dan Budaya | Burdah, Barzanji, Diba'i, Simthudduror (2 jam);

Kedua, Kelas XI, Alquran | Tahsin dan Tahfidz (2 jam), Tafsir | Marah Labid Al-Nawawi al-Bantani & Tafsir al-Maraghi Ahmad al-Maraghi (2 jam), Ilmu Tafsir | Al-Itqan fi 'Ulum al-Qur'an Al-Suyuthi (2 jam), Hadis | Riyad al-Shalihin & Al-Jami' al-Shaghir Al-Suyuthi (2 jam), Ilmu Hadis | Manhaj Dzawi al-Nadhar Al-Tirmasiy; Manhaj al-Latif Al-Maliki & Ushul al-Hadits wa Musthalahuhu Al-Khatib (2 jam), Tauhid | Ummu al-Barahin Sanusi (2 jam), Fiqh | Al-Iqna' Abu Syuja', Muhalla; Fiqh al-Sunnah Sayid Sabiq; Al-Fiqh al-Islamy Al-Zuhaily (2 jam), Ushul Fiqh | Lub al-Ushul Al-Anshary; Al-Luma Al-Syirazi; Ushul al-Fiqh Abu Zahrah; Ushul al-Fiqh Wahbah al-Zuhaily (2 jam), Akhlak-Tasawuf | Mau'idzat al-Mu'minin Al-Qashimy; Madarij al-Salikin Ibn Qayyim (2 jam), Tarikh | Sirah al-Nabawiyyah Ibnu Hisyam; Sirah al-Nabawiyyah Muhammad Husein Haikal (2 jam), Bahasa Arab | Al-Arabiyyah Baina Yadaik, Al-Arabiyyah li al-Nasyi'in (3 jam), Nahwu | Al-Fiyah Ibn Malik & Al-Durus al-Lughah al-'Arabiyyah Abdurrahim (2 jam), Sharaf | Mughni al-Labib Ibnu Hisyam al-Anshary (2 jam), Balaghah | 'Uqud al-Juman Al-Suyuthi (2 jam), Ilmu Kalam | Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah Al-'Asy'ary; Al-Milal wa al-Nihal Al-Syahrastani (2 jam), Ilmu Arudl | Nadzam al-Arudh (1 jam), Ilmu Manthiq | Sullam Al-Munawraq Al-Akhdhârî (1 jam), Ilmu Falak | Durus Usul al-Falaqiyah Ma'sum bin Al (1 jam), Pendidikan Kewarganegaraan (1 jam), Bahasa Indonesia (2 jam), Matematika (2 jam), Ilmu Pengetahuan Alam (2 jam), Seni dan Budaya | Burdah, Barzanji, Diba'i, Simthudduror (2 jam);

Ketiga, Kelas XII, Alquran | Tahsin dan Tahfidz (2 jam), Tafsir | Shafwah al-Tafasir al-Shabuni; Mahasin al-Ta'wil Al-Qashimi (2 jam), Ilmu Tafsir | Mabahis fi Ulum al-Quran Subhi al-Shalih (2 jam), Hadis | Riyad al-Shalihin & Al-Jami' al-Shaghir Al-Suyuthi (2 jam), Ilmu Hadis | Manhaj Dzawi al-Nadhar Al-Tirmasiy; Manhaj al-Latif Al-Maliki & Ushul al-Hadits wa Musthalahuhu Al-Khatib (2 jam), Tauhid | Ummu

al-Barahin Sanusi (2 jam), Fiqh | Al-Iqna' Abu Syuja', Muhalla; Fiqh al-Sunnah Sayid Sabiq; Al-Fiqh al-Islamy Al-Zuhaily (2 jam), Ushul Fiqh | Lub al-Ushul Al-Anshary; Al-Luma Al-Syirazi; Ushul al-Fiqh Abu Zahrah; Ushul al-Fiqh Wahbah al-Zuhaily (2 jam), Akhlak-Tasawuf | Mau'idzat al-Mu'minin Al-Qashimy; Madarij al-Salikin Ibn Qayyim (2 jam), Tarikh | Sirah al-Nabawiyah Ibnu Hisyam; Sirah al-Nabawiyah Muhmmad Husein Haikal (2 jam), Bahasa Arab | Al-Arabiyyah Baina Yadaik, Al-Arabiyyah li al-Nasyi'in (3 jam), Nahwu | Al-Fiyah Ibn Malik & Al-Durus al-Lughah al-'Arabiyyah Abdurrahim (2 jam), Sharaf | Mughli Labib Ibnu Hisyam al-Anshary (2 jam), Balaghah | 'Uqud al-Juman Al-Suyuthi (2 jam), Ilmu Kalam | Al-Ibanah 'an Ushul al-Diyanah Al-'Asy'ary; Al-Milal wa al-Nihal Al-Syahrastani (2 jam), Ilmu Arudl | Al-Mukhtashar al-Syafi Al-Rais (1 jam), Ilmu Manthiq | Sulam Al-Munawraq Al-Akhdhârî (1 jam), Ilmu Falak | Sullam al-Nayyi rain Al-Manshuriyah Jembatan Lima Jakarta (1 jam), Pendidikan Kewarganegaraan (1 jam), Bahasa Indonesia (2 jam), Matematika (2 jam), IPA (2 jam), Seni dan Budaya | Burdah, Barzanji, Diba'i, Simthudduror (2 jam)

Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana kegiatan pembelajaran PDFU Darussalam yang berada di lingkungan pesantren, menurut kepala TU PDFU Darussalam, yaitu meliputi: (1) luas tanah PDF Darussalam, merupakan bagian dari luas tanah pesantren yang luasnya kurang lebih 7 hektar dengan sertifikat hak milik pesantren; (2) gedung PDFU Darussalam telah menempati bagian dari gedung pesantren khusus digunakan untuk PDF dengan 3 ruang kelas tak ber-AC dan dua ruang kelas ber-AC yang dilengkapi 1 set sarana ruang kelas berupa meja peserta didik; kursi peserta didik, meja guru, kursi guru, lemari, papan tulis, dan tempat sampah. Terdapat sebuah ruangan kepala PDF Darussalam. Satu ruangan untuk ustaz, TU, dan ruang tamu. Di samping itu, terdapat ruang tempat ibadah yang terpisah, dan tempat toilet untuk ustaz dan santri.

Sarana pembelajaran yang tersedia di PDFU Darussalam Ciamis berupa peralatan pendidikan, media pendidikan, kitab-kitab sumber belajar, mushaf Alquran, dan kitab penunjang baik untuk ustaz maupun santri. Terdapat ruang untuk perpustakaan dengan koleksi kitab terbatas dan

masjid sebagai sarana untuk ibadah salat dan juga pembelajaran. Keadaan sarana prasarana PDF Darussalam sebagian keadaannya telah memadai dan sebagian kurang memadai. Ketersediaan sarana dan prasarana pada gilirannya akan sangat mendukung dalam penyelenggaraan PDF, maka dari keberadaan sarana yang sebagian kurang memadai dapat mengganggu efektifitas pembelajaran PDF.

Pembiayaan PDF

Dari segi sumber pembiayaan PDF, menurut kepala TU PDFU Darussalam, yaitu sumber pembiayaan PDFU Pesantren Darussalam untuk kelangsungan pendidikannya sementara hanya mengandalkan dana BOS untuk tahun 2015, tahun 2016, tahun 2017, dan tahun 2018. Untuk mengatasi kekurangan pembiayaan biasanya pihak pesantren yang mengatasinya, karena pesantren tidak mengambil iuran dana dari para santri. Pembiayaan PDF boleh dibidang kurang memadai, namun penyelenggara PDF tetap semangat dalam penyelenggaraan PDF yang dianggap sebagai kekuatan pesantren dalam penyelenggaraan pendidikan formal berbasis *turats*.

Evaluasi Proses

Pengelolaan Satuan PDF

Pengelolaan satuan pendidikan dilakukan dengan menerapkan manajemen dengan prinsip keadilan, kemandirian, kemitraan dan partisipasi, nirlaba, efisien, efektivitas, dan akuntabilitas. Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal secara umum menjadi tanggung jawab pesantren. Pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal dengan prinsip-prinsip di atas hasil temuan menunjukkan prinsip kemandirian, kemitraan, dan tanggungjawab menjadi ciri dari PDF Darussalam Ciamis.

Manajemen PDF Darussalam secara umum menjadi tanggung jawab pesantren, namun secara teknis dipegang oleh kepala PDF. Kepala PDF secara teknis bertanggung jawab atas kegiatan pelaksanaan PDF Darussalam di pesantren. PDF Darussalam dikelola atas kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan PDF untuk masa 4 tahun. Dalam hal ini PDF Darussalam telah memiliki pedoman yang mengatur pengelolaan PDF dalam bentuk program, kalender pendidikan,

jadwal pelajaran, dan jadwal penyusunan kurikulum. Namun demikian, menurut Waka Kurikulum, mengakui bahwa manajemen PDF Darussalam masih belum tertata dengan baik. Di samping itu, pengelolaan satuan pendidikan diniyah formal harus mengikuti proses akreditasi yang dilakukan oleh badan akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Waka Kurikulum, Husni, bahwa PDF Darussalam belum melakukan akreditasi.

Perencanaan Pembelajaran

Menurut pengakuan Ustaz Fatoni, untuk perencanaan pembelajaran pada PDFU Darussalam Ciamis, telah dilakukan pengembangan silabus oleh ustaz berdasarkan daftar isi kitab yang digunakan. Ustaz Fathoni belum menggunakan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), karena pembelajaran berbasis *turats* menurutnya cukup dengan menjelaskan tujuan pembelajaran atau pengajian saja. Ustaz Fathoni dalam menyusun silabus mengacu pada standar kurikulum yang ada terutama standar isi PDF.

Menurut Ustaz Otong Suhendar, untuk perencanaan pembelajaran pada PDFU Darussalam, belum pernah melakukan pengembangan silabus. Ustaz Otong belum pernah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, namun nantinya ustaz tersebut sudah berkomitmen untuk membuat RPP. Implementasi pembelajaran tiap semester dengan melakukan pengajian kitab kuning sebagaimana yang ditetapkan oleh Kemenag secara nasional. Ustaz Otong dalam menyusun silabus mengacu pada standar kurikulum yang ada terutama standar isi PDF.

Menurut Ustaz Tanto Al-Jauhari, perencanaan pembelajaran terkait pengembangan silabus oleh ustaz, masih belum berjalan efektif karena ustaz belum terbiasa membuat silabus. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) belum dibuat oleh ustaz. Semua pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum PDF, dan pengembangan silabus telah mengacu pada kurikulum yang berlaku terutama standar isi PDF.

Dari penuturan ustaz tentang perencanaan pembelajaran tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa perencanaan pembelajaran di PDFU Darussalam belum memenuhi standar, sehingga tampak adanya variasi perencanaan

pembelajaran yang kurang matang.

Proses Pembelajaran

Menurut pengakuan Ustaz Ahmad Farhani, kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran adalah mengabsen kehadiran santri, mencatat santri tidak hadir, dan memberikan motivasi kepada santri untuk bertanya dan berdiskusi mengenai bahan pembelajaran yang belum dikuasainya. Kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan inti dalam pembelajaran adalah menjelaskan materi yang akan dibahas, dan menggunakan media belajar. Adapun yang dilakukan ustaz untuk kegiatan penutup dalam pembelajaran adalah merangkum atau menyimpulkan materi yang disampaikan.

Menurut pengakuan Ustaz Otong Suhendar, kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran adalah mengabsen kehadiran santri, bertanya kepada santri sampai dimana pembahasan sebelumnya, dan memberikan motivasi kepada santri untuk bertanya dan berdiskusi mengenai bahan pembelajaran yang belum dikuasainya. Kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan inti dalam pembelajaran adalah menjelaskan materi yang akan dibahas, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan membuat rangkuman/kesimpulan materi pelajaran yang diajarkan untuk menutup kegiatan pelajaran. Kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan penutup dalam pembelajaran adalah merangkum atau menyimpulkan materi yang disampaikan.

Menurut pengakuan Ustaz Tanto Aljauhari, kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan pendahuluan dalam pembelajaran adalah mengabsen kehadiran santri, mencatat santri tidak hadir, bertanya kepada santri sampai dimana pembahasan sebelumnya, dan memberikan motivasi kepada santri untuk bertanya dan berdiskusi mengenai bahan pembelajaran yang belum dikuasainya. Kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan inti dalam pembelajaran adalah menjelaskan materi yang akan dibahas, menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media belajar, dan membuat rangkuman/kesimpulan materi pelajaran yang diajarkan untuk menutup kegiatan pelajaran. Adapun kegiatan yang dilakukan ustaz untuk kegiatan penutup dalam pembelajaran adalah merangkum atau menyimpulkan materi yang disampaikan.

Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran yang digunakan dalam Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Ulya Darussalam, menurut penuturan beberapa ustaz dalam kesempatan tertentu menggunakan metode diskusi mendalam dalam bentuk *focus group discussion* (FGD). Namun, metode pembelajaran yang sering digunakan dalam konteks berbasis *turast* adalah metode klasikal/kelas, bandongan/wetonan, sorogan (tutorial), dan muhawarah/ muhadatsah. Di samping itu, digunakan pula metode seminar, studi lapangan, dan praktik. Sebenarnya banyak metode pembelajaran yang dapat dimaksimalkan penggunaannya oleh ustaz, termasuk penggunaan variasi metode pembelajaran, sehingga akan berdampak pada pengelolaan proses pembelajaran yang menjadi lebih efektif.

Penilaian Hasil Pembelajaran

Beberapa penilaian hasil pembelajaran, menurut pengakuan beberapa ustaz, yaitu: (1) ustaz Otong Suhendar, memberikan pertanyaan-pertanyaan di akhir pembelajaran, melakukan penilaian atas tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik. Tugas yang diberikan kepada peserta didik dinilai dengan memberikan angka, adapun kekeliruan dalam menjawab dijelaskan ulang; (2) Ustaz Tanto, memberikan penilaian hasil belajar yang dilakukannya pada setiap akhir pembelajaran berdasarkan pengamatan terhadap peserta didik. Penilaian atas tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik adalah penilaian kemampuan membaca kitab. Adapun pemberian tes setiap selesai satu pokok pelajaran dipelajari belum dilakukan, dan belum memberikan remedial tes kepada peserta didik/santri; (3) Ustaz Soni, memberikan penilaian pada akhir pembelajaran belum dilakukan namun penilaian santri secara lisan adalah sangat memuaskan dalam setiap akhir pembelajaran. Penilaian atas tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik belum dilakukan. Pemberian tes setiap selesai satu pokok pelajaran dipelajari. Itu kadang-kadang setiap hari diberi tes. Adapun tes yang diberikan adalah sangat bervariasi sesuai bahasan yang dibahas. Adapun ustaz memberikan remedial tes kepada santri, jika ada nilai yang tidak memenuhi standar penilaian.

Dari penilaian yang dilakukan ustaz ini menunjukkan adanya variasi penilaian hasil pembelajaran yang sesungguhnya belum sesuai

dengan prosedur sistem penilaian pembelajaran yang profesional.

Penilaian Santri terhadap Proses Pembelajaran

Untuk penilaian santri terhadap proses pembelajaran yang dilakukan ustaz PDF, penulis menyebarkan angket untuk 20 santri PDF Darussalam Ciamis angkatan 2017. Yaitu sebagaimana tabel penilaian santri tentang proses pembelajaran, dengan skala selalu (SL), sering (SR), hampir tidak pernah, dan tidak pernah (TP):

Penilaian Santri tentang Proses Pembelajaran

NO	PERNYATAAN	SL	SR	HTP	TP
1	Ustadz melakukan pengelolaan kelas dengan baik	9	11	0	0
2	Ustadz merespons setiap pertanyaan dari santri	9	9	2	0
3	Ustadz menilai tugas santri	6	10	4	0
4	Ustadz memberikan tes remedial kepada santri	1	9	4	6
5	Ustadz mendorong santri aktif dalam pembelajaran	9	10	1	0
6	Ustadz melakukan komunikasi dengan santri	8	10	2	0
7	Ustadz menyebutkan sumber kitab dalam proses pembelajaran	14	5	1	0
8	Ustadz menutup pembelajaran dengan menyampaikan kesimpulannya	1	5	9	5
9	Ustadz menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya	0	9	7	4
10	Ustadz melakukan penilaian di akhir pembelajaran	7	5	8	0
11	Ustadz memberikan tes setelah menyelesaikan satu pelajaran tertentu	2	10	7	1
12	Ustadz menggunakan metode pembelajaran secara bervariasi	5	6	9	0

Berdasarkan penuturan ustaz mengenai proses pembelajaran yang dilakukan dan hasil penilaian santri tentang proses pembelajaran maka tampak pengelolaan proses pembelajaran di kelas terdapat kekurangan, sehingga pengelolaan proses pembelajaran ini harus menjadi perhatian untuk ditingkatkan secara efektif. Karena, pengelolaan proses pembelajaran yang efektif pada gilirannya dapat meningkatkan prestasi belajar santri.

Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan PDF adalah menjadi kewenangan pengawas pendidikan Islam Kementerian Agama. Namun hal ini belum ada pengawas khusus yang ditugaskan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan PDF di pesantren. Pembinaan dan pengawasan selama ini hanya dilakukan secara internal oleh pihak pesantren dan kepala PDF Darussalam Ciamis. Sehingga PDF Darussalam merasa bahwa upaya pembinaan dan pengawasan terhadap PDF Darussalam Ciamis masih kurang optimal. Upaya pembinaan dan pengawasan secara berkala juga

kurang diperhatikan, baik oleh pihak Kemenag, pengawas maupun kepala PDF Darussalam.

Output

Sistem Evaluasi PDF

Dari segi evaluasi PDF, menurut penuturan para ustaz PDFU Darussalam dalam kesempatan FGD, PDFU Pesantren Darussalam telah memiliki sistem evaluasi pendidikan, meliputi: *pertama*, penilaian yang dilakukan oleh pendidik berupa penilaian tes harian atau tes akhir pembelajaran, penilaian praktek dan penugasan atau portofolio. *Kedua*, penilaian yang dilakukan satuan pendidikan diniyah formal dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi peserta didik pada semua mata pelajaran berupa penilaian tengah semester dan akhir semester dalam bentuk tes hasil belajar. *Ketiga*, penilaian (imtitihan) oleh pemerintah dilakukan dalam bentuk ujian akhir pendidikan diniyah formal berstandar nasional.

Prestasi Santri

Prestasi santri PDFU Darussalam Ciamis, sebagaimana hasil FGD dengan para ustaz dan wakil PDF, yaitu: (1) prestasi akademik, yaitu bagi lulusan Pendidikan Diniyah Formal Ulya Pondok Pesantren Darussalam diharapkan dapat memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu agama Islam, pengetahuan umum, teknologi, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, peradaban, kebangsaan, dan kenegaraan; (2) prestasi non akademik, yaitu bagi lulusan santri PDFU Pesantren Darussalam diharapkan dapat memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam bekerjasama dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Di samping itu memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di PDF secara mandiri.

Sebaran Alumni

Untuk sebaran alumni PDFU Pesantren Darussalam, menurut Waka kurikulum PDF, maka dari 35 orang yang 10 orang masuk Institut Agama Islam Darussalam. Selebihnya ada yang meneruskan ngaji di pesantren, dan sebagian pulang ke kedua orangtuanya dan keberadaannya tidak diketahui. *Output* PDF Darussalam kurang

membuka ketersebaran alumni untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terutama Ma'had Ali. Di samping itu, pihak PDF Darussalam belum mengakomodir alumni/lulusan PDF dalam sistem aplikasi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.

D. PENUTUP

Simpulan

Beberapa simpulan dari penelitian ini adalah: rekognisi terhadap PDF di pesantren harus dibarengi dengan pengawalan konteks mutu penyelenggaraan PDF di pesantren secara profesional. Dari evaluasi penyelenggaraan PDFU Darussalam Ciamis tampak realitasnya yaitu: (1) dari segi *input*, terdapat beberapa ustaz kurang memenuhi standar kualifikasi akademik dan belum memiliki sertifikat PDF, standar kurikulum PDF dari Kemenag untuk kitabnya terlalu tinggi, dan hampir sama dengan kitab-kitab yang diajarkan pada Ma'had Ali, sehingga dapat menyulitkan dalam penjenjangannya; sarana prasarana kurang memadai, dan anggaran (dana) kurang mencukupi untuk pembiayaan PDFU; (2) dari segi proses PDF, manajemen PDF Darussalam masih belum tertata dengan baik, belum pernah dilakukan akreditasi untuk PDF Darussalam oleh Kementerian Agama untuk standarisasi PDF di pesantren, terdapat perencanaan pembelajaran yang kurang standar, pengelolaan proses pembelajaran kurang efektif, penggunaan metode pembelajaran kurang variatif, penilaian hasil pembelajaran kurang sesuai prosedur sistem penilaian pembelajaran yang profesional, pembinaan dan pengawasan kurang optimal, dan upaya pembinaan dan pengawasan secara berkala oleh pihak Kemenag, pengawas, dan kepala PDF masih kurang diperhatikan; (3) dari segi *output*, pihak PDF kurang membuka ketersebaran alumni untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terutama Ma'had Ali, dan belum mengakomodir lulusan PDF dalam sistem aplikasi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut di atas dapat disarankan beberapa hal penting yaitu: kepada Direktorat PD Pontren Kementerian Agama perlu mengkaji secara seksama fakta atau hasil dari penyelenggaraan PDF di pesantren, terkait kesesuaiannya dengan visi, misi, dan program

PDF, dengan membuat kebijakan perbaikan. Dari segi *input*, Kementerian Agama dalam pemberian rekognisi terhadap PDF di pesantren harus dibarengi dengan pengawalan mutu penyelenggaraan PDF di pesantren secara profesional. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu merekomendasikan kepada Pusdiklat dan Balai Diklat untuk melakukan kediklatan terkait peningkatan kompetensi ustaz PDF, pemerintah perlu menyelenggarakan kebijakan sertifikasi bagi pendidik PDF, Kementerian Agama dalam hal ini Direktorat PD Pontren perlu merumuskan ulang kurikulum PDF di pesantren jenjang ula, wustha, 'ulya, dan Ma'had Ali, yang merujuk pada kitab kuning, Kementerian Agama perlu menganggarkan dana pembiayaan PDF dan dana sarana prasarana PDF secara memadai. Dari segi proses, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama perlu merekomendasikan kepada Pusdiklat dan Balai Diklat untuk melakukan kediklatan terkait manajemen PDF yang profesional, akreditasi PDF, perencanaan pembelajaran yang standar (penyusunan RPP, silabus dan kurikulum muatan lokal pesantren), kediklatan terkait pengelolaan pembelajaran yang

profesional (penggunaan metode, media, dan sumber belajar), kediklatan terkait kompetensi penilaian pembelajaran ustaz yang memperhatikan prosedur sistem penilaian pembelajaran yang profesional. Kementerian Agama dan pesantren perlu melakukan optimalisasi pembinaan PDF di pesantren. Kementerian Agama dan pesantren perlu melakukan pengawasan dan pengendalian secara berkala terhadap penyelenggaraan PDF di pesantren. Dari segi *output*, pihak PDF perlu membuka ketersebaran alumni untuk melanjutkan ke perguruan tinggi terutama Ma'had Ali, dan perlu mengakomodir lulusan PDF dalam sistem aplikasi penerimaan mahasiswa perguruan tinggi.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi. *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Anis, Lift. *Pembinaan Kesadaran Beragama Pada Anak*. Pustaka Pelajar, Semarang, 2001.
- Basir, Abdul. *Evaluasi Pendidikan*. Surabaya: Universitas Airlangga, 1998.
- Haedari, Amin. *Peningkatan Mutu Terpadu Pesantren dan Madrasah Diniyah*. Jakarta: Diva Pustaka, 2006.
- Hall, Coombs Phillip. *The World Educational Crisis*. Oxford University Press, 1968.
- Hani, Handoko T.. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 2003.
- Langgulong, Hasan. *Pendidikan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Balai Pustaka Al-Husna, 1985.
- Mehrens, William A. dan Irlin J. Lehmann. *Introduction to measurement theory*. Belmont, California: Wadsworth, Inc., 1979.
- Muhajir, Noeng. *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial*. Yogyakarta: Rake Sarasen, Ed, IV, 1987
- PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (7)
- Purwanto. *Evaluasi Hasil Belajar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Stufflebeam, Daniel LeRoy. *Educational Evaluation Decision Making*. Itasca. Illinois: F.E. PeacockPubliser, Inc. 1977.
- Sánchez, George Isidore. *Educational Psychology*. Texas: College of Educational The University of Texas, 2003.
- Suharsimi, Arikunto. *Metodologi Penelitian*. Jakarta Penerbit PT. Rineka Cipta., 2002.
- Worthen, Blaine R, James R Sanders. *A highly esteemed and comprehensive overview of program evaluation that covers common approaches, models, and methods*. Western Michigan University; Utah State University, 2011.
- Sumber Online
kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formal-nonformal.html (diunduh 14 September 2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*: <https://kbbi.kata.web.id/pendidikan-formal/> (diunduh 14 September 2019).
- <http://kbbi.web.id/selenggara> pg. 26 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kamus versi online/daring dalam jaringan.
- <http://kbbi.web.id/selenggara> pg. 4 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kamus versi online/daring dalam jaringan (diunduh tanggal 7 Juli 2019)
- kanalinfo.web.id/2016/04/pengertian-pendidikan-formal-nonformal.html.
- Pranala (*link*):<http://kbbi.web.id/selenggara>. (diunduh tanggal 8 Juli 2019)
- Nirwan, Syaiful, Kustiono dan Puji Astuti. *Komponen Pendidikan*. <http://lukmancoroners.blogspot.com/2010/04/komponen-pendidikan.html> (diunduh 13 September 2019).

READING NEW PHENOMENONS SALAFI MOVEMENTS ON SOLO

ABDUL JAMIL WAHAB*)

ABSTRACT

Salafi can be seen as a thought and a movement that is connected to the dynamics of religious movements in the Middle East. Using qualitative method, this paper describes the existence of three types of Salafis that is taking ground in Solo. First, Puritanist Salafis based in Ma'had Imam Bukhari. Second, Haraki Salafis based in Al-Mukmin Ngeruki Islamic Boarding School and Ma'had 'Isy Karima. Third, Jihadists Salafis, namely Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) and several radical networks in Solo. The results show that exclusive preaching developed by puritanist Salafi groups, has stimulated horizontal conflicts social unrest. Haraki and jihadists Salafis whose ideas are mainly on the establishment of an Islamic state and the formalization of Islamic law has created a vertical conflict with the government. This study interestingly found a new variant of salafis, that is puritanist salafis whose teachings continue to develop in several places. This shows that puritanist salafis can coexist with other religious thoughts in society besides they can interact with several government programs. The existence of haraki and jihadists salafis maintain the inharmonious relation with the government.

KEY WORDS: *Puritanist Salafi, jihadis salafis, Solo, transnational, Daulah Islamiyah.*

MEMBACA FENOMENA BARU GERAKAN SALAFI DI SOLO

ABSTRAK

Salafi merupakan paham dan gerakan yang bersifat transnasional, yaitu terkoneksi dengan dinamika paham keagamaan di Timur Tengah. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mendeskripsikan eksistensi kelompok tiga jenis Salafi yang berkembang di Solo yaitu, *pertama*, Salafi Puritanis yaitu Ma'had Imam Bukhari. *Kedua*, Salafi Haraki yaitu Pesantren Al-Mukmin Ngeruki dan Ma'had 'Isy Karima. *Ketiga*, Salafi Jihadis yaitu Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) dan beberapa jaringan radikal di Solo. Dakwah eksklusif yang dikembangkan kelompok Salafi Puritanis, menimbulkan konflik horizontal karena meresahkan masyarakat. Sementara Salafi Haraki dan Jihadis yang mengusung gagasan pendirian negara Islam dan penerapat syariat Islam secara formal, menimbulkan konflik vertikal dengan penguasa. Kajian ini berhasil menemukan fenomena baru, bahwa dakwah Salafi Puritanis dapat terus berkembang di beberapa tempat, ini menunjukkan Salafi Puritanis dapat berkoeksistensi dengan paham keagamaan lainnya di masyarakat. Selain itu, Salafi Puritanis juga ternyata mulai membuka diri terhadap beberapa program pemerintah. Sedangkan Salafi Haraki dan Jihadis masih menunjukkan sikap penolakannya terhadap dasar negara dan konstitusi, sehingga terus berhadapan dengan penegak hukum atau pemerintah.

KATA KUNCI: Salafi Puritanis, salafi jihadis, Solo, transnasional, Daulah Islamiyah

*) Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Email: ajamilwahab@gmail.com

** Naskah diterima September 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Salafisme muncul sebagai bentuk reformasi keagamaan, yang bertujuan untuk menggantikan warisan keilmuan Islam tradisional. Gerakan Salafi menjadi kajian yang menarik sekaligus bombastis terutama setelah peristiwa runtuhnya World Trade Centre (WTC), 11 September 2001.¹ Roel Meijer, dalam *Global Salafism; Islam's New Religious Movement*, mengungkap adanya fenomena Salafisme global.² Sementara Quintan Wiktorowicz, dalam "The New Global Threat; Transnasional Salafis and Jihad" mengungkap varian dan perkembangan (dinamika) Salafi.³ Keduanya memberikan catatan yang kurang lebih sama, bahwa Salafisme menempatkan dirinya melawan semua arus agama lain di dalam dan di luar Islam, melawan arus politik dan intelektual, bersaing dengan liberalisme dan sekularisme, bahkan berseberangan dengan fondasi epistemologi yang mendasari modernitas.

Gerakan Salafi turut meramaikan aktivisme keislaman di Indonesia mulai pertengahan 1980-an. Ketika itu ruang publik Indonesia menyaksikan kemunculan pemuda-pemuda berjenggot (*lihyah*) dengan jubah (*jalabiyah*), serban (*imamah*), dan celana tanggung di atas mata kaki (*isbal*), maupun perempuan-perempuan dengan baju lebar hitam dan penutup muka (*niqab*). Secara eksplisit, mereka menyebut diri sebagai "Salafi." Pada aspek paham keagamaan, mereka memperkenalkan sebuah varian Islam yang sangat rigid, yang terfokus pada upaya pemurnian tauhid dan praktik keagamaan (ibadah dan akhlak) eksklusif yang diklaim sebagai jalan untuk mengikuti jejak keteladanan *Salaf al-Salih*, generasi awal muslim.

Salah satu daerah yang memiliki perkembangan cukup pesat bagi gerakan Salafi adalah wilayah Solo. Ada beberapa pusat dakwah dan pendidikan gerakan Salafi di Solo antara lain, Pesantren al-Mukmin Sukoharjo, Imam Bukhori

Karanganyar, 'Isy Karima Karanganyar, Ma'had Ibnu Abbas as-Salafi, Masjid Ibnu Taimiyah, dan Pesantren Jamilulrahman as-Salafy. Sementara dalam bentuk organisasi gerakan antara lain, Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) dan Jamaah Anshoru Syariah (JAS).

Untuk itu menarik dan penting dilakukan kajian terhadap perkembangan dan eksistensi faktual gerakan Salafi dan bagaimana pola relasinya dengan pemerintah. Melalui kajian ini diharapkan dapat diketahui secara utuh perkembangan dan eksistensi faktual varian-varian gerakan Salafi yang ada di Solo dan pola relasinya dengan pemerintah.

Kajian tentang gerakan Salafi di tanah air sudah beberapa kali dilakukan, antara lain, *pertama*, Jamhari dan Jajang Jahroni (ed) (2004), dalam buku dengan judul *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Dalam buku tersebut, dideskripsikan antara lain karakteristik, latar belakang kehadirannya, serta 4 eksemplar profil Salafi radikal yaitu MMI, Lasykar Jihad, FPI, dan HTI. *Kedua*, Din Wahid (2015), makalah dengan judul *Kondisi Faktual Kelompok Keagamaan Radikal di Indonesia: Kasus Gerakan Salafi*. Din Wahid menyebutkan sejarah kemunculan Salafi, tokoh-tokoh Salafi kontemporer, pembagian tiga tipologi Salafi, serta model gerakan masing-masing. *Ketiga*, Quintan Wiktorowicz (2006), kajiannya ditulis dalam judul buku *Anatomy of the Salafi Movement, in Studies in Conflict and Terrorism*. Dalam tulisannya Wiktorowicz menyebut tentang teologi dan karakteristik Salafi, metode penyebaran, serta pembagian tipologi Salafi. *Keempat*, Solahudin (2011), dalam bukunya *Dari NII ke JI*, selain mendeskripsikan perkembangan NII, Solahudin juga mendeskripsikan sejarah muncul dan perkembangan Jamaah Islamiyah (JI). Dalam buku tersebut Solahudin juga mendeskripsikan paham dan aktifitas JI sebagai organisasi bawah tanah yang memiliki paham Salafi Jihadi.

Kajian-kajian tersebut secara umum berhasil mengeksplorasi dan melihat Salafi dari perspektif sejarah berdirinya, paham ajaran, perkembangannya sejak pertama tumbuh hingga sampai di Indonesia, genealogi dan jejaring mereka di tanah air, namun pembahasan masing-masing masih parsial (salah satu atau dua varian Salafi saja) dan tidak mendeskripsikan secara utuh aktivitas dari seluruh varian-varian Salafi yang ada. Kajian kali ini, meski pada dasarnya

¹ Pemaparan deskripsi kritis tentang peristiwa 9/11 dikemukakan oleh Ibrahim M. Abu Rabi', "A post-September 11 Critical Assessment of Modern Islamic History" dalam Markham, Ian dan Rabi', Ibrahim, M. Abu (Eds.), 11 September: Religious Perspective on the Causes and Consequences (Oxford: Oneworld Publications, 2002).

² Roel Meijer (ed), *Global Salafism; Islam's New Religious Movement* (London: C. Hurst Company, 2009): 1.

³ Quintan Wiktorowicz. "The New Global Threat; Transnasional Salafis and Jihad." *Middle East Policy*, vol. VIII, no. 4, Desember (2001).

mengonfirmasi kajian-kajian sebelumnya, namun memiliki beberapa perbedaan yaitu, *pertama*, pembahasan fokus pada eksistensi dan perkembangan Salafi pada lokus penelitian yaitu di Solo. *Kedua*, membahas perkembangan varian-varian Salafi yang ada di Solo secara komprehensif (berdasarkan tiga tipologi Salafi Puritanis, Haraki, dan Jihadi). *Ketiga*, mendeskripsikan kondisi teraktual pola relasi kelompok Salafi dan pemerintah.

Ada dua teori yang dipakai dalam melihat fenomena gerakan Salafi ini. *Pertama*, gerakan Salafi di Solo tumbuh dan berkembang berdampingan dengan paham dan gerakan organisasi keagamaan lainnya. Gerakan Salafi mirip dengan konsep masyarakat sipil (*civil society*) yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai antitesa dari “masyarakat politik” atau negara. Pemikiran itu dapat dilacak dari pendapatnya Hobbes, Locke, Montesquieu, Hegel, Marx, Gramsci, dan lain-lain.⁴ Pemikiran mengenai masyarakat sipil tumbuh dan berkembang sebagai bentuk koreksi radikal terhadap eksistensi negara karena peranannya yang cenderung menjadi alat kapitalisme. *Kedua*, dalam konteks masyarakat Barat, terdapat teori “sekte-gereja” (*sect-church theory*) untuk membaca fenomena kemunculan aliran-aliran keagamaan sebagaimana diformulasikan oleh Weber dan Troeltsch. Teori tersebut mengalami penyempurnaan di tangan Richard Niebuhr yang menyebutkan bahwa sekte-sekte baru menarik anggotanya terutama dari mereka yang secara ekonomis dirugikan (*deprived*) atau dalam istilah Niebuhr disebut “Disinherited Classes of Society”. Jadi, kehadiran mereka itu bukan hanya disebabkan oleh penyempalan keagamaan, melainkan juga kekacauan sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa penyempalan teologis mereka menutupi dan menyembunyikan protes sosial. Melalui sekte, para anggotanya mentradisikan rasa rugi dan kehilangan mereka dengan cara menggantinya dengan keunggulan agama.⁵ Kedua teori tersebut, akan dipakai dalam membaca fenomena gerakan Salafi di tanah air dan di Solo khususnya.

⁴ Lihat George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, Edisi ke Enam 2010).

⁵ Abdul Aziz, *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia* (Jakarta: Diva Pustaka, 2004): 2-3.

Kajian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan wawancara, observasi, dan kajian pustaka. Kajian lapangan dilakukan selama dua minggu pada Oktober 2019 dengan melibatkan 20 informan. Wawancara dilakukan dengan sejumlah pihak yang memahami gerakan Salafi; tokoh dan pimpinan ormas keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, akademisi dari IAIN Surakarta dan UMS, pejabat Kementerian Agama Kota Surakarta, pengurus MUI, kepala KUA, penyuluh agama, aktivis Salafi, dan tokoh agama dan masyarakat yang memahami permasalahan gerakan Salafi. Observasi dilakukan di lokasi-lokasi yang menjadi pusat dakwah dan pendidikan Salafi di wilayah Solo dan sekitarnya. Sedangkan kajian pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dan data dari berbagai buku, jurnal, hasil riset, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian. Setelah pengumpulan data, proses selanjutnya adalah analisis data. Analisis dilakukan melalui reduksi data, yaitu menyeleksi data yang relevan dengan subyek penelitian dan menanggihkan data-data yang tidak relevan. Selanjutnya, data yang telah direduksi itu dikategorisasi berdasarkan item-item dalam penelitian. Proses selanjutnya adalah menyusun data dan mengolah data dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analitis.

B. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Terminologi dan Tipologi Salafi

Kata ‘*Salafi*’ adalah bentuk nisbat terhadap kata *salaf* yang secara epistemologis bermakna orang-orang yang hidup sebelum zaman kita. Adapun secara terminologis, *as-salaf* adalah generasi tiga abad pertama sepeninggal Rasulullah SAW. Definisi ini mengacu pada sebuah hadis yang berbunyi: “Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian yang mengikuti mereka (*tabi’in*), kemudian yang mengikuti mereka (*tabi’ tabi’in*).” (HR Bukhari, No. 3651-Muslim, No. 2533).

Dari definisi di atas nampaknya tidak ada yang salah dengan klaim Salafi. Sebab setiap muslim pasti mengakui legalitas kedudukan para pengikut Nabi saw. ini, baik sahabat, *tabi’in*, maupun *tabi’ tabi’in* sebagai generasi terbaik setelah Nabi saw. Saat ini lahir kelompok yang dinilai menyebut dirinya dengan Salafi, namun

bersifat eksklusif. Kelompok ini menyatakan satu-satunya kelompok *salaf*, sedangkan kelompok di luar dirinya dituding tidak *salaf*. Penamaan ulang Salafi dipopulerkan oleh Muhammad Nashiruddin al-Bani (1914-1999) yang pada tahun 1960-an di Madinah, melalui jamaahnya yang dikenal dengan sebutan Jamaah al-Salafiyah al-Muhtasibah.⁶

Munculnya global-Salafisme sebenarnya dimulai dari keinginan kembali kepada masa lalu, yaitu masa *as-salaf ash-sâlih*. Pada perkembangan berikutnya, ia mengalami pergeseran, dari ide pemikiran yang bersifat teologis menjadi gerakan politis (Jihad-Salafisme). Salafisme telah mengalami diaspora, berubah warna sesuai dengan tempat di mana Salafisme berkembang dan dikembangkan (mimikri), dan pada saat yang tepat berubah bentuk, terkondisi oleh tempat dan pimpinan Salafi. Di seluruh dunia, Salafi mempunyai agenda politik yang berbeda. Dengan demikian, terdapat arah yang berbeda pula.⁷

Din Wahid mengklasifikasikan gerakan Salafi di Indonesia menjadi tiga kategori: “purist”, “haraki” (pergerakan), dan “jihadi”. Ketiganya mempunyai kesamaan pandangan tentang tiga ajaran dasar Salafisme, yakni tauhid, mengikuti sunah dan menolak bidah, dan *al-wala wa al-bara*. Tentang tauhid, semua kelompok Salafi sepakat atas tiga dimensi dari tauhid (*rububiyah, uluhiyyah, dan al-asma wa al-sifat*). Adapun perbedaannya, kelompok Salafi “purist” menekankan loyalitas tanpa syarat kepada pemerintah, sementara kelompok Salafi “haraki” dan “jihadi” menolak loyalitas absolut kepada penguasa.⁸

Muhammad Ikhsan dengan mengutip pendapat Abu ‘Abdirrahman al-Thalibi membagi salafi dalam dua kategori yaitu Salafi Yamani dan Salafi Haraki. Ada beberapa ide penting dan khas gerakan Salafi, yaitu: *pertama, hajr muhtadi’* (pengisoliran terhadap pelaku bidah), mereka

(Salafi Yamani) berusaha keras untuk mengkritisi dan membersihkan ragam bidah yang selama ini diyakini dan diamalkan oleh berbagai lapisan masyarakat Islam. Kelompok ini akan mengeluarkan *tahdzir (warning)* terhadap orang yang melakukan hal yang dianggap bidah. Berbeda dengan Salafi Haraki, mereka cenderung melihat mekanisme *hajr al-muhtadi’* ini sebagai sesuatu yang tidak mutlak dilakukan, sebab semuanya tergantung pada maslahat dan mafsadatnya. *Kedua*, menolak keterlibatan dalam politik (parlemen dan pemilu), mereka (Salafi Yamani) memandang keterlibatan dalam semua proses politik praktis seperti pemilihan umum (pemilu) sebagai sebuah bidah dan penyimpangan. Mereka menganggap pemilu sebuah upaya menyekutukan Allah (syirik), karena menetapkan aturan berdasarkan suara terbanyak (rakyat), padahal yang berhak untuk itu hanya Allah. Sikap tersebut, berbeda dengan Salafi Haraki yang cenderung menganggap masalah pemilu sebagai persoalan ijthadiyah belaka, hal itu tidak lebih dari sebuah bagian administratif yang memungkinkan kita untuk mengadopsinya dari manapun selama mendatangkan maslahat. *Ketiga*, baik Salafi Yamani maupun Haraki, sikap keduanya terhadap gerakan Islam lain sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka dalam penerapan *hajr al-muhtadi’*. Salafi Yamani dikenal sangat ekstrim bahkan seringkali tanpa kompromi sama sekali. Sementara Salafi Haraki cenderung ‘moderat’ dalam menyikapi gerakan lain. *Keempat*, secara umum, Salafi meyakini ketidakbolehan *khuruj* atau melakukan gerakan separatisme dalam sebuah pemerintahan Islam yang sah. Sebagai konsekwensi dari prinsip ini, maka muncul kesan bahwa kaum Salafi Yamani cenderung ‘enggan’ melontarkan kritik terhadap pemerintah. Namun demikian, manhaj al-Salafi memberikan peluang untuk itu, meskipun dibatasi secara “empat mata” dengan sang penguasa. Sementara Salafi Haraki menganggap *khuruj* terhadap pemerintah merupakan keharusan jika melihat ada kemungkaran yang dilakukan pemerintah.⁹

Sementara itu, Noorhaidi Hasan membagi pendukung gerakan Salafi menjadi Yamani dan Haraki atau Sururi. Kelompok Yamani adalah

⁶ As’ad Said Ali, *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis* (Jakarta: LP3ES, 2012), 106.

⁷ Rofhani. “Melacak Gerakan Radikal Islam dari Wahabisme ke Global Salafisme.” *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 5, no. 1, Maret (2015): 89.

⁸ Din Wahid. “Kondisi Faktual Kelompok Keagamaan Radikal di Indonesia: Kasus Gerakan Salafi.” Makalah disampaikan dalam Seminar “Merajut Ukhuwah dalam Memperkuat Nilai-Nilai NKRI” dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2015): 12

⁹ Ikhsan. <http://wahdah.or.id/gerakan-Salafi-modern-di-indonesia> (diakses 5/11/2018).

para pengikut Syekh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i, pendiri Darul Hadits, sebuah lembaga kajian Salafisme di Dammaj Yaman. Sedangkan kelompok Salafi Haraki adalah para pengikut Syekh Muhammad Surur bin Nayef Zainal Abidin. Ia banyak berseberangan dengan para ulama Saudi Arabia, khususnya para ulama yang melegitimasi keputusan penguasa Saudi yang mengundang tentara Amerika guna menjaga negerinya dari ancaman Saddam Husain.¹⁰ Adapun Quintan Wiktorowicz, membagi gerakan Salafi menjadi tiga yaitu *Purist* (murni berdakwah), *Politics* (mereka bersinggungan dengan politik), dan *Jihadist* (menebar ajaran Islam dengan kekerasan).¹¹ Adapun Abu Mujahid membagi Salafi dalam tiga kategori yaitu, Salafi Jihadi, Salafi Haraki, dan Salafi Yamani.¹²

Dari pembagian Salafi yang dilakukan Din Wahid, M. Ikhsan, Noorhaidi Hasan, Quintan Wiktorowicz, dan Abu Mujahid di atas, penulis memilih menggunakan kategori yang dibuat oleh Din Wahid karena dinilai paling pas dalam menggambarkan dinamika Salafi yang ada di Indonesia. Kategori yang dibuat Noorhaidi, Abu Mujahid, dan M. Ikhsan yang menyebut adanya tipologi Yamani dinilai kurang pas, sebab kelompok ini, tidak semata-mata pengikut Syekh Muqbil al Wadi'i dari Yaman, tetapi juga mereka mengikuti Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali dari Saudi. Sementara kategori Wiktorowicz, sedikit mendekati, perbedaannya pada adanya soal penggunaan kata "Politics" menggantikan kata "Haraki".

2. Sejarah Kemunculan Salafi di Indonesia

Sejarah kemunculan Salafi tidak bisa dilepaskan dari peran Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia (DDII) yang berdiri pada tahun 1967. Tujuan pendirian DDII sebagaimana diutarakan oleh ketuanya yaitu Muhammad Natsir adalah: "kalau sebelumnya kami berdakwah lewat politik. Tetapi kami sekarang berpolitik melalui dakwah." DDII membuat jarnan internasional ke negara-negara Timur Tengah, DDII mendapat dana bantuan dari Arab Saudi, Kuwait, dan Pakistan

untuk melaksanakan program-programnya.¹³

Lewat ormas yang didirikannya (DDII) inilah, Muhammad Natsir mengirimkan pelajar ke Saudi Arabia yang kemudian mengembangkan paham Salafi di Indonesia; yaitu Abu Nida' Chomsaha Sofwan (yang kemudian mendirikan Yayasan At-Turots Al-Islamiy dan Islamic Center Bin Baz di bantul Yogyakarta), Ahmaz Faiz Asifuddin (yang kemudian mendirikan Ponpes Imam Bukhari di Solo), dan Ainur Rafiq Ghufroon (yang kemudian mendirikan Ponpes Al-Furqon di Gresik). Mereka inilah generasi awal yang pulang ke Indonesia sekitar awal tahun 1980-an. Bersamaan dengan pulang mereka ke Indonesia, didirikanlah Lembaga Pendidikan Bahasa Arab (LPBA) di Jakarta yang sekarang berubah nama menjadi Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Bahasa Arab (LIPIA). Sebuah lembaga pendidikan formal cabang dari Universitas Al-Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyyah di Riyadh, Saudi Arabia.¹⁴

Melalui para alumni Timur Tengah inilah Salafisme disebarkan, khususnya mereka yang menyelesaikan pendidikannya di perguruan tinggi di Saudi Arabia dan Yaman pada tahun 1980-an sebagaimana telah disebutkan di atas. Setelah menyelesaikan kuliah di kedua negara ini, para alumni bertekad untuk menyebarkan pikiran-pikiran Salafi di tanah air mereka secara sistematis. Sekembalinya ke Indonesia, mereka melihat umat Islam Indonesia sangat memerlukan "pemahaman yang benar" tentang Islam dan menuduh organisasi-organisasi Islam yang ada telah kehilangan semangat "Islam sejati" seperti yang dilakukan oleh nabi dan para sahabat, memiliki kecenderungan ke arah rasionalisasi dan mengabaikan kepentingan umat Islam.¹⁵

Para alumni Timur Tengah ini memulai kegiatan kalangan mahasiswa. Abu Nida yang berinisiatif memperkenalkan Salafi di kampus perguruan tinggi umum. Dengan dukungan dari Saefullah Mahyudin, ketua DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) cabang Yogyakarta, Abu Nida memberikan ceramah di Jama'ah Shalahudin, sebuah komunitas mahasiswa Muslim di

¹⁰ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 80-83.

¹¹ Wiktorowicz, *Anatomy of the Salafi Movement, in Studies in Conflict and Terrorism* (2006): 217.

¹² Abu Mujahid, *Sejarah Salafi di Indonesia* (Bandung: Tokobagus Publishing, 2012): 146-147.

¹³ Abu Mujahid, *Sejarah Salafi di Indonesia* (Bandung: Tokobagus Publishing, 2012): 135-137.

¹⁴ Maaher At-Thuwailibi. <https://www.erasuslim.com/berita/tahukah-anda/sejarahkelompokSalafidiindonesiadanasal mula-perpecahannya> (diakses 6/11/2018).

¹⁵ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 45.

Universitas Gajah Mada, dan mengorganisir halaqah dan dawrah di masjid-masjid yang ada di beberapa perguruan tinggi dan Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Pada awal 1990-an, kedatangan alumni Timur Tengah lainnya memperkuat kegiatan dakwah kampus ini. Mereka adalah, di antaranya, Ja'far Umar Thalib, Yazid Abdul Qadir Jawwas, dan Yusuf Usman Baisa yang ditugaskan oleh LIPIA (Lembaga Ilmu Pendidikan Islam dan Arab) untuk mengajar di Pesantren al-Irsyad, Solo, Jawa Tengah. Para alumni mengorganisir kegiatan-kegiatan dakwah di Universitas Diponegoro, Universitas Sebelas Maret, Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan Universitas Gajah Mada.¹⁶ Upaya-upaya yang dilakukan oleh para alumni Timur Tengah ini ternyata membuahkan hasil. Komunitas-komunitas Salafi yang mana mahasiswa menjadi anggota intinya, mulai bermunculan di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Ketika lulusan perguruan tinggi Saudi Arabia lainnya kembali ke Indonesia, kegiatan Salafi menyebar pula ke kota-kota lainnya seperti Semarang, Cirebon, Bandung, dan Makassar. Hasilnya sejumlah komunitas Salafi tumbuh secara signifikan di kota-kota ini dimana mereka menyebarkan paham Salafi dengan cara-cara yang sistematis.¹⁷

Untuk meningkatkan penyebaran Salafisme dan memperkuat eksistensi komunitas Salafi, alumni Saudi Arabia mendirikan yayasan-yayasan Salafi. Melalui dukungan finansial dari sebuah yayasan amal dari Saudi Arabia, al-Mu'assasat al-Haramayn al-Khayriyya, dan sebuah yayasan dari Kuwait, al-Jam'iyya Ihya al-Turats al-Islami, mereka membentuk Yayasan As-Sunnah, Majelis al-Turats al-Islami, dan Islamic Centre Bin Baz di Yogyakarta. Salah satu yayasan yang didirikan oleh gerakan ini adalah Yayasan As-Sunnah pada tahun 1992. Yayasan yang didirikan oleh Abu Nida ini bertujuan untuk menyebarkan pemahaman salafi dengan menggelar daurah (pengajian) untuk para mahasiswa di wilayah Jawa Tengah.¹⁸

Di Jakarta para pendukung mendirikan

Yayasan Al-Sofwah dan Lajnah al-Khayriyyah al-Musyarakah. Di Jawa Barat, mereka mendirikan Yayasan As-Sunnah (Cirebon) dengan dukungan dana dari Yayasan Al-Sofwah Jakarta, Al-Huda (Bogor), dan Nidaus Sunnah (Karawang). Di Sulawesi, M. Zaitun Rusmin, lulusan Universitas Islam Madinah, mendirikan organisasi Wahdah Islamiyyah.¹⁹

Selain yayasan, kelompok Salafi ini juga mendirikan pesantren-pesantren antara lain: Ihya al-Sunnah di Yogyakarta (1994), al-Turats al-Islami Yogyakarta (1995), Madinah dan Imam Bukhori di Solo, Minhaj as-Sunnah di Magelang, Lu'lu wal Marjan di Semarang, Ibn Taimiyah di Banyumas, al-Furqan dan al-Manshurah di Kroya, Assunnah di Cirebon, at-Thariyah di Temanggung, Ittiba' as-Sunnah di Sukoharjo, as-Salafy di Jember, Ta'zim al-Sunnah di Ngawi, al-Bayyinah di Gresik, al-Furqan di Cilacap, al-Furqan di Pekanbaru, Ibnu Qayyim di Balikpapan, Bin Baz, Al-Anshar, dan Difa' u as-Sunnah di Yogyakarta, dan Ibnu Taimiyah di Solo.²⁰

Selain melalui yayasan dan pesantren, kelompok Salafi juga mendirikan dan mengembangkan media sarana dakwah seperti stasiun TV (Dakwah TV, Insan TV, Ahsan TV, Rodja TV, Dewan Dakwah TV), stasiun radio (Radio Rodja, Radio Kita, Radio Bass, Radio as-Sunnah, Radio Hang, Radio Idzaatul Khoir, Radio Muslim, Radio Kajian *Online*, Radio Suara Quran, Radio Nurussunnah, Radio al-Hikmah, Radio Hidayat, Radio Kajian Barando, Radio an-Nas, dan Radio Muadz). Kelompok Salafi mengembangkan dakwahnya melalui penerbitan buku-buku (Pustaka Sahifa, Media Hidayat, Pustaka as-Sunnah, Griya Ilmu, Pustaka Azzam, Maktabah Salafi Press, Pustaka al-Kautsar, Pustaka Salafiah, dan Pustaka al-Qawam), majalah (as-Sunnah, al-Furqan, as-Syari'ah, an-Nasihah, Fatawa, Qiblati, ar-Risalah, Elfata, ad-Dzakirah al-Islamiyah, majalah Nikah, al-Mawaddah, dll), kaset, ceramah-ceramah, dan debat-debat dalam VCD/DVD. Kelompok Salafi juga membuat *website*, situs, dan blog pribadi, bahkan jejaring sosial seperti *facebook*, *twitter*, *WhatsApp*, dan *mailing list*

¹⁶ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 47

¹⁷ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 50.

¹⁸ Dady Hidayat. "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi." *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 17, no 2 (2012): 127.

¹⁹ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 50-52.

²⁰ Noorhaidi Hasan, *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia* (New York: Cornell Southeast Asia Program, 2005): 254.

untuk menyebarkan dakwahnya.²¹

Salah satu situs milik komunitas Salafi yang cukup dikenal adalah www.salafy.co.id. Situs ini dioperasikan oleh para pengikutnya dengan pengawasan dari pemimpin atau senior mereka. Ini tampak dalam susunan supervisor dan kontributor situs ini yang berasal dari aktivis Salafi apolitis Indonesia seperti Muhammad Umar As-Sewed dan Lukman Baabduh. Situs ini juga secara ekstensif memuat tulisan tokoh-tokoh seperti Ibn Baz dan Rabi al-Madkhali dari Saudi, dan para kontributor lokal.²²

3. Perkembangan Paham Salafi di Solo

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Din Wahid mengklasifikasikan gerakan Salafi di Indonesia menjadi tiga varian: "Purist", "Haraki" (pergerakan), dan "Jihadi". Pembahasan berikut ini, akan mendeskripsikan eksistensi dan perkembangan varian-varian Salafi di Solo berdasarkan kategori atau tipologi tersebut dan hubungan interaksi sosialnya dengan pemerintah.

a. Salafi *Purist*

Kehadiran kelompok Salafi *Purist* (apolitis) atau biasa juga disebut Salafi dakwah di Solo sejalan dengan kehadiran para mahasiswa yang pulang dari belajar di Saudi Arabia. Beberapa di antara mereka berhasil mendirikan lembaga pendidikan (*ma'had*) atau biasa disebut pesantren. Di antara Ma'had Salafi yang terkenal di Solo sebagai pusat Salafi adalah Imam Bukhori.

Ma'had Imam Bukhori

Salah satu tokoh yang mengembangkan Salafi adalah Ahmas Faiz Asifuddin. Ia berhasil mendirikan Pesantren Imam Bukhari di daerah perbatasan Karanganyar-Solo. Pondok Pesantren Imam Bukhari beralamat di Jl. Raya Solo-Purwodadi KM.8 Desa Selokaton, Kelurahan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar - Solo. Adapun jenjang pendidikan (putra-putri) yang ada di Pesantren Imam Bukhari adalah sebagai berikut:

1. Ibtidaiyah (setingkat SD)
2. Madrasah Mutawasithoh (MTW) setingkat SMP
3. I'dad Lughowy (IL) persiapan masuk Tsanawiyah (setingkat SMA)
4. Ma'had Aly (Setingkat S1 Khusus Putri)

²¹ Muhammad Ali. "Strategi Dakwah Salafi di Indonesia." *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, no. 1 (2013): 19-21.

²² Asep Muhamad Iqbal. "Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume II, no. 2 (2013): 78.

Program Ibtidaiyah, MTW, dan Tsanawiyah telah memiliki ijazah negara (Diknas) serta ijazah pesantren. Informasi resmi tentang pesantren ini dapat dilihat di website resminya yaitu <http://bukhari.or.id/>. Santri datang dari berbagai daerah di Indonesia, bahkan ada yang datang dari Singapura dan Malaysia.

Para alumni Ma'had Imam Bukhori biasanya melanjutkan ke universitas yang berafiliasi dengan Kementerian Pendidikan Saudi Arabia seperti LIPIA Jakarta dan Jamiah Islamiyyah di Madinah. Atau ke Al Azhar Mesir. Ada juga sebagian kecil yang melanjutkan ke PTN dalam negeri. Pada tahun pelajaran 2015/2016, santri yang melanjutkan pendidikan ke Universitas Madinah KSA sebanyak 29 alumni.

Pengajar di Imam Bukhori umumnya alumni dari berbagai perguruan tinggi di Timor Tengah dan dalam negeri yaitu para alumni dari Jamiatul Imam Muhammad Bin Su'ud di Riyadh Saudi Arabia, Jamiah Islamiyyah Madinah Saudi Arabia, Alumni LIPIA Jakarta, dan STDI Imam Syafi'i Jember.

Menurut Abdul Aziz, Kepala KUA Tasikmadu Karanganyar, dahulunya para pengurus dan ustaz yang mengajar di Imam Bukhari terlihat eksklusif, jika menikah, mereka tidak mau ke KUA untuk mencatatkan perkawinan, saat ini keluarga pengurus dan keluarga pimpinan Imam Bukhari jika menikah, dicatat termasuk jika pernikahannya *matsna* (istri kedua). Selama bertugas, ia sudah mengurus pencatatan pernikahan dari keluarga Ma'had Imam Bukhari sekitar 10 kali.²³

Masih menurut Abdul Aziz, Pesantren Imam Bukhori dulunya terkesan mengambil jarak dengan pemerintah, tapi dengan adanya pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kementerian Agama, pihak Imam Bukhori semakin bersikap akomodatif. Pada tahun 2014, pengurus pesantren mendaftarkan tanah wakafnya, saat ini baru ada 6 sertifikat. Sebelumnya mereka enggan mengurus karena ada kekhawatiran, jika Imam Bukhari karena sesuatu hal bubar, negara bisa mengooptasi aset milik Imam Bukhari. Masjid di lingkungan Pesantren Imam Bukhari memiliki IMB, ini satu-satunya masjid yang ada IMB-nya. Abdul Aziz

²³ Wawancara dengan Abdul Aziz di Kantor KUA Tasik Madu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jateng, tanggal 15 Oktober 2018.

mengatakan, pelajar Imam Bukhari saat ini ikut terlibat dalam momen MTQ, bahkan pelajar Imam Bukhori ada yang juara *qiroatul kutub* tingkat MA.

Para tokoh Pesantren Imam Bukhori, sejak 2015, sedikit demi sedikit mulai mengikuti kegiatan yang diprogramkan pemerintah (Kementerian Agama). Madrasah kini sudah diakui dan terdaftar di Kemenag, dahulunya masih belum terdaftar, sehingga untuk mendapatkan ijazah formal para pelajar harus mengikuti program Kejar Paket. Imam Bukhari juga mengirimkan perwakilannya masuk dalam kepengurusan MUI.

Di antara faktor cairnya hubungan Imam Bukhori dengan pemerintah, salah seorang aktifis Salafi di Solo yaitu AM (40 th),²⁴ menyatakan:

“Satu faktor yang mendukung pola relasi Imam Bukhori dengan masyarakat maupun pemerintah adalah kepemimpinan Ustaz Ahmas Faiz Asifuddin, sikap beliau yang dikenal lembut dalam berdakwah dan pandai dalam berinteraksi sosial, menjadikan beliau banyak didekati masyarakat. Ayah Ustaz Ahmas adalah tokoh NU dan punya pesantren NU, hal tersebut menjadikan beliau, bisa bersikap akomodatif dan lembut dalam berkomunikasi dengan masyarakat dari semua kalangan.”

Sikap “lunak” Imam Bukhori tersebut merupakan sebuah kemajuan (*progress*), sebab selama ini mereka (Salafi Puritanis) dikenal memiliki sifat “mengambil jarak” meski tidak secara frontal melawan pemerintah. Sikap non-kooperatif Salafi ini, banyak dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang mereka yakini, dimana secara umum mereka berpegang pada doktrin yang kaku (*rigid*) tanpa memberikan ruang interpretasi bagi akal. Dalam perkembangan berikutnya, mereka mempertegas identitas dirinya dan melawan musuh internal maupun asing, yakni Barat dan pihak-pihak yang dianggap akomodatif terhadap Barat atau menerapkan konsep-konsep Barat. Untuk itu tidak heran jika Salafi umumnya mengambil jarak dengan pemerintah, karena dianggap sebagai institusi yang menerapkan konsep-konsep Barat.

Selain Ma’had Imam Bukhori, terdapat lembaga-lembaga lainnya di Solo yang bisa masuk kategori Salafi Puritanis yaitu: Pesantren al-

²⁴ Wawancara dengan AM (40 th) di Imam Bukhori, Karanganyar, Jateng, tanggal 13 Oktober 2018.

Ukhuwah dan Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, Yayasan al-Madinah, Pesantren Ibnu Taymiah, Pesantren Darussalaf, dan Pesantren Ittiba’us Sunnah.

b. Salafi Haraki

Salafi Haraki berpendapat bahwa Islam adalah agama sempurna yang ajarannya mencakup semua aspek kehidupan: ibadah, sosial, ekonomi, dan politik. Sebagai konsekuensinya, penguasa diharuskan untuk menerapkan ajaran Islam tersebut. Kegagalan dalam menerapkan hukum Allah di atas, akan mendapatkan kritik tajam dari kelompok Salafi Haraki.²⁵ Ada beberapa lembaga atau organisasi yang bisa dikategorikan sebagai Salafi Haraki di Solo. Dalam pembahasan ini ada beberapa yang cukup berpengaruh di Solo sehingga layak untuk dideskripsikan yaitu, Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Ma’had ‘Iisy Karima, dan Jamaah Anshoru Syariah (JAS).

1) Pesantren Al-Mukmin Ngeruki

Abu Bakar Ba’asyir bersama Abdullah Sungkar mendirikan Pesantren Al-Mukmin Ngeruki pada tahun 1972. Selain kedua tokoh tersebut, pendiri lainnya adalah Abdullah Baraja, Yoyo Rosywardi, Abdul Qohar H. Daeng Matese, dan Hasan Basri. Gagasan pendirian pesantren diawali keprihatinan M. Natsir selaku ketua DDII yang melihat Surakarta sebagai basis Komunis. Selain itu, Surakarta juga menjadi basis Kristenisasi. Ketika itu DDII mensponsori berdirinya rumah sakit Islam dan Pesantren Ngeruki.²⁶

Pendirian Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Ngeruki (PPIM) juga didasari oleh kebutuhan kader mubalig/dai dalam rangka pemurnian ajaran Islam dari pengaruh budaya lokal yang dianggap menyimpang (tahayul, bidah, dan khurafat), serta membendung Kristenisasi yang ditujukan kepada masyarakat Jawa Abangan. Doktrin keagamaan komunitas PPIM didasarkan pada *Aqidah al-Islamiah as-Shohihah* sesuai paham Salafi yaitu: *pertama, Tauhid Rububiyah* (Allah Maha Pencipta, Penguasa,

²⁵ Din Wahid. “Kondisi Faktual Kelompok Keagamaan Radikal di Indonesia: Kasus Gerakan Salafi.” Makalah disampaikan dalam Seminar “Merajut Ukhuwah dalam Memperkuat Nilai-Nilai NKRI” dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, (2015): 13.

²⁶ Fuadudin, dkk., *Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Solo* (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2004): 19-25.

Pengatur, Pemelihara, dan Pendidik semua makhluk), *Kedua, Asma wa al-sifat* (Nama dan sifat Allah berbeda dengan makhluk), dan *Ketiga, Tauhid Uluhiyah* (semua ibadah dan amal makhluk hanya ditujukan sebagai ibadah kepada-Nya).²⁷

Din Wahid menyebut salah satu contoh Salafi Haraki adalah Pondok Pesantren Islam al-Mukmin Ngeruki (PPIM). Pondok ini sering mengkritik pemerintah jika pemerintah dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sekilas keberadaan Pesantren al-Mukmin Ngeruki tidak memperlihatkan satu ciri khas yang menonjol yang membedakannya dengan lembaga pendidikan Islam sejenis yang ada di Indonesia. Jenjang pendidikan di pondok ini, misalnya, juga dirancang sebagaimana halnya yang berlaku secara umum di Indonesia. Unit pendidikan yang terselenggara hingga saat ini adalah: Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), Kulliyatul Mu'alimin al-Islamiyah (KMI), Kulliyat Mu'allimat al-Islamiyah (KMA), Ma'had Shighar (MS), dan Ma'had 'Aly (MA). Di samping itu, pondok ini juga masih menggunakan sistem pendidikan tradisional *sorogan* dan *bandongan*, khususnya untuk mengkaji kitab-kitab di luar bahan-bahan pelajaran yang diberikan di unit-unit pendidikan yang telah disebutkan di atas.

Namun tidak demikian dengan substansi pelajaran yang diberikan di Ngeruki. Sikap dan pandangan keagamaan yang menekankan pemberlakuan syariat Islam menjadi satu isu utama dari materi pelajaran yang diberikan. Untuk mata pelajaran akidah, misalnya, tekanan diberikan tidak hanya pada keesaan Tuhan (tauhid), dan penjelasan tentang rukun iman yang lain, tapi yang terpenting adalah penolakan atas berbagai pandangan dan institusi kenegaraan yang dinilai tidak berdasarkan ajaran Islam.²⁸

Sejak awal masuk pondok, setiap santri laki-laki diwajibkan meninggalkan celana di atas mata kaki untuk menghindari larangan isbal, model baju koko, baju pakistan, dan gamis. Sementara santri perempuan diwajibkan memakai jilbab, berkaos kaki, dan sebagian ada yang menggunakan cadar, hanya dua matanya yang terlihat. Nampaknya, sejak awal santri mengalami proses internalisasi

simbol-simbol yang biasa menjadi identitas kelompok berpaham Salafi.

Pondok Ngeruki menganjurkan para santri membaca buku-buku terjemahan dari karya sarjana Muslim Timur Tengah, khususnya mereka yang berasal dari tokoh pergerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Salah satu di antaranya adalah buku karya Syekh Sa'id Hawa, *Jundullah Membasmi Penyakit Umat* (1986), karya Salim al-Qathani, *al-Wala wa al-Bara*, dan karya Abdullah Azam, *Tarbiyah Jihadiyah*. Dari ketiga buku tersebut, memberi bukti kuat bahwa Pondok Ngeruki sejak awal dirancang menjadi basis utama bagi penyebaran pemikiran keagamaan khas Salafi Haraki yang menekankan tidak saja pelaksanaan syariat Islam secara utuh, tapi juga pembentukan sistem sosial-politik dan kenegaraan yang memberi ruang bebas bagi berlakunya syariat Islam.²⁹

Para guru atau santri alumni dari Pesantren Ngeruki, beberapa mendirikan pesantren baru seperti: Pesantren al-Islam di Lamongan, 'Isy Kariman di Karanganyar, al-Muttaqin di Jepara, Darus Syahadah di Boyolali, Husnayain Jatibarang, dan al-Islah di Solo, Salman al-Farisi di Karanganyar, Darul Wahyain di Magetan.

2) Ma'had 'Isy Karima

Sejarah Yayasan Sosial dan Pendidikan Islam Isy Karima (YSPII) dapat dilihat dalam situs resmi YSPII yaitu <https://isykarima.com/profil/>. YSPII telah terbentuk sejak tahun 1994. Yayasan saat itu merencanakan pendirian Pondok Pesantren Taman Pendidikan Al-Qur'an setingkat SMA di bawah bimbingan Ya'qub Basya dan Suwardi Efendi. Kiprah YSPII pun terus berlanjut dengan membuat program baru, yaitu Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) untuk anak-anak pada tahun 1996. Program ini dibuat sebagai upaya memakmurkan Masjid Bilal Bin Rabah, sebuah masjid yang dibangun di atas tanah wakaf dari kaum muslimin melalui DDII.

Selanjutnya, sejumlah penasihat dari YSPII yang terdiri atas Ahmad Husnan, Muzayyin Abdul Wahab, Suwardi Efendi, dan Ustaz Muhammad Ilyas, serta dari DDII perwakilan Jawa Tengah memutuskan untuk mendirikan sebuah program pendidikan berupa Ma'had Tahfizhul Qur'an. Sejak itu, dibentuklah sebuah

²⁷ Fuadudin, dkk, *Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Solo* (Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2004): 236.

²⁸ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 60-61.

²⁹ Jamhari, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004): 64-65.

tim kerja guna menindaklanjuti program tersebut yang dibidani dan diketuai oleh K.H. Wahyuddin dan dibantu oleh para pengurus DDII serta sebagian santri Diniyyah putra YSPH angkatan I.

Pada tahun 1998 secara resmi berdirilah Ma'had 'Aly Tahfizhul Qur'an Isy Karima yang merupakan program pendidikan setingkat Diploma II dengan masa pendidikan selama 2 tahun dengan fasilitas beasiswa penuh. Jumlah mahasiswa angkatan pertama sebanyak 16 orang berasal dari berbagai daerah. Selama 2 tahun mereka diwajibkan mengkhatamkan Alquran sebanyak 30 Juz. dan barulah pada tahun 2000, Ma'had Tahfizhul Qur'an Isy Karima berhasil mewisuda angkatan pertamanya.

Upaya pengurus Ma'had Tahfizhul Qur'an dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat Indonesia tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1999 merekapun mendirikan Madrasah Aliyah Tahfizhul Qur'an (MATIQ) masa pendidikan 4 tahun dipimpin oleh Ustaz Eman Badru Tamam, Lc, jumlah siswa angkatan pertamanya sebanyak 7 orang. Tidak hanya itu, merekapun menyelenggarakan program bimbingan dai di tahun yang sama. Program ini ditujukan bagi para dai yang berasal dari tiga kecamatan di sekitar lingkungan Ma'had, yaitu Karangpandan, Ngargoyoso, dan Tawangmangu. Pada setiap sore harinya para dai secara antusias mengikuti program bimbingan.

Sekitar tahun 2008 sejumlah ustaz Isy Karima berkesempatan menunaikan ibadah haji. Saat itulah Isy Karima mulai menjalin hubungan yang serius dengan para Syekh Timur Tengah. Kala itu, Isy Karima juga berkesempatan menjadi anggota dari lembaga tahfidz internasional yang berpusat di Jeddah. Organisasi itu beranggotakan 60 negara. Isy Karima mendapat banyak akses untuk mengenal pesantren-pesantren tahfidz dari seluruh dunia. Hubungan itu membuka kesempatan bagi santri Isy Karima untuk mendapat beasiswa ke Timur Tengah. Tak hanya itu, Sihabudin dan rekannya juga bisa membangun relasi dengan para syekh yang berpengaruh.

Perkembangan 'Isy Karima yang begitu pesat tak hanya menguntungkan bagi lembaga tapi juga masyarakat sekitar pondok. Tiap hari Minggu, 'Isy Karima mengadakan pengajian bertajuk Ahad Pagi. Jamaah yang hadir ratusan dari sekitar Surakarta tak terkecuali warga Karangpandan.

Dalam pengajian itu 'Isy Karima juga memberikan bantuan bagi jamaah yang kurang mampu. Harapannya adalah agar masyarakat lebih kuat keislamannya.

Pada awalnya Ma'had 'Isy Karima dianggap asing oleh masyarakat, bahkan awal-awal sangat dicurigai, terutama oleh pemerintah. Tokoh penting 'Isy karima, ada Ustaz Badru dan Ustaz Syihab. Karakter keduanya juga berbeda, Ustaz Badru keras dalam paham keagamaan. Hal ini berbeda dengan Ustaz Syihab yang lebih akomodatif. Ustaz Syihab memiliki *basic* NU. Ustaz-ustaz Salafi banyak dekat dengan Ustaz Syihab. Pengajar di 'Isy Karima rata-rata bergelar LC. Kelebihan Ustaz Syihab selain berasal dari kultur NU, beliau adalah menantu DR. Tanjung pendiri DDII. Ustaz Syihab sering silaturahmi ke Mbah Maymun (tokoh NU), sehingga Keluarga Mbah Maymun juga sering berkunjung balik, seperti Gus Wafi, Gus Qoyim.³⁰

Kepala KUA Tasikmadu Abdul Aziz yang juga Sekretaris MUI Karanganyar menceritakan, dakwah NU dan Muhammadiyah baru menggeliat sekitar tahun 2005. Pada tahun 1996, Gus Dur datang, jamaah NU hanya sekitar 150 orang. Tahun 1995 ia masuk jadi staf di KUA. Menurutnya, kehadiran kelompok Salafi perlu disyukuri sebab membangunkan NU dan Muhammadiyah. Bagi NU, terlihat ada beberapa perubahan yaitu: (a) kini pengurus bekerja keras mengorganisir masyarakat, (b) organisasi-organisasi kini mulai tertata dari tingkat PC, MWC, dan ranting, (c) kini banyak dibangun gedung-gedung MWC.³¹

Masih menurut Abdul Aziz, Karanganyar dulu 'merah' atau abangan. Masyarakat sebenarnya membutuhkan sentuhan rohani, namun kondisi saat itu, baik NU maupun Muhammadiyah dalam keadaan 'tidur.' Dulu di masyarakat ada semacam NU phobia, sepeninggal Mbah Khusnan (tokoh NU), tidak ada lagi tokoh NU di Karanganyar yang berpengaruh. Jika dulu ada 5 kursi perwakilan NU di DPRD, pada giliran berikutnya kemudian hilang. Namun kini, 5 kursi itu kembali lagi. Berbeda dengan Muhammadiyah yang sudah maju dari dulu. Ada

³⁰ Wawancara dengan AS (50 th) Pengurus MUI Kab. Karanganyar, Jateng di Masjid Agung Karanganyar.

³¹ Wawancara dengan Abdul Aziz di Kantor KUA Tasik Madu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jateng, tanggal 15 Oktober 2018.

beberapa keunggulan Muhammadiyah yaitu di bidang pendidikan dan amal usaha. Namun demikian, dalam bidang dakwah seperti kehilangan identitas, sehingga sebagian umatnya aktif di MTA.

Sejak 2016, orang-orang dari Ma'had 'Isy Karima banyak duduk menjadi pengurus Masjid Agung Karanganyar. Awalnya kepengurusan terdiri dari tokoh-tokoh agama dari unsur NU dan Muhammadiyah. Setelah masuk nama-nama pengurus dari 'Isy Karima, kegiatan masjid semakin semarak. Jamaah menjadi bertambah banyak. Namun demikian, perlu disayangkan, masjid kemudian seolah "diokupasi" oleh orang-orang 'Isy Karima, sehingga kini, kepengurusan masjid menghadapi persoalan, satu sisi masjid perlu diramaikan, namun di sisi lain, masjid seolah dikuasai kelompok tertentu.³²

Selain Al-Mukmin Ngeruki dan 'Isy Karima, ada beberapa lembaga lain di Solo yang masuk dalam kategori Salafi Haraki yaitu Pesantren Salman al-Farisi, Ibnu Abbas Klaten, Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), Laskar Hisbullah, dan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).

c. Salafi Jihadis

1) Jamaah Anshorut Tauhid (JAT)

Eksistensi Salafi Jihadis di Solo, tidak bisa dilepaskan dengan sosok Abdullah Sungkar yaitu salah satu tokoh yang namanya banyak dikaitkan dengan Jamaah Islamiyah (JI), beliau adalah Amir (pimpinan tertinggi) JI. Selain pendiri Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Abdullah Sungkar adalah salah satu pimpinan di struktur NII, namun setelah terjadi *infishol* (konflik dan perpecahan) dengan pimpinan NII yaitu Ajengan Masduki. Setelah lepas dari kepemimpinan dalam struktur NII, Abdullah Sungkar kemudian mendirikan JI. Dalam catatan Solahudin, paham dan gerakan JI dikategorikan dalam kelompok Salafi Jihadi.³³ Para anggota JI sendiri pada umumnya adalah anggota NII, beberapa di antara mereka adalah mantan (alumni) yang pernah berangkat ke Pakistan untuk pendidikan di Akademi Militer Mujahidin Afghanistan pada tahun 1986-1992, beberapa di antaranya terlibat dalam pertempuran pembebasan Afghanistan dari penjajahan Soviet.

³² Wawancara dengan Abdul Aziz di Kantor KUA Tasik Madu, Kab. Karanganyar, Propinsi Jateng, tanggal 15 Oktober 2018.

³³ Solahudin, *NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2011).

Pada tahun 1999, Abdullah Sungkar wafat, kepemimpinan JI, dilanjutkan oleh Abu Bakar Ba'asyir.³⁴

Pada tahun 2008, Abu Bakar Ba'asyir membidani kelahiran Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) yang didirikan pada tanggal 27 Juli 2008 di Surakarta, kemudian dideklarasikan secara resmi pada 17 September 2008 di Asrama Haji Bekasi, Jawa Barat. JAT memiliki kepengurusan harian, sebagai pengelola organisasi yang dilaksanakan oleh seorang Sekretaris Jenderal, yaitu Ustaz Sonhaji, dibantu oleh Sekretaris JAT Ustaz Afifudin. JAT juga mendirikan sekretariat di Jl. Semenromo No.58, 04/XV Ngruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Telp. 0271-2167285/081 393 919 555, dengan email: info@ansharuttauhid.com.

Abu Bakar Ba'asyir mendirikan Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) setelah sebelumnya juga pernah menjadi pimpinan MMI. Organisasi JAT sebenarnya tidak jauh berbeda dengan MMI. Jama'ah Anshorut Tauhid (JAT) dari segi bahasa mempunyai makna jamaah pembela atau penolong tauhid. JAT ini didirikan untuk merevitalisasi gerakan Islam, menguatkan kembali semangat perjuangan umat Islam dalam upaya penegakan syari'at Islam secara *kaffah* di Indonesia. Komitmen yang besar terhadap kebutuhan diterapkannya syari'at Islam sebagai solusi keterpurukan umat Islam inilah yang menjadi alasan kuat didirikannya JAT yang berpusat di Surakarta, Jawa Tengah.

Pada tahun 2010, Abu Bakar Ba'asyir kembali ditangkap polisi dengan tuduhan terlibat dalam pendanaan bagi pelatihan jaringan Al-Qaeda di Aceh. Pada 16 Juni 2011, Abu Bakar Ba'asyir divonis penjara selama 15 tahun oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuduhan terlibat dalam kasus pelatihan teroris di Aceh dan dukungan terhadap gerakan terorisme di tanah air. Dengan adanya keterlibatan beberapa kader JAT dalam terorisme maka pemerintah Amerika telah secara resmi menyebut JAT sebagai organisasi teroris, namun pemerintah Indonesia masih belum memasukkannya sebagai organisasi teroris.

Pada tahun 2011, JAT membentuk cabang di Poso dengan Ustaz Yasin sebagai Amir dan

³⁴ Nasir Abas, *Membongkar Jama'ah Islamiyah* (Jakarta: Grafindo, 2009): 47-92.

Santoso sebagai ketua divisi kelaskaran. Di Poso inilah, mereka berencana mendirikan pemerintahan Islam. Untuk mendukung rencana tersebut, salah satu program utama JAT adalah melakukan rekrutmen anggota dan pelatihan militer yang langsung berada di bawah tanggung jawab Santoso.

Meskipun Amir JAT, Abu Bakar Ba'asyir dipenjarakan, akan tetapi gerakan ini terus eksis di bawah pimpinan Sonhaji dan Affifudin. JAT tetap konsisten menyerukan pemberlakuan syari'at Islam di Indonesia dan menolak segala produk undang-undang yang dinilai sebagai undang-undang yang berasal dari masyarakat Barat yang kafir. Tujuan yang hendak dicapai oleh gerakan ini adalah penegakan syari'at Islam di Indonesia dengan jalan mendirikan *Daulah/Khilafah Islamiyyah*.

Menurut Abdurrahim Ba'asyir, fokus perjuangan kami (Abu Bakar Ba'asyir dan JAT) adalah memperjuangkan tegaknya syari'at Islam (*tatbiqust asy-syari'ah*) di Indonesia. Kalau umat agama yang lainnya bisa menjalankan syari'at agamanya dengan bebas, dan dilindungi oleh negara, maka umat Islam pun harus diberi kebebasan yang sepadan. Oleh sebab itu, kewajiban umat Islam adalah berpegang teguh pada agama yang benar yaitu Islam. Dalam konteks ini, JAT berupaya menjadi wadah berkumpulnya jamaah dan wadah bagi umat Islam yang memiliki komitmen perjuangan menegakkan *Din al Islam*, menuju tegaknya kesatuan umat Islam di bawah kepemimpinan yang satu, yaitu *Khilafah Islamiyyah*.³⁵

Ideologi Islam yang dipahami dan dikembangkan oleh JAT adalah menolak berbagai bentuk ideologi yang diciptakan oleh manusia, seperti demokrasi, liberalisme, kapitalisme, sosialisme dan lainnya, karena tidak sejalan dengan Alquran dan prinsip sunah Rasulullah saw. sehingga hanya akan membawa kesesatan dan kekafiran semata. Maka agenda besar dari gerakan ini adalah mengganti ideologi yang ada (Pancasila) dengan ideologi Islam, karena dengan inilah syari'at Islam akan bisa tegak selama ada *Khilafah Islamiyyah* (negara Islam). Berkaitan dengan empat pilar kebangsaan, kalangan JAT

tidak sejalan dengan apa yang ada selama ini, bahwa empat pilar tersebut tidak bisa menjamin tegaknya syari'at Islam, maka dapat dikatakan sebagai *thaghut* karena tidak berpegang dengan prinsip *jama'ah* dan *imamah* sebagaimana yang telah diajarkan oleh Islam.³⁶

2) Jaringan Baru Radikal Solo

Banyak peristiwa teror bom terjadi di tanah air, dari laporan intelejen dan beberapa hasil riset, jaringan JI ada di balik peristiwa teror tersebut. Satu demi satu para pelaku, jaringan, dan otak di balik teror tersebut berhasil ditangkap atau ditembak aparat keamanan, antara lain: Ali Imron, Dulmatin, Nurdin M Top, Azhari, Hambali, Umar Patek, Nasir Abas, Fathurrahman Al Khozi, Ali Fauzi. Meski para pimpinan JI banyak tertangkap atau tertembak, namun ideologi dan cita perjuangan kelompok ini tidak mati, regenerasi dan rekrutmen terus berjalan.

Fajar Purwawidada dalam bukunya *Jaringan Baru Teroris Solo (2014)*, menyebut adanya beberapa kelompok baru yang berasal dari Solo atau berasal dari luar Solo, namun masih memiliki jaringan dengan kelompok teroris Solo, yaitu:

a) Kelompok Sigit Qardawi, Sigit Qardhawi alias Herman Wijanto merupakan pemimpin Laskar Hisbah atau Tim Hisbah Solo. Sigit menggunakan Masjid al-Anshor, Semanggi, Solo, sebagai markas. Selain melakukan aksi *sweeping* minuman keras, kelompok ini juga melakukan penyerangan terhadap aparat polisi. Kelompok ini pernah mencoba mengebom kantor pos polisi di Delanggu dan Ketanda, namun gagal meledak. M. Syarif yang melakukan bom bunuh diri di masjid Polresta Cirebon saat salat Jumat (15 April 2011) dan Ahmad Yosepha Hayat yang melakukan bom bunuh diri di Gereja Bethel Injil Sepenuh, Kepunton, Solo (25 September 2011) adalah anggota jaringan ini. Sigit Qardhawi ditembak mati oleh polisi dalam sebuah penyerangan pada 15 Mei 2011.

b) Kelompok Farhan, kelompok ini menamakan dirinya Abu Mus'ab al-Zarqawi Al-Indonisy, diambil dari nama pemimpin al-Qaeda. Farhan pemimpin kelompok ini adalah anak tiri dari Abu Umar (Pimpinan NII non teritorial). Enam dari anggota jaringan ini, termasuk Farhan

³⁵ Muchit, A Karim dalam Asnawati dan Achmad Rosidi (ed.), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2015), 315.

³⁶ Muchit, A Karim dalam Asnawati dan Achmad Rosidi (ed.), *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan* (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2015), 348-349

adalah alumni Pondok Ngeruki. Farhan pernah mengikuti latihan militer di Moro Filipina. Farhan dan kelompoknya melakukan teror terhadap polisi dan perampokan toko emas Mahkota di Pasar Klewer Solo, namun berhasil digagalkan polisi. Aksi Farhan terhenti setelah Densus 88 berhasil menyergap dan menembak mati Farhan dan Muchin pada tanggal 31 Agustus 2012.

c) Kelompok Badri Hartono, Badri Hartono alias Toni adalah warga Griyan Pajang, Solo. Kelompok itu tidak melakukan aksinya di Solo, tapi di Jakarta. Jaringan ini terbongkar karena kasus kecelakaan bom yang meledak di Rt 02/04 Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat (5 September 2012) dan kecelakaan Bom rakitan di Beji Depok (8 September 2012). Muhammad Thoriq kemudian menyerahkan diri. Thoriq dan kawan-kawan merencanakan pengeboman di Markas Brimob Jalan kwitang Jakarta, pos polisi jalan Salemba, dan markas Densus 88 di Trunojoyo Jakarta. Berdasarkan pengembangan penyelidikan polisi ternyata Thoriq adalah jaringan Badri Hartono yang juga memiliki nama al-Qaeda Indonesia.

d) Kelompok Abu Hanifah, kelompok ini berasal dari berbagai gerakan (*tanzim*). Pimpinan kelompok ini adalah Abu Hanifah alias Mustofa Bilal sudah masuk DPO Densus 88 sejak melakukan pelatihan bersama Abu Tholut di Poso pada tahun 2010. Kelompok Abu Hanifah merencanakan pengeboman di empat lokasi yaitu Konsul Jenderal Amerika di Jalan Citaraya Surabaya, Kedubes Amerika di Jakarta, Plaza 89 depan Kedubes Australia, dan kantor Freeport di Kuningan Jakarta. Aksi tersebut gagal karena keburu terbongkar oleh polisi dan terjadi penangkapan secara maraton terhadap anggotanya.

e) Kelompok Abu Roban, Abu Roban alias Amat Untung Hidayat adalah pimpinan Mujahidin Indonesia bagian Barat (MIB). Ia adalah warga desa Timbang, Kec. Banyuputih, Kab. Batang. Jaringan ini adalah penerus kelompok Abu Umar aktivis NII yang tertangkap di Bogor (4 Juli 2011) dalam kasus penyerangan terhadap Matori Abdul Jalil Menteri Pertahanan pada era Gusdur. Pembentukan MIB adalah hasil dari pelatihan paramiliter teroris kelompok Dulmatin di kawasan pegunungan Jalin Juntto Aceh Besar. Deklarasi MIB sendiri dilakukan di gunung Kamojang Garut Jawa Barat. Misi perjuangan

kelompok ini adalah membantu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso. Kelompok MIB banyak melakukan perampokan di Jawa dan Sumatera. Bank-bank milik pemerintah menjadi sasaran. Abu Roban tertembak mati saat penyergapan tanggal 8 Mei 2013.

f) Kelompok Dayat, kelompok ini melakukan aksinya di wilayah Tangerang Selatan. Kelompok ini pernah melakukan teror bom sebuah Vihara di Jakarta Barat. Selain itu, kelompok ini juga melakukan perampokan sejumlah toko emas, bank, dan penembakan polisi. Kelompok Dayat banyak ditangkap setelah tertangkapnya salah satu anggotanya yaitu Anton yang baru saja melakukan perampokan bank di jalan Korelet, Panongan, Kab. Tangerang. Berdasarkan keterangan Anton kelompok Dayat yang sedang berkumpul di sebuah rumah kontrakan Rt 04/07 Kel Kampung Sawah, Ciputat, Tangsel kemudian banyak tertangkap.

Selain kelompok-kelompok tersebut, terdapat tokoh-tokoh penting dalam jaringan terorisme. Obsatar Sinaga dkk dalam Bukunya *Terorisme Kanan Indonesia* (2018) menyebut sejumlah nama yang berasal dari Solo yang memiliki peran penting yaitu:

a) Bahrin Naim, memiliki nama lengkap Muhammad Bahrin Naim Anggih Tamtomo alias Abu Rayan. Bahrin Naim adalah perantara antara ISIS dengan gerakan teroris di Indonesia. Namanya mencuat setelah dikatakan sebagai otak serangan Bom Sarinah pada tahun 2016. Bahrin Naim sendiri bermukim di Suriah sejak Januari 2015. Bahrin pernah ditangkap oleh Densus 88 pada bulan Nopember 2010 di rumah kontrakannya di daerah Pasar Kliwon Solo dalam kasus kepemilikan senjata api. Kini Bahrin Naim aktif mengajak anggota JI untuk bergabung dengan ISIS. Bahrin mendapat perintah langsung dari pimpinan ISIS Abu Bakar al-Baghdadi terkait aksi apapun di Indonesia.

b) Abu Walid, sosok Abu Walid dikenal publik setelah ISIS merilis video berbahasa melayu pada tanggal 21 Juni 2016. Dalam video itu, Abu Walid terlihat berdiri sambil menenteng AK-47. Pada bagian akhir rekaman, Abu Walid berdiri di hadapannya duduk bersimpuh tiga tahanan (sandra) memakai baju oranye, dengan keji dan brutal Abu Walid menyembelih hidup-hidup tiga sandera tersebut. Setelah digorok, kepala sandera

dipotong sampai putus. Di Indonesia Abu Walid lebih dikenal sebagai Muhammad Yusuf Karim Faiz. Dia berasal dari Klaten Jawa Tengah. Di kampungnya dikenal sebagai Saefudin. Abu Walid adalah alumni Pesantren Ngruki, dia belajar selama 4 tahun. Setelah ikut berjihad di Ambon, ia melanjutkan sekolahnya di Arab Saudi. Pada tahun 2000-an itu bergabung dengan JI. Pada tahun 2004 ia ditangkap pemerintah Filipina, kemudian dibebaskan pada 10 Desember 2013. Setelah bebas, ia hilang tanpa kabar, tapi kemudian tiba-tiba muncul dalam video yang dirilis ISIS tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa gerakan Salafi di Solo tidak monolitik, namun memiliki berbagai variannya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut.

No	Varian Salafi	Lembaga/Organisasi
01	Salafi Puritanis	Pesantren Imam Bukhori, Pesantren al-Ukhuwah dan Pesantren Ibnu Abbas As-Salafi, Yayasan al-Madinah, Pesantren Ibnu Taymiyah, Pesantren Darussalaf, dan Pesantren Ittiba'us Sunnah.
02	Salafi Haraki	Pesantren Al-Mukmin Ngeruki, Tsy Karima, Salman al-Farisi, Ibnu Abbas Klaten, Forum Komunikasi Aktifis Masjid (FKAM), Laskar Hisbullah, JAS, dan Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS).
03	Salafi Jihadis	JAT, JAD, Laskar Hisbah, Abu Mus'ab al-Zarqawi Al-Indonisy, dan kelompok radikal lainnya

C. PENUTUP

Saat ini, umat Islam Indonesia telah menyaksikan kehadiran gerakan keagamaan yang dikenal sebagai gerakan Salafi. Paham dan gerakan Salafi tersebut, terus berkembang di tanah air, termasuk di Solo. Salafi dapat dikategorikan menjadi tiga varian: "Puris", "Haraki" (pergerakan) dan "Jihadi".

Kajian ini mendeskripsikan, bahwa Salafi Puris di beberapa tempat terus berkembang, ini menunjukkan mereka dapat berkoeksistensi dengan paham keagamaan lainnya di masyarakat. Selain itu, dengan sikap akomodatif yang dilakukan pemerintah setempat, Salafi Puritanis juga bisa membuka diri terhadap beberapa program pemerintah. Perkembangan ini perlu mendapat perhatian, sehingga pola serupa, bisa dilakukan pemerintah di wilayah lain.

Sementara itu, Salafi Haraki yang masih mengusung narasi keharusan pembentukan negara Islam dan pemberlakuan syari't Islam

secara formal. Dalam konteks Indonesia yang mengusung demokrasi, semua gagasan dan pemikiran perlu mendapatkan apresiasi, selagi tidak memaksakan kehendak dan menggunakan kekerasan. Untuk itu, upaya-upaya persuasif, mediasi, dan dialog perlu terus dilakukan pemerintah, sehingga dapat tumbuh sikap saling menghargai. Salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah pengembangan paham dan sikap moderat dalam beragama.

Adapun kelompok Salafi Jihadis yang melegalkan penggunaan cara-cara kekerasan dalam memperjuangkan cita-citanya, maka selain melalui pendekatan hukum harus juga dibarengi dengan pendekatan yang bersifat humanis. Selain itu, upaya-upaya kontra naratif radikalisme kepada masyarakat sebagai upaya pencegahan perlu terus ditingkatkan. Adanya regenerasi di kalangan Salafi Jihadis sebagaimana disebutkan di atas, menunjukkan program yang dilakukan pemerintah kurang efektif, sehingga membutuhkan evaluasi serius.

Membaca fenomena perkembangan gerakan Salafi tersebut, selain karena adanya faktor internal, seperti adanya kekhasan ajaran Islam yang memungkinkan interpretasi beragam terhadap ajarannya, terdapat pula faktor eksternal yaitu deprivasi atau rasa rugi dan tidak beruntung yang dirasakan seseorang, baik secara sosial-ekonomi maupun politik. Kemunculan Salafi di akhir kekuasaan Orde Baru sangat relevan, dimana saat itu kebijakan Orde Baru sangat represif, hal tersebut telah mengakibatkan masyarakat muslim Indonesia terpinggirkan untuk mendapatkan akses dalam sosial, ekonomi, dan politik.

Menyikapi paham dan gerakan Salafi di Solo, harus diletakkan dalam konteks masyarakat sipil (*civil society*) yang pada dasarnya dapat dipahami sebagai antitesa dari hegemoni negara sebagaimana dalam pandangan pengusung teori-teori sosiologi kritis seperti Gramsci, sehingga sikap pemerintah dalam menyikapi fenomena gerakan Salafi adalah mengedepankan dialog dan mendudukan gerakan Salafi sebagai mitra pemerintah dalam membangun kehidupan keagamaan masyarakat. Selain itu, dengan mengadopsi teori "sekte-gereja" (*sect-church theory*) sebagaimana diformulasikan oleh Weber dan Troeltsch, dimana kemunculan aliran-aliran (sekte) keagamaan, bukan hanya disebabkan oleh

penyempalan keagamaan, melainkan juga kekacauan sosial, sehingga menanganinya harus paralel dengan upaya distribusi kesejahteraan pada masyarakat secara adil dan merata.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Nasir. *Membongkar Jama'ah Islamiyah*. Jakarta: Grafindo, 2009.
- Ali, As'ad Said. *Ideologi Gerakan Pasca-Reformasi: Gerakan-Gerakan Sosial-Politik dalam Tinjauan Ideologis*. Jakarta: LP3ES, 2012.
- Asnawati dan Achmad Rosidi (ed.). *Mereka Membicarakan Wawasan Kebangsaan*. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2015.
- Aziz, Abdul. *Varian-Varian Fundamentalisme Islam di Indonesia*. Jakarta: Diva Pustaka, 2004.
- Chozin, Muhammad Ali. "Strategi Dakwah Salafi di Indonesia". *Jurnal Dakwah*, Vol. XIV, no. 1 (2013).
- Fuadudin, dkk. *Pondok Pesantren Al-Mukmin Ngeruki Solo*. Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2004.
- Gufron, Ali. *Risalah Iman dari Balik Terali, Khalifah Syuhada*, tanpa kota, 2009.
- Hasan, Noorhaidi. *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. New York: Cornell Southeast Asia Program, 2006.
- Hidayat, Dady. "Gerakan Dakwah Salafi di Indonesia pada Era Reformasi" *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol 17, no 2 (2012).
- Ikhsan, Muhammad. *Gerakan Salafi Modern di Indonesia, Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-Ide Substansialnya*. <http://wahdah.or.id/gerakan-Salafi-modern-di-indonesia> (diakses 5/11/2018).
- Iqbal, Asep Muhamad. "Agama dan Adopsi Media Baru: Penggunaan Internet oleh Gerakan Salafisme di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Indonesia*, Volume II, no. 2 (2013).
- Jamhari dan Jajang Jahroni (edt.). *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Jawas, Yazid Abdul Qadir. *Mulia dengan Manhaj Salaf*. Bogor: Pustaka at-Takwa. 2008.
- Meijer, Roel (edt.). *Global Salafism: Islam's New Religious Movement*. London: Hurst & Company, 2009.
- Mujahid, Abu. *Sejarah Salafi di Indonesia*. Bandung: Tokobagus Publishing, 2012.
- Noer, Deliar. *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942*. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1973.
- Purwawidada, Fajar. *Jaringan Baru Teroris Solo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), 2014.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. *Teori Sosiologi Modern..* Jakarta: Kencana, Edisi ke Enam, 2010.
- Rofhani. "Melacak Gerakan Radikal Islam dari Wahabisme ke Global Salafisme." *Religió: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 5, no. 1 (2015).
- Sinaga, Obsatar dkk. *Terorisme Kanan Indonesia*. Jakarta: Gramedia, 2018.
- Solahudin. *NII sampai JI, Salafi Jihadisme di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2011.
- Wahid, Din. *Kondisi Faktual Kelompok Keagamaan Radikal di Indonesia: Kasus Gerakan Salafi*. Makalah disampaikan dalam Seminar "Merajut Ukhuwah dalam Memperkuat Nilai-Nilai NKRI" dilaksanakan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2015.
- Wictorowicz, Quintan. "The New Global Threat; Transnasional Salafis and Jihad." *Middle East Policy*, vol. VIII, no. 4 (2001).
- Wiktorowicz, Quintan. *Anatomy of the Salafi Movement*, in *Studies in Conflict and Terrorism*, 2006.

CRITICISM OF KNOWLEDGE INTEGRATION IN NON-ISLAMIC STUDIES STUDENTS' DISSERTATION AT STATE ISLAMIC UNIVERSITY

MU'MIN ROUP, MUHAMMAD SHODIQ, MAUIDLOTUN NISA', FITRIYANI*

ABSTRACT

This research is a qualitative research with data quantification based on library and field research. The object of the research is dissertations of non-religious students in 4 UINs (State Islamic University) in Indonesia. The approach used in this study was Haught and Golshani's critical approach. Haught with his evolutionary theology believes that science which is based on the theory of evolution can be integrated with faith based theology, while Golshani places religion as a standard entity. For him, the existence of science relies heavily on a scientific metaphysical framework rooted in Islamic values. Both of these theories will be used in understanding the logic of the integration methodology used in the dissertation research.

KATA KUNCI: *Criticism, Scientific integration reasoning, non-religious students, UIN dissertation*

KRITIK NALAR INTEGRASI KEILMUAN PADA KARYA DISERTASI MAHASISWA BERLATAR BELAKANG NON-AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kuantifikasi data yang berbasis penelitian kepustakaan dan lapangan. Artinya, penelitian ini meski merupakan *library research*, namun secara praktis termasuk penelitian lapangan karena objek penelitiannya adalah disertasi mahasiswa non-Agama di 4 UIN yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis Haught dan Golshani. Haught dengan teologi evolusinya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang berbasis teori evolusi dapat diintegrasikan dengan teologi yang berbasis keimanan, sedangkan Golshani lebih menempatkan agama sebagai entitas yang telah baku. Baginya, sains sangat bergantung pada kerangka metafisis saintis yang berakar pada nilai keislaman. Kedua teori ini akan dipergunakan dalam membongkar nalar metodologi integrasi yang digunakan dalam penelitian disertasi tersebut.

KATA KUNCI: Kritik, nalar integrasi keilmuan, disertasi UIN

*) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, mumin.roup@uinjkt.ac.id. Muhammad Shodiqmshodiq@sadra.ac.id, STFI Sadra Jakarta, Indonesia. Mauidlotun Nisa', UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, mauidlotun.nisa@uinjkt.ac.id., Fitriyani, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, fitriyani@uinjkt.ac.id

* Naskah diterima September, 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Penelitian ini berangkat dari semakin banyak mahasiswa berlatar belakang non-agama atau lulusan prodi umum (Kebidanan, Kedokteran, Matematika, Kimia, Fisika, Psikologi, dan lain sebagainya) yang berani melanjutkan studinya ke program doktor di UIN (Universitas Islam Negeri), di mana UIN merupakan lembaga pendidikan tinggi yang sarat dengan kajian-kajian agama atau *Islamic Studies*. Fenomena di atas menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat awam, bagaimana bisa mahasiswa non-agama mampu beradaptasi dengan mudah dan dalam waktu yang relatif singkat mampu mengkaji Islam mengingat kajiannya cukup luas dan komprehensif, mulai dari pemikiran Islam, Tasawuf, Filsafat Islam, dan Ilmu-ilmu Alquran lainnya sebagai basis studi Islam. Untuk merespon hal ini, UIN berupaya memberi jawaban yang cukup cerdas kepada masyarakat luas yaitu dengan konsep integrasi.¹

Fakta di atas harus disadari, lahir atas adanya transformasi dari STAIN dan IAIN menjadi UIN, yang kemudian meniscayakan adanya pembukaan fakultas selain fakultas agama, seperti Fakultas Kedokteran, Fakultas Sains dan Teknologi, dan fakultas umum atau jurusan umum lainnya.² Artinya, lulusan fakultas dan jurusan umum tersebut pasti kemudian akan melanjutkan ke jenjang magister dan doktor di UIN, bahkan tidak menutup kemungkinan mahasiswa lulusan non-agama di luar lingkungan UIN seperti lulusan UI, UNJ, ITB, IPB, dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja, transformasi di atas juga kemudian diikuti dengan program rekrutmen terhadap dosen-dosen yang juga diambilkan dari lulusan PTN umum, yang tentu bukan tanpa masalah. Secara metodologis dan keilmuan, mereka berbeda dengan pola dan sistem berpikir dalam ilmu-ilmu keagamaan yang telah dikembangkan di UIN. Hal ini dapat menimbulkan *gap* dan pertentangan antara dosen agama dan umum. Paling tidak, dapat menyebabkan kebingungan di antara mahasiswa. Fakta ini juga dikuatkan oleh Mulyadi Kartanegara yang menyatakan bahwa nyaris

semua UIN di Indonesia mengalami hal yang sama.³

Dalam rangka merespon persoalan tersebut, UIN dengan bangga dan nyata mendeklarasikan “program integrasi ilmu pengetahuan”.⁴ Artinya, posisi ilmu agama dan umum adalah sama, di mana Alquran dan hadis diposisikan sebagai hasil eksperimen dan penalaran logis, dan sama-sama menjadi sumber inspirasi keilmuan, sehingga tidak ada perbedaan antara ilmu agama dan umum. Konsep integrasi ini secara kasat mata terlihat telah menyelesaikan persoalan dikotomi ilmu agama dan umum. Akan tetapi, secara metodologis, konsep tersebut sebenarnya masih hanya berbicara pada tataran luar keilmuan, belum pada aspek substansial, masalah ontologis dan epistemologis, sehingga belum benar-benar menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Fakta ini seakan dikuatkan dan diperjelas oleh pernyataan M. Nur Syam yang menyatakan secara tersirat bahwa integrasi keilmuan yang ada merupakan konsep bukan *by design*.⁵ Hal ini menunjukkan bahwa konsep integrasi ini belum memiliki landasan dan rancang bangun yang jelas dan operasionalisasinya. Konsep integrasi lahir dan berjalan sesuai dengan aliran air yang deras melalui gerakan Islamisasi ilmu. Hal ini menjadi penting mengingat kajian Islam sangat kompleks dan signifikan dengan ilmu-ilmu yang lain. Kompleksitas ini meniscayakan kajian yang holistik dan berkelanjutan dan tentunya butuh waktu yang panjang untuk mengupas tuntas segala yang menjadi pembahasannya. Bahkan tidak hanya di UIN, kini perguruan tinggi umum pun disinyalir telah melakukan integrasi itu. Asumsi penulis ini dikuatkan oleh M. Nur Syam yang mengatakan bahwa kini hampir tidak dijumpai secara tegas, mana ilmu yang dikembangkan oleh sebuah institusi, apakah lembaga agama atau lembaga umum.

Kenyataannya, integrasi keilmuan yang terjadi di UIN belum berbicara tentang bagaimana mempertemukan antara metode empirik-eksperimen yang diambil dari tradisi Barat dengan

¹M. Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan Tinggi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 92.

²Azyumardi Azra, *Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam Pendidikan Islam* (Jakarta: Logos, 1999), 169.

³Mulyadi Kartanegara, “Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis” dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN* (Jakarta: Depag, 2000), 451.

⁴Azyumardi Azra, *Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam Pendidikan Islam*, 169.

⁵M. Nur Syam. *Integrasi dalam Keilmuan*. <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1968> (diakses 27 September 2017).

metode pembacaan teks yang bernuansa spiritual dari Islam. Jika masalah ini tidak diselesaikan, maka yang terjadi sebenarnya bukan integrasi melainkan hanya labelisasi Alquran atas ilmu-ilmu Barat. Inilah yang terjadi dalam karya-karya penelitian mahasiswa, meski pada tataran skripsi dan tesis hal ini masih bisa dimaklumi dalam rangka mengkaji dan mendeskripsikan, akan tetapi jika sudah pada tataran disertasi, artinya hanya labelisasi Alquran-lah yang terjadi, maka sikap kritis dan pembenahan secara epistemologi, ontologi, dan aksiologi harus dilakukan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian tentang persoalan-persoalan epistemologis, ontologis, dan aksiologis sebagai tiga basis utama konsep integrasi keilmuan di UIN, mengingat bahwa epistemologi Islam tidak akan berguna jika basis ontologisnya tidak diintegrasikan dalam Islam. Dan ketika hal ini terjadi maka ilmu umum akan tetap sekuler dan menolak kebenaran agama sebagaimana yang terjadi di Barat.⁶

Agar integrasi yang ada di UIN yang praktis ada dalam metodologi penelitian disertasi mahasiswa lulusan non-agama tidak hanya pada tataran labelisasi Alquran, mengingat bahwa semua keilmuan lahir dari basis ontologi, epistemologi, dan aksiologi yang membuktikan perbedaan basis keilmuan Islam dan umum, maka diperlukan parameter-parameter tertentu sehingga tercapai tujuan integrasi yang sebenarnya. Untuk mencapai hal tersebut tidak cukup dengan memberi justifikasi ayat Alquran pada setiap penemuan dan keilmuan, memberikan label Arab atau Islam pada istilah-istilah keilmuan dan sejenisnya, tetapi perlu ada perubahan paradigma pada basis-basis keilmuan Barat, agar sesuai dengan basis-basis dan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan realitas metafisik, religius, dan teks Alquran. Hal ini penting karena sebuah ilmu akan tetap sekuler jika tidak didasarkan pada basis ontologis atau pandangan dunia (*world view*) yang utuh dan 'tunggal' berlandaskan tauhid.⁷ Kompleksitas kriteria integrasi yang ideal ini memunculkan sikap skeptisisme terhadap karya disertasi mahasiswa non-agama di UIN Jakarta. Jika

konsep integrasi tidak secara tegas dikonsepsikan, maka akan berpotensi untuk disalahoperasionalkan atau bahkan disalahgunakan oleh sebagian mahasiswa non-agama yang belum memahami ilmu secara filosofis, mulai dari epistemologi, ontologi, sampai aksiologi.

Kajian Literatur

Pada dasarnya, konsep integrasi dalam pendidikan khususnya di perguruan tinggi Islam seperti UIN telah banyak dilakukan oleh para pakar seperti Harun Nasution dengan pemikiran rasionalnya yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Akal dan Wahyu Dalam Islam*.⁸ Memang secara eksplisit ia belum membahas integrasi keilmuan secara tegas, akan tetapi secara implisit gagasan dan pemikirannya sangat berdampak pada upaya integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum, di mana akal menjadi acuan ilmu umum dan wahyu menjadi pedoman ilmu agama. Bahkan pemikiran Harun Nasution ini dianggap sebagai embrio lahirnya UIN dengan konsep integrasinya, di mana UIN Jakarta sebagai pelopor UIN-UIN lain yang ada di Indonesia.

M. Amin Abdullah pada tahun 2003 juga telah menulis sebuah gagasan mengenai integrasi sebagaimana karya yang berjudul *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistimologi Islam dan Umum*.⁹ Puncaknya pada tahun 2006, ia secara nyata menggagas konsep integrasi tersebut dalam bentuk karya yang berjudul *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Dalam bukunya, Amin Abdullah mengangkat konsep integrasi-interkoneksi yang merupakan sebuah upaya dalam pembaharuan pemahaman yang selama ini ada di kalangan para tokoh serta cendekiawan muslim yang sering tanpa sadar membuat sebuah legalitas dari Alquran atas fenomena yang ada. Ismail Raji Al Faruqi salah satu tokoh yang mencetuskan hal tersebut dengan konsepnya tentang Islamisasi pengetahuan. Namun integrasi-interkoneksi yang diusung oleh M. Amin Abdullah adalah sebuah proses pemahaman keilmuan dari teks ke konteks, yang

⁶Naquib Al-Attas, *Islam The Concept of Religion and the Foundations of The Ethics and Morality* (Kuala Lumpur: ABIM, 1971), 50.

⁷Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 180.

⁸Harun Nasution, *Akal dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986).

⁹M. Amin Abdullah, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistimologi Islam dan Umum* (Yogyakarta: Suka Press, 2003).

mencakup *Hadlarah Al-Nassh*, *Hadlarah Al-'Ilm*, dan *Hadlarah Al-Falsafah*. Selain itu, pada tahun 2005, Zainal Abidin Bagir juga telah menggali dan membahas mengenai integrasi ilmu dan agama dalam sebuah buku karyanya yang berjudul *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi*. Dalam bukunya ini, ia mencoba memaparkan konsep integrasi dalam dua tataran teoretis dan praktis.¹⁰ Mengingat konsep integrasi ini bisa dikatakan gampang-gampang susah dalam implementasinya.

Wahyudi Irawan Yusuf pada tahun 2006 juga telah berupaya mencari model integrasi sains dan agama melalui studi perbandingan pemikiran John F. Haught dan Mehdi Golshani dan relevansinya dengan gagasan integrasi UIN Sunan Kalijaga menurut Amin Abdullah. Dalam penelitiannya ini, ditemukan sebuah strategi membongkar integrasi yang dilakukan oleh Haught dan Golshani.¹¹ Haught menempatkan agama sebagai media konfirmasi sains dengan menempatkan "iman" pada sebuah fakta bahwa semesta mempunyai hukum alam sebagai landasan sains. Secara khusus, Haught menempatkan teori evolusi sebagai teori yang paling penting untuk disikapi. Oleh sebab itu, konsep teologi evolusi sebagai bentuk integrasi menjadi gagasan barunya. Dengan teologi evolusi, teologi menjadi bangunan yang aktif dan kreatif. Berbeda dengan Haught, Golshani lebih menempatkan agama sebagai entitas yang telah baku. Dengan menempatkan praduga metafisis sebagai basis sains dalam integrasi. Baginya, eksistensi sains sangat bergantung pada kerangka metafisis saintis yang memberi arah bagaimana menginterpretasi data ilmiah. Dalam proses interpretasi tersebut, munculnya metafisika yang berakar pada nilai keislaman sangat penting. Oleh sebab itu, ia mengajukan sains Islam sebagai bentuk integrasi. Dari temuan Yusuf tersebut mengenai gagasan Haught dan Golshani, dapat disimpulkan bahwa integrasi Amin Abdullah cenderung di antara Haught dan Golshani. Ia

cenderung moderat, tidak terlalu liberal dan juga tidak konservatif dalam menempatkan agama. Dalam kerangka pengembangan keilmuan juga ia sejalan dengan Golshani dengan tidak melakukan Islamisasi pengetahuan.

Sebagaimana diketahui bersama dan dikuatkan beberapa temuan penelitian sebelumnya bahwa karakteristik integrasi keilmuan yang ada di UIN Yogyakarta adalah integrasi berparadigma integratif-interkoneksi. Dan untuk lebih menggali paradigma tersebut, Luthfi Hadi Aminuddin pada tahun 2010 meneliti tentang Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma Integratif - Interkoneksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹² Ia mengungkapkan bahwa secara epistemologi, paradigma keilmuan UIN Sunan Kalijaga yang dikenal dengan paradigma integratif - interkoneksi merupakan pengembangan dari epistemologi *bayani*, *'irfani*, dan *burhani* yang digagas oleh al-Jabiri. Selain itu, paradigma integratif-interkoneksi termasuk model integrasi ilmu (*hadarat al-'ilm*) dan agama (*hadarat al-nas*) dengan tipologi triadik. Dalam model triadik ini ada unsur ketiga yang menjembatani sains dan agama yaitu filsafat (*hadarat al-falsafah*). Dalam penelitian ini, ditemukan hal yang sangat menarik bahwa secara praktis, paradigma integrasi interkoneksi yang dibangun oleh UIN Sunan Kalijaga masih memiliki keterbatasan, karena cenderung lebih bersifat teoritis. Konsep paradigma tersebut belum dijabarkan dalam empat ranah utama dalam melaksanakan kurikulum yaitu ranah filosofis, materi, metodologi, dan strategi.

Nurlena Rifai, Fauzan, Wahdi Sayuti, dan Bahrissalim, pada tahun 2014 telah mencoba melakukan penelitian tentang Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran. Nurlena dkk., dalam penelitiannya ini berusaha membidik konsep integrasi melalui penerapannya dalam pengembangan kurikulum dalam pembelajaran yang ada di UIN di seluruh Indonesia. Ditemukan bahwa ternyata 6 UIN di Indonesia secara umum belum dilakukan secara

¹⁰Zainal Abidin Bagir. "Tradisi Integrasi Ilmu dalam Institusi Pendidikan Islam." *KHAZANAH*, Vol. XII, no. 01 (2014).

¹¹Wahyudi Irawan Yusuf, "Mencari Model Integrasi Sains dan Agama: Studi perbandingan Pemikiran John F. Haught dan Mehdi Golshani dan Relevansinya dengan Gagasan Integrasi UIN Sunan Kalijaga menurut Amin Abdullah", *Tesis* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2006. http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php/pendidikan_dan_sosial/Detail/abstract/view/Fulltext/id/389 (diakses 27 September 2017).

¹²Luthfi Hadi Aminuddin. "Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma Integratif - Interkoneksi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, Volume 4, no. 1 (2010).

sistematik dan berkesinambungan dalam penerapan integrasi keilmuan, baik dalam penyusunan maupun dalam pengembangan kurikulum,. Konsep integrasi keilmuan masih berhenti pada tataran normatif-filosofis dan masih mencari bentuk penerapan yang sesuai dengan masing-masing UIN.¹³ Dari sini terlihat jelas distingsi dan pentingnya penelitian yang akan penulis lakukan dalam rangka membongkar dan membedah nalar integrasi pada disertasi mahasiswa non-agama di UIN se-Indonesia dalam rangka membuktikan sejauh mana level integrasi yang terjadi selama ini.

Ada penelitian disertasi yang mengungkap tentang bagaimana tiga UIN (Jakarta, Yogyakarta, dan Malang) membangun paradigma integrasi keilmuannya yang ditulis oleh Ansori pada tahun 2014 dengan judul "Integrasi Keilmuan Atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang". Dalam penelitiannya ini, ia menggunakan metode analisis eklektik dengan pendekatan historis-fenomenologis.¹⁴ Temuan penelitiannya adalah bahwa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berparadigma integrasi keilmuan dialogis universal, yang terejawantah dalam mottonya: *knowledge, piety, integrity*. UIN Jakarta menolak gradasi dalam integrasi keilmuan dan gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan sebab Islamisasi ilmu masih mengandung tanda tanya besar. Ketika semua ilmu sudah Islam, IPA tentu sudah selesai, sesuai prinsip-prinsip universal. Sedangkan teori-teori sosial tertentu dan ilmu humaniora mayoritas berbasis keilmuan Barat, masih menysakan persoalan. Integrasi UIN Jakarta dikuatkan oleh adanya Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang tidak dimiliki oleh UIN lain di Indonesia. Berbeda dengan UIN Jakarta, hasil penelitian Ansori ini menyatakan bahwa corak bangunan keilmuan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menganut paradigma membangun sains Islam seutuhnya. Integrasi-interkoneksi

keilmuan dengan merajut trilogi khasanah keilmuan *Hadlaaraat al-Nassh, Hadlaaraat al-Falsafah*, dan *Hadlaaraat al-'Ilm (H-NFI)*, dimana ia tidak memilih Islamisasi ilmu dan lebih condong pada konsep humanisasi agama. Kecondongan ini menjadikan UIN Yogyakarta populer dengan *worldview* integrasi-interkoneksi yang humanis. UIN Sunan Kalijaga memiliki karakter sirkulasi *archeological science*, populer menjadi *spider web*, tiga nalar budaya H-NFI. Hubungan trilogi *religion, philosophy, dan science*, yakni *semipermeable, intersubjective testability, dan creative imagination*. Adapun UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, memiliki paradigma integratif universal *Ulul Albab* dengan metafora pohon ilmu, di mana hakikat tujuan mencari ilmu adalah untuk mengetahui isi jagat raya (*universe, universal*) dan membangun kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Jika filosofi ini disepakati, maka integrasi agama dan ilmu otomatis akan terjadi. UIN Malang secara implisit menolak paradigma Islamisasi ilmu pengetahuan sama seperti UIN Yogyakarta. Praktik nyata filosofi integrasi pohon ilmu tersebut, telah dilakukan oleh UIN Malam berupa pendidikan Islam komprehensif yang populer dengan tarbiyah *Ulul Albab* sebagai wadah pendidikan holistik berupa pendidikan karakter, kemahiran berbahasa Arab, dan bahasa Inggris, pembinaan salat berjamaah lima waktu, dan menghafal Alquran.

Pada tahun 2016 Benny Afwazi juga telah melakukan kajian dalam rangka membangun integrasi ilmu-ilmu sosial dan hadis nabi. Dalam penelitiannya, ia berupaya mendiskusikan masuknya ilmu sosial ke dalam studi tentang tradisi nabi (hadis) sebagai bagian dari integrasi antara ilmu sosial dengan agama.¹⁵ Dalam proses integrasi, hadis berperan sebagai obyek material dan kajian yang menjadi obyek formal adalah ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, antropologi, geografi, sejarah, ilmu ekonomi, psikologi, begitu pula ilmu politik. Dengan demikian, ilmu-ilmu sosial dapat berperan sebagai bagian dari praktik formulasi makna hadis secara kontekstual bagi ragam waktu dan tempat yang berbeda. Sebagai contoh, makna kontekstual dari "Quraisy" sebagai

¹³Nurlena Rifa'i, dkk. "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum Di UIN Se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran." *TARBIYA*, Vol. I, no.1 (2014): 13-34.

¹⁴Anshori, "Integrasi Keilmuan Atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta, dan UIN Malang", *Disertasi*, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014). Lihat juga Weni Hidayati. *Dosen UMS Teliti Konsep Integrasi Keilmuan Tiga UIN (Jakarta, Yogyakarta dan Malang)*. <http://uin-suka.ac.id/page/berita/detail/942/dosen-ums-teliti-konsep-integrasi-keilmuan-tiga-uin-jakarta-yogyakarta-dan-malang> (diakses 27 September 2017).

¹⁵Benny Afwazi. "Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi." *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, no. 1 (2016): 101-102. <http://repository.uin-malang.ac.id/989/1/Integrasi%20Ilmu%20sosial%20dan%20hadis%20Nabi.pdf> (diakses 27 September 2017).

kaum yang memiliki pengaruh, mempunyai dukungan fanatis, dan kemampuan serta kualitas untuk memegang posisi sebagai pemimpin negara. Penelitian Benny ini membuktikan dan memperlihatkan level integrasi antara ilmu sosial dan hadis hanya pada tataran pendekatan yang digunakan. Artinya, integrasi yang telah dilakukan dalam hal ini lahir dari sebuah pendekatan ilmu-ilmu umum.

Zainal Abidin pada tahun 2014 telah menelisik dan mengungkap kapan tradisi integrasi keilmuan dilakukan dalam pendidikan Islam yang ditulis dalam artikelnya berjudul "Tradisi Integrasi Ilmu dalam Institusi Pendidikan Islam."¹⁶ Dalam penelitiannya ini dengan menggunakan pendekatan sejarah, ia menemukan bahwa sebenarnya tradisi integrasi keilmuan dalam pendidikan Islam itu muncul sejak awal periode Islam. Karena secara faktual lembaga-lembaga pendidikan Islam menjadi basis pengkajian berbagai disiplin ilmu. Upaya integrasi ilmu dalam Islam, sudah menjadi tugas mulia para ilmuan di tengah pengaruh sekularisme Barat yang mendominasi paradigma keilmuan modern. Meski demikian, dengan warisan intelektual dan peradaban Islam pada pendidikan Islam harus tetap digaungkan dalam kerangka modernitas, sehingga ilmu yang berkembang tidak tercerabut dari akar fundamental Islam.

Geliat dan gairah kritik integrasi dalam penelitian disertasi di UIN kini banyak berkembang di kalangan akademisi, mengingat saat ini banyak penelitian disertasi yang mengklaim mengaplikasikan integrasi keilmuan. Salah satunya adalah Fadhli Lukman pada tahun 2016 meneliti mengenai integrasi-interkoneksi dalam studi hadis disertasi di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁷ Dalam penelitiannya ini, ia mengungkap hanya ada sembilan dari empat belas disertasi yang dibahas telah melibatkan objek formal yang berasal dari tradisi keilmuan sosial yang berkembang di Barat semenjak abad ke-18 melalui analisis metodologi yang digunakan dalam disertasi tersebut.

Dari kajian literatur di atas, dapat terlihat jelas

¹⁶Zainal Abidin. "Tradisi Integrasi Ilmu dalam Institusi Pendidikan Islam." *KHAZANAH*, Vol. XII, no. 01 (2014).

¹⁷Fadhli Lukman. "Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga." *RELIGIA*, Vol. 19, no. 2 (2016). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia> (diakses 29 September 2017).

bahwa penelitian yang akan diteliti ini sangat penting mengingat telah banyak karya disertasi yang mengklaim mempraktikkan konsep integrasi keilmuan tanpa adanya evaluasi dan pembuktian klaim tersebut. Ditambah lagi, nampaknya belum ada yang berani membongkar nalar metodologi disertasi yang mengklaim menggunakan konsep integrasi dalam kerangka konsepnya, khususnya pada disertasi mahasiswa non-agama (Kedokteran, Ilmu Kesehatan, Kebidanan, Ekonomi), dan lain sebagainya di UIN.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kuantifikasi data yang berbasis penelitian kepustakaan dan lapangan. Artinya, penelitian ini meski merupakan *library research*, namun secara praktis termasuk penelitian lapangan karena objek penelitiannya adalah disertasi mahasiswa non-agama di 4 UIN yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori John F. Haught dan Mehdi Golshani Haught dengan teologi evolusinya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang berbasis teori evolusi dapat diintegrasikan dengan teologi yang berbasis keimanan, sedangkan Golshani lebih menempatkan agama sebagai entitas yang telah baku. Baginya, eksistensi sains sangat bergantung pada kerangka metafisis saintis yang berakar pada nilai keislaman. Kedua teori ini akan dipergunakan dalam membongkar nalar metodologi integrasi yang digunakan dalam penelitian disertasi tersebut.

Subjek penelitian ini adalah beberapa mahasiswa doktor, alumni program doktor lulusan S1 dan S1 dari prodi umum dan lulusan PTU, dan pimpinan Pascasarjana UIN, serta kepala perpustakaan Pascasarjana UIN di Indonesia. Sedangkan objek penelitian ini adalah 3 disertasi lulusan 4 UIN di Indonesia yang berlatar belakang pendidikan non-agama, baik di tingkat sarjana maupun magister, dengan pembatasan hanya pada UIN Suska Riau, UIN Syahid Jakarta, UIN SGD Bandung, dan UIN Maliki Malang.

Sumber primer penelitian ini adalah karya disertasi mahasiswa berlatar belakang non-agama yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Suska Riau, dan UIN Gunung Djati Bandung. Artinya hanya ada 4 UIN yang akan dijadikan sebagai sumber

data primer mengingat keempat UIN tersebut merupakan salah satu UIN lebih awal mengalami transformasi dibanding dengan UIN lainnya, seperti UIN Sunan Ampel Surabaya, UIN Palembang, UIN Imam Bonjol Padang, dan lain sebagainya. Adapun sumber data sekunder penelitian ini adalah beberapa literatur otoritatif yang membahas tentang integrasi keilmuan, baik berupa buku maupun artikel jurnal seperti *Akal dan Wahyu Dalam Islam* karya Harun Nasution, *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum* dan *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif* karya M. Amin Abdullah, dan *Integrasi Ilmu dan Agama: Interpretasi dan Aksi* karya Zainal Abidin Bagir, dan lain sebagainya.

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian ini di antaranya melalui pembacaan dan menginventarisasi disertasi yang ada serta literatur yang otoritatif yang membahas mengenai integrasi, mulai dari membedah metode dan pendekatan apa yang digunakan serta temuan yang dihasilkan. Selanjutnya, wawancara terhadap pimpinan 4 UIN atau tokoh pencetus integrasi di masing-masing UIN yang menjadi objek penelitian serta penulis disertasi untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman mereka tentang konsep integrasi yang menjadi ciri masing-masing UIN, di antaranya wawancara dengan Samsul Hadi Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, tanggal 20 Oktober 2018, wawancara dengan Direktur Pascasarjana UIN Suska Riau, di Kampus UIN Suska Riau, 20 November 2018, dan wawancara dengan Direktur Sps. UIN Maliki Malang, di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, tanggal 20 Oktober 2018.

C. HASIL DAN DISKUSI

Dalam konteks ini konsep Mehdi Golshani menjadi teori dalam membedah nalar integrasi yang ada pada karya disertasi mahasiswa yang berlatar belakang pendidikan umum. *The Holy Quran and the Science of Nature* karya Mehdi Golshani pada tahun 1986, yang telah diterjemahkan dengan judul *Filsafat Sains Menurut al-Quran* terbitan Mizan 1988 menjadi karya fenomenal integrasi agama dan sains.¹⁸ Dalam

¹⁸Mehdi Golshani, *The Holy Quran and the Science of Nature, Filsafat Sains Menurut al-Quran*. (Bandung: Mizan, 1988).

sejumlah tulisannya, Golshani menyatakan bahwa yang dimaksud sains Islami adalah sains yang sesuai dengan pandangan dunia Islam. Dalam kata pengantar bukunya, *the Holy Quran and the Science of Nature*, Golshani mengingatkan bahwa pembahasan dasar-dasar epistemologi dalam pandangan Alquran untuk memperkuat kajian ilmu-ilmu kealaman merupakan hal yang masih sedikit dikerjakan dalam tradisi intelektual Islam dan ia menganjurkan agar para saintis muslim untuk menyediakan lebih banyak lagi waktu dan energinya dalam berkontribusi pada persoalan yang amat penting ini.

Ketika mendiskusikan relasi Islam dan ilmu-ilmu kealaman, Golshani terlebih dahulu menjelaskan definisi pengetahuan (*'ilm*) dalam pandangan Islam. Berdasarkan kajian epistemologisnya, Golshani menyimpulkan bahwa Alquran menggunakan kata *'ilm* atau pengetahuan, baik untuk membahas ilmu-ilmu kealaman maupun ilmu-ilmu yang lain. Dalam diskursusnya, Golshani menggunakan istilah ilmu sakral (*sacred sciences*) dan ilmu sekuler (*secular sciences*). Golshani menjelaskan bahwa ilmu sakral adalah ilmu yang terbingkai dalam pandangan dunia teistik; yang memandang Tuhan sebagai Pencipta dan Pemelihara semesta dan tidak membatasi wujud hanya dalam wilayah material, sembari meyakini pada tujuan bagi alam ciptaan dan mengakui aturan moral yang ditetapkan-Nya. Sementara ilmu sekuler adalah ilmu yang dibangun dengan paradigma yang sama sekali mengabaikan semua hal yang dipedomani ilmu sakral tersebut. Golshani mengibaratkan sains ibarat pohon yang dahannya kering, sehingga agar pohon tersebut tumbuh dan berkembang secara subur, maka ia harus 'disiram' dengan agama. Golshani beralasan karena sains tidak bebas nilai dan keyakinan bahwa sains modern bersifat netral, bebas nilai, objektif dan sebagainya merupakan produk kejahilan belaka.¹⁹

Gagasan tentang sains sakral dikembangkan Golshani disebut sebagai "sains Islam". Golshani membantah secara tegas pandangan bahwa sains adalah bebas dari nilai dan ideologi. Baginya, semua teori sains, khususnya teori-teori fundamental, melibatkan praanggapan-praanggapan metafisika yang berakar pada *world*

¹⁹ Mehdi Golshani, *The Holy Quran and the Science of Nature, Filsafat Sains Menurut al-Quran*.

view para saintis bersangkutan. Golshani mendefinisikan “sains Islam” sebagai jenis sains yang di dalamnya pengetahuan tentang dunia fisik terkandung dalam pandangan dunia Islam.

Menurut Golshani, pemahaman yang reduksionis atau cenderung menyederhanakan permasalahan tersebut jelas sangat tidak relevan dengan makna sains Islam yang ingin mendasarkan penemuan sains pada sebuah eksperimen yang bergantung pada pengandaian-pengandaian (*presuppositions*) metafisika. Golshani berpandangan bahwa sains tidak bisa dipisahkan dari seperangkat nilai yang mengitarinya. Walaupun sains merupakan fakta saintifik yang berakar pada realitas obyektif, dan memiliki metode universal yang khas, terdiri dari eksperimen, observasi, dan kerja teoretis, kerja saintifik sangat sarat dengan praduga-praduga filosofis dan keagamaan. Sementara metafisika memainkan peran penting pada segenap tahapan aktivitas saintifik, meskipun bisa saja semua itu berlangsung tanpa disadari. Berbeda dengan Golshani dalam merepresentasikan relasi agama dan sains, Haught mencoba menawarkan paradigma baru, yaitu upaya perjumpaan secara konfirmatif. Tujuannya adalah mengupayakan agar semakin banyak studi tentang teologi yang menghasilkan cara-cara lebih mendalam tentang bagaimana agama (teologi) melandasi dan memelihara seluruh kegiatan ilmiah.²⁰

Konsep Golshani dan Haught menarik digunakan untuk membedah nalar integrasi ilmu agama dan sains yang digalakkan oleh UIN Jakarta, UIN Malang, UIN SGD Bandung, dan UIN Suska Riau. Menurut hasil kajian beberapa penelitian yang sudah ada khususnya penelitian Nurlena, dkk pada tahun 2014 sebagaimana pada tabel 1.

Tabel 1:
Konsep Integrasi di 4 UIN

No	Nama UIN	Paradigma Keilmuan	Konsep Integrasi
1.	UIN Sultan Syarif Kasim, Riau	Orientasi ilmu pengetahuan merupakan perpaduan antara ilmu-ilmu <i>qudriyyah/laadriyyah</i> (<i>al-ushul</i>) (ilmu yang berkaitan dengan teks keagamaan) dengan ilmu-ilmu <i>kanu'iyah</i> dan ilmu-ilmu <i>ijtimaiyyah</i> (ilmu kealaman dan kemasyarakatan) dan ilmu <i>hailarohi al-falsafah</i> (ilmu etika kefilisafatan).	Integrasi keilmuan merupakan penggabungan antara ilmu agama dan umum. Untuk mencapai itu, tidak cukup dengan memberikan justifikasi ayat pada setiap penemuan dan keilmuan, memberikan label Arab atau Islam pada istilah-istilah keilmuan dan sejenisnya, tetapi perlu ada perubahan paradigma pada basis keilmuan Barat agar sesuai dengan basis dan khazanah keilmuan Islam yang berkaitan dengan realitas metafisik, religius, dan teks suci.

²⁰ John F. Haught. “Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog,” dalam *Science and Religion: From Conflict to Conversation*, terj. Fransiskus Borgias (Bandung: Mizan, 2004).

2.	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Islam tidak mengenal dikotomi keilmuan, karena sumber semua pengetahuan adalah Allah. Oleh karenanya, paradigma keilmuan yang dikembangkan adalah mempertemukan sains dengan kebenaran wahyu.	Integrasi keilmuan merupakan perpaduan antara ilmu agama dan ilmu umum, serta integrasi antara ilmu agama dengan ilmu umum. Perpaduan ini mencakup tiga aspek atau level, yakni: integrasi ontologis, integrasi klasifikasi ilmu, dan integrasi metodologis.
3.	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung.	Agama dan sains telah berkembang seiring dengan dinamika keilmuan dan pemikiran manusia. Demikian halnya ilmu pengetahuan dan sains lahir bukan hanya dari penalaran secara mendalam terhadap objek-objek pengetahuan yang terdapat pada materi ciptaan Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah Tuhan sendiri sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Perpaduan antara ayat <i>kanu'iyah</i> dengan ayat <i>qudriyyah</i> akan melatirkan suatu paradigma keilmuan yang berpijak pada wahyu dan rasionalitas.	Integrasi keilmuan mengikuti filosofi roda yang memiliki 3 komponen, yakni poros (<i>as</i>), jari-jari (<i>velg</i>) dan ban (<i>tyre</i>). Ketiga komponen tersebut bekerja secara simultan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Oleh karenanya, integrasi keilmuan merupakan integrasi ayat-ayat <i>qudriyyah</i> dan ayat-ayat <i>kanu'iyah</i> yang mencakup aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis.
4.	UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.	Meletakkan agama sebagai basis ilmu pengetahuan. Alquran dan hadis dalam pengembangan ilmu diposisikan sebagai sumber ayat-ayat <i>qudriyyah</i> sedangkan hasil observasi, eksperimen, dan penalaran logis diposisikan sebagai sumber ayat-ayat <i>kanu'iyah</i> . Dengan posisinya seperti itu, maka berbagai cabang ilmu pengetahuan selalu dapat dicari sumbernya dari Alquran dan hadis. Metafora yang digunakan adalah sebuah pohon yang kokoh, bercabang rindang, berdaun subur, dan berbuah lebat karena ditopang oleh akar yang kuat. Akar yang kuat tidak hanya berfungsi merangga pokok pohon, tetapi juga menyerap kandungan tanah bagi pertumbuhan dan perkembangan pohon.	Integrasi keilmuan merupakan penggabungan ilmu agama dan ilmu umum dalam satu kesatuan. Kedua jenis ilmu yang berasal dari sumber yang berbeda itu harus dikaji secara bersama-sama dan simultan. Perbedaan di antara keduanya ialah bahwa mendalam ilmu yang bersumber dari Alquran dan hadis hukumnya wajib bagi setiap mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Sedangkan mendalam ilmu yang bersumber dari manusia hukumnya wajib <i>leffiyah</i> .

Dari sana dapat terlihat jelas, masing-masing UIN di Indonesia memiliki paradigma integrasi keilmuan yang berbeda sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi. Meski demikian, 4 UIN di atas sama-sama memiliki tantangan berat terkait bagaimana mengaplikasikan konsep integrasi keilmuannya pada kasus mahasiswa doktoralnya yang memiliki latar belakang non-agama. Menjadi keniscayaan bahwa mahasiswa tersebut wajib mendialogkan keilmuan umumnya dengan ilmu keislaman sebagai karakteristik UIN yang digambarkan pada karya disertasi mereka.

Mengingat bahwa program Pascasarjana Doktor di UIN Malang hanya ada 2, yaitu program doktor Manajemen Pendidikan Islam (MPI) dan Pendidikan Bahasa Arab (PBA), maka terlihat jelas dari hasil observasi dan kajian literatur di lapangan mayoritas disertasi yang ditemukan

yang kemungkinan besar berlaku adanya integrasi adalah program doktor MPI, meski juga tidak menutup kemungkinan ada di PBA. Berikut data disertasi yang ditemukan.

Tabel 2:
Disertasi UIN Maliki, Malang

No.	Mahasiswa	Judul Disertasi	Metodologi
1.	Sri Rahmi NIM: 09730011 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maliki-Malang Tahun 2014	Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Hubungan Antarmanusia (<i>Human Relation</i>) pada Saat Pemecahan Masalah, Pengambilan Keputusan, dan Pembentukan Kerjasama Tim (Studi Multi Situs di SDI Hikmatul Fadhillah dan SDI Shafiyatul Amaliyyah Medan)	Pendekatan kualitatif dengan fenomenologik naturalistik (<i>Phenomenological Naturalistic</i>) yang bermakna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu, dengan rancangan penelitian studi multi situs (<i>multisite studies</i>)
2.	Aan Eko Khusri Ubaidillah NIM. 13730010 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maliki-Malang Tahun 2016.	Pengembangan Sumber Daya Pendidik Berkesetaraan Jender (Studi Multikasus di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub, Mojokerto dan SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang)	Paradigma interpretatif atau <i>post-positivistic</i> , kualitatif, studi kasus, dan rancangan multikasus.
3.	Ahamd Fauzi NIM. 10730002 Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maliki-Malang Tahun 2016.	Model Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Perspektif Konstruksi Sosial Kiai di Pondok Pesantren Zairul Hasan Genggong Probolinggo-Jawa Timur.	Teori konstruksi sosial (<i>social construction</i>) Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan pendekatan fenomenologis.

Dari sisi kajian disertasinya, Sri Rahmi nampaknya telah berupaya sekuat tenaga mendialogkan kajian pendidikan dengan hubungan masyarakat (*public relation*) secara umum yaitu dengan judul *Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Membangun Hubungan Antarmanusia (Human Relation) pada Saat Pemecahan Masalah, Pengambilan Keputusan, dan Pembentukan Kerjasama Tim (Studi Multi Situs di SDI Hikmatul Fadhillah dan SDI Shafiyatul Amaliyyah Medan)*, padahal jika dilihat fokus bidang konsentrasinya adalah Manajemen Pendidikan Islam.

Menarik dibahas juga bahwa SR menggunakan pendekatan kualitatif dengan fenomenologik naturalistik (*Phenomenological Naturalistic*) yang bermakna memahami peristiwa dalam kaitannya dengan orang dalam situasi tertentu, dengan rancangan penelitian studi multi situs (*multisite studies*). Dari sana terlihat jelas upaya integrasi keilmuan yang dilakukan oleh SR dalam mendialogkan kajian fenomenologi bahkan sosial dengan kajian manajemen pendidikan Islam

yang menjadi konsentrasi bidangnya. Oleh karena itu, disertasi SR ini dapat diklaim sebagai produk disertasi yang integratif dengan multi pendekatan.

Dari disertasi Aan Eko Khusni Ubaidillah (AEKU) dapat diungkap bahwa ia merupakan mahasiswa doktoral dengan konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam. Oleh karena itu, meneliti tentang *Pengembangan Sumber Daya Pendidik Berkesetaraan Jender (Studi Multikasus di Madrasah Aliyah Miftahul Qulub, Mojokerto, dan SMP A. Wahid Hasyim Tebuireng Jombang)*. Dari judul yang diangkat, nampaknya ia ingin melihat pengembangan SDM dari sisi kesetaraan Jender melalui paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretatif atau *post-positivistic*, kualitatif, studi kasus, dan rancangan multikasus. Multi pendekatan yang ia gunakan cukup memberikan bukti bahwa upaya integrasi keilmuan telah ada.

Ahmad Fauzi merupakan mahasiswa Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Maliki-Malang Tahun 2016. Penelitian disertasinya yang berjudul "Model Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Perspektif Konstruksi Sosial Kiai di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo-Jawa Timur", menggunakan teori konstruksi sosial (*social construction*) Peter L. Berger dan Thomas Luckman dengan pendekatan fenomenologis. Secara kasat mata, pendekatan yang digunakan nampaknya merupakan sebuah upaya AF dalam mendialogkan ilmu agama dan sains. Sebab pendekatan fenomenologi merupakan salah satu pendekatan studi agama.²¹

Sebagaimana diketahui bahwa konsep integrasi UIN Malang adalah integrasi 'Ulul al-Bab. Seluruh UIN wajib melakukan integrasi meskipun mahasiswanya bukan berasal dari Universitas Umum. Model disertasi dari yang ditulis oleh lulusan universitas umum adalah langsung menyatakan teori atau perspektif misalnya pada strategi pendidikan karakter, kemudian teori-teori tersebut dikaji dan dikaitkan dalam perspektif Islam, lalu disandingkan dan didialogkan dengan konsep Islam. Disertasi tersebut mengkonstruksi titik temu bidang kajiannya dengan implementasi integrasi keilmuan di masing-masing UIN dengan

²¹Clive Erricker, "Pendekatan Fenomenologis", dalam Peter Conolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama* (Yogyakarta: LKis, 2002), 105.

cara menyandingkan kajian teori dengan konsep Islam kemudian didialogkan dengan konsep Islam. Di sinilah letak integrasi yang dimaksudkan, sehingga dalam disertasi pada kajian pustaka disamping terdapat perspektif Islam kemudian perspektif Islam tersebut dijadikan pisau analisis dalam membahas hasil penelitian. Kerangka konseptual integrasi keilmuan yang digunakan dalam metodologi penelitian disertasi tersebut yaitu misalnya ada kajian teori/ perspektif teori menurut teori Barat dan Islam kemudian dijadikan pisau analisis. Dalam hal ini pisau analisis berfungsi untuk mengetahui bagaimana hasil disandingkan dan didialogkan dengan konsep Islam. Di sinilah peran metodologi, yang kemudian menghasilkan temuan-temuan dan hasil lapangan dalam perspektif religius dan lain sebagainya.²²

Pernyataan di atas cukup menguatkan bahwa mayoritas disertasi yang ada di Pascasarjana UIN Maliki, Malang telah cukup berupaya mengaplikasikan konsep integrasi keilmuan sesuai dengan visi dan misi institusi. Berikut disertasi yang secara kasat mata dianggap sebagai disertasi yang mengusung konsep integrasi keilmuan di UIN Suska Riau.

Tabel 3
Disertasi UIN Suska, Riau

No.	Mahasiswa	Judul Disertasi	Metodologi
1.	Muhammad Tawwaf NIM. 31594105755 PPs. UIN Suska, Riau Tahun 2017. Lulusan: S1 IAIN Suska Pekanbaru dan UI S2 Unpad, Bandung S3 UIN Suska, Riau	Pengembangan Model Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Madrasah pada Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Indragiri Hilir	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/ Madrasah, dengan nilai keislaman yang melekat pada madrasah sebagai sekolah berkecenderungan keislaman.
2.	Koncoro Hadi NIM. 31494106559 PPs. UIN Suska, Riau Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maliki-Malang Tahun 2014 Lulusan: S1 Kimia Universitas Riau S2 Kimia UGM S3 PAI UIN Suska Riau	Integrasi Islam dalam Pembelajaran Kimia pada Kurikulum Tingkat SMA/MA	Mengintegrasikan kimia modern dengan Alquran sebagai sumber ilmu pengetahuan yaitu melalui tiga proses bagian, empirik, logik, dan intuitif. Penelitian ini menitikberatkan integrasi Islam dalam materi pembelajaran kimia, di mana ditemukan bahwa terdapat pembelajaran saintifik kimia perspektif hadis dan integrasi Islam dalam proses pembelajaran kimia.
3.	Muhammad Syahrullah NIM. 31595106041 PPs. UIN Suska, Riau Tahun 2018. Lulusan: Alumni Gontor, Ponorogo, Jatim. S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau S2 Magister Manajemen Universitas Riau S3 UIN Suska, Riau	Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya di Peradilan Agama	Penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dengan menggunakan ustuhul fikih, kaedah fikih, dan perbandingan pendapat fikih, subjek penelitian dianalisis untuk menemukan pendapat yang aqah dan aslah.

²²Wawancara dengan Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang di Kampus UIN Malang, 28 November 2018.

Dari data di atas, terlihat jelas bahwa Muhammad Tawwaf (MT) memiliki latar belakang keilmuan dan akademik yang cukup beragam. Ia lulusan PTKI, S1 IAIN Suska Riau, dan PTU seperti UI serta Unpad sebelum melanjutkan studi doktor di UIN Suska Riau. Dari latar belakang akademik yang ada, ia meneliti tentang *Pengembangan Model Pengelolaan Perpustakaan Sekolah Madrasah pada Lembaga Pendidikan Islam di Kabupaten Indragiri Hilir*. Dari judul yang diangkat nampaknya Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI). Dari sisi objek penelitian yang diambil, ia nampaknya berupaya melakukan integrasi keilmuan antara kajian ilmu perpustakaan dengan lembaga pendidikan Islam. Dengan membidik lembaga pendidikan yang berkecenderungan Islam, ia akan membidik perspektif keislaman dalam menentukan faktor dan variabel penelitiannya.

Sementara Koncoro Hadi merupakan alumni S1 dan S2 Prodi umum di PTU yaitu S1 Kimia Universitas Riau dan S2 Kimia UGM, dan S3 PAI UIN Suska Riau Program Doktor Manajemen Pendidikan Islam, UIN Maliki-Malang Tahun 2014. Judul disertasinya adalah *Integrasi Islam dalam Pembelajaran Kimia pada Kurikulum Tingkat SMA/MA*. Dari segi judul, KH secara eksplisit menggunakan diksi integrasi dalam judul disertasinya, dan ini merupakan upaya yang nyata dalam mengusung konsep integrasi di UIN, meski secara langsung UIN Suska Riau belum dapat mengusung konsep integrasi tersebut dengan baik jika dibandingkan dengan UIN-UIN yang lain di Indonesia.

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas, Muhammad Syahrullah merupakan alumni S1 PTKI dan S2 Prodi umum di PTU. Meski demikian, dari data yang ada ia adalah lulusan Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Dari judul disertasinya yang berjudul *Konsep Akad dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Implikasinya di Peradilan Agama* juga telah berupaya melakukan dialog antara keilmuan Islam yaitu terkait dengan kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Meski program Pascasarjana UIN Pekanbaru, Riau telah mencanangkan konsep integrasi disertasi bagi mahasiswa non-agama sebagai merefleksikan visi dan karakter integrasi, akan tetapi dalam praktiknya Pascasarjana UIN Suska Riau belum terdapat disertasi yang ditulis oleh mahasiswa prodi non-agama. Hal ini disebabkan

UIN PKU yang masih memiliki jurusan-jurusan *Islamic studies* (Studi Islam). UIN Suska Riau tidak hanya menargetkan karya mahasiswa, melainkan juga dosen-dosen yang ada dikirim untuk studi ke luar negeri agar mereka melakukan upaya-upaya penelitian pada bidangnya masing-masing yang *non-Islamic studies* sehingga mereka mampu melakukan model integrasi dalam disertasinya dan ciri khas disertasi yang dilahirkan dosen-dosen yang dikirim seperti yang diinginkan, karena memang UIN Suska Riau belum memiliki prodi *non-Islamic studies* pada tingkat S3.²³

Jika mahasiswa dari Universitas umum melanjutkan studi ke Pascasarjana UIN Suska Riau, maka mereka wajib mengikuti pola dari Pascasarjana UIN Suska Riau yaitu pola *Islamic studies* dan mengintegrasikan keilmuan umum yang mereka miliki ke dalam *Islamic studies* dengan mengikuti model yang telah dibuat. Wacana dan rancangan untuk membuat prodi *non-Islamic studies* sudah ada akan tetapi belum terwujud.

Syarat-syarat penelitian disertasi yang diterima oleh UIN Suska Riau terhadap penelitian dengan kategori non-kajian Islam seperti Matematika, Biologi, Bahasa, dan lain-lain harus diintegrasikan dengan kajian *Islamic Studies*. Disertasi tersebut mengkonstruksi titik temu bidang kajiannya dengan implementasi integrasi keilmuan sebagaimana contoh model integrasi keilmuan dalam bidang pendidikan dan sistem pengajaran melalui eksperimen. Misalnya, bagaimana mengajarkan Kimia dengan mengintegrasikannya dengan ayat-ayat Alquran dan hadis. Disertasi di Pascasarjana UIN Suska Riau baru tersedia dalam bidang pendidikan dan hasilnya cukup bagus karena mereka menyatukan ilmu agama dan ilmu sains yang mana selama ini kedua ilmu ini terpisah dan terdiktomi.

Kerangka konseptual integrasi keilmuan yang digunakan dalam metodologi penelitian disertasi mereka seperti di bidang keilmuan Kimia dan Biologi yang kemudian dapat mereka integrasikan dengan metode yang integratif pada ayat-ayat Alquran seperti ayat dalam QS. Fussilat: 53 dan ayat lain yang relevan dengan topik kajian mereka.

Tiga karya disertasi di SPs. UIN Syahid Jakarta berikut ini merupakan produk integrasi yang

digaungkan oleh UIN Jakarta melalui program SPs.-nya, berikut data sementara yang ada.

Tabel 4:
Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

No.	Mahasiswa	Judul	Metodologi
1.	Teguh Slamet Wahyudi Pengkajian Islam, Konsentrasi Sains, SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017	Dimensi Kemanusiaan dan Ketuhanan dalam Matematika Al-Khawarizmi dan Matematika Modern.	Studi perbandingan, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara dimensi kemanusiaan dan ketuhanan antara matematika al-Khawarizmi dengan matematika modern. Selain itu, prinsip metode hermeneutika digunakan dalam menafsirkan data-data untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.
2.	Fatma Sylavana Dwi Harahap NIM. 3114 Pengkajian Islam, Konsentrasi Kebidanan dan Ilmu Kesehatan, SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017.	Reintegrasi Agama dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan di Padangsidempuan, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta)	Rumus Aljabar dengan: a. Sifat komutatif $a + b = b + a$, b. sifat asosiatif $(a+b) + c = a + (b+c)$, dan c. sifat distributif $a(b+c) = ab + ac$. "Hasil penelitian ini sesuai dengan konsep Ibn Sina tentang konsep sehat. Metode kualitatif melalui konsep reintegrasi agama dan kesehatan reproduksi didapatkan dari hasil wawancara mendalam melalui eksplorasi informasi dari akar rumput (<i>grass roots</i>) maupun para ahli dan pemangku jabatan (<i>stakeholder</i>).
3.	Harnas NIM. 31141200000006 Pengkajian Islam, Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi, SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.	Islam Rahmatan Li Al-Alamin (Studi tentang Pemikiran dan Kiprah Dakwah Muhammad Shamsi Ali di New York.	Pendekatan agama, historis, <i>leadership</i> , dan komunikasi, sedangkan metodenya menggunakan <i>grounded research</i> .

Teguh Slamet Wahyudi merupakan mahasiswa S3 Pengkajian Islam, Konsentrasi Sains, SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017. Dari data sementara yang ditemukan melalui wawancara, terungkap bahwa penulis adalah seorang guru Matematika di SMAN Depok. Ia alumni S1 PTU di Semarang dan S2 di PMIAI ICAS-Paramadina Jakarta dengan konsentrasi Filsafat dan *Islamic Studies*. Untuk menyelesaikan disertasi dan melanjutkan S3 di SPs. UIN Jakarta, ia mengikuti banyak kajian filsafat di berbagai lembaga termasuk di STFI Sadra Jakarta.

Judul disertasinya adalah *Dimensi Kemanusiaan dan Ketuhanan dalam Matematika Al-Khawarizmi dan Matematika Modern*. Metode penelitian yang digunakan adalah studi perbandingan, untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan antara dimensi kemanusiaan dan ketuhanan antara matematika al-Khawarizmi dengan matematika modern. Selain itu, prinsip

²³Wawancara dengan Direktur Sps. UIN Suska Riau, di Kampus UIN Suska Riau, 20 November 2018.

metode hermeneutika digunakan dalam menafsirkan data-data untuk mendapatkan kesimpulan penelitian.

Kemudian disertasi yang berjudul *Reintegrasi Agama dan Sains Bidang Kesehatan Reproduksi (Studi Kasus Kehamilan Tidak Diinginkan di Padangsidempuan, Tangerang Selatan, dan DKI Jakarta)* karya FSH juga cukup menegaskan adanya integrasi keilmuan, bahkan disertasi ini dipromotori oleh Azyumardi Azra sebagai salah satu pencetus konsep integrasi keilmuan di UIN. Dari data yang diperoleh, baik melalui wawancara maupun dokumen disertasi yang ada terungkap bahwa penulis adalah seorang bidan praktik pribadi di wilayah Bogor. Ia lulusan S1 Kebidanan di PTU di Jakarta. Ia melanjutkan S2 di SPs. UIN Jakarta. Artinya, ia sudah memiliki *trade* mengkaji keislaman sejak jenjang S2 sebelum melanjutkan S3 Pengkajian Islam di SPs. UIN Jakarta.

Tidak jauh berbeda dengan dua disertasi di atas, Hannas mahasiswa Pengkajian Islam, Konsentrasi Dakwah dan Komunikasi, SPs. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga menulis disertasi yang berjudul *Islam Rahmatan Li Al-Alamin (Studi tentang Pemikiran dan Kiprah Dakwah Muhammad Shamsi Ali di New York)*. Pendekatan yang digunakan meliputi: agama, historis, *leadership*, dan komunikasi, sedangkan metodenya menggunakan *grounded research*. Dari multi pendekatan yang digunakan jelas ada upaya integrasi keilmuan dalam disertasinya di bawah bimbingan Atho Mudzhar yang cukup konsen dengan integrasi keilmuan. Dari data sementara yang ditemukan melalui wawancara, terungkap bahwa penulis adalah seorang doktor teologi Kristen. Artinya, saat ia menjadi mahasiswa doktor di SPs. UIN Jakarta, ia sudah menjadi doktor. Ia seorang pastur yang aktif berdakwah pada komunitas agama yang dianutnya.

Dari data yang ada terlihat jelas mayoritas disertasi mahasiswa non-agama yang ada di UIN Jakarta telah menggunakan metodologi yang diusung oleh konsep integrasi keilmuan. Hal ini tidak terlepas dari peran pimpinan khusus promotor.

Berikut disertasi yang diklaim sebagai hasil integrasi keilmuan, ilmu agama, dan ilmu sains yang ada di UIN SGD Bandung.

Tabel 5:
Disertasi UIN SGD Bandung

No.	Mahasiswa	Judul Disertasi	Metodologi
1.	Andi Rosa NIM. 3.209.4.0002 Sekolah Pascasarjana, UIN SGD Bandung Tahun 2014	Re-Integrasi Keilmuan Sosial Holistik dalam Tafsir Tematik Kontemporer di Indonesia (Studi Terhadap Pemikiran dan Epistemologi Tafsir Al-Quran dalam Karya-karya Quraish Shihab	Pendekatan Analisis Isi dan Komparatif
2.	Ahmad Labudi NIM. 3.214.4.009 Sekolah Pascasarjana, UIN SGD Bandung Tahun 2014	Agama dan Dinamika Politik Lokal (Studi Primodialisme Agama pada Pilkada Kabupaten Bandung).	Integrasi agama dan politik dengan pendekatan socio-politik.
3.	Idrus Ruslan NIM. 3.209.4.007 Program Pascasarjana UIN SGD, Bandung Tahun 2013.	Pancasila Sebagai Landasan Bagi Terbentuknya Masyarakat Madani di Indonesia	Penelitian Kepustakaan

Dari tabel di atas, Andi Rosa lulusan Sekolah Pascasarjana, UIN SGD Bandung Tahun 2014 menulis disertasi dengan judul *Re-Integrasi Keilmuan Sosial Holistik dalam Tafsir Tematik Kontemporer di Indonesia (Studi Terhadap Pemikiran dan Epistemologi Tafsir Al-Quran dalam Karya-karya Quraish Shihab)*. Ia menggunakan analisis isi dan komparatif. Dari judul disertasi yang ada, ia secara jelas memilih diksi reintegrasi sebagai upaya mengejawantahkan konsep integrasi keilmuan yang ada di UIN. Tidak jauh berbeda dengan Andi Rosa, Ahmad Labudi lulusan UIN SGD Bandung Tahun 2014 juga menulis disertasi dengan judul *Agama dan Dinamika Politik Lokal (Studi Primodialisme Agama pada Pilkada Kabupaten Bandung)*. Secara jelas ia mengakomodir dua variabel penting yaitu agama dan politik sebagai upaya integrasi keilmuan. Tidak seperti AR dan AL, Idrus Ruslan lulusan UIN SGD Bandung tahun 2013, secara alami menulis disertasi dengan judul *Pancasila Sebagai Landasan Bagi Terbentuknya Masyarakat Madani di Indonesia*. Secara implisit ia membahas terkait Pancasila dan agama Islam sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia. Dalam hal ini nampaknya ia berupaya mendialogkan Pancasila dan Islam di Indonesia.

Dari data di atas, disertasi UIN SGD Bandung cukup menggambarkan paradigma integrasi keilmuan, bahkan dengan melihat pendekatan yang digunakan. Hal ini sesuai dengan visi integrasi keilmuan di UIN SGD Bandung yang memandang bahwa agama dan sains telah berkembang seiring dengan dinamika keilmuan dan pemikiran manusia. Demikian halnya ilmu

pengetahuan dan sains lahir bukan hanya dari penalaran secara mendalam terhadap objek-objek pengetahuan yang terdapat pada materi ciptaan Tuhan, tetapi yang lebih penting adalah Tuhan sendiri sebagai sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan itu sendiri. Perpaduan antara ayat *kauniyyah* dengan ayat *qauniyyah* akan melahirkan suatu paradigma keilmuan yang berpijak pada wahyu dan rasionalitas.

Sudah menjadi keniscayaan bagi sebuah institusi untuk secara kontinyu melakukan evaluasi program-programnya. Peran para pemangku kebijakan, mulai dari Rektor, Dekan, Kaprodi, hingga dosen sangat diperlukan dalam upaya evaluasi aktualisasi visi dan misi yang ada dengan praktik pelaksanaan di lapangan. Menyoal nalar integrasi disertasi mahasiswa non-agama di UIN di Indonesia yang secara terang-terangan menggagas konsep integrasi keilmuan, penting dilakukan evaluasi, perbaikan serta upaya-upaya yang konkret dalam memperbaiki kesalahan di lapangan yang tidak sedikit tidak sesuai dengan visi dan misi integrasi keilmuan. Masih banyak disertasi mahasiswa lulusan S1 dan S2 Prodi Non-Agama yang tidak merefleksikan integrasi tersebut di dalam kerangka metodologi penelitiannya.

Peran kritis UIN dalam evaluasi kebijakan konsep integrasi terhadap karya disertasi yang telah ada yaitu secara teknis diserahkan kepada pembimbing, Kajur, dan Sekjur. Kajur dan Sekjur harus mengevaluasi seminar hasil yang telah dipresentasikan pada seminar tertutup dan terbuka. Konsep inti Islam adalah hati atau *qalbu*. Hal ini berbeda dengan Barat yang berpendapat bahwa perilaku dikendalikan oleh akal, sedangkan menurut konsep Islam baik dan buruknya seseorang dikendalikan oleh hati manusia. Ilmu agama dan ilmu umum tidak dipisahkan, karena semua ilmu adalah sama.²⁴ Dari konsep inilah terintegrasi bahwa konsep ilmu adalah sama. Sehingga menghasilkan suatu visi misi dimana sistem pendidikan harus menggabungkan antara konsep perguruan tinggi dan pesantren agar bisa mengimplementasikan konsep integrasi tersebut.

Proses pencapaian konsensus dan kebijakan diawali dengan sebuah ide yang kemudian

disosialisasikan oleh pimpinan yang kemudian membentuk tim yang akan mensosialisasikan kepada para dosen yang kemudian akan bermuara pada proses penyusunan kurikulum pembelajaran. Distingsi konsep integrasi yang dimiliki UIN Malang dengan UIN lainnya di Indonesia adalah bahwa konsep UIN Malang digambarkan dengan pohon ilmu sedangkan UIN Jogja model konsepnya adalah jaring laba-laba. Meskipun memiliki tujuan yang sama akan tetapi model integrasinya berbeda. Gagasan dan konsep integrasi itu diimplementasikan dalam penulisan disertasi mahasiswa yang berlatar belakang non-agama dengan peran mata kuliah filsafat ilmu dijabarkan menjadi integrasi antara filsafat ilmu dan agama, kemudian paradigmanya dan kajian Alquran dan hadis tematik. Bentuk kontrol pihak pimpinan terhadap isi disertasi untuk melihat integrasi keilmuan yang dikembangkan adalah melalui Kaprodi dan Sekretaris Prodi yang secara kontinyu mengadakan evaluasi setiap akhir semester mengenai tulisan-tulisan disertasi dan hasil-hasil penelitian. Meski demikian, masih terdapat kesulitan yang dihadapi oleh pembimbing maupun pimpinan Pascasarjana dalam mengarahkan disertasi agar sesuai dengan integrasi keilmuan. Kesulitan tersebut salah satunya adalah kurangnya pemahaman para pembimbing yang berasal dari universitas umum mengenai ilmu-ilmu agama. Meskipun sudah dilakukan kolaborasi dengan pembimbing yang memiliki *background* keilmuan non-agama.

Menurut Direktur SPs. UIN Maliki Malang, ada lima mata kuliah yang menjaga integrasi di tingkat pasca sarjana S2 yaitu Hadis, Integrasi Islam dan Sains, Filsafat Ilmu, studi peradaban dan pendekatan studi Islam. Sedangkan pada tingkat S3 pascasarjana terdapat mata kuliah yang menjaga integrasi yaitu studi Alquran dan Hadis tematik dan studi Islam Interdisipliner. Kemudian yang menjadi persoalan adalah siapa yang bisa mengaktualisasikan dan mengejawantahkan itu dalam karya ilmiahnya tergantung dengan kemampuan masing-masing. Dalam kenyataannya ada yang bisa mengintegrasikan langsung ke dalam karya ilmiahnya. Contohnya, ketika harus mengeluarkan ayat Alquran, Hadis, dan Sejarah Islam, namun diberikan dispensasi kepada mereka yang tergolong sebagai pemula dalam mengintegrasikan aspek yang diwajibkan tersebut dalam perspektif Islam. Oleh karena itu,

²⁴Wawancara dengan Direktur Sps. UIN Maliki Malang, di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, tanggal 20 Oktober 2018.

dosen-dosen yang memiliki basis kajian ilmu umum akan dibekali dengan ilmu agama, begitu juga sebaliknya dosen-dosen yang memiliki basis ilmu agama dibekali dengan ilmu sains, sehingga dosen mata kuliah Sains dapat menghubungkan sains dengan Islam dan dosen mata kuliah Studi Islam dapat menghubungkan studi Islam dengan ilmu sains.

Peran kritis UIN Suska Riau dalam evaluasi kebijakan konsep integrasi terhadap karya disertasi yang telah ada yaitu dengan menyerahkan tugas evaluasi kepada jurusan sebagai penanggung jawab dengan arahan pimpinan. Evaluasi yang ada berupa kebijakan konsep-konsep integrasi yang diterapkan oleh mahasiswa dalam kerangka konseptual dan metodologi penelitian dalam disertasinya. Kebijakan-kebijakan tersebut tercantum dalam pedoman akademik dan masuk dalam sistem kurikulum. Implementasi detailnya perlu diteliti satu-persatu dan dilakukan secara kontinyu setiap semester ketika rapat dosen dan rapat program intern program Pascasarjana.

Terkait kebijakan integrasi di UIN Suska Riau, pelopor dan penggagas konsep integrasi keilmuan di UIN, misalnya, di UIN Syarif Hidayatullah adalah Azyumardi Azra, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adalah Amin Abdullah dengan lambang sarang laba-laba yang artinya integrasi dan terkoneksi. Kemudian untuk UIN Maulana Malik Ibrahim-Malang, sebagai pencetus integrasi keilmuan adalah Imam Suprayogo dengan lambang pohon ilmu. Berbeda dengan ketiga UIN sebelumnya, UIN Suska Riau menggambarkan integrasi keilmuan dengan lambang tiga spiral andromeda yang menggambarkan surat Fussilat ayat 53 yang menjelaskan tentang 3 pokok keilmuan yakni ilmu alam dan ilmu sosial humaniora dimana kedua ilmu tersebut tidak dapat berdiri sendiri dan belum lengkap tanpa adanya *tabayyun* yang berasal dari ilmu Alquran yang menghasilkan kajian keislaman (*Islamic studies*), sehingga ilmu Alam, Sosial Humaniora, dan *Islamic studies* dapat menyatu dalam satu titik tauhid. Jadi dalam istilah spiral andromeda ilmu digerakkan oleh tauhid dan berorientasi tauhid, maka tidak ada ilmu yang tidak membawa kepada keimanan kepada Allah. Agar setiap orang yang berilmu melahirkan kesadaran akan keberadaan Allah dan merasakan keberadaan Allah dan akan tunduk dengan kebesaran yang Allah miliki.

Berbeda dengan UIN Suska Riau, pencetus lambang UIN Alauddin Makassar adalah Azhar Arsyad dengan lambang pohon cemara, sedangkan UIN Bandung adalah Nanak Fatah Nasir sebagai penggagas integrasi keilmuan dengan lambang roda pedati yang berarti wahyu memandu ilmu. Distingsi konsep integrasi yang dimiliki oleh UIN Suska Riau dengan UIN-UIN lainnya yang memiliki visi dan misi integrasi keilmuan adalah pada dasarnya tidak ada, sebab sebenarnya substansinya sama namun pengungkapannya yang berbeda-beda dan beragam. Bahkan hal ini diperkuat oleh hasil dari konsensus *International Conference of Islamic and Education* tahun 1977 yaitu pendikotomian ilmu harus dihilangkan, mengintegrasikan semua ilmu dan harus menghilangkan sistem dualisme pendidikan.

Gagasan integrasi keilmuan itu diimplementasikan dalam penulisan disertasi mahasiswa yang berlatar belakang non-agama dengan kebijakan bahwa mereka dituntut untuk mengintegrasikan keahlian mereka di bidang Sains dengan kajian Islam (*Islamic Studies*) agar terjadi keseimbangan (*balancing*) dan keterkaitan (*connecting*) antara visi UIN dan latar belakang dari masing-masing dosen umum, sebab pada umumnya dosen-dosen yang masuk di Fakultas Tarbiyah UIN Suska adalah dosen-dosen yang memiliki latar belakang ilmu umum.

Bahkan untuk membekali mahasiswa S3 dalam menulis karya disertasi dengan karakter integrasi, UIN Suska Riau memberikan mata kuliah khusus atau pelatihan khusus. Mata kuliah khusus masuk ke dalam mata kuliah Filsafat Ilmu dan Metode Penelitian. Untuk mengontrol kualitas disertasi mahasiswa non-agama atau bahkan mahasiswa agama sekalipun dalam melihat integrasi keilmuan yang dikembangkan, dilakukan bimbingan dan pembinaan khusus disertasi pada mahasiswa yang berasal dari Prodi non-kajian Islam (*Islamic studies*) agar dapat mengintegrasikan keilmuannya dengan baik. Meski demikian, masih saja terdapat kesulitan yang dihadapi oleh pembimbing maupun pimpinan Pascasarjana dalam mengarahkan disertasi agar sesuai dengan integrasi keilmuan. Karena tidak semua memahami konsep-konsep integrasi pada awalnya, namun setelah mereka memepelajari dalam perkuliahan kemudian merasa tertarik dan tertantang untuk melakukan

integrasi tersebut karena menemukan hal-hal baru.

C. PENUTUP

Dari analisis dan interpretasi data yang ada, dapat disimpulkan bahwa pada disertasi mahasiswa berlatar belakang pendidikan S1 dan S2 non-Agama masing-masing UIN di Indonesia telah mereflesikan visi dan karakter integrasi keilmuan sesuai dengan kemampuan SDM yang dimiliki. Mayoritas kerangka konseptual yang digunakan dalam disertasi tersebut menggunakan metode multi pendekatan, mulai pendekatan fenomenologi hingga secara langsung dan glambang memilih diksi kata integrasi dalam judul disertasinya. Banyak peran kritis yang telah dilakukan oleh UIN di Indonesia dalam mengevaluasi kebijakan konsep integrasi terhadap karya disertasi yang telah ada mulai dengan diwajibkannya mahasiswa mengambil mata kuliah Filsafa Ilmu, mata kuliah Metode Penelitian Pendekatan Agama, pemilihan promotor khusus bagi mahasiswa non-agama sebagaimana yang dilakukan oleh Sps. UIN Jakarta, mewajibkan semua mahasiswa mengutip sumber Alquran dan hadis dalam kerangka teori, dan upaya-upaya lain

yang mampu mewujudkan konsep integrasi keilmuan pada disertasi mahasiswa yang berlatarbelakang pendidikan non-agama di UIN.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Kemenag melalui Puslitpen UIN Jakarta yang telah memberikan hibah penelitian pada tahun 2018, sehingga riset ini dapat terlaksana dengan baik. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam riset ini, terima kasih atas informasi dan data yang diberikan kepada kami sebagai peneliti.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi Pendekatan Integratif-Interkonektif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Abdullah, M Amin. *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum: Upaya Mempertemukan Epistemologi Islam dan Umum*. Yogyakarta: Suka Press, 2003.
- Abdullah, M. Amin. *Islamic Studies di Perguruan Tinggi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Abidin, Zainal. "Tradisi Integrasi Ilmu dalam Institusi Pendidikan Islam." *KHAZANAH*, Vol. XII, no. 01 (2014).
- Afwazi, Benny. "Membangun Integrasi Ilmu-Ilmu Sosial dan Hadis Nabi." *Jurnal Living Hadis*, Volume 1, no. 1, (2016): 101-128. <http://repository.uin-malang.ac.id/989/1/Integrasi%20Ilmu%20Sosial%20dan%20Hadis%20Nabi> (diakses 27 September 2017).
- Al-Attas, Naquib. *Islam The Concept of Religion and the Foundations of The Ethics and Morality*. Kuala Lumpur: ABIM, 1971.
- Aminuddin, Luthfi Hadi. "Integrasi Ilmu dan Agama: Studi Atas Paradigma Integratif - Interkonektif UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *KODIFIKASIA Jurnal Penelitian Keagamaan dan Sosial-Budaya*, Volume 4, no. 1 (2010).
- Anshori. *Integrasi Keilmuan Atas UIN Jakarta, UIN Yogyakarta dan UIN Malang*. (Yogyakarta: Disertasi Sekolah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2014).
- Azra, Azyumardi. *Studi-studi Agama di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dalam Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos, 1999.
- Erricker, Clive, "Pendekatan Fenomenologis", dalam Peter Conolly (ed.), *Aneka Pendekatan Studi Agama*. Yogyakarta: LKis, 2002.
- Golshani, Mehdi. *The Holy Quran and the Science of Nature, Filsafat Sains Menurut al-Quran*. Bandung: Mizan, 1988.
- Haight, John F. "Perjumpaan Sains dan Agama: Dari Konflik ke Dialog," dalam *Science and Religion: From Conflict to Conversation*, terj. Fransiskus Borgias. Bandung: Mizan, 2004.
- Hidayati, Weni. *Dosen UMS Teliti Konsep Integrasi Keilmuan Tiga UIN (Jakarta, Yogyakarta dan Malang)*. <http://uin-suka.ac.id/page/berita/detail/942/dosen-ums-teliti-konsep-integrasi-keilmuan-tiga-uin-jakarta-yogyakarta-dan-malang> (diakses 27 September 2017).
- Kartenegara, Mulyadi, "Membangun Kerangka Ilmu Perspektif Filosofis" dalam Komaruddin Hidayat dan Hendro Prasetyo (ed), *Problem dan Prospek IAIN*. Jakarta: Depag, 2000.
- Lukman, Fadhli. "Integrasi-Interkoneksi dalam Studi Hadis Disertasi di UIN Sunan Kalijaga." *RELIGIA*, Vol. 19, no. 2 (2016). <http://e-journal.stain-pekalongan.ac.id/index.php/Religia> (diakses 29 September 2017).
- Nasution, Harun. *Akal dan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Nata, Abuddin. *Manajemen Pendidikan Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Nurlena, Rifai, Fauzan Fauzan, and Bahrissalim. "Integrasi Keilmuan dalam Pengembangan Kurikulum di UIN se-Indonesia: Evaluasi Penerapan Integrasi Keilmuan UIN dalam Kurikulum dan Proses Pembelajaran." *TARBIYA: Journal of Education in Muslim Society* 1, no. 1 (2014): 13-34.
- Syam, M. Nur. "Integrasi dalam Keilmuan." <http://nursyam.uinsby.ac.id/?p=1968> (diakses 27 September 2017).
- Yusuf, Wahyudi Irawan, "Mencari Model Integrasi Sains dan Agama: Studi Perbandingan Pemikiran John F. Haught dan Mehdi Golshani dan Relevansinya dengan Gagasan Integrasi UIN Sunan Kalijaga menurut Amin Abdullah." (Yogyakarta: Tesis Universitas Gadjah Mada, 2006. <http://etd.repository.ugm.ac.id/indonesia/1339/1/13391339> (diakses 27 September 2017).

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF
EDUCATION AND TRAINING INFORMATION
SYSTEMS AT RELIGIOUS EDUCATION AND TRAINING
CENTER OF DENPASAR

MUHIMATUL KIBTIYAH*)

ABSTRACT

The study was conducted in line with the occurrence of complaints from the Simdiklat operator at the Religious Training Center related to the slow login process, frequent disruptions when operating the system, rebooting occasion, and some menu choices were still overlapping so that were considered less effective by user. This study aims to measure the effectiveness of the application of the education information system at Denpasar Religious Education Centre. Population of this study was Simdiklat application users, with total population of 64 employees including 20 Widyaiswara/tutors and 44 employees. The sample consisted of 31 employees who actively engage in using the application based on purposive sampling technique. Numbers of research samples were 31 respondents. Partial Least Square (PLS) was used to analyse.

KATA KUNCI: *System quality, information quality, top management support, expertise, system user satisfaction*

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI
KEDIKLATAN DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN
DENPASAR

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya keluhan dari admin Simdiklat di Balai Diklat Keagamaan terkait lambatnya proses *login*, seringnya terjadi gangguan saat mengoperasikan sistem, sistem tiba-tiba kembali ke awal saat sedang digunakan, dan beberapa pilihan menu masih saling tumpang tindih sehingga dinilai kurang efektif oleh pemakai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang efektivitas penerapan sistem informasi kediklatan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Simdiklat yaitu semua pegawai Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang berjumlah 64 orang. Widyaiswara berjumlah 20 orang, pegawai berjumlah 44 orang. Adapun sampel berjumlah 31 orang pegawai, karena widyaiswara dan pegawai yang tidak langsung terlibat dalam kepanitiaan tidak dipilih sebagai sampel. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian adalah 31 responden. Analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square*, (PLS).

KATA KUNCI: Kualitas sistem, kualitas informasi, dukungan manajemen puncak, kegunaan, kepuasan pengguna sistem

*) Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Jl. Raya Denpasar Gilimanuk KM. 14 Mengwitani Mengwi Badung. Email: muhimatul.kibtiyah@gmail.com

** Naskah diterima September, 2019, direvisi Oktober 2019 dan disetujui untuk diterbitkan November 2019

A. PENDAHULUAN

Pelayanan publik merupakan kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan publik. Balai Diklat Keagamaan Denpasar merupakan salah satu dari 14 Balai Diklat Keagamaan se-Indonesia yang telah menerapkan Sistem Informasi Kediklatan (Simdiklat) dalam pelaksanaan Diklat. Simdiklat adalah aplikasi yang mengintegrasikan proses perencanaan, penyelenggaraan, pengevaluasian, dan pendokumentasian kegiatan pendidikan dan pelatihan berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Manfaat simdiklat dapat meningkatkan kemudahan, dan kualitas proses kediklatan, pendeteksian ASN yang belum atau pernah mengikuti kegiatan kediklatan serta peningkatan kualitas pelayanan kediklatan dapat dicapai dengan penggunaan sistem informasi. Penggunaan informasi teknologi tersebut diamanatkan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Agama (PMA).¹

Sejak tahun 2011, aplikasi Simdiklat belum pernah dilakukan penelitian terhadap efektivitas sistem sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan informasi yang dibutuhkan untuk menunjang keberlangsungan informasi dan menunjang keberlangsungan organisasi. Terkait dengan efektivitas Simdiklat, beberapa waktu terakhir, sering terjadi keluhan dari admin Simdiklat di seluruh Indonesia terkait lambatnya proses *login*, seringnya terjadi gangguan saat mengoperasikan sistem, sistem tiba-tiba kembali ke awal saat sedang digunakan, dan beberapa pilihan menu masih saling tumpang tindih sehingga dinilai kurang efektif oleh pemakai.

Pengukuran efektivitas Sistem Informasi (SI) dilakukan agar tidak terjadi *productivity paradox* yaitu investasi yang mahal di bidang SI tetapi menghasilkan *return* yang rendah.² Efektivitas SI tersebut adalah sejauh mana SI yang dimaksud diimplementasikan benar-benar memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi.³ Adapun pengukuran kesuksesan adalah sesuai dimensi (1) kualitas sistem digunakan untuk

mengukur kualitas sistem teknologi informasi sendiri, (2) kualitas informasi digunakan untuk mengukur kualitas keluaran dari sistem informasi, (3) penggunaan adalah penggunaan keluaran dari suatu sistem informasi oleh penerima, (4) kepuasan pengguna adalah respon pemakai terhadap penggunaan keluaran sistem informasi, (5) dampak individual merupakan efek dari informasi terhadap perilaku pemakai, (6) dampak organisasi merupakan dampak dari informasi terhadap kinerja organisasi. Penelitian ini mengadopsi penelitian Putrawan (2015) yang meneliti efektivitas sistem informasi manajemen daerah di Kabupaten Gianyar.⁴

Perumusan Masalah

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kegunaan Simdiklat?
- 2) Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kegunaan Simdiklat?
- 3) Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kegunaan Simdiklat?
- 4) Apakah kualitas sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Simdiklat?
- 5) Apakah kualitas informasi berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Simdiklat?
- 6) Apakah dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Simdiklat?
- 7) Apakah kegunaan Simdiklat berpengaruh terhadap kepuasan pengguna Simdiklat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Pengaruh kualitas sistem terhadap kegunaan Simdiklat.
- 2) Pengaruh kualitas informasi terhadap kegunaan Simdiklat.
- 3) Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kegunaan Simdiklat.
- 4) Pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna Simdiklat.
- 5) Pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna Simdiklat.
- 6) Pengaruh dukungan manajemen puncak

¹ Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016.

² V. Venkatesh and F.D. Davis. "Theoretical extension of the technology acceptance model: four longitudinal field studie". *Management Science* 46, (2) (2000) : 186-204.

³ S. Ozkan, M. Cakir, S. Bilgen. "A Maturity Based Qualitative Information Systems Effectiveness Evaluation of a Public Organization in Turkey". *Journal of Cases on Information Technology* 10, (3) (2008): 58-71.

⁴ N.A. Putrawan, *Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Gianyar* (Denpasar: Tesis Universitas Udayana, 2017).

- terhadap kepuasan pengguna Simdiklat.
- 7) Pengaruh kegunaan Simdiklat terhadap kepuasan pengguna Simdiklat.

Kajian Literatur

Kajian Teori

Theory of Reasoned Action (TRA)

Teori yang banyak digunakan di penelitian-penelitian sistem informasi mengenai perilaku individual ini adalah teori tindakan beralasan (*theory of reasoned action* atau TRA) yang dikembangkan oleh Icek Ajzen dan Martin Fishbein (1975).⁵ Teori tindakan beralasan menjadi dasar teori bahwa individu-individu akan menggunakan komputer jika mereka merasa menggunakan komputer tersebut akan mendapatkan manfaat (*outcomes*) yang positif.

Social Cognitive Theory (SCT)

Teori kognitif sosial (*social cognitive theory* atau SCT) merupakan teori tentang perilaku individual berbasis pada premis bahwa pengaruh lingkungan sosial, kognitif, dan faktor-faktor personal lainnya saling memengaruhi. Pengaruh lingkungan sosial berupa dorongan penggunaan komputer oleh orang lain. Dorongan orang lain bisa berupa dorongan individual maupun dukungan organisasional dalam rangka penggunaan komputer. Dukungan organisasional diharapkan memengaruhi sikap atau perilaku individual di dalam organisasi tersebut.⁶

Technology Acceptance Model (TAM)

Model penerimaan teknologi (*technology acceptance model* atau TAM) yang dikembangkan Davis⁷ sebenarnya diadopsi dari *the theory of reasoned action* (TRA), yaitu teori tindakan beralasan yang dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen tahun 1980 dengan satu premis bahwa reaksi dan persepsi seseorang terhadap sesuatu hal, akan menentukan sikap dan perilaku orang tersebut.⁸

Teori Sistem

Teori sistem memungkinkan kita menjelaskan

perilaku organisasi, baik internal maupun eksternal.⁹ Teori ini menjelaskan penyebab anggota dalam suatu organisasi mau melaksanakan tugas mereka sendiri maupun tugas secara berkelompok, secara internal. Adapun secara eksternal, teori ini membandingkan aktivitas dalam organisasi pada aktivitas di luar organisasi.

Kualitas Sistem Simdiklat

Kualitas sistem merupakan karakteristik dari informasi yang melekat mengenai sistem itu sendiri.¹⁰ Kualitas sistem berarti kualitas dari kombinasi *hardware* dan *software* dalam sistem informasi.¹¹ Kualitas sistem digunakan untuk mengukur kualitas sistem teknologi informasinya sendiri.¹² Kualitas sistem dalam penelitian ini didefinisikan sebagai kualitas sistem aplikasi Simdiklat. Fokusnya adalah kepuasan pengguna akhir (*end user satisfaction*) dari sistem tersebut, yang merujuk pada seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, kebijakan, dan prosedur dari sistem informasi dapat menyediakan informasi bagi kebutuhan pengguna.¹³

Kualitas Informasi Simdiklat

Kualitas informasi merujuk pada *output* dari sistem informasi, menyangkut nilai, manfaat, relevansi, dan urgensi dari informasi yang dihasilkan.¹⁴ Kualitas informasi adalah tingkat relevan (*relevant*), ketepatan waktu (*timely*), aman, dan disajikan dengan rancangan informasi yang baik dalam sebuah *website*.¹⁵ Kualitas Informasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini merupakan persepsi pengguna mengenai kualitas informasi yang dihasilkan oleh aplikasi Simdiklat.

Dukungan Manajemen Puncak

Keterlibatan manajemen puncak dalam kesuksesan implementasi SI merupakan hal yang sangat penting. Keterlibatan tersebut diharapkan

⁹ Ivencevich, Donnelly, Gibson, *Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses* (Bina Rupa Aksara: Jakarta, 1996), 41.

¹⁰ W.H. DeLone and E.R. McLean. "Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable". *Inf. Syst. Res.* 3 (4) (1992): 60-95.

¹¹ DeLone, W. H., and McLean, E. R., Op. Cit.

¹² Hartono. Op. Cit., 12.

¹³ DeLone, W. H., and McLean, E. R., Op. Cit.

¹⁴ L.F. Pitt, R.T. Watson. "Measuring Information Systems Service Quality: Concerns for a Complete Canvas". *MIS Quarterly*. 21(2) (1997): 209-221.

¹⁵ Liu Chang and Kirk P. Arnet. "Exploring the Factor Associated with Web site Success In the Context of Electronic Commerce". *Information and Management* 38 (2000): 22-23.

⁵ I. Ajzen and M. Fishbein. "Attitude Behavior Relation : "A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research." *Psychological Bulletin* Vol. 84, no. 5 (1977) : 888-918.

⁶ A. Bandura. "Social Cognitive Theory, An Agentic Perspective". *Asian Journal of Social Psychology*, 2 (1999): 21-41.

⁷ Davis, F. D. "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology". *MIS Quarterly*. 13 (3) (1989) : 319-340.

⁸ Hartono Jogiyanto, *Metodologi Penelitian Bisnis* (Yogyakarta: BPFEE, 2004), 111.

akan memengaruhi kepuasan pengguna SI. Penelitian Sahusilawane menyatakan bahwa dukungan manajemen memengaruhi kepuasan pengguna SI.¹⁶ Demikian juga penelitian yang dilakukan Simatupang dan Akib.¹⁷

Kegunaan Simdiklat

Penerimaan teknologi oleh pengguna ditentukan oleh dua tipe motivasi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik timbul karena adanya ekspektasi yang dirasakan oleh individu itu sendiri dari hasil berinteraksi dengan sebuah aplikasi sistem teknologi informasi. Sedangkan motivasi ekstrinsik muncul karena adanya ekspektasi atas penggunaan aplikasi sistem teknologi informasi tertentu yang diterima dari luar yaitu penghargaan karena kinerjanya meningkat.

Penelitian yang Relevan

Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian terdahulu. Pertama, yang dilakukan Putrawa.¹⁸ Hasil yang didapatkan adalah kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan aplikasi SIMDA, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kegunaan aplikasi SIMDA, dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kegunaan aplikasi SIMDA, kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna aplikasi SIMDA, kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna aplikasi SIMDA, dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi SIMDA, dan kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Putrawan adalah bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar, sehingga peneliti tertarik mengetahui tingkat efektivitas penggunaan sistem tersebut. Kedua, penelitian efektifitas penerapan Sistem Informasi Akademik berbasis Komputer pada UKIT oleh Palelleng (2013).¹⁹

B. METODE PENELITIAN

Sampel, Data, Tempat, dan Waktu

Jenis data yang digunakan adalah data

kuantitatif dari sumber primer yaitu hasil tanggapan kuesioner dari responden dan data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lain atau data penelitian terdahulu, yang terkait dengan aplikasi Simdiklat. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Simdiklat yaitu semua pegawai Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang berjumlah 64 orang. Widyaiswara berjumlah 20 orang, pegawai berjumlah 44 orang. Adapun sampel berjumlah 31 orang pegawai, karena widyaiswara dan pegawai yang tidak langsung terlibat dalam kepanitiaan tidak dipilih sebagai sampel. Metode *sampling* yang digunakan adalah *non probability sampling*. Adapun teknik penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.

Identifikasi Variabel

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Variabel manifes

Variabel manifes adalah indikator-indikator variabel yang nilainya dapat dilihat langsung dari jawaban responden pada kuesioner.

2) Variabel laten

Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat diukur langsung tetapi diukur melalui suatu dimensi atau indikator dari masing-masing variabel. Variabel laten dibagi menjadi dua, yaitu eksogenous dan endogenous.

a) Variabel laten eksogenous adalah variabel penyebab atau variabel yang mempengaruhi variabel lain dan tidak dipengaruhi oleh variabel lain dalam model, dengan tanda anak panah menuju ke variabel lainnya (variabel laten endogenous). Adapun variabel eksogenous dalam penelitian ini adalah kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan manajemen puncak.

b) Variabel laten endogenous adalah variabel yang dipengaruhi variabel lain dalam model. Variabel endogenous adalah variabel dengan tanda menerima anak panah dari variabel lainnya. Adapun variabel endogen dalam penelitian ini adalah kegunaan dan kepuasan pengguna

Pengujian Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian (kuesioner) digunakan untuk mengumpulkan data yang merupakan penggambaran variabel yang akan diteliti dan berfungsi sebagai pembuktian hipotesis. Pengujian validitas instrumen menggunakan nilai

¹⁶ W. Sahusilawane. "Pengaruh Partisipasi Pemakai, dan Dukungan Atasan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Pemerintah". *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol.10, no. 1 (2014): 37-43.

¹⁷P. Simatupang dan H. Akib. "Potret Efektivitas Organisasi Publik." *Review Hasil Penelitian Manajemen Usahawan Indonesia* 36 (1)(2007): 35-41.

loading factor dan *cross loadings* masing-masing blok indikator. Instrumen dikatakan valid jika nilai *loading factor* > 0,5 dan setiap blok indikator untuk setiap variabel laten yang diukur memiliki nilai *cross loadings* yang lebih tinggi dibandingkan dengan indikator untuk variabel laten lainnya.²⁰ Adapun Teknik statistik yang digunakan untuk menguji reliabilitas dalam penelitian ini adalah uji *Cronbach's alpha*. Pengujian reliabilitas instrumen dalam penelitian ini menggunakan formula koefisien *cronbach's alpha* dan *composite reliability*. Instrumen dikatakan reliabel jika memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* > 0,6.²¹

Hipotesis

Berdasarkan penelitian terdahulu, hipotesis penelitian ini sebagai berikut.

H₁: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kegunaan

H₂: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kegunaan

H₃: Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kegunaan

H₄: Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna

H₅: Kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna

H₆: Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna

H₇: Kegunaan berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui survei kuesioner. Item-item pernyataan dan pertanyaan dalam penelitian ini menggunakan dua skala yaitu skala *Likert* dan skala *semantic differential*. Kuesioner untuk variable dukungan manajemen puncak dan kegunaan menggunakan skala *likert*. Pengukuran dengan skala *likert* menghasilkan data interval.²² Kuesioner untuk variabel kualitas sistem, kualitas informasi, dan kepuasan pengguna menggunakan skala *semantic differential*. Data yang diperoleh adalah data

interval.²³

Teknik Analisa Data

Selanjutnya data primer yang telah dikumpulkan dianalisis dengan pemodelan persamaan struktural (*Structural Equation Modeling*, disingkat SEM) berbasis komponen atau varian (*component based*) yang populer dengan sebutan *Partial Least Square* (PLS), dengan bantuan program Smart PLS 3.2.6 pada tingkat signifikansi 5 persen. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Partial Least Square* (PLS) karena PLS dapat digunakan pada data ukuran sampel kecil.

Evaluasi model PLS dilakukan dengan mengevaluasi model pengukuran (*measurement model*) atau sering disebut *outer model* dan model struktural (*structural model*) atau sering disebut *inner model*. Model pengukuran menunjukkan bagaimana variabel manifes atau *observed* variabel merepresentasikan variabel laten untuk diukur. Sedangkan model struktural menunjukkan kekuatan estimasi antar variabel laten atau konstruk.

Langkah-langkah analisis data dan pemodelan persamaan struktural dengan menggunakan SmartPLS, adalah (1) merancang model struktural (*inner model*), *inner model* atau model struktural, (2) merancang model pengukuran (*outer model*), (3) mengkonstruksi diagram jalur

1) Konversi diagram jalur ke sistem persamaan

Diagram jalur analisis efektivitas yang sudah disusun selanjutnya dikonversi ke dalam sistem persamaan yaitu:

a) Model persamaan dasar dari *inner model* dapat ditulis sebagai berikut:

$$\zeta_1 = \hat{1}\hat{1} + \hat{2}\hat{2} + \hat{3}\hat{3} + e_1$$

$$\zeta_2 = \hat{1}\hat{\zeta}_1 + \hat{4}\hat{1} + \hat{5}\hat{1} + \hat{6}\hat{1} + e_2$$

Keterangan:

ζ_1 = Variabel endogen Kegunaan (K)

ζ_2 = Variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

1 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Kualitas sistem (KS) terhadap variabel endogen Kegunaan (K)

2 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Kualitas informasi (KI)

terhadap variabel endogen Kegunaan (K)

¹⁸ Putrawan, Op Cit.

¹⁹ S. Palelleng. "Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akademik Berbasis Komputer pada Universitas Kristen Indonesia Traja". *Jurnal KIP* Vol 2, (2013): 135-254.

²⁰ Ghozali Op.Cit.

²¹ Ghozali Op.Cit.

²² D.R. Cooperand S.C. Pamela, *Business Research Methods* (Jakarta: Erlangga, Edisi Kelima, 2014), 46.

²³ Sugiyono. Op.Cit., 138.

3 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Dukungan manajemen puncak (DMP) terhadap variabel endogen Kegunaan (K)

4 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Kualitas sistem (KS) terhadap variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

5 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Kualitas informasi (KI) terhadap variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

6 = Koefisien pengaruh variabel eksogen Dukungan manajemen puncak (DMP) terhadap variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

1 = Koefisien pengaruh variabel endogen Kegunaan (K) terhadap variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

e1 = Tingkat kesalahan (*inner residual error*)
e2 = Tingkat kesalahan (*inner residual error*)

b) Model persamaan dasar *outer model* dapat ditulis sebagai berikut:

(1) Variabel eksogen Kualitas sistem (KS)

$X_{11} = \beta_{11}KS + \alpha_1$, $X_{12} = \beta_{12}KS + \alpha_2$, $X_{13} = \beta_{13}KS + \alpha_3$, $X_{14} = \beta_{14}KS + \alpha_4$, $X_{15} = \beta_{15}KS + \alpha_5$, $X_{24} = \beta_{24}KS + \alpha_{24}$

(2) Variabel eksogen Kualitas informasi (KI)

$X_{21} = \beta_{21}KI + \alpha_{25}$, $X_{22} = \beta_{22}KI + \alpha_{26}$, $X_{23} = \beta_{23}KI + \alpha_{27}$, $X_{24} = \beta_{24}KI + \alpha_{28}$, $X_{220} = \beta_{244}KI + \alpha_{44}$

(3) Variabel eksogen Dukungan manajemen puncak (DMP)

$X_{31} = \beta_{45}DMP + \alpha_{45}$, $X_{32} = \beta_{46}DMP + \alpha_{46}$, $X_{33} = \beta_{47}DMP + \alpha_{47}$, $X_{34} = \beta_{48}DMP + \alpha_{48}$, $X_{36} = \beta_{49}DMP + \alpha_{49}$

(4) Variabel endogen Kegunaan (K)

$Y_{11} = \beta_{50}K + \alpha_{50}$, $Y_{12} = \beta_{51}K + \alpha_{51}$, $Y_{13} = \beta_{52}K + \alpha_{52}$, $Y_{14} = \beta_{53}K + \alpha_{53}$, $Y_{15} = \beta_{54}K + \alpha_{54}$, $Y_{16} = \beta_{55}K + \alpha_{55}$

(5) Variabel endogen Kepuasan pengguna (KP)

$Y_{21} = \beta_{56}KP + \alpha_{56}$ $Y_{24} = \beta_{59}KP + \alpha_{59}$

2) Estimasi: *weight*, koefisien jalur, dan *loading*

Metode pendugaan parameter (*estimasi*) di dalam PLS adalah metode kuadrat terkecil. Proses perhitungan dilakukan dengan cara *iterasi*. Pendugaan parameter dalam PLS meliputi 3 hal yaitu (1) *weight estimate*, (2) *part estimate* (estimasi jalur), (3) *means* dan lokasi parameter (nilai konstanta regresi, intersep).

3) Evaluasi *goodness of fit* model PLS

Evaluasi *goodness of fit* model PLS dilakukan dengan mengevaluasi *outer model* dan *inner model*. Ada tiga kriteria untuk menilai model pengukuran yaitu: *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *composite reliability*.

Inner model. Pada tahap ini dilakukan pelaporan hasil model struktural dengan melihat signifikansi dari semua *path* estimasi. Kekuatan prediksi model struktural diukur dengan menggunakan (1) Nilai *R-Squares* variabel endogen yang merupakan uji *goodness-fit model*. Nilai *R-square* sebesar 0,67 (kuat), 0,33 (moderat), dan 0,19 (lemah). (2) *Q square* (*Q*) *Predictive relevance* untuk model struktural, mengukur seberapa baik nilai observasi dihasilkan oleh model dan juga estimasi parameterinya.²⁴ Perhitungan *Q square* dilakukan dengan rumus yang dikembangkan oleh Stone dan Geiser dalam penelitian Jaya dan Sumertajaya.²⁵

$$Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_i^2)$$

Besaran Q^2 memiliki nilai dengan rentang 0 dan 1, apabila nilai $Q^2 = 0$ menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* dan jika nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model kurang memiliki *predictive relevance*. Menurut Stone dan Geiser dalam Jaya dan Sumertajaya nilai $Q^2 = 0,02$ (kecil), 0,15 (sedang) dan 0,35 (besar).

4) Pengujian hipotesis (*resampling bootstrapping*)

Hasil *pengujian* hipotesis dapat dilihat pada *pengujian inner model* yaitu (1) *T-statistic/p-value*, Apabila koefisien *T-statistic* menunjukkan koefisien yang lebih besar dari *t* tabel (1,64) atau nilai *p-value* < 0,05, hasil ini menggambarkan variabel tersebut signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna pada variabel laten terhadap variabel laten lainnya. (2) *Path Coefficients*. Nilai *path coefficients* menunjukkan koefisien hubungan antara variabel laten dengan variabel laten lainnya. Besarnya pengaruh total variabel laten terhadap variabel laten lainnya (*total effect*) diperoleh melalui hasil tambah antara pengaruh langsung (*direct effect*) dengan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) yang dimiliki.

²⁴ W.W. Chin. "The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modelling in Marcoulides. G.A. (ed) Modern Methods for Business Research, Mahwah, NJ, Lawrence Erlbaum Associated". 101 (1) (1998) : 295-336.

²⁵ Jaya dan Sumertajaya. Op.Cit.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN SIMDIKLAT

Aplikasi Simdiklat diperlakukan penuh pada 19 Oktober 2016.²⁶ Aplikasi Simdiklat digunakan untuk membantu mempermudah pelaksanaan Diklat. Responden penelitian ini adalah pegawai pada Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Semua pegawai menjadi responden pada penelitian ini karena semua pegawai terlibat dalam penggunaan aplikasi simdiklat sebagai panitia. Sehingga jumlah total responden adalah sebanyak 33 orang. Jumlah kuesioner yang tidak kembali adalah 2 bendel kuesioner, sehingga data yang diolah adalah 31 bendel kuesioner.

Pengujian Instrumen

Uji Validitas

Pengujian dilakukan sebanyak sepuluh kali dengan masing-masing langkah mengeluarkan variabel yang mempunyai nilai *outer loading*-nya $< 0,7$. Sampai pada tahapan ke sepuluh dinyatakan semua indikator telah valid secara *convergent validity*. Ketika semua nilai VIF semua indikator menunjukkan nilai < 10 , maka sudah tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam level outer model.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas *Pilot Test* memperlihatkan bahwa seluruh konstruk memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* $> 0,7$ sehingga seluruh indikator konstruk dalam kuesioner dapat dikatakan reliabel. Adapun nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* berturut-turut untuk masing-masing konstruk adalah: Kualitas Sistem/KS (X1) 0.906 dan 0.926, Kualitas Informasi/KI (X2) 0.939 dan 0.949, Dukungan Manajemen Puncak/DMP (X3) 0.827 dan 0.896, Kegunaan/K (Y1) 0.934 dan 0.948, Kepuasan Pengguna/KP (Y2) 0.958 dan 0.970.

Hasil Penelitian

Evaluasi Model

Pengujian model pengukuran digunakan untuk validasi model penelitian yang dibangun. Dua parameter utama yang dibangun adalah pengujian validitas konstruk (validitas konvergen dan validitas diskriminan) dan pengujian reliabilitas konstruk.

- Uji Validitas (Validitas konvergen dan diskriminan)

Validitas konstruk terdiri atas validitas konvergen dan validitas diskriminan.

(1) Validitas konvergen. Validitas konvergen sebuah konstruk dengan indikator reflektif dievaluasi dengan Average Variance Atracted (AVE). Nilai AVE 0.5 atau lebih yang berarti konstruk dapat menjelaskan 50% lebih varians itemnya. Nilai average Variance Extracted (AVE) > 0.50 . Nilai AVE X1 adalah 0.643, nilai AVE X2 adalah 0.698, nilai AVE X3 adalah 0.742, nilai AVE Y1 adalah 0.755, nilai AVE Y2 adalah 0.889. Dengan demikian, syarat validitas konvergen telah terpenuhi.

(2) Validitas diskriminan. Untuk mengetahui Validitas diskriminan adalah dengan melihat nilai *cross loading*. Apabila nilai *loading* dari masing-masing item terdapat konstraknya lebih besar dari nilai loadingnya. Nilai konstruk yang diharapkan adalah lebih besar dari 0.7.²⁷

Konstruk X1 semua nilai loading semua indikatornya lebih besar daripada semua *crossloading*nya. X1₁₁ mempunyai nilai loading 0.746, dimana hal itu adalah lebih besar dari pada nilai cross loading ke konstruk lain yaitu sebesar 0.643 ke X₂, 0.347 ke X₃, 0.360 ke Y₁ dan 0.536 ke Y₂. Begitu juga dengan item lainnya.

- Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menunjukkan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Nilai yang dianggap reliabel harus di atas 0.70. Alat yang digunakan untuk menilai adalah *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Nilai *composite reliability* 0.6–0.7 dianggap memiliki reliabilitas yang baik. Adapun nilai Cronbach alpha yang diharapkan adalah di atas 0.7. Nilai cronbach alpha adalah > 0.7 , hal ini menerangkan bahwa semua konstruk reliabel. Uji yang dilakukan untuk meyakinkan bahwa tidak ada masalah dalam pengukuran adalah analisis *undimensionalitas* model.

Goodness of Fit Models

Goodness of fit adalah ukuran yang menunjukkan prediksi model keseluruhan atau ukuran yang menunjukkan seberapa besar model secara keseluruhan mampu menjelaskan *variance*

²⁶ PMA. Op. Cit.

²⁷ Ghozali Op.Cit.

dari data. Koefisien determinasi (R^2) merupakan cara untuk menilai seberapa besar konstruk endogen dapat dijelaskan oleh konstruk eksogen. Nilai koefisien determinasi (R^2) diharapkan antara 0 dan 1. Nilai R^2 variabel kegunaan sebesar 0,554, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan 55,4 % varian kegunaan, sisanya 44,6 % dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam model. Nilai R^2 variabel kepuasan pengguna sebesar 0,424, hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel yang dimasukkan dalam model dapat menjelaskan 42,4% varian kepuasan pengguna, sisanya 57,6 % dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti dalam model.

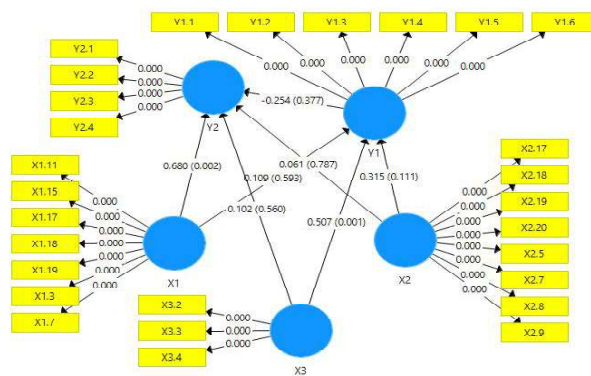
Relevansi Prediksi atau Q^2 (Q^2) digunakan untuk menilai *predictive relevance*. Nilai $Q^2 > 0$ menunjukkan bahwa model mempunyai *predictive relevance* yang akurat terhadap konstruk tertentu. Sedangkan nilai $Q^2 < 0$ menunjukkan bahwa model kurang mempunyai *predictive relevance*. Nilai Q^2 *predictive relevance* dihitung dengan $Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2)$ sehingga menghasilkan nilai 0,365. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki *predictive relevance* yang baik ($Q^2 > 0$). Nilai Q^2 *predictive relevance* sebesar 36,5% mengindikasikan bahwa keragaman data dapat menjelaskan model sebesar 36,5% atau dengan kata lain informasi dalam data sebesar 36,5 % dapat dijelaskan oleh model tersebut, sedangkan sisanya 63,5 % dijelaskan oleh variabel lain (yang belum termasuk dalam model ini) dan *error*.

Pengujian Hipotesis

Untuk menguji Hipotesis dan melihat signifikansi dan kekuatan hubungan antar konstruk. Nilai *path coefficient* berkisar antara -1 hingga +1. Semakin mendekati nilai +1, hubungan kedua konstruk semakin kuat. Hubungan yang mendekati -1 mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersifat negatif.²⁸

Hasil pengujian hipotesis untuk model struktural tampak pada Tabel 1. Untuk menilai signifikansi model prediksi dalam pengujian struktur model dapat dilihat dari nilai P values antara variabel eksogen ke variabel endogen yang disajikan pada Gambar 1.

Gambar. 1
Gambar Signifikansi Diagram Jalur Analisis Efektivitas Simdiklat Balai Diklat Keagamaan Denpasar



Tabel 1
Hasil Pengujian Hipotesis

Uraian	Hipotesis	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	P Values	Keterangan
X1 -> Y1	H1	0.109	0.106	0.204	0.593	tidak didukung
X2 -> Y1	H2	0.315	0.330	0.198	0.111	tidak didukung
X3 -> Y1	H3	0.507	0.498	0.146	0.001	Didukung
X1 -> Y2	H4	0.680	0.662	0.223	0.002	Didukung
X2 -> Y2	H5	0.061	0.070	0.225	0.787	tidak didukung
X3 -> Y2	H6	0.102	0.124	0.175	0.560	tidak didukung
Y1 -> Y2	H7	-0.254	-0.273	0.287	0.377	tidak didukung

Sumber: Data Smart PLS

Tabel 1 menunjukkan bahwa hipotesis 1 (H_1), kualitas sistem (X_1) tidak berpengaruh positif terhadap kegunaan (Y_1). Nilai signifikansi p value adalah 0.593 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H_1 tidak didukung**. Hipotesis 2 (H_2) menyatakan bahwa Kualitas Informasi (X_2) tidak berpengaruh terhadap kegunaan (Y_1). Nilai signifikansi p value adalah 0.111 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H_2 tidak didukung** dengan nilai koefisien 0.315 yang menunjukkan faktor Kualitas Informasi tidak berpengaruh terhadap kegunaan. Hipotesis 3 (H_3) menyatakan bahwa Dukungan Manajemen

²⁸J.F. Hair at. All. Op.Cit

Puncak (DMP) berpengaruh positif terhadap Kegunaan (K). Nilai signifikansi *p value* adalah 0,001 ($< 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H₃ didukung** dengan nilai koefisien 0.507. Hipotesis 4 (H₄) menyatakan bahwa kualitas sistem (X1) berpengaruh positif terhadap Kepuasan Pengguna (Y2). Nilai signifikansi *p value* adalah 0.002 ($< 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H₄ didukung** dengan nilai koefisien 0.680 yang menunjukkan faktor kualitas informasi berpengaruh positif terhadap kegunaan. Hipotesis 5 (H₅) menyatakan kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Nilai signifikansi *p value* adalah 0.787 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H₅ tidak didukung** dengan nilai koefisien 0.061 yang menunjukkan faktor kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Hipotesis 6 (H₆) menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh pada kepuasan pengguna (KP). Nilai signifikansi *p value* adalah 0.560 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H₆ tidak didukung**. Hipotesis 7 (H₇) menyatakan bahwa kegunaan (K) tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna (KP). Nilai signifikansi *p value* adalah 0.377 ($> 0,05$). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa **H₇ tidak didukung** dengan nilai koefisien -0.254 yang menunjukkan faktor kegunaan berpengaruh negatif terhadap kepuasan pengguna.

C. PEMBAHASAN

Pengaruh kualitas sistem terhadap kegunaan

Pengujian H₁ dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas sistem terhadap kegunaan, hasil uji empiris menunjukkan bahwa H₁ tidak didukung yaitu kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan aplikasi Simdiklat. Ini berarti kualitas sistem tidak dapat meningkatkan kegunaan/kemanfaatan pengguna aplikasi Simdiklat. Bukti empiris ini konsisten dengan penelitian Seddon²⁹ dan Jaya.³⁰

Kualitas sistem tercermin dari kecepatan

respon, kemampuan berfungsi kembali ketika terjadi *error*, kemudahan dan keamanan penggunaan, serta perintah/bahasa yang mudah dipahami yang dapat mempengaruhi persepsi terhadap kegunaan dari sistem tersebut. Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan diduga disebabkan beberapa hal yaitu *pertama* konteks sistem informasi bagi pengguna aplikasi Simdiklat di Balai Diklat bersifat wajib dan sangat diperlukan, *kedua* diduga tidak adanya partisipasi dari pengguna dalam pembuatan sistem tersebut karena sistem informasi tidak didesain langsung oleh pengguna sedangkan pengguna aplikasi Simdiklat di Balai Diklat hanya menerima dan menggunakan.

Adapun menjadi penyebab tidak berpengaruhnya kualitas sistem terhadap kegunaan, hal ini diduga dipengaruhi beberapa hal yaitu *pertama* minimnya pengalaman responden dalam menggunakan aplikasi Simdiklat, *kedua* minimnya pelatihan yang diadakan untuk penggunaan aplikasi simdiklat yang dapat menambah tingkat kemampuan pengguna individu dalam menguasai sistem sehingga mempengaruhi persepsi pengguna terhadap kemanfaatan/kegunaan dari sistem tersebut.

Pengaruh kualitas informasi terhadap kegunaan

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H₂ tidak didukung. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas informasi maka tidak meningkatkan kegunaan aplikasi Simdiklat. Bukti empiris ini tidak konsisten dengan hasil penelitian Seddon dan Kiew,³¹ yang menyatakan bahwa semakin tinggi kualitas informasi akan semakin tinggi persepsi tentang kegunaan sistem tersebut. Kualitas Informasi tidak mempengaruhi kegunaan sistem disebabkan bahwa pengguna menyadari sistem ini berdiri sendiri dan tidak saling berintegrasi dengan sistem lain. Kegunaan sistem ini tidak berkembang dan berpengaruh pada aplikasi lainnya.

Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kegunaan

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H₃ didukung dengan koefisien positif. Hal

²⁹ P.B. Seddon and M.Y. Kiew. "A Partial Test and Development of DeLone and McLean's Model of IS Success". *Australian Journal of Information Systems* 4 (1) (1996) : 90-109.

³⁰ Jaya dan Sumertajaya. "Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square". *Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika*. (2008): 118-132.

³¹ P.B. Seddon and M.Y. Kiew. "A Partial Test and Development of DeLone and McLean's Model of IS Success". *Australian Journal of Information Systems* 4 (1) (1996) : 90-109.

ini berarti semakin tinggi dukungan manajemen puncak maka semakin tinggi kegunaan yang dirasakan dalam menggunakan aplikasi Simdiklat. Bukti empiris ini konsisten dengan hasil penelitian Hussein *et al.*,³² Hanif,³³ dan Yulistia, dkk.,³⁴ yang menyatakan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kegunaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kegunaan. Dukungan manajemen puncak tergambar pada keadaan (1) pimpinan mengetahui tentang keberadaan simdiklat (2) mengetahui manfaat yang diperoleh dengan menggunakan aplikasi simdiklat (3) Mendukung dan mendorong penggunaan aplikasi simdiklat (4) Pimpinan menyediakan sarana dalam rangka implementasi aplikasi simdiklat, (5) pimpinan memfasilitasi bawahan mengikuti pelatihan dalam rangka penggunaan aplikasi simdiklat 6) Pimpinan memonitor bawahan dalam rangka penggunaan aplikasi simdiklat.

Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa dukungan manajemen puncak akan lebih tinggi dirasakan oleh pengguna jika adanya dukungan kepala Balai atas sumberdaya yang diperlukan dan keterlibatan pimpinan dalam implementasi aplikasi Simdiklat. Dengan demikian, Kepala Balai sebaiknya mempertimbangkan untuk meningkatkan dukungan yang diberikan. Dengan dukungan yang diberikan, para pengguna sistem akan merasakan manfaat keberadaan sistem tersebut untuk meningkatkan kinerja. Dukungan manajemen puncak tercermin dari dukungan yang diberikan oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Denpasar atas sumberdaya yang diperlukan untuk implementasi aplikasi Simdiklat serta adanya keterlibatan maupun partisipasi pimpinan dalam aktivitas implementasi aplikasi Simdiklat.

Pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna

³² J.G. Hussain, at. all. "Ethnic minority graduate entrepreneurs in the UK: Characteristics, motivations and access to finance". *Industry and Higher Education* 21 (6) (2007) : 455-463.

³³ Hanif dkk. "Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap kegunaan system akuntansi Keuangan Rumah Sakit dengan Konflik Kognitif dan Afektif sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Ekonomi* Vol. 22 (2014) : 27-41.

³⁴ Yulistia, dkk. "Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Benefita* 2 (2017) : 179-183.

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_4 didukung dengan koefisien positif. Hal ini berarti semakin tinggi kualitas sistem maka akan mempengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi Simdiklat. Bukti empiris ini konsisten dengan penelitian Amalia.³⁵ Bukti empiris ini menyatakan bahwa kualitas sistem memiliki implikasi bahwa pengguna akan cenderung lebih puas menggunakan Simdiklat. Dapat dikatakan bahwa kualitas sistem yang tinggi tidak meningkatkan pemakaian Simdiklat. Dengan tingginya kualitas sistem, para pengguna akan merasakan manfaat keberadaan sistem sehingga merasa puas dengan sistem tersebut. Implementasi sistem informasi berbasis teknologi dapat membuat operasional instansi yang banyak dan rumit menjadi lebih efisien, efektif, dan akuntabel. Kualitas sistem dinyatakan baik apabila sistem mempunyai fleksibilitas yang tinggi, mampu berintegrasi dengan sistem lain, cepat dalam merespon, mampu berfungsi kembali ketika error, mudah dan nyaman digunakan, dan sederhana perintahnya.

Pengaruh kualitas informasi terhadap kepuasan pengguna

Hasil pengujian menunjukkan bahwa H_5 tidak didukung. Semakin tinggi kualitas informasi maka tidak memengaruhi kepuasan pengguna dalam menggunakan aplikasi Simdiklat. Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa individu akan cenderung lebih puas menggunakan SI jika informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut jumlahnya lengkap, tepat dan cermat, akurat, kekinian serta format sesuai dengan yang dibutuhkan. Hasil penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan Pawirosumarto³⁶ dan Septiani³⁷ tetapi konsisten dengan penelitian Fendini.³⁸ Indikator yang dipersepsikan responden kurang adalah

³⁵ Amalia dan Pratomo. "Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan *Perceived Usefulness* Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akutansi". *E-Proceeding of Management* Vol. 3, no. 2 (2016): 1516-1522

³⁶ Pawirosumarto. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem E-Learning". *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. VI, no.3 (2016) : 416-433.

³⁷ Septianita dkk. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan Rail Ticketing System Terhadap Kepuasan Pengguna". *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol 1, no 1 (2014): 53-56.

³⁸ D.S. Fendini (tt). "Pengaruh Kualitas system dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna."

kelengkapan informasi yang dihasilkan aplikasi, ketepatan, dan kecermatan informasi yang dihasilkan, dan kekinian (*ke-update-tan*) informasi yang dihasilkan aplikasi. Aplikasi ini berdiri sendiri dan tidak terintegrasi dengan aplikasi lain, sehingga pengguna memerlukan beberapa sistem dengan informasi yang hampir sama.

Pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan pengguna

Pengujian H_6 dilakukan untuk menguji pengaruh dukungan manajemen puncak terhadap kepuasan pengguna, sebagaimana yang dinyatakan dalam H_6 yaitu dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna. Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_6 tidak didukung. Hal ini berarti dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat. Berdasarkan hasil penelitian bisa dijelaskan bahwa variabel dukungan manajemen puncak tidak dapat meningkatkan kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat. Hal ini disebabkan karena sistem tidak berada di Balai Diklat, akan tetapi terpusat, sehingga atasan tidak dapat memberikan dukungan secara langsung.

Pengaruh kegunaan terhadap kepuasan pengguna

Hasil pengujian memperoleh bukti empiris bahwa H_7 tidak didukung. Bukti empiris ini konsisten dengan pendapat Utomo³⁹ yang menyatakan persepsi tentang kegunaan sistem berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Bukti empiris ini memiliki implikasi bahwa pengguna mengetahui bahwa Simdiklat dapat membantu menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, dapat meningkatkan kinerjanya, dapat meningkatkan produktivitas, dapat membuat pekerjaan lebih efektif, dapat mempermudah pekerjaan, bermanfaat dalam pekerjaan, tetapi pegawai akan tetap menggunakan simdiklat meskipun tidak puas dengan penggunaannya. Hal ini menyatakan bahwa sistem dinilai kurang memuaskan oleh pengguna. Meskipun demikian, pengguna tetap menggunakan sistem, ini dikarenakan sistem ini diharuskan dalam penggunaannya karena data pegawai telah tersimpan di Simdiklat. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa kegunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna.

D. PENUTUP

Simpulan

Penelitian ini mengkaji efektivitas aplikasi Simdiklat di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Sesuai Tabel 1 pada nilai P Value, bahwa hanya Hipotesis 1 dan 2 yang didukung. Hasil pengolahan dan pembahasan menunjukkan bahwa variabel kegunaan dan kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat dipersepsikan rendah oleh responden. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa aplikasi Simdiklat di Balai Diklat Keagamaan Denpasar secara simultan dinyatakan belum efektif oleh pengguna.

- 1) Kualitas sistem tidak berpengaruh terhadap kegunaan aplikasi Simdiklat
- 2) Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kegunaan aplikasi Simdiklat
- 3) Dukungan manajemen puncak berpengaruh positif terhadap kegunaan aplikasi Simdiklat
- 4) Kualitas sistem berpengaruh positif terhadap kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat
- 5) Kualitas informasi tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat
- 6) Dukungan manajemen puncak tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna aplikasi Simdiklat
- 7) Kegunaan tidak berpengaruh terhadap kepuasan pengguna

Saran

Berdasarkan atas simpulan dan hasil analisis di atas berikut ini akan dikemukakan beberapa keterbatasan dan saran: (1) kualitas sistem, kualitas informasi, dan dukungan manajemen puncak, dapat menjelaskan varian data sebesar 84% sesuai besarnya nilai Adjusted R Square. Sisanya masih terdapat variabel lain yang turut mempengaruhi kegunaan sistem dan kepuasan pengguna, peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel lain seperti faktor budaya tertentu, tempat dilaksanakannya penelitian. (2) Penelitian ini telah membuktikan bahwa kualitas sistem dan kualitas informasi, tidak berpengaruh terhadap kegunaan Simdiklat. Akan tetapi dukungan manajemen puncak berpengaruh terhadap kegunaan Simdiklat. Kualitas sistem berpengaruh pada kepuasan, sedangkan kegunaan tidak mempengaruhi kepuasan pengguna. Kualitas

³⁹L.T. Utomo, dkk. "Pengaruh Kualitas sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akademik Universitas Merdeka Malang." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika* Vol. 3, no. 2 (2017) : 150-160.

sistem berpengaruh pada kepuasan pengguna. Sedangkan kualitas informasi dan dukungan manajemen puncak tidak mempengaruhi kepuasan pengguna. Adapun kegunaan tidak mempengaruhi kepuasan pengguna. (3) Hubungan antar variabel yang tidak terbukti secara empiris dapat dijadikan kerangka evaluasi bagi pengembang program untuk senantiasa mengembangkan kualitas sistem dan kualitas informasi dengan harapan supaya kegunaan Simdiklat semakin bermanfaat sehingga kepuasan pengguna semakin meningkat. (4) penelitian ini

dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar pada awal tahun 2019, peneliti lain dapat melakukan penelitian pada Balai Diklat lain atau pada tahun yang berbeda karena sangat mungkin sistem akan selalu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan pengguna.[]

DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. and Fishbein, M. "Attitude Behavior Relation : A Theoretical Analysis and Review of Empirical Research". *Psychological Bulletin* Vol. 84, no. 5 (1977) : 888-918.
- Amalia dan Pratomo. "Pengaruh Kualitas Sistem Informasi, Kualitas Informasi, dan Perceived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Akutansi". *E-Proceeding of Management* Vol. 3, no. 2. (2016) : 1516-1522.
- Anonim. *Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Manajemen Pendidikan dan pelatihan*. (2016)
- Bandura, A. "Social Cognitive Theory, An agentic Perspective". *Asian Journal of Social Psychology* 2 (1999) : 21-41.
- Chang, Liu and Kirk P. Arnet. "Exploring the Factor Associated with Web site Success In the Context of Electronic Commerce." *Information and Management* 38 (2000): 22-23.
- Chin, W. W. "The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modelling in Marcoulides. G.A. (ed) *Modern Methods for Business Research*, Mahwah, NJ". *Lawrence Erlbaum Associated* 101 (1) (1998) : 295-336.
- Cooper, D. R., and Pamela S.C. *Business Research Methods*. Jakarta: Erlangga, Edisi Kelima, 2014.
- Davis, F. D. "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology". *MIS Quarterly* 13 (3) (1989) : 319-340.
- DeLone, W. H. "Determinants of Success for Computer Usage in Small Business". *MIS Quarterly* 12 (1) (1988) : 51-61.
- DeLone, W. H., and McLean, E. R.,. "Information Systems Success: The Quest for the Dependent Variable". *Inf. Syst. Res* 3 (4) (1992) : 60-95.
- DeLone, W. H., and McLean, E. R., "The DeLone and McLean Model of Information Systems Success : A Ten-Year Update". *J. Manag. Inf. Syst* 19 (4) (2003) : 9-30.
- Fendini, D.S., (tt). "Pengaruh Kualitas sistem dan Kualitas Informasi Terhadap Kepuasan Pengguna".
- Gibson, Ivencevich, Donnelly. "Organisasi, Perilaku, Struktur, Proses". Jakarta: Bina Rupa Aksara, 1996.
- Ghozali dan Latan. "Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0 untuk Penelitian Empiris." *Semarang Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Edition: 2 (2015) : 290.
- Hanif dkk. "Pengaruh Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan Rumah Sakit dengan Konflik Kognitif dan Afektif sebagai Variabel Intervening". *Jurnal Ekonomi* Vol. 22 (2014) : 27-41.
- Hartono Jogiyanto. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta, 2004.
- Hussain, J. G., Scott, J. M., Millman, C., Hannon, P. D., Matlay, H., "Ethnic Minority Graduate Entrepreneurs in the UK: Characteristics, Motivations and Access to Finance". *Industry and Higher Education* 21 (6) (2007) : 455-463.
- Jaya dan Sumertajaya. "Pemodelan Persamaan Struktural dengan Partial Least Square". *Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika* (2008) : 118-132.
- Ozkan, S., Hackney, R., Bilgen, S., PB-ISAM: "A Process Based Framework for Information Systems Effectiveness Assessment". *Journal of Enterprise Information Management* 20 (6) (2007) : 700-725
- Ozkan, S., Cakir, M., Bilgen, S., "A Maturity Based Qualitative Information Systems Effectiveness Evaluation of a Public Organization in Turkey". *Journal of Cases on Information Technology* 10 (3) (2008) : 58-71.
- Palelleng, S. 2013. "Penilaian Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Akademik

- Berbasis Komputer pada Universitas Kristen Indonesia Traja". *Jurnal KIP* Vol 2. (2013) : 135-254.
- Pawirosumarto. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pengguna Sistem E-Learning". *Jurnal Ilmiah Manajemen* Vol. VI, no. 3 (2016) : 416-433.
- Pitt, L. F., Watson, R. T. "Measuring Information Systems Service Quality: Concerns for a Complete Canvas". *MIS Quarterly* 21 (2) (1997) : 209-221.
- Putrawan, N.A. "Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Pemerintah Kabupaten Gianyar." (*Tesis*). (Denpasar 2017): Universitas Udayana.
- Sahusilawane, W. "Pengaruh Partisipasi Pemakai, dan Dukungan Atasan Terhadap Kinerja Sistem Informasi Akuntansi pada Bank Pemerintah". *Jurnal Organisasi dan Manajemen* Vol 10, no. 1 (2014) : 37-43.
- Hair, J.F., Tomas, G.M.H., Ringle, Christian M., dan Marko Sarstedt. *A Primer Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Los Angeles: SAGE Publication, Ltd., 2014.
- Simatupang, P., dan Akib, H., "Potret Efektivitas Organisasi Publik: *Review Hasil Penelitian Manajemen Usahawan Indonesia*" 36 (1) (2007) : 35-41.
- Seddon, P.B. and Kiew, M.-Y., "A Partial Test and Development of DeLone and McLean's Model of IS Success". *Australian Journal of Information Systems* 4 (1) (1996) : 90-109.
- Septianita dkk. "Pengaruh Kualitas Sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Pelayanan Rail Ticketing System Terhadap Kepuasan Pengguna". *E-Journal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi* Vol 1, no 1. (2014) : 53-56.
- Utomo, L.T., Ardianto, Y.T., dan Sisharini, N. "Pengaruh Kualitas sistem, Kualitas Informasi, Kualitas Layanan, Terhadap Kepuasan Pengguna sistem Informasi Akademik Universitas Merdeka Malang." *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika* Vol. 3, no. 2 (2017) : 150-160.
- Venkatesh, V. and Davis, F. D. "Theoretical Extension of The Technology Acceptance Model : four longitudinal field studie". *Management Science* 46 (2) (2000): 186-204.
- Yulistia., Novi Y., dan Eka Y. "Analisis Faktor Keperilakuan Organisasi Terhadap Kegunaan Sistem Akuntansi Keuangan di Badan Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat". *Jurnal Benefita* 2 (2017): 179-183.

DEMOCRATIZING PUBLIC PARTICIPATION IN MAINTAINING RELIGIOUS HARMONY

AKMAL SALIM RUHANA

ABSTRACT

People's participation in maintaining religious harmony among the multi religious societies in Indonesia has now become public policy issue. Public participation itself varies in the types and levels of contribution, from just being invited, being involved and up to self-initiative to work on a public issue. The question is, how far has the quality of public participation been carried out? By using public participation theory, this qualitative research with descriptive analysis shows that collaborative participation and empowerment are more in line with the efforts to democratize public life. This research encourages broader public participation in maintaining religious harmony in Indonesia.

KEY WORDS: *Public participation, democracy, religious harmony, collaboration, empowerment*

DEMOKRATISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA

ABSTRAK

Publik telah banyak berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan kerukunan umat beragama di Indonesia yang menjadi isu kebijakan publik. Partisipasi publik itu beragam jenis dan tingkat kontribusinya, mulai dari sekadar diundang, terlibat hingga inisiatif mengerjakan sendiri suatu isu publik. Pertanyaannya, sejauhmana kualitas partisipasi publik telah dilakukan? Dengan menggunakan kerangka teori partisipasi publik, penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitik ini menunjukkan bahwa partisipasi kolaboratif dan pemberdayaan lebih sejalan dengan upaya demokratisasi kehidupan publik. Penelitian ini mendorong partisipasi publik yang lebih luas dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama.

KATA KUNCI: Partisipasi publik, demokrasi, kerukunan umat beragama, kolaborasi, pemberdayaan

HISTORY OF ADVOCACY OF RELIGIOUS PLURALISM: CASE STUDY OF ANCESTRAL RELIGION ADVOCACY IN INDONESIA

HUSNI MUBAROK

ABSTRACT

In November 2017, the Constitutional Court (MK) granted a judicial review of ancestral religious beliefs on article 61 paragraph 1 and article 64 paragraph 1 of the Civil Administration Law 2013. The decision is an essential milestone for the practice of advocacy for religious pluralism in Indonesia. How to understand the advocacy of religious pluralism, in this context, for the followers of the ancestral religions, in Indonesia from a historical perspective? This research argues that the supporters of the ancestral religions have been accustomed to advocating themselves to fight for the fate of their communities since the Indonesian independence. The roles of NGO activists and academics play as a supporting system for the decisions of ancestral religious communities in the face of changes in the political structure and politics of religion since the independence until the reform era.

KEY WORDS: *Advocacy, ancestral religion, social inclusion, policy, public service, social acceptance*

SEJARAH ADVOKASI PLURALISME AGAMA: STUDI KASUS ADVOKASI AGAMA LELUHUR DI INDONESIA

ABSTRAK

November 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi para penghayat agama leluhur atas pasal 61 ayat 1 dan pasal 64 ayat 1 Undang-Undang Administrasi dan Kependudukan (Adminduk) 2013. Putusan MK di atas merupakan tonggak penting advokasi pluralisme agama di Indonesia. Bagaimana rute

dan jalan advokasi terhadap ragam agama, dalam konteks ini penghayat agama leluhur dalam sejarahnya? Menggunakan metode penelitian kualitatif, tulisan ini mengajukan argumen bahwa penghayat kepercayaan sejak kemerdekaan telah terbiasa mengadvokasi diri sendiri untuk memperjuangkan nasib komunitasnya di hadapan berbagai rezim. Peran aktivis LSM dan akademisi lebih sebagai sistem pendukung atas keputusan komunitas penghayat agama leluhur dalam menghadapi perubahan struktur politik dan politik agama sejak kemerdekaan hingga era reformasi.

KATA KUNCI: Advokasi, agama leluhur, inklusi sosial, kebijakan, pelayanan publik, penerimaan sosial

THE EVALUATION OF 5000 DOCTORAL SCHOLARSHIP PROGRAM OF THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS (MORA) IN THE GRADUATE SCHOOL OF UPI BANDUNG

SUPRAPTO

ABSTRACT

The 5000 doctoral Scholarship Program of MORA aims at the development of capacity, capability, human resource quality at the Ministry generally and at the Directorate General of Islamic Education specifically. The study takes advantage of qualitative description of Graduate School Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. The findings show that the awarded students were full funded, there is inconsistency between the regulation and its implementation. Decision No 226 Year 2015 on the guidelines of scholarship recipients among lecturer candidates, lecturers, and staff members at an Islamic Higher Education Institution, Chapter IV article B clearly states doctoral scholarship is awarded for the duration of 8 semester or 4 and can be extended up to one year. On the contrary, the students are provided with tuition fee and stipend, while there is no book allowance, thesis writing support, publication allowance, and transport fee. The scholarship is awarded for only six semesters.

KEY WORDS: Evaluation, the 5000 doctoral scholarship, and Graduate School of UPI

EVALUASI PROGRAM 5000 DOKTOR KEMENTERIAN AGAMA RI DI SEKOLAH PASCASARJANA UPI BANDUNG

ABSTRAK

Program 5000 doktor Kementerian Agama RI bertujuan meningkatkan kapasitas, kapabilitas, dan kualitas sumber daya manusia (SDM) pada Kementerian Agama secara umum dan SDM pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam secara khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif pada Program Pascasarjana (SPs) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Hasil penelitian menunjukkan seluruh mahasiswa penerima beasiswa di SPs UPI merupakan beasiswa penuh (*full scholarship*), masih terjadi ketidaksesuaian antara peraturan dengan pelaksanaan di lapangan. Pada SK No. 226 Tahun 2015 tentang pedoman pemberian beasiswa untuk calon dosen, dosen, dan tenaga kependidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada bab iii tercantum biaya penulisan disertasi, batas waktu pemberian beasiswa, dan pada bab iv poin b beasiswa program doktor diberikan pada waktu 8 semester atau 4 tahun dan diperpanjang 1 tahun. Namun, dalam kenyataan di lapangan mahasiswa hanya diberikan uang semester dan biaya hidup saja tidak pembiayaan untuk pembelian buku, penulisan disertasi, publikasi (jurnal internasional), dan transport bagi mahasiswa yang berasal dari luar kota. Dan pemberian beasiswa hanya 6 semester.

KATA KUNCI: Evaluasi, Program 5000 Doktor dan Sekolah Pascasarjana UPI

MUHAMMADIYAH AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAMS: HABITUS, MODALITY, AND ARENA

ABSTRACT

The study sheds light on community development programs conducted by Muhammadiyah. Through practical Social Theory by Pierre Bourdieu, this study finds some points: first, the reasons of Muhammadiyah's community development programs. Second, the models of Muhammadiyah's community

development programs. It finds that the programs are conducted due to al-Ma'un theological perspective coined KH. Ahmad Dahlan which is described by Moeslim Abdurrahman as "Transformative Islam" that fights for the weak people. This social theology then leads to social conducted by Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM)/Community Development Assembly to combat poverty in the 21st century.

KEY WORDS: *Muhammadiyah, al-ma'un theology, Moeslim Abdurrahman, Transformative Islam, and community development*

MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: HABITUS, MODAL, DAN ARENA

ABSTRAK

Artikel ini akan mengulas paradigma dari praktik gerakan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Dengan menggunakan pendekatan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, studi kualitatif ini akan mengemukakan beberapa hal: *pertama*, apa yang mendorong lahirnya gerakan pemberdayaan masyarakat dalam Muhammadiyah. *Kedua*, bagaimana model praksis pemberdayaan masyarakat ini dilakukan Muhammadiyah. Penelitian ini menemukan bahwa praksis pemberdayaan masyarakat Muhammadiyah didorong oleh teologi Alma'un (ajaran) pendiri gerakan ini yaitu KH. Ahmad Dahlan, yang direinterpretasi oleh Moeslim Abdurrahman menjadi "Islam Transformatif" sebagai paradigma Islam yang memihak kepada kaum lemah. Teologi sosial ini kemudian melahirkan praksisme sosial yang dilakukan oleh Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) untuk menggempur kemiskinan gaya baru di abad ke-21.

KATA KUNCI: Muhammadiyah, teologi Al-Ma'un, Moeslim Abdurrahman, Islam transformatif, pemberdayaan Masyarakat.

EDUCATION SERVICE INDEX OF BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN

SRI RAYANI TANJUNG

ABSTRACT

This paper is based mainly on the survey findings on the Education Service Index which provides information on measuring the level of training participants' satisfaction on public services at the Medan Religious Training Centre (BDK). This survey is carried out to investigate the quality of public services and is one of the requirements in the Integrity Zone Development Program at BDK Medan. Respondents in this survey were training participants at BDK Medan from 2016-2018 and were selected according based on cluster random sampling technique. The locations of the activities were 35 cities (Office of MORA at Regency/City levels, IAIN, IAKN and STAKPN) with a total of 230 respondents. Technically the sending of questionnaire was conducted by writing a permission letter to BDK Medan stakeholders and meetings at aHotel/Restaurant Hall for filling out the questionnaire. The results of this study showed that all elements of BDK Medan's public services are in "good" category scored 86,17 in the interval (76,61-88,30).

KEY WORDS: *Education service index, public satisfaction index, service quality and public service*

INDEKS LAYANAN KEDIKLATAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN

ABSTRAK

Tulisan ini diangkat dari hasil survei untuk mengetahui indeks layanan kediklatan yang memberikan informasi pengukuran tingkat kepuasan peserta diklat terhadap layanan publik Balai Diklat Keagamaan (BDK) Medan. Survei ini merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam melihat kualitas pelayanan publik dan merupakan salah satu syarat dalam Program Pembangunan Zona Integritas BDK Medan. Responden pada survei ini adalah peserta

diklat yang telah menerima pelayanan/alumni diklat BDK Medan dari tahun 2016-2018 dan dipilih sesuai dengan pemetaan yang dilakukan berdasarkan teknik *cluster random sampling*. Lokasi kegiatan sebanyak 35 kota (Kemenag Kab/Kota, IAIN, IAKN, dan STAKPN) dengan jumlah responden 230 orang. Secara teknis, penyampaian kuesioner dilakukan dengan menyurati *stakeholder* BDK Medan dan menyepakati pertemuan tersebut di Aula Hotel/Rumah Makan dalam pengisian kuesioner. Hasil penelitian ini memberikan informasi bahwa seluruh unsur pelayanan publik BDK Medan dalam kategori "baik", dengan nilai indeks layanan kediklatan BDK Medan sebesar 86,17 yang berada pada interval (76,61-88,30).

KATA KUNCI: Indeks layanan kediklatan, indeks kepuasan masyarakat, kualitas pelayanan dan pelayanan publik

QUALITY ANALYSIS OF PARTICIPANTS IN THE TRAINING WITH SERVQUAL METHODS AND TOLERANCE ZONE IN BDK SEMARANG

RISKHA NURFITRIYAH

ABSTRACT

Training participants' satisfaction can be achieved by providing good quality service. Therefore, BDK of Semarang as a training service provider must focus on the training participants' satisfaction as consumers. Good service performance and the fulfilment of training participants' expectations will greatly affect the satisfaction of training participants. This study aims to identify differences between the reality and expectations among the training participants on the services of the training providers and to analyze the quality of training services provided by training providers using the Servqual method and Zone of Tolerance. Based on the value with the Servqual method, the study found that the quality of the training committee's service providers did not satisfy the training participants as customers. Whereas the value with the ZOT (zone of tolerance) method found that out of the 15 service attributes of the training committee, there were 9 service attributes that could

still be tolerated by the training participants including registration service, training equipment, training facilities and infrastructure, tidiness and friendliness of the committee, committee response, safety and comfort of participants, committee empathy for participants, menu variations and professionalism and friendliness of lecturers.

KEY WORDS: *Customer satisfaction, zone of tolerance, service quality*

KUALITAS LAYANAN PESERTA DENGAN METODE SERVQUAL DAN ZONE OF TOLERANCE DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG

ABSTRAK

Kepuasan peserta diklat dapat dicapai dengan memberikan kualitas pelayanan yang baik. Oleh karena itu, BDK Semarang sebagai penyedia jasa layanan diklat harus berfokus pada kepuasan peserta diklat sebagai konsumen. Kurangnya kinerja pelayanan selama ini belum sesuai dengan harapan, dan sangat berpengaruh terhadap kepuasan peserta diklat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara kenyataan dan harapan para peserta diklat atas pelayanan dari penyelenggara diklat dan menganalisis kualitas pelayanan diklat yang diberikan oleh penyelenggara diklat dengan metode *Servqual* dan *Zone Of Tolerance*. Berdasarkan nilai dengan metode *Servqual*, diperoleh bahwa kualitas layanan panitia penyelenggara diklat masih belum bisa memuaskan peserta diklat sebagai pelanggan. Sedangkan nilai dengan metode ZOT (*zone of tolerance*) didapatkan bahwa dari 15 atribut pelayanan dari panitia penyelenggara diklat, terdapat 9 atribut pelayanan yang masih bisa ditoleransi oleh peserta diklat, yaitu pelayanan saat registrasi, bahan perlengkapan diklat, sarana dan prasarana diklat, kerapihan dan keramahan panitia, respon panitia, keamanan dan kenyamanan peserta, empati panitia terhadap peserta, variasi menu serta profesionalisme dan keramahan pengajar/widyaiswara.

KATA KUNCI: *Kepuasan pelanggan, zone of tolerance, kualitas layanan*

**EVALUATION OF THE
IMPLEMENTATION OF
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
(FORMAL RELIGIOUS EDUCATION)
IN PESANTREN DARUSSALAM
CIAMIS WEST JAVA**

ACHMAD DUDIN

ABSTRACT

This article is the result of the author's research in 2019. The main backdrop of this research is the quality issues of Formal Religious Education (PDF) that needs to be taken into account for their effectiveness in the future references. This evaluation research using a qualitative approach was conducted Ulya Ciamis West Java level. The data and information of this research reflected the thoughts of religious teachers, caregivers, managers, experts and related officials as well as an analysis of the implementation of the school in the pesantren. The results show: first, the development of the religious school has to be in line with the quality standard; some teachers argued that many teachers had no academic qualification and relevant certificates, funding and facilities did not sustain the quality of the school. Second, in terms of the process, the management system is not well implemented, course planning, course management, traditional teaching methods, ineffective course evaluation, and no monitoring and evaluation process.

KEY WORDS: *Evaluation, Formal Religious School(PDF), Pesantren Darussalam Ciamis*

**EVALUASI PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL
(PDF) PESANTREN DARUSSALAM
CIAMIS JAWA BARAT**

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian penulis tahun 2019. Latar belakang penelitian ini adalah adanya persoalan mutu Pendidikan Diniyah Formal (PDF) yang strategis untuk diperhatikan demi efektifitas penyelenggaraan PDF ke depan. Penelitian evaluasi dengan pendekatan kualitatif

ini mengambil kasus pada PDF tingkat Ulya Ciamis Jawa Barat. Data dan informasi penelitian ini merupakan hasil pikiran para ustadz, pengasuh, pengelola, pakar, dan pejabat terkait serta analisis terhadap penyelenggaraan PDF di pesantren. Hasilnya, *pertama* dari segi *input*, rekognisi terhadap PDF di pesantren harus dibarengi dengan pengawalan konteks mutu penyelenggaraan PDF di pesantren secara profesional, terdapat beberapa ustadz kurang memenuhi standar kualifikasi akademik dan semua ustadz belum memiliki sertifikat PDF, standar kurikulum PDF belum terumuskan sesuai jenjang, pembiayaan dan sarana prasarana kurang memadai. *Kedua*, dari segi proses, manajemen PDF belum tertata dengan baik, belum akreditasi, perencanaan pembelajaran kurang standar, pengelolaan proses pembelajaran kurang efektif, penggunaan metode pembelajaran kurang variatif, penilaian hasil pembelajaran kurang sesuai prosedur yang profesional, pembinaan dan pengawasannya kurang optimal.

KATA KUNCI: *Evaluasi, PDF Pesantren Darussalam Ciamis*

**READING NEW PHENOMENONS
SALAFI MOVEMENTS ON SOLO**

ABDUL JAMIL WAHAB

ABSTRACT

Salafi can be seen as a thought and a movement that is connected to the dynamics of religious movements in the Middle East. Using qualitative method, this paper describes the existence of three types of Salafis that is taking ground in Solo. First, Puritanist Salafis based in Ma'had Imam Bukhari. Second, Haraki Salafis based in Al-Mukmin Ngeruki Islamic Boarding School and Ma'had 'Isy Karima. Third, Jihadists Salafis, namely Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) and several radical networks in Solo. The results show that exclusive preaching developed by puritanist Salafi groups, has stimulated horizontal conflicts social unrest. Haraki and jihadists Salafis whose ideas are mainly on the establishment of an Islamic state and the formalization of Islamic law has created a vertical conflict with the government. This study interestingly found a new variant of salafis, that is puritanist salafis

whose teachings continue to develop in several places. This shows that puritanist salafis can coexist with other religious thoughts in society besides they can interact with several government programs. The existence of haraki and jihadists salafis maintain the inharmonious relation with the government.

KEY WORDS: Puritanist Salafi, jihadis salafis, Solo, transnational, Daulah Islamiyah.

MEMBACA FENOMENA BARU GERAKAN SALAFI DI SOLO

ABSTRAK

Salafi merupakan paham dan gerakan yang bersifat transnasional, yaitu terkoneksi dengan dinamika paham keagamaan di Timur Tengah. Melalui penelitian dengan pendekatan kualitatif, artikel ini mendeskripsikan eksistensi kelompok tiga jenis Salafi yang berkembang di Solo yaitu, *pertama*, Salafi Puritanis yaitu Ma'had Imam Bukhari. *Kedua*, Salafi Haraki yaitu Pesantren Al-Mukmin Ngeruki dan Ma'had 'Isy Karima. *Ketiga*, Salafi Jihadis yaitu Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) dan beberapa jaringan radikal di Solo. Dakwah eksklusif yang dikembangkan kelompok Salafi Puritanis, menimbulkan konflik horizontal karena meresahkan masyarakat. Sementara Salafi Haraki dan Jihadis yang mengusung gagasan pendirian negara Islam dan penerapat syariat Islam secara formal, menimbulkan konflik vertikal dengan penguasa. Kajian ini berhasil menemukan fenomena baru, bahwa dakwah Salafi Puritanis dapat terus berkembang di beberapa tempat, ini menunjukkan Salafi Puritanis dapat berkoeksistensi dengan paham keagamaan lainnya di masyarakat. Selain itu, Salafi Puritanis juga ternyata mulai membuka diri terhadap beberapa program pemerintah. Sedangkan Salafi Haraki dan Jihadis masih menunjukkan sikap penolakannya terhadap dasar negara dan konstitusi, sehingga terus berhadapan dengan penegak hukum atau pemerintah.

KATA KUNCI: Salafi puritanis, salafi jihadis, Solo, transnasional, Daulah Islamiyah

CRITICISM OF KNOWLEDGE INTEGRATION IN NON-ISLAMIC STUDIES STUDENTS' DISSERTATION AT STATE ISLAMIC UNIVERSITY

MU'MIN ROUP, MUHAMMAD SHODIQ, MAUIDLOTUN NISA',
FITRIYANI

ABSTRACT

This research is a qualitative research with data quantification based on library and field research. The object of the research is dissertations of non-religious students in 4 UINs (State Islamic University) in Indonesia. The approach used in this study was Haught and Golshani's critical approach. Haught with his evolutionary theology believes that science which is based on the theory of evolution can be integrated with faith based theology, while Golshani places religion as a standard entity. For him, the existence of science relies heavily on a scientific metaphysical framework rooted in Islamic values. Both of these theories will be used in understanding the logic of the integration methodology used in the dissertation research.

KATA KUNCI: Criticism, scientific integration reasoning, non-Religious students, UIN dissertation

KRITIK NALAR INTEGRASI KEILMUAN PADA KARYA DISERTASI MAHASISWA BERLATAR BELAKANG NON-AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan kuantifikasi data yang berbasis penelitian kepustakaan dan lapangan. Artinya, penelitian ini meski merupakan *library research*, namun secara praktis termasuk penelitian lapangan karena objek penelitiannya adalah disertasi mahasiswa non-Agama di 4 UIN yang ada di Indonesia. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kritis Haught dan Golshani. Haught dengan teologi evolusinya berpendapat bahwa ilmu pengetahuan yang berbasis teori evolusi dapat diintegrasikan dengan teologi yang berbasis keimanan, sedangkan Golshani lebih

menempatkan agama sebagai entitas yang telah baku. Baginya, sains sangat bergantung pada kerangka metafisis saintis yang berakar pada nilai keislaman. Kedua teori ini akan dipergunakan dalam membongkar nalar metodologi integrasi yang digunakan dalam penelitian disertasi tersebut.

KATA KUNCI: Kritik, nalar integrasi keilmuan, disertasi UIN

THE EFFECTIVENESS OF THE IMPLEMENTATION OF EDUCATION AND TRAINING INFORMATION SYSTEMS AT RELIGIOUS EDUCATION AND TRAINING CENTER OF DENPASAR

MUHIMATUL KIBTIYAH

ABSTRACT

The study was conducted in line with the occurrence of complaints from the Simdiklat operator at the Religious Training Center related to the slow login process, frequent disruptions when operating the system, rebooting occasion, and some menu choices were still overlapping so that were considered less effective by user. This study aims to measure the effectiveness of the application of the education information system at Denpasar Religious Education Centre. Population of this study was Simdiklat application users, with total population of 64 employees including 20 Widyaiswara/tutors and 44 employees. The sample consisted of 31 employees who actively engage in using the application based on purposive sampling technique. Numbers of research samples were 31 respondents. Partial Least Square (PLS) was used to analyse.

KATA KUNCI: System quality, information quality, top management support, expertise, system user satisfaction

EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN DENPASAR

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya keluhan dari admin Simdiklat di Balai Diklat Keagamaan terkait lambatnya proses *login*, seringkali terjadi gangguan saat mengoperasikan sistem, sistem tiba-tiba kembali ke awal saat sedang digunakan, dan beberapa pilihan menu masih saling tumpang tindih sehingga dinilai kurang efektif oleh pemakai. Penelitian ini bertujuan untuk menguji tentang efektivitas penerapan sistem informasi kediklatan di Balai Diklat Keagamaan Denpasar. Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna aplikasi Simdiklat yaitu semua pegawai Balai Diklat Keagamaan Denpasar yang berjumlah 64 orang. Widyaiswara berjumlah 20 orang, pegawai berjumlah 44 orang. Adapun sampel berjumlah 31 orang pegawai, karena widyaiswara dan pegawai yang tidak langsung terlibat dalam kepanitiaan tidak dipilih sebagai sampel. Teknik penentuan sampel menggunakan *purposive sampling*. Jumlah sampel penelitian adalah 31 responden. Analisis yang digunakan adalah *Partial Least Square*, (PLS).

KATA KUNCI: Kualitas sistem, kualitas informasi, dukungan manajemen puncak, kegunaan, kepuasan pengguna sistem

A

Abdul Jamil Wahab

Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

Email: ajamilwahab@gmail.com

“MEMBACA FENOMENA BARU GERAKAN SALAFI DI SOLO”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 225-240

Achmad Dudin

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Jl. MH Thamrin No. 6 Jakarta Pusat. Email: achmad.dudin@gmail.com

“EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL (PDF) PESANTREN DARUSSALAM CIAMIS JAWA BARAT”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 209-224

Akmal Salim Ruhana

Peneliti Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat, Kemenag RI Jakarta, akmalsalimruhana@gmail.com

“DEMOKRATISASI PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMELIHARAAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 125-134

Azaki Khoirudin

Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia Email: azakikhoirudin@gmail.com

“MUHAMMADIYAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: HABITUS, MODAL, DAN ARENA”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 165-184

H

Husni Mubarak

Peneliti Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD), Yayasan Paramadina, Jakarta. Email: husni@paramadina-pusad.or.id

“SEJARAH ADVOKASI PLURALISME AGAMA: STUDI KASUS ADVOKASI AGAMA LELUHUR DI INDONESIA”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 135-146

M

Mu'min Roup, Muhammad Shodiq, Mauilotu Nisa', Fitriyani

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, mumin.roup@uinjkt.ac.id., mshodiq@sadra.ac.id, STFI Sadra Jakarta, Indonesia., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, mauilotun.nisa@uinjkt.ac.id., UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia, fitriyani@uinjkt.ac.id

“KRITIK NALAR INTEGRASI KEILMUAN PADA KARYA DISERTASI MAHASISWA BERLATAR BELAKANG NON-AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 241-256

Muhamatul Kibtiyah

Balai Diklat Keagamaan Denpasar, Jl. Raya Denpasar Gilimanuk KM. 14 Mengwitani Mengwi Badung.

Email: muhamatul.kibtiyah@gmail.com

“EFEKTIVITAS PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEDIKLATAN DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN DENPASAR”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 257-270

R

Riskha Nurfitriyah

Balai Diklat Keagamaan Semarang Jl. Temugiring Banyumanik Semarang 50264.

riskhafitriyah@gmail.com

“KUALITAS LAYANAN PESERTA DENGAN METODE SERVQUAL DAN *ZONE OF TOLERANCE* DI BALAI DIKLAT KEAGAMAAN SEMARANG”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 257-270

Sri Rayani Tanjung

Balai Diklat Keagamaan Medan, Jl. TB. Simatupang No. 122 Medan, tanjungsri93@gmail.com

“INDEKS LAYANAN KEDIKLATAN BALAI DIKLAT KEAGAMAAN MEDAN”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 185-198

Suprpto

Peneliti Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.

suprptolitbang@gmail.com

“EVALUASI PROGRAM 5000 DOKTOR KEMENTERIAN AGAMA RI DI SEKOLAH PASCASARJANA UPI BANDUNG”

Jurnal Dialog Vol. 42, No.2, Desember 2019. hal: 147-164

KRITERIA PENULISAN

1. Naskah yang dimuat dalam jurnal ini merupakan hasil penelitian dengan topik masalah sosial dan keagamaan.
2. Naskah belum pernah dimuat atau diterbitkan di media lain.
3. Naskah ditulis dengan kaidah tata Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris yang baku dan benar.
4. Penulis membuat surat pernyataan bahwa naskah yang dikirim adalah asli dan memenuhi persyaratan klirens etik dan etika publikasi ilmiah (bebas dari plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi) berdasarkan Peraturan Kepala I- [PI No. 8 Tahun 2013 dan No.5 Tahun 2014.
5. Apabila naskah ditulis dari hasil penelitian kelompok dan akan diterbitkan sendiri, diharuskan menyertakan surat pernyataan persetujuan tertulis dari anggota kelompok yang lain.
6. Naskah tulisan berisi sekitar 15-20 halaman dengan 1,5 (satu setengah) spasi, kertas kuarto (A 4).
7. Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris maksimal 15 kata menggambarkan isi naskah secara keseluruhan.
8. Judul Bahasa Indonesia ditulis dengan huruf kapital, bold, center, sedangkan judul Bahasa Inggris ditulis dengan huruf kapital pada awal kata, italic, bold dan center.
9. Nama penulis tanpa gelar akademik diletakkan di tengah (center), Nama instansi, alamat instansi, dan email penulis diletakkan dalam satu baris dan di tengah (center).
10. Abstrak dan kata kunci dibuat dalam dwi bahasa (Inggris dan Indonesia). Abstrak ditulis dalam satu paragraph, diketik dengan 1 spasi, jenis huruf Palatino Linotype ukuran 11, jumlah kata 150-200 kata. Abstrak Bahasa Inggris diketik dengan menggunakan format italic.
11. Abstrak, berisi gambaran singkat keseluruhan naskah mengenai permasalahan, tujuan, metode, hasil, dan rekomendasi kebijakan.
12. Jenis huruf latin untuk penulisan teks adalah *Palatino Linotype* ukuran 12 dan ukuran 10 untuk catatan kaki.
13. Jenis huruf Arab untuk penulisan teks adalah *Arabic Transparent* atau *Traditional Arabic* ukuran 16 untuk teks dan ukuran 12 untuk catatan kaki.
14. Penulisan kutipan (footnote) dan bibliografi berpedoman pada Model Chicago Contoh:

Footnote

Satu Penulis

Amanda Collingwood, *Metaphysics and the Public* (Detroit: Zane Press, 1993), 235-38.

Dua Penulis

John B. Christianse and Irene W. Leigh, *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices* (Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002), 45-46.

Artikel pada Jurnal

Footnote

Tom Buchanan. "Between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Bibliografi

Satu Penulis

Collingwood, Amanda. *Metaphysics and the Public*. Detroit: Zane press, 1993.

Dua Penulis

Christiansen, John B., and Irene W. Leigh. *Cochlear Implants in Children: Ethics and Choices*. Washington, D.C.: Gallaudet UP, 2002.

Tiga Penulis

Venolia, Jean P., Georgio Cordini, and Joseph Hitchcock. *What Makes a Literary Masterpiece*. Chicago: Hudson, 1995.

Banyak Penulis

Bailyn, Bernard, et al. *The Great Republic*. Lexington, MA: D.C. Heath, 1977.

Penulis Anonim

Beowulf: A New Prose Translation. Trans. E. Talbot Donaldson. New York: W.W. Norton, 1966.

Multi- Volume

Dorival, Bernard, *Twentieth Century Painters*. Vol 2. New York: Universe Books, 1958.

Hasil Produksi Editor

Guernsey, Otis L. , Jr., and Jeffrey Sweet, eds. *The Burns Mantle Theatre Yearbook of 1989-90*. New York: Applause, 1990.

Artikel pada Jurnal

Buchanan, Tom. "13between Marx and Coca-Cola: Youth Cultures in Changing European Societies, 1960-1980". *Journal of Contemporary History* 44, no. 2 (2009): 371-373.

Artikel pada Prosiding/Conference Paper

Tidak diterbitkan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." Paper presented at the 16th Annual Agricultural Conference, Pietersburg University, South Africa, April 8-11, 2003.

Diterbitkan dan diedit

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting." *In Proceedings of the 16th Annual Agricultural Conference*, April 8-11, 2003, Pietersburg University, South Africa. Edited by Jan Van Riebeeck. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004.

Diterbitkan tanpa pengeditan

Boy, Justin A. "Rainwater Harvesting," *In Agricultural in the North: Are We Making a Difference?* Conference Proceeding, April 8-11, 2003. Pietersburg, South Africa: Pietersburg University Press, 2004,

Sumber Online

Website

Tice-Deering, Beverly. *English as a Second Language*. <http://www.seattlecentral.org/faculty/bticed> (accessed July, 2005). University of Chicago Dept. of Romance Languages and Literatures. Romance Languages and Literature. <http://humanities.uchicago.edu/romance> (accessed July 27, 2009).

E-Book

Thornton, Chris. *Truth from Trash: How Learning Makes Sense*. Cambridge, MA: MIT Press, 2000. <http://emedia.netlibrary.com>.

E-Journal

Warr, Mark, and Christophers G. Ellison. "Rethinking Social Reaction to Crime: Personal and Altruistic Fear in Family Households." *American Journal of Sociology* 106, no. 3 (2000): 551-78. http://www.journals.uchicago.edu/AJS/journal/issues/v106n3/050125/05_0126.html. (accessed June 28, 2003),

15. Transliterasi berpedoman pada Pedoman Transliterasi Arab-Latin Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987.
16. Artikel hasil penelitian memuat judul, nama penulis, alamat instansi, email, abstrak, kata kunci, dan isi. Isi artikel mempunyai struktur dan sistematika serta persentase jumlah halaman sebagai berikut:
 - a. Pendahuluan, menguraikan latar belakang, perumusan masalah, dan tujuan penelitian (10%)
 - b. Kajian literatur, menguraikan teori dan hasil penelitian terdahulu yang relevan (15%)
 - c. Metode penelitian, berisi rancangan/model, sampel dan data, tempat dan waktu, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data (10%)
 - d. Hasil penelitian dan pembahasan (50%)
 - e. Penutup yang berisi simpulan dan saran (15%)
 - f. Ucapan terima kasih
 - g. Daftar Pustaka. Jumlah sumber acuan dalam satu naskah paling sedikit 10 dan 80% di antaranya merupakan sumber acuan primer dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Sumber acuan primer adalah sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dapat berupa tulisan dalam makalah ilmiah dalam jurnal internasional maupun nasional terakreditasi, hasil penelitian di dalam disertasi, tesis maupun skripsi.
17. Pemuatan atau penolakan naskah akan diberitahukan secara tertulis/email. Naskah yang tidak dimuat tidak akan dikembalikan, kecuali atas permintaan penulis.

